ᨕᨘᨀᨘᨑᨗᨊ ᨕᨘᨊᨚᨈᨗᨊᨗᨚ ᨅᨔᨗᨕᨗᨚ ᨀᨔᨗᨊ

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

PERUBAHAN RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2019 - 2023





GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR [illegible]

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 perlu disesuaikan kembali dengan perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurud a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2019 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Tata cara terkait dengan pengisian matriks dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan yang beririsan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

(2) Sasaran Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Sasaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman bagi:

a. Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB; dan

c. sebagai acuan bagi Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan

menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

2. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 3 Mei 2022

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 3 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 17

KATA PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly* (UNGA) dikantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, *New York* Amerika Serikat. TPB/SDGs yang terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target yang menggambarkan visi dan ruang lingkupagenda pembanguna global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.

Indonesia berkomitmen melaksanakan agenda TPB melalui Peraturan Presiden Nomor: 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 secara bersama-bersama dengan seluruh aktor pembangunan dari berbagai unsur baik pelaku usaha, filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media dan kelompok masyarakat telah menyusun Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs dalam bentuk narasi dan matriks yang menggambarkan rencana program dan kegiatan untuk pencapaian target TPB/SDGs pada tahun 2030 mendatang. Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan pijakan dan panduan bagi semua aktor pembangunan dalam rangka merubah misi menjadi aksi nyata. Berbagai rencana tersebut akan mencakup tujuan, target dan indikator, serta program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Dokumen Perencanaan Daeah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka diperlukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023 dengan penyesuaian kondisi serta kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan yang beririsan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Terima kasih kepada Tim Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan serta pihak terlibat yang telah membantu mempersiapkan dan memfasilitasi berbagai pertemuan hingga terselesaikannya Perubahan RAD TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 9

DAFTAR GAMBAR 17

DAFTAR GRAFIK 19

1.1. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dengan RPJMD 21

1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs 24

1.2.1. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs 27

1.2.2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs 28

1.2.3. Pembiayaan TPB/SDGs 29

1.2.4. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs 29

1.2.5. Sistimatika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs 30

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun 32

2.1.1 Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi 33

2.1.2 Sistem Perlindungan Sosial Nasional 35

2.1.3 Akses terhadapa Pelayanan Dasar 36

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. 38

2.2.1. Menghilangkan Kelaparan 38

2.3. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. 39

2.2.2. Menghilangkan Kelaparan 39

2.2.3. Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi 41

2.2.4. Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan 41

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 45

2.3.1. Angka Kematian Ibu (AKI) 45

2.3.2. Angka Kematian Bayi (AKB) 45

2.3.3. Angka Kematian Balita 46

2.3.4. Angka Kematian Neonatal 47

2.3.5. Mengakhiri Epidemi Penyakit Tidak Menular 47

2.3.6. Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) 49

2.3.7. Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi 50

2.3.8. Mencapai Cakupan Kesehatan Universal 50

2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua. 53

2.4.1 Partisipasi Pendidikan penduduk Indonesia 53

2.4.2 Disparitas Pendidikan Antara Perempuan dan Laki-laki 55

2.4.3 Kemampuan Siswa Sulawesi Selatan 56

2.4.4 Kualitas Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan 56

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 57

2.5.1. Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. 58

2.5.2. Menghapus Semua Praktik Berbahya 59

2.5.3. Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin. 60

2.5.4. Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi. 61

2.5.5. Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan. 61

2.6. Pengelolaal Air Bersih dan Sinitasi Layak 63

2.6.1. Menjamin penyediaan akses air minum layak dan terjangkau 63

2.6.2. Menjamim penyediaan sanitasi layak dan terjangkau 64

2.6.3. Peningkatan sistem pengelolaan lumpur tinja 65

2.6.4. Peningkatan kualitas air sungai dan danau sebagai air baku 66

2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua 67

2.7.1. Kebutuhan Energi Daerah 67

2.7.2. Produksi dan Penggunaan Energi 67

2.7.3. Energi Baru dan Terbarukan (EBT). 68

2.7.4. Intensitas dan efisiensi energi (listrik) 69

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 71

2.8.1. Perkembangan Ekonomi Makro 71

2.8.2. Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif. 72
2.8.3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 72
2.8.4. Peningkatan Pariwisata 73
2.9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi 74
2.9.1. Pembangunan Infrastruktur 74
2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara 81
2.10.1. Kesenjangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 82
2.10.2. Jumlah daerah tertinggal 82
2.10.3. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah 83
2.10.4. Kepesertaan aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 84
2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan 85
2.11.1. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau 85
2.11.2. Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk 86
2.11.3. Persentase sampah perkotaan yang tertangani 87
2.11.4. Jumlah kota hijau yang menyediakan rumah terbuka hijau 88
2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 89
2.12.1. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan tertangani sesuai peraturan perundangan 90
2.12.2. Timbulan sampah yang di daur ulang 90
2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan 91
2.13.1. Penanggulangan Bencana 91
2.13.2. Dokumen pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 94
2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan 96
2.14.1. Jumlah luas kawasan konservasi perairan di daerah 96
2.14.2. Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan 97
2.14.3. Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil 97
2.14.4. Jumlah nelayan yang terlindungi 98
2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan 99
2.15.1. Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan 99
2.15.2. Jumlah kesatuan pengelolaan hutan 100
2.15.3. Proporsi luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan 100

2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh 94
2.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global 95
3.1. Target dan Indikator TPB/SDGs. 98
3.1.1. Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan 98
3.1.2. Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs. 98
3.2. Tujuan 2. Tanpa Kelaparan 108
3.2.1. Target dan Indikator Tujuan 2 TPB/SDGs 108
3.2.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 2 TPB/SDGs 108
3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 112
3.3.1. Target dan Indikator Tujuan TPB/SDGs 112
3.3.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs 113
3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas 119
3.4.1. Target dan Indikator Tujuan 4 TPB/SDGs 119
3.4.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 4 TPB/SDGs 119
3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender 123
3.5.1. Target dan Indikator Tujuan 5 TPB/SDGs 123
3.5.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs 123
3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 129
3.6.1. Target dan Indikator Tujuan 6 TPB/SDGs 129
3.6.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs 129
3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau 135
3.7.1. Target dan Indikator Tujuan 7 TPB/SDGs 135
3.7.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 7 TPB/SDGs 135
Program Tujuan 7 TPB/SDGs 135
3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 138
3.8.1. Target dan Indikator Tujuan 8 TPB/SDGs 138
3.8.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs 138
3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrasruktur 143
3.9.1. Target dan Indikator Tujuan 9 TPB/SDGs 143
3.9.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 9 TPB/SDGs 143

Program Tujuan 9 TPB/SDGs 144
3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan 147
3.10.1. Target Dan Indikator Tujuan 10 TPB/SDGs 147
3.10.2. Arah Kebijkan Pencapaian Tujuan 10 TPB/SDGs 147
3.11. Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Berkelanjutan 150
3.11.1 Target Dan Indikator Tujuan 11 TPB/SDGs 150
3.11.2 Arah kebijakan pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs 151
Program yang mendukung Tujuan 11 TPB/SDGs antara lain : 151
3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan 155
3.12.1. Target dan Indikator Tujuan 12 TPB/SDGs 155
3.12.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs 155
Program Tujuan 12 TPB/SDGs 155
3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim 157
3.13.1. Target dan Indikator Tujuan 13 TPB/SDGs 157
3.13.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs 157
Program Tujuan 13 TPB/SDGs 158
3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan 160
3.13.1. Target dan Indikator Tujuan 14 TPB/SDGs 160
3.13.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs 160
Program Tujuan 14 TPB/SDGs 160
3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan 162
3.15.1. Target dan Indikator Tujuan 15 TPB/SDGs 162
3.15.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs 162
Program Tujuan 15 TPB/SDGs 163
3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh 166
3.16.1. Target dan Indikator Tujuan 16 TPB/SDGs 166
3.16.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujaun 16 TPB/SDGs 166
Program Tujuan 16 TPB/SDGs 166
3.17. Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 171
3.17.1. Target dan Indikator Tujuan 17 TPB/SDGs 171
3.17.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs 171

Program Tujuan 17 TPB/SDGs 172
4.1. Mekanisme Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD) 176
4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 176
4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi 176
5.1. Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs 178
5.2. Penguatan Sarana Pelaksanaan TPB/SDGs 178
5.2.1. Perluasan Penggunaan Teknologi. 178
5.2.2. Kemitraan Multipihak. 179
5.2.3. Penguatan Koordinasi 179
5.2.4. Peningkatan Kapasitas. 179
5.2.5. Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak. 180
5.2.6. Penguatan Strategi Komunikasi. 180
5.2.7. Pemutakhiran Dokumen 180

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sinergi RPJMD 2018-2023 Dan TBP/SDGs 16

Tabel 2.1. Jumlah Dan Presentase Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 28

Tabel 2.2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 29

Tabel 2.3 Presentase Pmks Yang Memperoleh Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019 30

Tabel 2.4. Ketersediaan Pangan Utama, Ketersediaan Energi Dan Protein Perkala Dan Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Provinsi Tahun 2015-2019 33

Tabel 2.5 Produksi Hasil Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 34

Tabel 2.6 Ketersediaan Enegeri Dan Protein Perkata Provinsi Selawesi Selatan Tahun 2015-2019 34

Tabel 2.7 Cakupan Balita Gizi Buruk Untuk Mendapatkan Perawatan Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 35

Tabel 2.8 Luas Lahan Pertanian Provisni Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 38

Tabel 2.9 Angka Kematian Bayi (Akb) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 40

Tabel 2.10 Angka Kematian Balita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 41

Tabel 2.11. Angka Kematian Neonatal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 41

Tabel 2.12 Tingkat Tuberkolosis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 42

Tabel 2.13 Proporsi Kasus Tuberkolosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program Dots Provinsi Sulawesi Selatan 42

Tabel 2.14 Angka Kejadian Malaria Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 43

Tabel 2.15 Total Fertility (Tfr) Provinsi Sulawesi Selatan 44

Tabel 2.16 Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia-15-49 Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019 44

Tabel 2.17 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019 45

Tabel 2.18 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Se;Atan 2015-2019 46

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Kasar (Apk) Provinsi Wilayah Regional Sulawesi Nasional Tahun 2015 2019 48

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni (Apm) Sekolah Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2015-2019 48

Tabel 2.21 Rasio Apm Perempuan/Laki-Laki Di Sma Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 49

Tabel 2.22 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Mengenah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 50

Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Berakses Air Minum Provinsi Sulawsi Selatan Tahun 2015-2019 58

Tabel 2.24 Rumah Tinggal Bersanisitasoi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 59

Tabel 2.25 Kondisi Sanitasi Dan Layanan Akses Layanan Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 59

Tabel 2.26 Rasio Tersediaan Daya Listrik Provinsi Sualwesi Selatan Tahun 2018-2019 61

Tabel 2.27 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2013-2017 65

Tabel 2.28 Perkembangan Pdrb Perkapita(Adhb) Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional 2013-2017 65

Tabel 2.29 Indeks Layanan Infrastruktur Pronvinsi Sualwesi Selatan Tahun 2018-2019 69

Tabel 2.30 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 70

Tabel 2.31 Pelabuhan Laut Di Sulawesi Selatan 71

Tabel 2.32 Pelabuhan Laut Di Sulawesi Selatan 72

Tabel 2.33 Pelabuhan Sungai Dan Danau Di Sulawesi Selatan 74

Tabel 2.34 Perkembangan Pdrb Perkapita (Adhb) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 77

Tabel 2.35 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Provinsi Sualwesi Seltaran Tahun 2015-2019 78

Tabel 2.36 Rasio Rummah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 80

Tabel 2.37 Presentase Penanganan Sampah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 82

Tabel 2.38 Indeks Tutup Lahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 83

Tabel 2.39 Ketersediaan Fasilitas Pengurnagan Sampah Diperkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 85

Tabel 2.40 Dokumen Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca (Gck) Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019 89

Tabel 2.41 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Gck) 90

Tabel 2.42 Rasio Kawasan Lindungan Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 90

Tabel 2.43 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 92

Tabel 2.44 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Perberdyaan Masyarakat (Lpm)

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 96

Tabel 3.1 Target Dan Indikator Tujuan 1 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan .....

Tabel 3.2 Target Dan Indikator Tujuan 2 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan .....

Tabel 3.3 Target Dan Indikator Tujuan 3 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan .....

Tabel 3.4 Target Dan Indikator Tujuan 4 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan .....

Tabel 3.5 Target Dan Indikator Tujuan 5 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan .....

Tabel 3.6 Target Dan Indikator Tujuan 6 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan .....

Tabel 3.7 Target Dan Indikator Tujuan 7 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan .....

Tabel 3.8 Target Dan Indikator Tujuan 8 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan .....

Tabel 3.9 Target Dan Indikator Tujuan 9 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan .....

Tabel 3.10 Target Dan Indikator Tujuan10 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan.....

Tabel 3.11target Dan Indikator Tujuan 11 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan .....

Tabel 3.12 Target Dan Indikator Tujuan 12 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan.....

Tabel 3.13 Target Dan Indikator Tujuan 13 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan.....

Tabel 3.14 Target Dan Indikator Tujuan 14 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan.....

Tabel 3.15 Target Dan Indikator Tujuan 15 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan.....

Tabel 3.16 Target Dan Indikator Tujuan 16 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan.....

Tabel 3.17 Target Dan Indikator Tujuan 17 Sdgs Provinsi Sulawesi Selatan.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram Jadwal Pelaporan Dan Pemantauan Tpb/Sdgs Nasional Dan Daerah 176

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan presentase penduduk miskin Provisni Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2015-2019 ..... *27*

Grafik 2 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet dan Kepemilikan Kompoter pribadi di Provinsi Sulawesi Selatan *97*

SDGs

Sulsel









BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dengan RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. TPB/SDGs telah dirumuskan pada tingkat global dengan melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015. Agenda tersebut mengakui bahwa pengahpusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim, sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

TPB/SDGs merupakan komitmen Internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan Nasional dan Daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian, serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD. Target-target TPB/SDGs sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dalam bent uk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Begitupun dengan Isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Adapun poin-poin TPB yang sejalan dengan isu strategis Pembangunan daerah, yaitu:

1. Mendekatkan Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat, searah dengan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan, searah dengan

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan

3. Sejahtera, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
4. Kualitas Infrastruktur yang Menunjang Perekonomian, searah dengan Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
5. Pemerataan Pendapatan bagi Warga Sulawesi Selatan, searah dengan Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan dan Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan;
6. Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Berkualitas, searah dengan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas dan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
7. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam, searah dengan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan;
8. Revitalisasi Para digma Pengelolaan Komoditi (petik, olah, jual), searah dengan Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
9. Sulawesi Selatan sebagai Poros Maritim, searah dengan Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tabel 1.1
Sinergi RPJMD 2018-2023 dan TPB/SDGs

RPJMD	Sasaran	TPB/SDGs
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan; b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public.	G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G10 Berkurangnya Kesenjangan G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh,
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel;	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah.	G1 Tanpa Kemiskinan G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G11 Kota dan Pemukiman yang berlanjut

3. Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;	a. Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah;	G1 Tanpa Kemiskinan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G10 Berkurangnya Kesenjangan G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;	a. Meningkatnya derajat kecerdasan dan penguasaan iptek masyarakat b. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Keseetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk	a. Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis suber daya alam b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	G7 Energi Bersih dan Terjangkau G10 Berkurangnya Kesenjangan G11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan G12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab G13 Penangangan Perubahan Iklim G10 Ekosistem Lautan G10 Ekosistem Daratan

1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs

TPB/SDGs sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs. Sebagai contoh, Tujuan 1 MDGs tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB/SDGs diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB/SDGs menjadi sebanyak 6 Tujuan (meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan). Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan global, TPB/SDGs jauh lebih ambisius bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan "Tanpa Kemiskinan" dan "Tanpa Kelaparan", akan dituntaskan Tujuan tersebut hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai "Zero Goal". Sebagai contoh, target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol (zero). Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol (zero).

TPB/SDGs juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB/SDGs telah bertransformasi menjadi 241 Indikator.

Meski menghadapi tantangan sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, serta dengan budaya dan kondisi geografis beragam, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mencapai hampir semua indikator MDGs dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya. 49 dari 67 indikator MDGs telah berhasil dicapai Indonesia pada akhir tahun 2015. Tujuh indikator utama yang telah dicapai dalam MDGs tersebut meliputi: 1) kemiskinan dengan ukuran USD 1,00/kapita per hari, 2) akses pendidikan dasar, 3) kesetaraan gender dalam pendidikan, 4) angka kematian bayi dan balita, 5) pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) dan malaria, 6) akses terhadap air bersih dan sanitasi perkotaan, dan 7) permukiman kumuh perkotaan. Sementara itu, terdapat enam indikator MDGs yang belum dapat dicapai pada akhir tahun 2015 yaitu: 1) kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional,angka kematian ibu, 3) prevelansi HIV dan AIDS, 4) tutupan lahan, 5) air minum layak perdesaan, dan 6) sanitasi layak perdesaan. Pencapaian MDGs inilah yang diteruskan oleh Pemerintah

Indonesia dalam pelaksanaan TPB/SDGs.

Pada dasarnya MDGs dan TPB/SDGs punya persamaan dan kesamaan tujuan yakni TPB/SDGs melanjutkan cita-cita mulia MGDs yang ingin konsen menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. Millenium Development Goals (MDGs) ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada tujuan pembangunan Millenium dengan target MDGs adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015 yang merupakan tantangan utama dalam pembangunan yang terurai dalam mencapai 8 buah Tujuan Pembangunan Milenium sebagai tujuan yang diukur untuk pembangunan. 8 Tujuan Pembangunan Milenium yakni : 1. Menanggulangin kemiskinan dan kelaparan; 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua; 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurungkan angka kematian anak; 5. Meningkatkan kesehatan ibu; 6. Memerangi HIV / AIDS, malaria, dan penyakit menular lainya; 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Melalui MDGs pada akhirnya menghasilkan berkurangnya jumlah penduduk miskin sekitar setengahnya. Maka TPB/SDGs pun tercetus untuk meneruskan dan memantapkan serta menyempurnakan cita-cita MDGs agar lebih berkelanjutan dan selamanya. Pengertian TPB/SDGs adalah singkatan atau kepanjangan dari sustainable development goals, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia dalam melanjutkan konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berkhir pada tahun 2015.

Berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030. Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus. Target yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk, serta beberapa indikator terkait lingkungan. Namun, dokumen yang disepakati pimpinan dunia pada tahun 2000 tersebut habis pada tahun 2015.

Para pemimpin dunia merasa agenda Millenium Development Goals perlu dilanjutakan, sehinggamuncul sebuah dokumen usulan bernama TPB/SDGs (sustainable develpment goals). Dimana. Ada sejumlah perbedaan dan pengembangan konsep yang lebih mendalam lagi, perbedaan antara MDGs dan TPB/SDGs. TPB/SDGs memiliki 5

pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulai di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disususnlah 17 Tujuan Global berikut ini :

1. **Tanpa Kemiskinan.** Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. **Tanpa Kelaparan.** Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. **Kehidupan Sehat dan Sejahtera.** Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia;
4. **Pendidikan Berkualitas.** Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. **Kesetaraan Gender.** Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. **Air Bersih dan Sanitasi Layak.** Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. **Energi Bersih dan Terjangkau.** Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. **Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Yang Layak.** Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur.** Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri kreatif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. **Berkurangnya kesenjangan.** Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. **Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.** Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh berkelanjutan;
12. **Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan.** Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. **Penanganan Perubahan Iklim.** Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. **Ekosistem Lautan.** Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. **Ekosistem Daratan.** Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggunaan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaraman hayati;
16. **Perdamaian, keadilan, dan kelembangaan yang tangguh.** Menguatkan

masyarakat yang inkluif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat;

17. **Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.** Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Menyikapi 17 Tujuan Global tersebut, Pemerintah setempat juga hanya akan berhasil dalam melaksanakan agenda besar ini jika adanya partisipasi luas yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan seperti anggota parlemen, pemimpin daerah, masyarakat lokal, masyarakat sipil, pemuda, komunitas agama, serikat buruh, pelaku bisnis dan akademis di seluruh dunia, bahwa jika Global Goals untuk pembangunan Berkelanjutan ini diketahui oleh orang dengan baik dan membuat orang peduli mengenai apa yang telah dijanjikan, para politisi tentunya akan berada dibawah tekanan yang lebih besar untuk merealisasikannya.

1.2.1. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan TPB/SDGs

melalui berbagai program dan kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. Sejumlah langkah yang telah ditempuh daerah sampai dengan akhir tahun 2019 antara lain: (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target TPB/SDGs dengan prioritas pembangunan daerah, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator TPB/SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator TPB/SDGs, (iv) membuat peraturan tentang penanggungjawab kelompok kerja berupa SK. Gubernur terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi TPB/SDGs di Sulawesi Selatan.

1.2.2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi yang dilaksanakan ke depan memiliki prinsip dasar untuk ***People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership*** atau yang dikenal dengan prinsip 5P. People, memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. Planet, melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Prosperity, memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. Peace, memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. Patnership, mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.

Dengan kata lain bahwa Prinsip pertama adalah universality. Prinsip ini mendorong penerapan TPB/SDGs di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam konteks nasional, implementasi TPB/SDGs akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah integration. Prinsip ini mengandung makna bahwa TPB/SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Prinsip kedua ini telah dipegang teguh dalam penyusunan rencana aksi khususnya terkait dengan penyusunan program dan kegiatan serta penganggarannya. Prinsip terakhir adalah “No One Left Behind” yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan TPB/SDGs di Indones

1.2.3. Pembiayaan TPB/SDGs

Sebagai wujud komitmen dalam menjalankan TPB/SDGs Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan telah mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan TPB, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (innovative financing). Sehubungan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda, dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB di daerah. Sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD), namun juga pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak NGO antara lain pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukan perkembangan yang ditunjukan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah. Selanjutnya, kerjasama antara pemerintah dan swasta di wujudkan dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam upaya pencapaian pelaksanaan TPB.

1.2.4. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs mengacu pada Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penyusunan RAD- TPB/SDGs dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (Pokja) yang didasarkan atas Keputusan Gubernur Nomor: 453/II/TAHUN 2019 tentang Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals TPB/SDGs;

2. Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs;
3. Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun RAD TPB/SDGs, dengan tahapan:

a. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs.
b. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator terkait dengan pencapaian TPB/SDGs.
c. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana.
d. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs.

4. Melaksanakan pembahasan Draf II Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs (narasi dan matrik) masing-masing Pokja;
5. Melaksanakan Pleno penyempurnaan DrafFinal Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs berdasarkan masukan hasil pembahasa dari masing-masing Pokja;
6. Melakukan Penyempurnaan Draf Final Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs;
7. Mengesahkan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs oleh Koordinator Pelaksana (Gubernur Sulawesi Selatan);
8. Melakukan Sosialisasi dan fasilitasi Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
9. Melakukan penyusunan final Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs di tingkat daerah sesuai dengan proses penyusunan Renaksi Daerah TPB/SDGs di tingkat nasional.

1.2.5. Sistimatika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Sistimatika Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas lima bagian, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai, keselarasan TPB/SDGs dengan RPJMN dan RPJMD, bagaimana TPB/SDGs menyempurnakan MDGs, dan juga komitmen Pemda dalam melaksanakan TPB/SDGs. Bab ini juga menjelaskan pula secara singkat prinsip pelaksanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan TPB/SDGs di

daerah sesuai dengan perannya masing-masing dan pembiayaan TPB/SDGs serta potensi pembiayaan lainnya. Proses penyusunan RAD juga menjadi satu bagian penting yang dibahas di bab pertama.

Bab II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs, menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi pemda dalam pelaksanaan tujuan 1 sampai dengan tujuan 17 untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (baseline) dan capaian hingga tahun 2023 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs 2019 hingga tahun 2023.

Bab III Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs, yang menunjukkan arah kebijakan pemerintah daerah yang terdapat pada RPJMD 2018-2023 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) OPD, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TPB/SDGs, mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan nonpemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak nonpemerintah dilakukan berdasarkan *self-assessment*. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Indonesia serta untuk melihat capaian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs untuk masing-masing tujuan serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs 2019-2023 ini.

Bab V Penutup, yang berisi tentang kaidah dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam pelaksanaan RAD TPB/SDGs, Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan nonpemerintah yang tertuang pada program dan kegiatan



KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN

BAB 2

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi global maupun nasional. Berbagai upaya dalam penyediaan pangan, kesehatan, pendidikan, perluasan lapangan kerja dan pembangunan pertanian terus dilakukan guna pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar negara berkembang. Persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka, tetapi bagi negara berkembang persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara-negara sangat miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya.

Berbagai macam definisi kemiskinan telah diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan oleh pemerhati kemiskinan. Bank Dunia (2005) mendefinisikan kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Menurut Amartya Sen (1999), kemiskinan dapat terjadi akibat perampasan kapabilitas (capability deprivation), yakni kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang. Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena kelangkaan sumber daya alam sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah, sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena alokasi sumber daya yang ada tidak terbagi secara merata. Keberagaman pandangan tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi dimensi.

Fenomena ini membuat pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah. Namun demikian, kemiskinan tetap harus diukur sebagai gambaran dan bahan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskin.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dalam perspektif peraturan perundang-undangan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

2.1.1 Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bahan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diatas garis kemiskinan. Jadi, penduduk dikatakan miskin jika pengeluaran perkapita perbulannya dibawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan. Tingkat kemiskinan di Sulawesi selatan sekalipun relatif menurun, tetapi persentasenya masih cenderung tinggi.

Grafik II.1.

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

Penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi target utama pemerintah melalui beberapa program penanggulangan kemiskinan. Tingkat kemiskinan Sulawesi selatan selama tahun 2015-2019 lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional. Pada tahun 2019, tingkat kemiskian Sulawesi Selatan yaitu 8,56 persen, sedangkan tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,22 persen. Berdasarkan capaian tersebut, maka Target RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menurunkan persentase penduduk miskin yaitu 8,78 persen pada tahun 2019 telah tercapai (melampaui).

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan terus mengalami fluktuasi. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 864,51 ribu jiwa (10,12%). Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2013-2017 didominasi oleh penduduk pedesaan. Berdasarkan data statistik (Maret 2018) jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 792,63 ribu jiwa (9,06%) dibawah rata-rata nasional yaitu 9,82%.

Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Penduduk Miskin / Wilayah	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Selatan						
Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan	Ribu Jiwa	157,18	150,6	166,5	168,7	162,39
Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan	Ribu Jiwa	707,34	646,21	659,47	610,94	597,19
Jumlah Penduduk Miskin Kota + Desa	Ribu Jiwa	864,51	796,81	825,97	779,64	759,58
Persentase Penduduk Miskin Perkotaan	%	4,93	4,47	4,76	4,48	4,22
Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	%	13,22	12,3	12,65	12,15	11,90
Persentase Penduduk Miskin Kota + Desa	%	10,12	9,24	9,48	8,87	8,56
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Nasional						
Jumlah Penduduk Miskin Nasional	Juta Jiwa	28.513,57	27.764,32	26.582,99	25.674,58	24.785,87
Persentase Penduduk Miskin Nasional	%	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-201

2.1.2 Sistem Perlindungan Sosial Nasional

Pemerintah Pusat melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin sejak tahun 2008 yang merupakan peralihan program Asuransi Miskin (ASKESKIN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Program Jaminan Kesehatan Gratis yang keduanya sekarang telah berintegrasi menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berupaya untuk menghadapi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan penjaminan/pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku. Selain itu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin didukung dengan penganggaran kegiatan-kegiatan operasional untuk meningkatkan penyediaan serta efektivitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat, keamanan dan kesehatan makanan, pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman dan realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan daerah miskin dan masyarakat tidak mampu. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Prrovinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Primer dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan pada Rumah Sakit Tingkat Pertama maupun Regional, yang mekanisme pembiayaan dikelola oleh BPJS. Pelayanan Dasar yang diberikan meliputi kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung, antara lain pelayanan gawat darurat, konsultasi dan pemeriksaan dokter umum dan gigi, pemberian obat, pemeriksaaan Laboratorium sederhana, Pelayanan KIA, pelayanan rawat inap pada Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Keliling. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sejak tahun 2015 hingga 2019 telah mencapai kondisi 100%.

2.1.3 Akses terhadapa Pelayanan Dasar

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan sasaran utama pelayanan sosial. Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Tahun 2019 Jumlah PMKS tang diberikan bantuan sebanyak 287.692 jiwa lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 355.136 jiwa pada tahun 2018. Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan pada tahun 2019 adalah sebanyak 462.125 jiwa. Secara persentase pada tahun 2019, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 57,11 persen lebih rendah 12,37 persen dari tahun 2018 yaitu 70,48 persen.Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan	Jiwa	57.362	77.376	101.154	355.136	287.692
Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	jiwa	320.720	321.765	376.071	503.847	462.125
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	17,88	24,04	26,90	70,48	57,11

Akses pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunaan dibeberapa aspek. Pada aspek aksesibilitas cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2015 cakup pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 94,02% dan masih ada yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan sekitar 5,98%. Tahun 2016 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 92,90% dan masih ada yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan sekitar 7,1% dan tahun 2017 cakuoan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 94,05% dan masih ada yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan

sekitar 5,95%. Pada tahun 2018 jumlah cakupan persalinan oleh tenaga Kesehatan mengalami penurunan menjadi 91,99% dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 90,97%., Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dari tahun 2015 - 2019 mengalami fluktuasi, secara umum disebabkan oleh masih adanya persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, karena persalinan yang dilakukan di rumah dikarenakan kondisi geografis jauh dari fasilitas kesehatan yaitu di daerah kepulauan dan pegunungan, serta sasaran estimasi yang menjadi denominator capaian yang berbeda agak jauh dibanding dengan sasaran riil. Untuk meningkatkan cakupan di atas, pemerintah telah melakukan beberapa upaya diantaranya penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran yang berada di dekat fasilitas Kesehatan dan penyediaan dukungan dana Jaminan persalinan untuk Persalinan di fasilitas.

Kemudian untuk akses pelayanan pendidikan yang diukur berdasarkan APM SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2018 yaitu 64,25 persen dan realisasi 60,03 persen atau dengan capaian 93,43 persen. Untuk tahun 2019 target APM 63,00 persen dan realisasi sebesar 60,14 persen atau dengan capaian sebesar 95,46 persen. Data ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 (APM) Sekolah menengah sudah memenuhi target. Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan capaian APM jenjang pendidikan menengah di Sulawesi Selatan adalah aksesibilitas sekolah semakin terjangkau akibat diberlakukannya sistem zonasi yang mengurangi jarak dan waktu tempuh ke sekolah. Selain itu beberapa faktor yang mendorong pencapaian target ini antara lain Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan penguatan penerapan regulasi wajib belajar. Namun, jika dibandingkan dengan APM Nasional maka APM Sulawesi Selatan masih dibawah nilai APM Nasional.

Akses kebutuhan dasar terhadap kuantitas juga kualitas air mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada angka tahun 2019 dibandaingkan pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2019 persentase penduduk berakases air minum di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sejumlah 96,16%, tahun 2018 yang hanya mencapai 87,37%. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan defenisi akses air minum sesuai dengan indikator RPJMN dan indikator SDGs. Dari data tersebut terlihat bahwa 3,84% penduduk atau sebesar 340.390 jiwa masih mengakses air untuk kebutuhan minum langsung dari sungai, danau, sumur dan atau mata air terbuka lainnya.

Tantangan Pelaksanaan dan permasalahan dari tujuan ini adalah :

1) Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun belum optimal.
2) Masih minimnya penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
3) Minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
4) Terbatasnya SDM pengelola dan pendampingan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) yang belum optimal
5) Belum optimalnya penanganan dan pemberian bantuan sosial pada korban bencana alam
6) Belum optimalnya upaya penyelenggaraan kesejahteraan bagi lanjut usia.
7) Minimnya tempat-tempat sosial/penampungan bagi usia lanjut

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

2.2.1. Menghilangkan Kelaparan

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan status ketahanan pangan di Sulawesi Selatan yang ditunjukkan bahwa terdapat 93 desa/kelurahan atau sebesar 3,05 persen yang terindikasi Sangat Rentan Terhadap Kerawanan Pangan, 272 desa/kelurahan atau sebesar 8,91 persen yang terindikasi Rentan, 392 desa/kelurahan atau sebesar 12,82 persen yang terindikasi Agak Rentan dan 2.297 atau 75,21 persen tahan terhadap kerawanan pangan

Persentase ketersediaan pangan utama yaitu beras, jagung dan kedelai Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2015 Ketersedian beras Sulawesi Selatan Sebesar 354 persen meningkat menjadi 388,24 persen pada tahun 2018 namun, mengalami penurunan menjadi 363,76 persen pada tahun 2019. Ketersedian jagung Sulawesi Selatan cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2015 ketersedian jagung sebesar 24,33 persen dan menjadi 47,88 persen di tahun 2019. Capaian ketersedian beras dan jagung sangat berbeda dengan ketersedian kedelai yang mana hanya bertumbuh 1,4 persen dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019.Seperti pada tabel berikut

2.3. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

2.2.2. Menghilangkan Kelaparan

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan status ketahanan pangan di Sulawesi Selatan yang ditunjukkan bahwa terdapat 93 desa/kelurahan atau sebesar 3,05 persen yang terindikasi Sangat Rentan Terhadap Kerawanan Pangan, 272 desa/kelurahan atau sebesar 8,91 persen yang terindikasi Rentan, 392 desa/kelurahan atau sebesar 12,82 persen yang terindikasi Agak Rentan dan 2.297 atau 75,21 persen tahan terhadap kerawanan pangan

Persentase ketersediaan pangan utama yaitu beras, jagung dan kedelai Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2015 Ketersedian beras Sulawesi Selatan Sebesar 354 persen meningkat menjadi 388,24 persen pada tahun 2018 namun, mengalami penurunan menjadi 363,76 persen pada tahun 2019. Ketersedian jagung Sulawesi Selatan cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2015 ketersedian jagung sebesar 24,33 persen dan menjadi 47,88 persen di tahun 2019. Capaian ketersedian beras dan jagung sangat berbeda dengan ketersedian kedelai yang mana hanya bertumbuh 1,4 persen dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019.Seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Ketersediaan Pangan Utama, Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Pengawasan dan Pembinaan Kemanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Komoditas	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan Beras	%	352	373,6	384	388,24	363,76
Ketersediaan Jagung	%	24,33	34,02	38,89	44,33	47,88
Ketersediaan Kedelai	%	23,56	23,71	20,88	22,55	24,96

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel, tahun 2020

Peningkatan produksi ternak dalam 5 tahun terakhir sebesar 5,65 untuk daging, 6,61 untuk telur dan produksi susu menurun 5,65 persen. Peningkatan produksi daging dan telur ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 5 persen untuk tahun 2018-2023.

Target produksi daging 2019 dalam renstra Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 149.800 ton dicapai 150.454 ton atau terjadi surplus 1.600 ton. Berdasarkan struktur sumber daging, produksi daging sapi mengalami penurunan sebagai dampak dari impor dan tingginya biaya produksi pada tingkat peternak, sementara produksi daging unggas mampu mensubtitusi kebutuhan yang terus meningkat. Produksi daging didukung oleh pemotongan ternak sapi, kerbau dan dan unggas (ayam pedaging, ayam buras dan ayam petelur serta itik). Data populasi sapi tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Produktivitas Hasil Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Hasil Peternakan	Satuan	Produktivitas Hasil Peternakan					%
		2015	2016	2017	2018	2019	
Daging	Kg	121,141	119,811	126,958	136,712	150,454	5,65
Telur	Kg	133,600	143,847	151,100	170,766	171,985	6,61
Susu	Kg	2,727	2,752	3,173	1,888	1,918	-5,66

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2019

Kondisi Ketersedian energi dan protein perkapita provinsi sulawesi selatan pada tahun 2015 masing-masing sebesar 5.544 kkal/kapita/hari dan 154 gram/kapita/hari dan menurun masing-masing menjadi 3879 kkal/kapita/hari dan112,67 gram/kapita/hari pada tahun 2019. Sedangkan untuk Persentase pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan tahun 2015 sebesar 77,27 persen dan mencapai 100 persen pada tahun 2017, sampai tahun 2019. Seperti pada tabel berikut

Tabel 2.6 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/ kapita/hari	5.544	5.862	3.906	3.572	3.879
Ketersediaan Protein Perkapita	kkal/ kapita/hari	154,52	168,34	125,41	103,75	112,67
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	77,27	85,13	100	100	100

2.2.3. Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi

Prevalensi *stunting* di Sulawesi Selatan pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) masih cukup tinggi,walaupun terjadi fluktiatif selama periode 2017-2019. Pada tahun 2019 proporsi *stunting* pada anak balita adalah sebesar 30,59% (SSGBI) menurun dari angka 35,7% di tahun 2018 (Riskesdas).

Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, dari tahun 2015 sampai 2019, cenderung mengalami peningkatan, dan cakupannya pun mencapai 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor diantaranya meningkatnya surveilans gizi di 24 kab/kota sehingga kasus-kasus yg terjadi semuanya dapat ditemukan dan dilakukan intervensi penatalaksanaan kasus gizi buruk. Selain itu tersedianya aplikasi by name by addres Pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) sehingga data antropometri balita dan status gizinya tercatat dengan baik (saat ini hasil coverage pencatatan mencapai >85 % balita di Sulsel), selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita	184	156	138	369	446
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Balita	184	156	138	369	446
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.2.4. Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan

Perkembangan lahan baku sawah tahun 2015-2019 di Provinsi Sulawesi Selatan masih mengalami fluktuasi. Hal ini karena di kabupaten/kota terjadi alih fungsi lahan

sawah ke non pertanian seperti pembangunan infrastruktur, perumahan dan pusat-pusat bisnis. Namun disisi lain masih diimbangi dengan program percetakan sawah baru dari pemerintah dan cetak sawah swadaya dari masyarakat. Sejak tahun 2015 – 2019 pemerintah telah melaksanakan cetak sawah baru seluas 19.045 ha di 15 Kabupaten di Sulawesi Selatan.

Kewenangan publikasi lahan sawah dari BPS berakhir sampai dengan tahun 2017. Sejak 2018, luas baku lahan sawah diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) melalui keputusan menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2: 399/Kep- 23.3/X/2018 tanggal 8 oktober 2018 tentang luas baku sawah nasional. Luas baku lahan sawah tahun 2015 2017 diterbitkan oleh BPS, sedangkan 2018 – 2019 diterbitkan oleh kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional (Kemeterian ATR-BPN). Berdasarkan data Luas Baku sawah 2015 – 2019, terlihat bahwa rata-rata setiap tahunnya menurun seluas 4.103 Ha atau sekitar 0,24 %. Kondisi penurunan lahan sawah tersebut juga akan mempengaruhi produksi penurunan komoditas strategis padi pada khususnya, dan produksi tanaman pangan pada umumnya sebagai media tanam.

Berdasarkan hal tersebut maka terkait dengan perkembangan Lahan Baku Sawah maka beberapa faktor pendorong dan factor penghambat yang dapat diidentifikasi antara lain untuk faktor pendorong karena adanya regulasi yang dibuat yang terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan kemudian adanya program cetak sawah baru yang merupakan program pemerintah untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan ke non pertanian, termasuk cetak sawah swadaya yang dilakukan oleh masyarakat selanjutnya pemanfaatan Lahan Rawa untuk ditingkatkan menjadi lahan pertanian pangan serta adanya program pemerintah untuk meningkatkan Intensitas Pertanian (IP), baik dari segi penyediaan dan perbaikan irigasi, sistem pompanisasi dan sebagainya kemudian yang menjadi faktor penghambat dikarenakan adanya alih fungsi lahan sawah ke non pertanian seperti infrastruktur, perumahan, dan pusat- pusat bisnis kemudian factor Iklim dan cuaca (banjir atau kekeringan) yang sering mengganggu pertanaman sehingga target produksi tidak tercapai.

Luas Lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya lahan sawah menunjukkan angka yang fluktuatif, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan

dengan perumbuhan sebesar 2.08% dari tahun 2018, meskipun pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibanding pertumbuhan nasional yang mencapai 5,05%. Persentase luas lahan sawah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap luas lahan sawah nasional dari tahun 2015 hingga 2019 rata-rata sebesar 8,28%, nilai ini cukup besar dibanding 29 Provinsi lainnya di Indonesia, dimana Provinsi Sulawesi Selatan memiliki lahan sawah terluas setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, sehingga dari sisi pertanian Provinsi Sulawesi Selatan masih diharapkan menjadi lumbung pangan khususnya pada wilayah luar Pulau Jawa. Data terkait perbandingan luas lahan sawah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional

Produktivitas ternak dapat diukur dengan kelahiran, pemotongan dan pengeluaran (ekspor), serta produksi daging untuk ternak potong, produksi susu untuk ternak perah dan produksi telur untuk unggas. Produksi daging berasal dari pemotongan ternak sapi, kerbau, ternak kecil dan unggas. Sedangkan produksi telur dari ternak ayam petelur dan itik, serta produksi susu dari sapi perah. Selama 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan produksi daging sebesar 5,65 persen, telur sebesar 6,61 persen, dan susu mengalami penurunan selama tahun 2015-2019. Penimgkatan pertumbuhan produksi daging dan telur didiukung oleh peningkatan populasi dan peningkatan produksitifitas dari perbaikan system produksi di tingkat petani. Penurunan produksi susu terjadi di tahun 2019 di sebabkan karena sebagian populasi sapi perah di kabupaten Enrekang sdh afkir atau sdh tdk berproduksi. Pembinaan yang konsisten dalam 5 tahun kedepan diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan produksi daging dan telur yang besar, dan melalukan pembinaan produksi susu untuk mengembalikan kejayaan produksi susu kabupaten enrekang. .

Luas lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan nilai yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2019, luas lahan pertanian terbesar tercatat pada tahun 2016 seluas 1.245.551 Ha selanjutnya mengalami penurunan ditahun 2017 dan 2018 kemudian meningkat kembali menjadi 1.241.353 Ha pada tahun 2019. Peningkatan luas lahan pertanian ini belum diikuti dengan peningkatan produksi padi, data menunjukkan bahwa produksi gabah kering giling pada tahun 2018 adalah 5.952.616,45 ton mengalami penurunan sebesar 15,09% pada tahun 2019 menjadi 5.054.166,96, hal ini disebabkan gagal panen yang terjadi akibat bencana banjir pada tahun 2019 pada beberapa kabupaten yang menjadi penyumbang produksi pertanian seperti Bone, Sidrap, Soppeng dan Wajo.

Data luas lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi atas lahan sawah, lahan tegal/kebun dan lahan ladang/huma.Penggunaan lahan pertanian terbesar adalah untuk lahan sawah yang rata-rata sebesar 51,58% dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang peningkatan luas lahan sawah untuk pertanian masih cukup besar jika diikuti dengan penyediaan infrastruktur pengairan berupa irigasi yang dapat berfungsi baik untuk penyediaandan pengaturan air dalam menunjang produksi pertanian. Data luas lahan pertanian Provinsi Sulawesi selatan tahun 2015 hingga 2019 selengkapnya pada tabel berikut

Tabel 2.8.

Luas Lahan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Lahan Sawah	Ha	628.148	649.190	646.611	641.457	654.818
	a. Luas Lahan Sawah beririgasi	Ha	383.507	390.768	388.756	280.409	-
	b. Luas Lahan Sawah Tidak Beririgasi	Ha	244.641	258.422	257.855	361.048	-
2.	Luas Lahan Tegal/Kebun	Ha	526.681	501.918	481.352	501.507	496.641
3.	Luas Lahan Ladang/Huma	Ha	106.717	107.759	117.588	93.221	89.894
Total Luas Lahan Pertanian		**Ha**	**1.261.546**	**1.258.867**	**1.245.551**	**1.236.185**	**1.241.353**

Sumber : Statistik Data Lahan 2015 – 2019, kementerian Pertanian RI, 2020

Tantangan Pelaksanaan dan permasalahan dari TPB ini adalah :

1) Masih rendahnya ketersediaan pangan utama (Beras, jagung dan kedelai).
2) Masih rendahnya ketersediaan energi perkapita.
3) Masih rendahnya ketersediaan protein perkapita
4) Belum terwujudnya sistem logistik daerah yang terintegrasi dan informatif.
5) Pola konsumsi pangan yang belum berimbang, khususnya untuk kelompok umbi-umbian; pangan hewani; sayur dan buah; serta minyak dan lemak.

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Tujuan ini berbicara tentang bagaimana masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur. Penyediaan air bersih dan sanitasi sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, anak, dan bayi. Pemerintah daerah dapat menangani permasalahan ini melalui perbaikan permukiman kumuh dan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin perkotaan terhadap pelayanan dasar. Salah satu upaya kunci untuk mencapai Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera adalah mengurangi Angka Kematian Ibu dan Angka kematian Bayi.

2.3.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibudisebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya.Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global.AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. Kasus kematian ibu pada tahun 2016 sebesar 105 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 kasus kematian ibu meningkat menjadi 77 kasus, Pada tahun 2018 kasus kematian ibu sebesar 92 kasus. Pada tahun 2019 kasus kematian ibu sebesar 94 kasus. Jika melihat data tersebut dari tahun 2016 hingga 2019 terjadi peningkatan kasus, namun pada tahun 2016 jumlah kematian ibu menurun menjadi 77 kasus dari 105 kasus kematian pada tahun 2017.

2.3.2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kejadiaan kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas) Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya

dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas denganmenurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan

Sepanjang tahun 2015-2019, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2015 sampai 2019cenderung mengalami penurunan, Hal ini dikarenakan adanya beberapa perbaikan, diantaranya peningkatan kualitas kesehatan ibu semasa hamil serta penanganan dan pemantauan bayi baru lahir secara adekuat, dengan adanya program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ini juga sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan penyebab terbanyak kematian dimasa neonatal, yaitu BBLR dan Asfiksia, sementara pada masa bayi penyebab kematiannya adalah Pneumonia dan Diare, hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kematian Bayi	Kasus	1.167	1.183	1.059	1.037	919
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	2,21	7,94	7,05	5,76	5,69

2.3.3. Angka Kematian Balita

Sepanjang tahun 2015-2019, angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2015 sampai 2019cenderung mengalami penurunan, Rata-rata kematian Balita disebabkan oleh Diare dan Pneumonia, penyebab ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada saat anak sakit. Ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit yang belum adekuat. Selengkapnya pada tabel berikut

Tabel 2.10 Angka Kematian Balita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kematian Balita	Kasus	1.265	1.303	1.151	1.124	991
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	2,8	8,2	7,67	6,26	6,20

2.3.4. Angka Kematian Neonatal

Sepanjang tahun 2015-2019, angka kematian neonatalper 1000 kelahiran hidup dari tahun 2015 sampai 2019 cenderung mengalami penurunan, Kematian Neonatal umumnya disebabkan oleh BBLR dan Asfiksia, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam mendeteksi dan tatalaksana awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, dan kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.11Angka Kematian Neonatal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kematian Neonatal	Kasus	936	887	818	799	714
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	6,12	5,64	5,44	6,21	5,86

2.3.5. Mengakhiri Epidemi Penyakit Tidak Menular

Kasus HIV/AIDS di Sulawesi selatan menunjukkan kecenderungan menurun dan prevalensi dapat ditahan ditahun 2019 yaitu 0,019 % sesuai taget didalam dokumen RPJMD, namun capaian ini masih rendah disebabkan oleh tidak semua Kabupaten/Kota

melakukan kegiatan Sero Survey untuk penemuan kasus. Untuk TBC, target program penanggulangan TBC secara nasional telah ditetapkan eliminasi TBC akan dicapai pada tahun 2030. Dalam roadmap eliminasi TBC menunjukkan sampai tahun 2020 diharapkan adanya upaya akselerasi untuk meningkatkan penemuan kasus TBC. Angka penemuan kasus berdasarkan data yang telah didapatkan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2018 0,013% per 100.000 penduduk, menurun menjadi hingga 0,019% per 100.000 penduduk ditahun 2019. Hal ini menggambarkan jumlah kasus yang telah didapatkan di pelayanan keshatan dan dilaporkan di program terus menurun.

Tabel 2.12 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kasus Penderita TBC	Orang	13.043	13.029	16.966	18.193	18.961
Jumlah pendududuk	Ribu Orang	8.520,3	8.606,4	8.690,3	8.771,9	8.851,2
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Per 100.000 penduduk	156	156	195	207	214

Evaluasi data kesembuhan dinilai secara kohor selama 1 tahun sehingga data pengobatan pasien tahun 2019 belum dapat dianalisis. Target kesembuhan tahun 2015 telah tercapai sesuai indikator nasional yaitu 85 persen. Tahun 2016 sesuai kebijakan NTP (National Tuberculosis Program) target yang harus dicapai sebesar 90 persen. Berdasarkan laporan data kesembuhan antara tahun 2016-2018 menunjukkan hasil yang belum mencapai target. Beberapa hal yang menjadi permasalahannya adalah turn over SDM TBC yang tinggi sehingga mengakibatkan pasien tidak terlayani dengan baik. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel I2.13 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	%	86	87	86	87	NA

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Pengendalian penyakit malaria telah menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Angka Kejadian Malaria yang diukur dengan *Annual Parasite Incidence* (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa segala upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan memiliki nilai signifikan dalam pengendalian malaria.

Pencapaian kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya peningkatan sumber daya manusia baik dalam diagnosis dan tata laksana, serta manajemen program, dan peningkatan kapasitas tenaga laboran dalam pemeriksaan sediaan darah malaria. Selain itu dilakukan juga surveilans migrasi dan penyelidikan epidemiologi kasus positif malaria, penemuan suspek malaria baik secara aktif maupun pasif, pelaksanaaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1-2-5 terhadap semua kasus positif malaria, serta pemberian pengobatan sesuai standar kepada penderita malaria.

Tabel 2.14 Angka Kejadian Malaria
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0,10	0,12	0,14	0,15	0,10

2.3.6. Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM)

Beberapa tahun terakhir data menunjukkan bahwa Penyakit Tidak Menular (PTM) penyebab kematian paling banyak, kondisi penyakit yang pada 1990-an lebih didominasi penyakit menular, saat ini berubah menjadi lebih banyak penyakit yang tidak menular.Merokok pada usia remaja menjadi faktor resiko penyebabnya, kemudian pola makan yang tidak sehat yang menjadikan orang obesitas serta malas beraktivitas.Indeks Penyakit Tidak Menular (PTM) di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 0,53% menurun pada tahun 2018 0,41%. Untuk Prevalensi Hipertensi pada tahun 2014 sebesar 20,64% menurun secara signifikan pada tahun 2017 sebesar 5,02%, sedangkan untuk Prevalensi Obesitas umur ≥ 18 tahun di tahun 2017 sebesar 3,17%.

2.3.7. Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Tingginya angka TFR dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik utnuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Faktor-faktor ini pula yang mempengaruhi TFR di Sulawesi Selatan.Total fertility rate (TFR) Sulawesi Selatan tersajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.15 Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015- 2019

Indikator Satuan		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,28	2,35	2,21	2,44	2,4

Sumber : BKKBN Perwakilan dan Dinas P3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan

Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 di Sulawesi Selatan semakin meningkat dari tahun 2015 ke 2019. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan promosi keluarga berencana, meskipun CPR ini belum memberikan gambaran pemakaian kontrasepsi modern, karena CPR ini mengukur pemakaian metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern.

Tabel 2.16 Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15–49	%	66,87	67,42	66,34	66,5	71,74

Sumber : BKKBN Perwakilan dan Dinas P3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan

2.3.8. Mencapai Cakupan Kesehatan Universal

Pemerintah Pusat melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin sejak tahun 2008 yang merupakan peralihan program Asuransi Miskin (ASKESKIN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Program Jaminan Kesehatan Gratis

yang keduanya sekarang telah berintegrasi menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berupaya untuk menghadapi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan penjaminan/pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku. Selain itu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin didukung dengan penganggaran kegiatan-kegiatan operasional untuk meningkatkan penyediaan serta efektivitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat, keamanan dan kesehatan makanan, pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman dan realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan daerah miskin dan masyarakat tidak mampu.Selengkapnya pada tabel berikut. Penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Primer dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan pada Rumah Sakit Tingkat Pertama maupun Regional, yang mekanisme pembiayaan dikelola oleh BPJS.

Tabel 2.17 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Prrovinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Pelayanan Dasar yang diberikan meliputi kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung, antara lain pelayanan gawat darurat, konsultasi dan pemeriksaan dokter umum dan gigi, pemberian obat, pemeriksaaan Laboratorium sederhana, Pelayanan KIA, pelayanan rawat inap pada Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Keliling. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sejak tahun 2013 hingga sekarang telah mencapai kondisi 100%.

2.3.9. Meningkatkan Pemertanaan Distiribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin

Rasio tenaga medis per satuan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, memperlihatkan kecenderungan yang tidak tetap jumlahnya. Pada tahun 2015, rasio tenaga medis 47,99/100.000 penduduk, kemudian tahun 2016 dan tahun 2017 turun menjadi 41,61 dan 37,70 per 100.000 penduduk. Hal ini disebabkan pada tahun 2017

pendataan tenaga medis sudah mulai dilakukan secara online sehingga tenaga medis di unit fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya tercover. Tahun 2018 rasio ini meningkat menjadi 42,72/100.000 penduduk,hal ini disebabkan karena adanya penempatan Dokter melalui Program Nusantara Sehat berbasis Tim dan berbasis Individu, pemanfaatan Dokter Spesialis melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pemerintah serta adanya upaya Pemerintah Daerah untuk merekrut tenaga dokter di masing-masing Kabupaten/Kota. Tahun 2019 rasio ini kembali menurun menjadi 41,11/100.000 penduduk, disebabkan karena kurangnya partisipasi beberapa rumah sakit swasta dalam penginputan SDMK secara online. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Tenaga Medis	Orang	4.089	3.581	3.590	4.028	3.875
Jumlah Penduduk	Orang	8.520.304	8.606.375	9.522.503	9.426.885	9.426.885
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Angka per 1000 penduduk	0,48	0,42	0,38	0,43	0,41

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Tantangan Pelaksanaan dan permasalahan dari TPB ini adalah :

1) Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk
2) Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
3) Masih rendahnya cakupan Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani.
4) Rendahnya Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
5) Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS
6) Masih rendahnya Cakupan Kunjungan Bayi
7) Masih rendanya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
8) Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Nifas
9) Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Anak Balita
10) Masih rendahnya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia

6 - 24 bulan keluarga miskin.

11) Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
12) Kurangnya sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
13) Masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;
14) Masih tingginya prevalensi angka stunting

2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

2.4.1 Partisipasi Pendidikan penduduk Indonesia

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah adalah perbandingan jumlah siswa SMA sederajat berapapun usianya dibagi dengan jumlah penduduk berusia 16 hingga 18 tahun. Hal ini memberikan informasi mengenai tingkat serapan pendidikan dan partisipasi penduduk pada setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin tinggi pula akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, serta semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pada Tahun 2018 Target (APK) Sekolah Menengah yaitu 80,50% dan realisasi adalah 81,74% yang berarti bahwa capaian sebesar 101,21%. Sedangkan Tahun 2019 Target APK 88,12% dan realisasi 86,09% yang berarti capaian sebesar 97,70%.

Penurunan capaian tahun 2018 dan 2019 disebabkan karena kenaikan target yang cukup tinggi di tahun 2019. Pada tahun 2019 (APK) Siswa Sekolah Menengah belum mencapai target, hal ini dapat disebabkan antara lain karena kondisi layanan pendidikan antar wilayah belum berimbang, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap usia sekolah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi pada Wilayah Regional Sulawesi dan Nasional Tahun 2015 - 2019

Wilayah	Satuan	Angka Partisipasi Kasar				
		2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	%	78,02	80,89	82,84	80,68	83,98
Sulawesi Utara	%	86,30	86,32	91,73	82,25	86,60
Sulawesi Tengah	%	82,87	83,45	84,85	83,53	87,35
Sulawesi Tenggara	%	81,39	81,81	80,01	84,83	86,81
Gorontalo	%	86,89	88,67	80,89	84,25	88,64
Sulawesi Barat	%	84,94	83,49	80,34	84,48	84,10
Sulawesi Selatan	%	78,03	83,66	83,14	81,74	86,09

Sumber : BPS berbagai seri

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.

Target Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah untuk tahun 2018 yaitu 64,25 persen dan realisasi 60,03 persen atau dengan capaian 93,43 persen. Untuk tahun 2019 target APM 63,00 persen dan realisasi sebesar 60,14 persen atau dengan capaian sebesar 95,46 persen. JIka dibandingkan dengan APM Nasional maka APM Sulawesi Selatan masih dibawah nilai APM Nasional. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Murni (APM)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Selatan						
Jumlah Siswa Usia 16 - 18 Tahun pada Jenjang SMA/SMK/MA	Orang	270.335	260.974	257.122	537.684	537.698
Jumlah Anak Usia 16 - 18 Tahun	Orang	432.813	424.831	411.330	381.153	361.485

Jumlah Anak Usia 16 - 18 Tahun yang tidak bersekolah pada Jenjang SMA/SMK/MA	Orang	162.478	163.857	154.208	119.776	80.162
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	%	59.47	59.62	59.86	60.03	60.14
Nasional						
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	%	59.71	59.95	60.37	60.67	60.84

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

Data diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 (APM) Sekolah menengah sudah memenuhi target. Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan capaian APM jenjang pendidikan menengah di Sulawesi Selatan adalah aksesibilitas sekolah semakin terjangkau akibat diberlakukannya sistem zonasi yang mengurangi jarak dan waktu tempuh ke sekolah. Selain itu beberapa faktor yang mendorong pencapaian target ini antara lain Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan penguatan penerapan regulasi wajib belajar.

2.4.2 Disparitas Pendidikan Antara Perempuan dan Laki-laki

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perempuan sudah mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh kesempatan belajar di bangku SMA, rasionya menurun pada tahun 2019 sebesar 108,97 menjadi 106,11.

Tabel 2.21

Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	%	102,96	102,04	110,66	108,97	106,11

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.4.3 Kemampuan Siswa Sulawesi Selatan

Kemampuan siswa di lingkupnasional diukur menggunakan *The OECD Programme for InternationalStudent Assessment* (PISA). Akan tetapi, pemerintah Provinsi SulawesiSelatan belum mengadopsi cara pengukuran tersebut sebagai standar kemampuan siswa.

2.4.4 Kualitas Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan

Rasio Guru/Murid per Kelas Pendidikan Menengah,Perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sebaliknya nilai rasio yang rendah menunjukan adanya penguasan kelas yang lebih sehingga mutu pengajaran cenderung membaik. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang/tingkat Sekolah menengah (SM) sederajat cenderung rasio menurun dari tahun ke tahun menunjukan adanya mutu pengajaran yang baik. Capaian menunjukan satuan pendidikan pada jenjang SM sederajat telah menjalankan program manajemen berbasis sekolah (school based management) dengan memperhatikan ketentuan Standar Proses (PBM) dan Standar Pengelolaan (Sekolah) yang termaktub dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Rasio Guru terhadap siswa Pendidikan Menengah pada tahun 2018 1 : 14, sedangkan rasio guru terhadap siswa tahun 2019 yaitu 1 : 15. Pada dasarnya rasio ideal untuk 1 kelas yaitu 1 : 36. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pemerataan penempatan guru.Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.22

Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	1 : 12	1 : 14	1 : 12	1 : 14	1 : 15

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Ratio Guru/Murid perkelas rata-rata diartikan sebagai perbandingan dari jumlah guru pada satuan pendidikan (SM sederajat) per kelas dengan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan (SM sederajat). Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan kelas pada suatu sekolah atau daerah tertentu dengan interpretasi bahwa semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin tinggi tetapi penguasaan kelas oleh guru semakin tidak efektif. Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami penurunan akan tetapi menunjukan pengelolaan kelas yang semakin efektif. Dengan angka capaian yang menunjukan pada satuan pendidikan (SM sederajat) mengatur jumlah kelompok belajar sesuai ketentuan Standar Sarana Prasaran Pendidikan sehingga penguasaan materi bagi siswa memperlihatkan kompetensinya dan bagi guru dapat memperlihatkan penguasaan bahan ajar/materi.

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan pada tujuan ini antara lain adalah :

1). Peningkatan kualitas pendidikan masih perlu dioptimalkan
2). Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM),
3). Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun,
4). Belum optimalnya penduduk usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM),
5). Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional,
6). Kurangnya penguatan sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama,
7). Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online,
8). Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah terpencil

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Permasalahan terkait keseteraan gender masih harus menjadi perhatian utama pemerintahan di Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan data Pertumbuhan IPM di Sulawesi Selatan tahun pada tahun 2019 mencapai 75,42% untuk Laki-laki sedangkan untuk perempuan hanya mencapai 70,21. Dari data diatas terlihat bahwa Indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan masih belum merata sehingga menjadi tantangan dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Indikator APM merupakan indikator yang lebih baik dibanding dengan indikator APK, sebab APK biasanya digunakan ketika APM-nya masih jauh dari 100 persen. Di Provinsi Sulawesi Selatan, Rasio APM perempuan/laki-laki di SD mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun (2015- 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan di SD bagi anak perempuan sudah mampu menyamai anak laki-laki dengan capaian 101,32 di tahun 2019. Dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tidak ada lagi perempuan yang buta huruf pada kelompok usia 15-24 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki sudah mencapai nilai 100,6 pada tahun 2019.

Kesadaran kaum perempuan untuk bisa baca tulis semakin meningkat, hal ini berkorelasi dengan rasio APM perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan SMP hingga perguruan tinggi juga sudah mencapai nilai 100. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perempuan sudah mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh kesempatan belajar di bangku SMA, walapun rasionya menurun pada tahun 2019 sebesar 106,11. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat perguruan tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa perempuan sudah diberikan peluang untuk memperoleh pendidikan di perguruan tinggi sama seperti laki-laki. Hal ini berarti jenjang pendidikan perempuan yang ditempuh semakin meningkat disebabkan kesadaran bahwa perempuan harus meningkatkan kualitas ilmu dan pendidikan sama seperti laki-laki.

2.5.1. Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.

Berdasarkan data 2019 , bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu tahun dalam 5 tahun terakhir realisasi 100%, dimana semua kasus yang terlapor melalui unit layanan terpadu mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih baik ditingkat kabupaten maupun kota. Hal ini merujuk pada amanah SPM bahwa setiap orang yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun korban perdagangan orang, termasuk laki-laki, berhak mendapatkan pelayanan berdasarkan kasus korban.

Untuk cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan

bantuan hukum kurun waktu lima tahun (2015-2019) data terus meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 100% pada tahun 2019. Korban/Klien yang melaporkan diri di tempat pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tetap diberikan layanan hukum, namun pada kondisi tertentu beberapa klien (pelapor) mencabut laporan dan ditempuh dengan jalan damai.

Pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA) Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang kinerjanya pada tahun 2019 baru mencapai 30 persen dikarenakan kondisi keluarga dan kesiapan korban kekerasan perempuan dan anak yang mempengaruhi kinerja pemulangan korban kekerasan. Demikian halnya dengan layanan reintegrasi sosial, yang merupakan upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga dengan memberikan berbagai layanan untuk mempersiapkan perempuan dan anak korban kekerasan melalui pemberian layanan terapi oleh konselor, dan pelatihan keterampilan termasuk pemenuhan spiritual klien sampai kondisi korban siap untuk pulang dan keluarga mau menerima korban. Persentase layanan reintegrasi sosial yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi Sulsel sampai tahun 2019 sebanyak 21 persen di Sulawesi Selatan.

2.5.2. Menghapus Semua Praktik Berbahya

Anak merupakan penentu kualitas sumberdaya manusia dan akan menjadi pilar utama pembangunan, oleh karena itu seluruh popuasi anak perlu ditingkatkan kualitasnya, mendapatkan perlindungan sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Provinsi Sulawesi Selatan cukup banyak memiliki tenaga kerja dibawah umur, terutama yang bekerja di usaha-usaha informal, asisten rumah tangga, hotel tempat karoke, pedagang asongan(untuk diwilayah perkotaan), pemulung dst. Kondisi tempat kerja tersebut sangat rentan dengan tindakan kekerasan, pelecehan seksual, seks bebas dan narkoba.

Dari jumlah tenaga informal dan formal, pekerja anak mengalami peningkatan yg cukup signikan dari tahun-tahun dan pada tahun 2019 mencapai kurang lebih 0,09 persen atau jika dirata-ratakan meningkat 0,04 persen dari tahun 2018.

2.5.3. Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin.

Sejarah menunjukkan bahwa perempuan Indonesia mampu menjadi pemimpin dan pengambil keputusan yang penting, dan bahkan Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan. Hal ini memberikan gambaran bahwa ruang untuk menjadi pemimpin terbuka bagi seorang perempuan, dan perempuan harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Meskipun demikian, data secara umum menunjukkan bahwa persentase perempuan di posisi pengambilan keputusan di lembaga eksekutif masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan , baik ekeskutif dan yudikatif di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan telah mengalami peningkatan dari tahun 2015 (48,41%) hingga tahun 2019 (53,10%) meskipun belum optimal namun telah mencapai diatas 50%, hal ini disebabkan karena para pemimpin lembaga pemerintah sebagian sudah memahami pentingnya peran perempuan di lembaga pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Sulawesi Selatan pada kurun waktu dua tahun terakhir mengalami penurunan. Kecenderungan. Melalui data Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dapat dikatakan bahwa 50,32 persen dari penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang siap dalam dunia kerja pada tahun 2019. Saat ini, perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) Sulawesi Selatan lebih banyak berkegiatan mengurus rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa kerja di Sulawesi Selatan sudah setara dari penduduk laki-laki Perempuan tidak bekerja dapat disebabkan faktor sosial dan budaya, seperti mengurus rumah tangga, sulit masuk ke sektor formal, diskriminasi pekerjaan bagi perempuan, dan budaya yang tumbuh di masyarakat tentang peran dan kedudukan perempuan. Faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan antara lain: marginalisasi dalam pekerjaan, kedudukan perempuan yang subordinat dalam sosial budaya, stereotip terhadap perempuan, dan tingkat pendidikan perempuan yang rendah (Khotimah, 2009).

Kemudian dengan terbitnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa parpol harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sebuah akses positif bagi seluruh perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dan

legislatif. Terlihat dengan adanya peningkatan jumlah perempuan terpilih menjadi wakil rakyat pada periode pemilihan 2019-2024 sebesar 25,88% dibandingkan pemilihan periode 2015-2018 yang hanya mencapai 17,86% namun belum dapat mencapai kuota 30%, artinya pencapaian perempuan dalam bidang politik masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Terbitnya *grand design* peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 10 tahun 2014, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan berhasil

2.5.4. Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi.

Tingginya angka Total Fertility Rate di Provinsi Sulawesi Selatan dimana angka rata-rata per wanita disebabkan oleh masih tingginya angka unmet need (kejadian kebutuhan KB yang tidak terpenuhi), dan masih relatif tingginya angka putus pemakaian kontrasepsi. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pada program KB semakin menurun sejak era reformasi birokrasi, namun pada tahun 2019 angka TFR sebesar 2,40 menunjukkan penurunan dari tahun 2018 yang mencapai 2,44 meski masih diatas target nasional 2,1.

2.5.5. Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan.

Provinsi Sulawesi selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Hal ini merupakan strategi yang dibangun untuk menginternalisasikan kebijakan gender ke dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah sehingga diharapkan kebijakan dan program kegiatan yang ada di Provinsi Sulawesi selatan sudah memprioritaskan keterlibatan perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan daerah.

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan pada tujuan ini antara lain adalah :

1) Pelembagaan PUG 7 prasyarat PUG pada Lembaga Pemerintah belum optimal
2) Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

3) Layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga/organisasi masyarakat belum terstandarisasi

4) Ketersediaan data dan informasi gender dan anak di provinsi dan kabupaten/kota secara kontinyu dan tervalidasi belum terbangun

5) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat setiap tahun

6) Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di kab/kota sebagian besar belum terstandarisasi

7) Jumlah petugas layanan terlatih dan mampu tata laksana pada unit layanan perlindungan perempuan dan anak di kab/kota masih sangat sedikit

8) Layanan Sistem Perlindungan Anak yang meliputi pencegahan, deteksi dini, penanganan, dan pemulihan belum berjalan secara holistic integrative, baik inter maupun antar sektor dan wilayah

9) Ketersediaan lembaga layanan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial yang ramah anak masih kurang

10) Ketersediaan lembaga layanan pusat pembelajaran keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak dan berkesetaraan gender, masih sangat kurang.

11) Angka kelahiran total masih relatif tinggi

12) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan

13) Tingginya unmetneed ber KB ;

14) Tingginya peserta KB yang putus pakai (drop out)

15) Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

16) Rendahnya keikutsertaan KB pria

17) Melemahnya kualitas keluarga dalam menjalankan 8 fungsi keluarga

18) Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap

dan perilaku dalam mendukung program bangga kencana.

19) Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja,

2.6. Pengelolaal Air Bersih dan Sinitasi Layak

2.6.1. Menjamin penyediaan akses air minum layak dan terjangkau

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan penggunaan air semakin tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kebutuhan terhadap kuantitas juga kualitas air pun turut meningkat. Pada tahun 2019 persentase penduduk berakases air minum di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sejumlah 96,16 %.

Penyediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3), kebijakan tersebut dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan. Persentase rumah tangga yang berakses air minum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian 96,16% dari total 8.864.337 rumah tangga.

Air minum layak adalah air minum yang memenuhi 4 kriteria diantaranya; kualitas air sesuai dengan standar air minum, kuantitas yang mengacu pada standar penyediaan yaitu 60 liter/hari/orang, Kontunuitas atau tersedia secara terus menerus, serta Keterjangkauan yaitu akses dan harga terjangkau. Penyediaan air minum layak menunjukkan peningkatan sebesar ±2% /tahun.

Peningkatan yang cukup signifikan pada angka tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan defenisi akses air minum sesuai dengan indikator RPJMN dan indikator SDGs. Dari data tersebut terlihat bahwa 3,84% penduduk atau sebesar 340.390 jiwa masih mengakses air untuk kebutuhan minum langsung dari sungai, danau, sumur dan atau mata air terbuka lainnya. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk berakses air minum	Jiwa	7.443.530	7.517.263	7.593.263	7.668.636	8.523.946
Jumlah Penduduk	Jiwa	8.520.304	8.606.375	8.690.294	8.776.888	8.864.337
Persentase Penduduk Berakses air minum	%	87,36	87,35	87,38	87,37	96,16

Sumber: Bappelitbangda, 2020

Peningkatan limbah domestik akan meningkatkan pencemaran air yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan konsentrasi parameter BOD dan COD di badan air sungai. Secara umum, nilai IKA di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2015 – 2019 apabila dilihat kecenderungan linear- nya maka nilai IKU cenderung menurun dengan laju penurunan 0,57 per tahun. Akan tetapi, pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan yang cukup besar dari 75,44 menjadi 54,29 dan meningkat Kembali pada tahun 2018 sebesar 56,15. Sementara pada tahun 2019 IKA Sulawesi Selatan kembali menurun menjadi 54,93. Hal ini karena Kurangnya pendanaan untuk merealisasikan jumlah target dan kurangnya sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor utama kurang optimalnya pencapaian target nilai indeks kualitas lingkungan hidup.

2.6.2. Menjamim penyediaan sanitasi layak dan terjangkau

Akses sanitasi layak merupakan indikator kepemilikan jamban beserta septic tank yang layak. Salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah keterpenuhan akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sudah mencapai 95,15%, meningkat dibanding tahun 2015 yang mencapai 83,00%. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma, agama, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Angka rumah tinggal bersanitasi diperoleh dari persentase akses penduduk terhadap jamban, dimana pada terdapat peningkatan sebesar 12.15 persen dalam 5 tahun terakhir, Persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sudah mencapai 95.15 persen. Faktor yang mempengaruhi Perilaku masyarakat yang belum memperhatikan pola perilaku hidup

bersih dan sehat.Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Rumah Tinggal Bersanitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi	Unit	1.651.626	1.767.440	1.713.087	1.891.538	2.000.877
Jumlah Rumah Tangga	Unit	1.990.008	2.009.996	2.029.478	2.048.450	2.102.977
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	83,00	87,93	84,41	92,34	95,15

Sumber: Bappelitbangda, 2020

2.6.3. Peningkatan sistem pengelolaan lumpur tinja

Capaian keterpenuhan akses terhadap layanan sanitasi layak di Sulawesi Selatan masih membutuhkan dukungan ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan beserta layanannya. Hal ini terlihat dari 24 kab/kota di Sulawesi Selatan, terdapat 10 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang belum memiliki IPLT, dan dari 14 kabupaten/kota yang telah memiliki IPLT hanya ada 7 IPLT yang berfungsi

Tabel 2.25
Kondisi Sanitasi dan Akses Layanan Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/ Kota	BAB Sembarangan (%)	Akses Jamban (%)	Septic Tank Layak (%)	Cakupan Layanan Truk Tinja (%)	Kondisi IPLT
1	Kep. Selayar	21,76	78,24	56,64	21,60	Belum Tersedia
2	Bulukumba	7,51	92,49	83,71	83,71	Rusak
3	Bantaeng	8,66	91,34	91,13	87,87	Tidak Berfungsi
4	Jeneponto	15,59	84,41	71,18	71,18	Belum Tersedia
5	Takalar	7,71	92,29	59,26	40,74	Tidak Berfungsi
6	Gowa	5,67	94,33	81,94	81,94	Belum Tersedia
7	Sinjai	10,63	89,37	70,13	70,13	Berfungsi
8	Bone	7,67	92,33	83,98	76,31	Rusak
9	Maros	16,75	83,25	92,28	75,53	Tidak Berfungsi
10	Pangkep	20,17	79,83	89,81	69,64	Belum Tersedia
11	Barru	6,80	93,20	76,89	76,31	Berfungsi
12	Soppeng	3,35	96,55	60,03	36,52	Belum Tersedia
13	Wajo	1,74	98,26	93,68	91,94	Tidak Berfungsi
14	Sidrap	3,02	96,98	90,32	87,30	Tidak Berfungsi
15	Pinrang	3,32	96,68	58,4	55,08	Berfungsi
16	Enrekang	8,96	91,04	98,53	89,57	Belum Tersedia
17	Luwu	16,97	83,03	77,55	60,58	Belum Tersedia
18	Tana Toraja	3,95	96,05	66,16	62,21	Berfungsi

19	Luwu Utara	11,21	88,79	89,64	78,43	Belum Tersedia
20	Luwu Timur	9,89	90,11	66,84	56,95	Belum Tersedia
21	Toraja Utara	2,99	97,01	65,86	31,15	Belum Tersedia
22	Makassar	2,78	97,22	63,87	33,35	Berfungsi
23	Pare-Pare	0	100	87,18	87,18	Berfungsi
24	Palopo	7,81	92,12	99,99	92,18	Berfungsi
Sulawesi Selatan		**7,66**	**92,34**	**78,25**	**64,40**	

Sumber: Data Olahan AMPL, STBM, dan Dokumen SSK, BAPPELITBANGDA tahun 2020

2.6.4. Peningkatan kualitas air sungai dan danau sebagai air baku

Penentuan nilai IKA (Indeks Kualitas Air) Sulawesi Selatan didasarkan pada hasil pemantauan kualitas air pada 27 sungai lintas kabupaten se-Sulawesi Selatan. Hasil pengukuran kualitas air untuk setiap sungai dilakukan pada lokasi hulu, tengah dan hilir. Peningkatan limbah domestik akan meningkatkan pencemaran air yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan onsentrasi parameter BOD dan COD di badan air sungai. Secara umum, nilai IKA di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2015 – 2019 apabila dilihat kecenderungan linear- nya maka nilai IKU cenderung menurun dengan laju penurunan 0,57 per tahun. Akan tetapi, pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan yang cukup besar dari 75,44 menjadi 54,29 dan meningkat Kembali pada tahun 2018 sebesar 56,15. Sementara pada tahun 2019 IKA Sulawesi Selatan kembali menurun menjadi 54,93. Hal ini karena Kurangnya pendanaan untuk merealisasikan jumlah target dan kurangnya sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor utama kurang optimalnya pencapaian target nilai indeks kualitas lingkungan hidup.

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan pada tujuan ini antara lain adalah :

1. Masih rendahnya Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 Meter).
2. Terbatasnya infrastruktur pengairan dan jalan usaha tani
3. Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak

2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua

2.7.1. Kebutuhan Energi Daerah

Saat ini, sistem kelistrikan Sulawesi Selatan memiliki kapasitas daya mampu 1.230 MW dengan beban puncak 1.002 MW. Dengan kata lain, besaran cadangan daya mencapai 228 MW atau rasio reserve margin 18,5%. Pada Tahun 2018, kapasitas daya mampu Sulawesi Selatan diprediksikan m encapai 1.973 MW dengan beban puncak sebesar 1.475 MW, sehingga daya cadangan Sulawesi Selatan diprediksi mencapai 33% atau melampaui ambang batas ideal. Bahkan pada 2020, cadangan daya listrik di Sulsel diprediksi bisa berada pada level 55% atau ekuivalen 1.176 MW dengan asumsi daya mampu sebesar 3.291 MW, sedangkan beban puncak 2.115 MW.

2.7.2. Produksi dan Penggunaan Energi

Pengguna energi dikelompokkan dalam 5 sektor, yaitu; rumah tangga, industri, fungsi Rasio Ketersediaan daya listrik merupakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dimana pada tahun 2019 sebesar 98 persen jauh melampaui dari target sebesar 88,75 persen. Hal tersebut disebabkan Daya listrik terpasang Sulawesi selatan pada tahun tersebut sebesar 7.020 GWh dengan jumlah kebutuhan 7.148 GWh. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari capaian tahun 2018 dimana pada tahun tersebut daya listrik terpasang sebesar 6.155 GWh dengan jumlah kebutuhan 6.361 GWh atau capaian sebesar 97 persen. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan seluruh sistem kelistrikan dapat tersambung pada akhir 2019. Rasio ketersediaan listrik tersajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.26

Rasio Ketersedian Daya Listrik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019

Ketersediaan Daya Listrik	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Daya terpasang Provinsi Sulsel (GWh)	GWh	4,189	4,064	5,878	6,155	7,020
Total Kebutuhan Sulsel (GWh)	GWh	4,397	4,986	5,635	6,361	7,148
Rasio ketersedian Daya Listrik Sulsel	%	95%	82%	104%	97%	98%

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2020

Saat ini, PLN baru saja berhasil menyambung sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Penyambungan sistem kelistrikan ini dapat meningkatkan keandalan dan efisensi listrik. Dengan demikian, surplus daya sebesar 400 mega watt (MW) di Sulawesi Selatan, kini dapat terpasok ke Sistem Sulawesi Tenggara dan sistem kelistrikan di Sultra semakin andal dengan pasokan tambahan dari Sulsel, begitu pun sebaliknya. Interkoneksi dua wilayah di Sulawesi ini seiring dengan rampungnya 1.265 menara jaringan transmisi, dan enam gardu induk, yang membentang dari Wotu, Malili, Lasusua, Kolaka, Unaaha hingga Kendari.

Peningkatan Kapasitas Pembangkit selama 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat seiring dengan kebutuhan akan listrik semakin meningkat pula. Tahun 2015, Jumlah Kebutuhan Listrik SulSel 4.397 GWh sementara Daya Terpasang sebesar 4.189 GWh. Namun di Tahun 2016, mengalami penurunan capaian Ketersediaan daya listrik sebesar 82 %, terjadi penurunan sebesar 13 % dari tahun 2015, hal tersebut terjadi karena Daya terpasang yang ada di Prov. SulSel mengalami penurunan daya menjadi 4.064 GWh sementara kebutuhan akan listrik semakin meningkat sebesar 4.986 GWh. Selanjutnya di tahun 2017, terjadi surplus daya listrik sebesar 104 %, dimana jumlah daya terpasang sebesar 5.878 GWh dan Jumlah kebutuhan Energi listrik sebesar 5.635 GWh hinggah tahun 2019, daya terpasang sebesar 7.020 GWh dengan total kebutuhan 7.148 GWh sehingga rasio ketersediaan daya listrik mencapai 98%

Akses yang terbatas adalah kendala terbesar dalam upaya untuk mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil dan daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau. Kendala biasanya muncul dalam proses pengiriman peralatan listrik karena banyak akses jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan pengangkut material.

2.7.3. Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Ketersediaan listrik serta penambahan pembangkit yang relatif agresif tersebut menjadi sebuah sinyalemen dorongan akselerasi perekonomian daerah. Ketersediaan pasokan listrik dengan cadangan daya yang terus membesar tersebut bahkan bisa menjadi momentum bagi Sulsel untuk bertransformasi menjadi lumbung energi dan melengkapi predikat daerah yang sebelumnya sebagai salah satu lumbung pangan di Tanah Air. Namun ketersediaan serta penambahan pembangkitan memerlukan dukungan peningkatan kapasitas tranmisi dan konsistensi pelayanan serta pemerataan distribusi listrik guna mendukung kebijakan pengembangan industri.

2.7.4. Intensitas dan efisiensi energi (listrik)

Untuk Tahun 2015, rasio desa berlistrik sebesar 90,20 persen dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebesar 2.727 desa dari 3.023 desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2015 adalah Pembangunan PLTMH di Desa Leppangeng, Kec. Pituriase, Kab.Sidrap 1 Unit dan PLTS Tersebar di Kab. Luwu Timur 88 Unit dan Kab. Pangkep 32 Unit.

Untuk Tahun 2016, rasio desa berlistrik meningkat sebesar 91,65% dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 2.777 Desa dari 3.030 Jumlah desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2016 adalah Pembangunan PLTMH di Desa Ulusalu, Kec.Latimojong, Kab.Luwu 1 Unit kapasitas 30 Kw, di Desa Lembang, Kec. Suppirang, Kab. Pinrang 1 Unit kapasitas 70 Kw, di Desa Taloto, Kec. Seko Kab Luwu Utara 1 Unit kapasitas 40 Kw. Untuk pembangunan PLTS Tersebar dilakukan di Kab. Pinrang sebanyak 52 Unit dan di Kab. Bone sebanyak 100 Unit. Pembangunan PLTS Terpusat juga dilaksanakan di Pulau Balang Caddi, Kel. Mattiro Bintang, Kec. Liukang Tupabbiring, Kab. Pangkep dan di Pulau Manara Indah, Desa Mana Indah, Kec. Bontomatene, Kab. Selayar.

Untuk Tahun 2017, rasio desa berlistrik meningkat sebesar 92,51% dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 2.804 Desa dari 3.031 Jumlah desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2017 adalah Pembangunan PLTMH 10 Unit yang dilaksanakan di (1) Desa Sali-Sali, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, (2) Desa Kanna Kec. Bessesangtempe, Kab. Luwu, (3) Desa Suppirang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang (4) Desa Mesakda, Kec. Lembang, Kab. Pinrang (5) Desa Balepe, Kec. Malimbong Balepe, Kab. Tana Toraja (6) Desa Makkodo, Kec. Simbuang, Kab. Tana Toraja, (7) Desa Ilanbatu Uru Kec. Walenreng Barat, Kab. Luwu (8) Desa Kaladi Darussalam, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu (9) Desa Kanandede Kec. Rangong, Kab. Luwu Utara (10) Desa Beroppa, Kec. Seko, Kab. Luwu Utara. Pembangunan PLTS Terpusat juga dilaksanakan di (1) Pulau Sabangko, Kec. Liukang Tupabbiring Kab. Pangkep, (2) Pulau Pasi Kec. Bontoharu ab. Kep Selayar, (3) Pulau Kanalo II Desa Persatuan, Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai.

Rasio desa berlistrik pada tahun 2018 terealisasi sebesar 95,8% dari target sebesar 97% sehingga capaiannya adalah sebesar 99,91% hal tersebut dipengaruhi oleh kegiatan

Pembangunan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Wilayah Terpencil yang di kembangkan dengan konsep pemanfaatan energi setempat, khususnya energi terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi dan kegiatan yang bersifat produktif belum merata di semua lokasi pedesaan di Sulawesi selatan. Penempatan lokasi kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Wilayah Terpencil tahun 2018 dilaksanakan di (1) Dusun Silei Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, (2) Desa Dampan, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, (3) Desa Kanna Utara, Kecamatan Bassesangtempe, Kabupaten Luwu, (4) Desa Mapetajang, Kecamatan Bassesangtempe, Kabupaten Luwu, (5) Desa Ulusalu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, (6) Desa Kalaha, Kec. Seko, Kabupaten Luwu Utara, (7) Desa Komba, Kec. Rongkong, Kabupaten Luwu Utara

Untuk Tahun 2019, Rasio Desa berlistrik sebesar 98,51 melampaui dari target sebesar 97 % hal tersebut dipengaruhi oleh pengembangan jaringan listrik PLN yang sudah dapat menjangkau sebagian besar wilayah desa terpencil dan terisolasi. Dari jumlah desa yang ada sebanyak 3.030, masih terdapat 45 Desa yang belum menikmati listrik dan akan dituntaskan untuk sampai pada tahun 2023.

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua adalah :

1) Masih maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar (good mining practice);
2) Belum optimalnya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi dalam rangka peningkatan capaian rasio desa berlistrik.
3) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah
4) Masih bergantung pada penyediaan energi fosil
5) Masih ada daerah di pulau terpencil, terisolir dan terdepan yang belum teraliri listrik
6) Jumlah Produksi Komoditas Tambang Menurun
7) Masih banyak daerah dan pualu yang belum mendapatkan air bersih di Sulawesi Selatan
8) Penurunan Kuantitas Air Tanah di Sulawesi Selatan
9) Masih Banyak Pemanfaatan Air Tanah Tanpa Izin
10) Masih banyaknya penambangan tanpa izin
11) Sumber Daya Manusia yang belum memadai
12) Sarana dan prasarana yang belum memada

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

2.8.1. Perkembangan Ekonomi Makro

Ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2019 tumbuh 6,92%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,99%, diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 10,53% serta Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial 9,98%.

Tabel 2.27
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2013-2017

Indikator	Satun	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi						
Sulawesi Selatan	%	7,19	7,42	7,21	7,06	6,92
Nasional	%	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan masih fluktuatif perkembangannya dalam lima tahun terakhir, namun yang membahagiakan masih terus diatas pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Tabel 2.28
Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Indikator	Satun	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Selatan	Juta Rp	39,95	43,82	47,82	52,64	57,03
Nasional	Juta Rp	45,12	47,94	51,89	55,99	59,07

PDRB perkapita (ADHB) menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Walaupun

demikian, dari 24 kabupaten/kota terdapat satu kabupaten yang PDRB perkapita mengalami penurunan nilai di tahun 2016 sampai 2018 dibanding nilai yang dicapai pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Luwu Timur. Namun nilai tersebut telah meningkat menjadi 70,07 juta rupiah di tahun 2019 dari 69,73 juta rupiah pada tahun 2015

2.8.2. Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2019 sebanyak 6.407.285 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 4.030.400 orang, naik 42.371 orang dibanding Agustus 2018. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja 3.830.096 orang dan pengangguran 200.304 orang. Dibandingkan Agustus 2018, jumlah penduduk bekerja bertambah 55.172 orang, sedangkan pengangguran berkurang sebanyak 12.801 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2019 sebesar 62,90 persen. Indikator ini lebih rendah 0,11 persen poin dibanding TPAK Agustus 2018. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang menurun.

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada perusahaan beskala nasional di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mencapai angka 5.53 persen, diakibatkan karena pada adanya proyek yang berskala nasional yang merealisasikan proyeknya pada sektor jasa lainnya (industri semen) yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun berikutnya angka rasio daya serap tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan menurun karena perusahaan-perusahaan sebagian besar menggunakan mesin-mesin yang berteknologi sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja.

2.8.3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Perekonomian rakyat yang ditandai oleh indikasi pertumbuhan koperasi, Provinsi Sulawesi Selatan berhasil memberdayakan koperasi relatif optimal. Pada Bidang

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ditunjukkan dengan jumlah koperasi yang berdaya (aktif) semakin banyak, yaitu sebesar 65,3% di tahun 2019 yang mana dari tahun tahun sebelumnya terus bertambah, tahun 2016 jumlah Koperasi Aktif sebesar 58,64%, kemudian menjadi 59,28% di tahun 2017, pada tahun 2018 nilai peningkatan Koperasi Aktif menjadi 70,43%, Peningkatan ini penting untuk dipertahankan mengingat koperasi dan sektor ekonomi mikro lainnya menjadi "soko guru" perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dan pembinaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM juga di arahkan untuk memperkuat, meningkatkan kontribusinya dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan.

2.8.4. Peningkatan Pariwisata

Pariwisata merupakan investasi yang sangat menjanjikan. Hal ini karena investasi yang dilakukan untuk pengembangan wisata biasanya hanya sekali dan dilanjutkan dengan pengelolaan dan peralatan, sedangkan penggunaan atas pemanfaatan bisa berulang-ulang. Hal ini akan lebih maksimal jika didukung oleh obyek yang menarik, kemudahan akses dan promosi yang baik. Potensi dasar yang ada di sektor pariwisata Indonesia sangat besar pengaruhnya terhadap sumber devisa negara. Kunjungan Wisatawan Nusantara atau biasa disebut Wisatawan Domestik adalah wisatawan dalam negeri, bukan wisatawan yang datang dari negara lain. Untuk tahun 2019, dinas kebudayaan dan kepariwisataan mentargetkan kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 7.500.000 kunjungan dengan realisasi sebanyak 8.681.275 kunjungan atau 115 persen dari yang ditargetkan. Adapun untuk rata-rata pengeluaran sebesar Rp.750.000,- per hari dengan total belanja wisatawan nusantara per tahunnya mencapai 35,18 Triliun

Pencapaian peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara periode tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi setiap tahun. Secara umum rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara di Sulawesi Selatan meningkat secara fluktuatif. Peningkatan ini dapat dilihat dari pertumbuhan per tahun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari 2015 – 2017, dimana terjadi peningkatan sebesar 23,32% di tahun 2016 dan 8,14% di tahun 2017. Hal ini disebabkan dibukanya berbagai penerbangan langsung (direct flight) dari luar negeri langsung ke Sulawesi Selatan (Bandara Sultan Hasanuddin). Selain itu, terjalinnya kerjasama bidang pariwisata menjadi salah satu faktor pendorong tingginya kunjungan wisatawan mancanegara ke

Sulawesi selatan.

Secara umum rata-rata pertumbuhan pergerakan wisatawan nusantara di Sulawesi Selatan sebesar 25,02%. Realisasi pergerakan wisatawan nusantara ke Sulawesi Selatan selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan

1. Tingginya Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
2. Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama (PB)
3. Rendahnya besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
4. Masih rendahnya tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total penduduk yang bekerja.
5. Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan
6. Tingginya pemutusan hubungan kerja akibat Pandemi
7. Menurunnya tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja di Sulawesi Selatan
8. Rendahnya daya saing tenaga kerja
9. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
10. Belum kondusifnya hubungan industrial dan rendahnya kesadaran masyarakat dan pengusaha maupun syarikat pekerja/buruh dalam pelaku hubungan industrial
11. Tingkat pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat koperasi relatif terbatas. Hal ini menjadikan koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian.
12. Menurunnya jumlah koperasi aktif, akibat terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pengurus koperasi;
13. Tingkat produktivitas dan daya saing UKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaaan proses produksi dan teknologi.

2.9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

2.9.1. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan daerah dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Jaringan transportasi merupakan

salah satu tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaa pelabuhan, terminal, elektrifikasi, irigasi, layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi, diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun ketersediaan infrastruktur perlu ditingkatkan agar angka kecelakaan di sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan. Ketersediaan layanan infrastruktur secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29.
Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2019

Indikator	Satuan	Tahun	
		2018	2019
25 % Kemantapan Jalan	angka	14,74	15,38
25% Kecamatan Terhubung Jalan Provinsi Kondisi Dalam Baik	angka	16,28	17,58
20% Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Regional	angka	20,00	20,00
20% Rasio Eletrifikasi Desa	angka	19,20	19,80
20% Rasio Jaringan Irigasi	angka	15,83	3,29
Indeks Layanan Infrastruktur	angka	73,38	76,05

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari lima komponen komposit, ketersediaan pelabuhan pengumpan regional yang memiliki capaian kinerja tertinggi dan capaian kinerja terendah dicapai oleh rasio jaringan irigasi.

Total panjang jalan di Sulawesi Selatan sebesar 32.432 km, yang terdiri dari 1.745,92 km jalan Nasional, 2.015,23 km jalan Provinsi, serta 26.708,39 km jalan Kabupaten/Kota. Infrastruktur jalan merupakan instrumen penting untuk mengakselerasi perwujudan

posisi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terinduksinya biaya transportasi dan meningkatnya waktu tempuh, yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1159/IV/Tahun 2018 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi di Sulawesi Selatan yang menjadikan panjang jalan kewenangan provinsi meningkat dari 1.500,15 km menjadi 2.009,35 km. Perubahan Keputusan Gubernur terhadap kewenangan jalan berdampak pada persentase kondisi jalan yang menurun pada tahun 2018. Walaupun pada kenyataannya, jumlah panjang jalan kondisi mantap meningkat secara signifikan. pembangunan transportasi jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi jalan tidak mengalami perubahan panjang jalan dimana kondisi jalan baik pada tahun 2015 adalah 42.11 persen dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 42.22 persen. Tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan, hingga tahun 2019 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 39.84 persen.

Tabel 2.30.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Panjang Jalan Kondisi baik	Km	483,21	633,36	516.26	639,32	672,13
Panjang jalan Keseluruhan	Km	1.147,51	1.500,15	1.500,15	2.009,35	2.009,35
Mantap	Km	1.003,13	928,06	953,65	1.184,44	1.236,15
Mantap	%	87,14	61,86	63,57	58,94	61,52
Tidak Mantap	Km	144,38	572,09	546,5	824,91	773,2
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Bondisi Baik	**%**	**42,11**	**42,22**	**34,41**	**35,85**	**39,84**

Di sektor transportasi laut dan penyeberangan, terdapat 82 Pelabuhan yeng telah berfungsi dan masih dalam tahap pengembangan yang terbagi dalam 4 hirarki pelabuhan yaitu; Pelabuhan Utama (PU), Pelabuhan Pengumpul (PP), Pelabuhan Pengumpan Regional (PR), dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL). Selain itu, terdapat 5 dermaga

penyeberangan danau (tabel 132).

Tabel 2.31
Pelabuhan Laut di Sulawesi Selatan

No	kabupaten / kota	pelabuhan	hierarki pelabuhan			
			2011	2015	2020	2030
1	Bantaeng	Bantaeng /Bonthain	PP	PP	PP	PP
2	Barru	Garongkong	PP	PP	PP	PP
3	Bone	Bajoe	PP	PP	PP	PP
4	Bone	Pattirobajo	PR	PR	PR	PR
5	Bulukumba	Bulukumba / Lappe'e	PP	PP	PP	PP
6	Bulukumba	Maccini Baji	PP	PP	PP	PP
7	Jeneponto	Jeneponto /Bunging	PR	PR	PR	PR
8	Luwu Timur	Malili (Sungai)	PP	PP	PP	PP
9	Makasar	Makasar / Makasar New Port	PU	PU	PU	PU
10	Makasar	Paotere	PR	PR	PR	PR
11	Palopo	Palopo / Tg. Ringgit	PP	PP	PP	PP
12	Pangkajene Kepulauan	Biringkasi	PR	PR	PR	PR
13	Pare-Pare	Capa ujung / Pare - Pare	PP	PP	PP	PP
14	Pare-Pare	Pare- Pare / Nusantara	PP	PP	PP	PP
15	Pinrang	Marabombang	PL	PR	PR	PR
16	Selayar	P. Jampea (Banteng)	PR	PR	PR	PR
17	Selayar	Selayar /Benteng / Rauf Rahman	PP	PP	PP	PP
18	Selayar	Galesong / Takalar	PP	PP	PP	PP
19	Sinjai	Sinjai / Larea-rea	PP	PP	PP	PP
20	Wajo	Siwa / Bangsalae	PR	PR	PP	PP

Sumber : Rencana Induk Pelabuhan

Tabel 2.32 Pelabuhan Laut di Sulawesi Selatan

No	Kabupaten / Kota	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
			2011	2015	2020	2030
1	Barru	Lamuru Kung	PL	PL	PL	PL
2	Barru	Waetuo	PL	PL	PL	PL
3	Bone	Cenrana	PL	PL	PL	PL
4	Bone	Lapangko/ Salameko	PL	PL	PL	PL
5	Bone	P.Salemo	PL	PL	PL	PL
6	Bulukumba	Butung/ Kasuso	PL	PL	PL	PL
7	Bulukumba	Bira/Tanah Beru	PL	PL	PL	PL
8	Jeneponto	Tarowang	PL	PL	PL	PL
9	Luwu	Bawa Salo	PL	PL	PL	PL
10	Luwu	Bona Pule	PL	PL	PL	PL
11	Luwu	Kajang	PL	PL	PL	PL
12	Luwu	Pancana / Pute	PL	PL	PL	PL
13	Luwu Timur	Wotu	PL	PL	PL	PL
14	Luwu Utara	Labuange	PL	PL	PL	PL
15	Makassar	Kayu Bangkoa	PL	PL	PL	PL
16	Makassar	Pulau Barrang Caddi	PL	PL	PL	PL
17	Makassar	Pulau Barrang Lompo	PL	PL	PL	PL
18	Makassar	Pulau Bone Tambung	PL	PL	PL	PL
19	Makassar	Pulau Kodi Ngareng	PL	PL	PL	PL
20	Makassar	Pulau Lae-Lae	PL	PL	PL	PL
21	Makassar	Pulau Langkai	PL	PL	PL	PL
22	Makassar	Pulau Samalona	PL	PL	PL	PL
23	Pangkajene Kepulauan	P.Badi	PL	PL	PL	PL
24	Pangkajene Kepulauan	P.Balo-Baloang Lompo	PL	PL	PL	PL
25	Pangkajene Kepulauan	P.Dewakang Lompo	PL	PL	PL	PL
26	Pangkajene Kepulauan	P.Doang-Doangan Lompo	PL	PL	PL	PL
27	Pangkajene Kepulauan	P. Gondong Bali	PL	PL	PL	PL

28	Pangkajene Kepulauan	P. Kapoposang Bali	PL	PL	PL	PL
29	Pangkajene Kepulauan	P. Karangrang	PL	PL	PL	PL
30	Pangkajene Kepulauan	P. Kulamnbing	PL	PL	PL	PL
31	Pangkajene Kepulauan	P. Langkoitang	PL	PL	PL	PL
32	Pangkajene Kepulauan	P. Pammantauang	PL	PL	PL	PL
33	Pangkajene Kepulauan	P. Samatelu	PL	PL	PL	PL
34	Pangkajene Kepulauan	P. Karumpa	PL	PL	PL	PL
35	Pangkajene Kepulauan	P. Madu	PL	PL	PL	PL
36	Pangkajene Kepulauan	P. Rajuni	PL	PL	PL	PL
37	Pinrang	Langga	PL	PL	PL	PL
38	Pinrang	Ujung Lero	PL	PL	PL	PL
39	Selayar	Appatana	PL	PL	PL	PL
40	Selayar	Bangkala	PL	PL	PL	PL
41	Selayar	Cappasalo / Malangke	PL	PL	PL	PL
42	Selayar	Lampia	PL	PL	PL	PL
43	Selayar	Larompong	PL	PL	PL	PL
44	Selayar	P.Batang Mata	PL	PL	PL	PL
45	Selayar	P. Bembe / Tanamlala	PL	PL	PL	PL
46	Selayar	P.Binapa	PL	PL	PL	PL
47	Selayar	P.Bona Lohe	PL	PL	PL	PL
48	Selayar	P. Kalao	PL	PL	PL	PL
49	Selayar	P.Komba- Komba	PL	PL	PL	PL
50	Selayar	P. Lambego	PL	PL	PL	PL
51	Selayar	P. Paadang	PL	PL	PL	PL
52	Selayar	P. Tanapa	PL	PL	PL	PL
53	Selayar	P. Tambolongan	PL	PL	PL	PL
54	Selayar	P. Tanakeke / Satanga	PL	PL	PL	PL
55	Selayar	Pasitallu	PL	PL	PL	PL
56	Sinjai	P. Bunang Luha	PL	PL	PL	PL
57	Sinjai	Patubukan	PL	PL	PL	PL
58	Takalar	P. Kambuno	PL	PL	PL	PL
59	Takalar	Salomakko	PL	PL	PL	PL

60	Wajo	Doping	PL	PL	PL	PL
61	Wajo	Jalang Cendrane	PL	PL	PL	PL
62	Wajo	Danggae	PL	PL	PL	PL

Sumber : Rencana Induk Pelabuhan

Tabel 2.33
Pelabuhan Sungai dan Danau di Sulawesi Selatan

No	Pelabuhan sungai dan Danau	Pencapaian	Hierarki
1	Dermaga Danau towuli	Rencana	pengumpan
2	Dermaga Danau Temped	Rencana	pengumpan
3	Dermaga Danau Matano	Operasi	pengumpan
4	Dermaga Danau Sindereng	Rencana	pengumpan
5	Dermaga Mahalona	Rencana	pengumpan

Sumber : Rencana Induk Pelabuhan

Di sektor transportasi udara terdapat 8 Bandar Udara yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu Bandara Sultan Hasanuddin sebagai bandara internasional di Kota Makassar, Bandara Andi Jemma dan Bandara Seko di Kabupaten Luwu Utara, Bandara Lagaligo di Kota Palopo, Bandara Arung Palakka di Kabupaten Bone, Bandara Aroeppala di Kabupaten Selayar, Bandara Pongtiku di Kabupaten Tana Toraja, Bandara Sorowako du Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, sedang direncanakan pengembangan 2 bandara baru di Kabupaten Bulukumba dan di Kabupaten Luwu Timur.

Tantangan Pembangunan Infrastruktur Tangguh untuk Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Inovasi

1) Masih kurangnya proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik.
2) Masih rendahnya Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 Meter).
3) Masih kurangnya akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota;
4) Masih rendahnya progres revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota, sertamasih terbatasnya rencana rinci tata ruang yang telah disusun

5) Belum optimalnya sinergitas rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah

6) Belum optimalnya pengembangan basis data penataan ruang dalam skala Provinsi Sulawesi Selatan.

2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Tujuan ini berbicara tentang mengurangi kesenjangan antara yang terkaya dan termiskin di suatu daerah atau negara. Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dalam suatu negera. Penyaluran sumber daya kepada pemerintah daerah di kawasan-kawasan yang paling membutuhkan menjadi sangat krusial, begitu pula dengan meningkatkan kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengatasi kemiskinan dan pengasingan. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk tidak mendiskriminasi dalam menyediakan pelayanan umum, dapat menerapkan pajak progresif sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskalnya dan mengalokasikan anggaran daerah untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan bagi rumah tangga termiskin di masyarakat.

Prioritas Daerah dalam melaksanakan tujuan ini yakni dengan fokus pada Peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan, dan Peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, dengan sasaran meningkatnya kamtibmas dan kewaspadaan nasional; Penataan keagrariaa dan penataan administrasi perbatasan antar daerah, provinsi dengan sasaran meningkatnya pertahanan wilayah; Pengembangan kerjasama luar negeri, dengan sasaran meningkatnya efektivitas diplomasi.

Kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan secara keseluruhan diarahkan untuk menurunkan kesenjangan yang tergambar pada angka koefisien gini. Pencapaian target tujuan ini selaras dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan pada pencapaian target Tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengarusutamaan kebijakan pembangunan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang layak dan kewirausahaan. Kebijakan pembangunan yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan ini adalah peningkatan pemberdayaan dan pemenuhan hak dasar orang miskin dan peningkatan kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi dan kredit usaha bagi PMKS guna mencapai target koefisien gini di Sulawesi Selatan.

2.10.1. Kesenjangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Tantangan perekonomian daerah Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan, sebagaimana pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, tidak lagi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai koefisien gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata distribusi pendapatan, maka nilai koefisen gini mendekati satu. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 untuk periode September tercatat sebesar 0,390 yang masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 0,380.Nilai ini juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,385. Namun bila dibandingkan dengan Rasio Gini di Pulau Sulawesi, maka Rasio Gini Sulawesi Selatan tahun 2019 masih lebih baik dari Provinsi Provinsi Gorontalo sebesar 0,420. Rasio Gini Provinsi di Pulau Sulawesi dan Nasional dari tahun ke tahun capaiannya berfluktuasi. Memperhatikan capaian Gini Rasio Provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2019, maka diperoleh gambaran bahwa terjadi berbaikan ditahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,01 poin, demikian pula dengan Provinsi Sulwesi Tenggara,sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan ketimpangan sebesar 0,06 poin. Pada rentan tahun 2017 hingga 2018 nilai Indeks Gini Sulawesi Selatan menunjukkan penurunan yang berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan semakin kecil.

2.10.2. Jumlah daerah tertinggal

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2019 Kabupaten Selayar, Kabupaten Jeneponto, Pangkep serta Toraja Utara telah keluar dari status daerah tertinggal. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menetapkan daerah tertinggal adalah perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah yang semuanya diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten Jeneponto yang merupakan daerah tertinggal di tahun 2017 sebesar 8,25% mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2018 menjadi 6,29% dan di terus

menurun pada tahun 2019 menjadi 5,47%.

2.10.3. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah

PDRB perkapita (ADHB) menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Walaupun demikian, dari 24 kabupaten/kota terdapat satu kabupaten yang PDRB perkapita mengalami penurunan nilai di tahun 2016 sampai 2018 dibanding nilai yang dicapai pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Luwu Timur. Namun nilai tersebut telah meningkat menjadi 70,07 juta rupiah di tahun 2019 dari 69,73 juta rupiah pada tahun 2015.

Adapun kabupaten/kota yang PDRB perkapitanya tertinggi di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 adalah Kota Makassar sebesar 116,87 juta rupiah, menyusul Kabupaten Pangkep dengan PDRB perkapita sebesar 77,46 juta rupiah dan Kabupaten Luwu Timur sebesar 77,07 juta rupiah. Sedangkan PDRB perkapita terendah diantara kabupaten lainnya, adalah Kabupaten Gowa yang hanya mencapai 27,10 juta rupiah dan Kabupaten Jeneponto 27,74 Juta rupiah. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

No	Kab. / Kota	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	31,86	35,46	39,27	43,62	47,50
2	Bulukumba	23,31	26,06	29,03	31,55	33,80
3	Bantaeng	30,42	34,13	37,41	41,63	46,80
4	Jeneponto	19,69	21,94	23,94	26,03	27,74
5	Takalar	23,78	26,73	29,21	31,51	34,01
6	Gowa	19,03	21,04	22,98	25,07	27,10
7	Sinjai	31,57	34,61	37,89	41,88	44,90
8	Maros	45,94	52,09	56,12	60,92	64,33
9	Pangkep	56,94	62,92	67,60	71,98	77,46
10	Barru	28,87	31,75	34,51	38,09	41,71
11	Bone	31,36	35,15	39,04	43,87	47,50
12	Soppeng	30,27	34,89	39,19	44,12	48,18
13	Wajo	38,45	41,94	45,08	47,15	49,87
14	Sidrap	32,12	36,66	40,24	43,25	46,01
15	Pinrang	35,83	39,78	43,95	48,29	52,05
16	Enrekang	26,20	29,22	31,28	32,81	35,36

17	Luwu	29,59	33,55	36,56	40,20	43,25
18	Tana Toraja	21,43	23,72	26,15	29,31	31,96
19	Luwu Utara	28,73	32,02	35,02	38,65	41,70
20	Luwu Timur	69,73	61,72	63,71	69,41	70,07
21	Toraja Utara	26,10	29,91	33,80	37,84	41,50
22	Makassar	78,94	87,13	95,67	106,23	116,87
23	Parepare	36,50	39,35	42,88	45,94	49,80
24	Palopo	31,68	34,04	36,83	40,32	43,02
SULAWESI SELATAN		**39,95**	**43,82**	**47,82**	**52,64**	**57,03**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

2.10.4. Kepesertaan aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Persentase besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek berfluktuasi. Dimana pada tahun 2015 sebesar 71.15 persen, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 73.56 persen dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan masing masing menjadi sebesar 71,23 persen pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 64,51 persen dan pada tahun 2019 sebesar 63,55 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.35.
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	71,16	73,56	71,23	64.51	63.55

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

Ada banyak faktor yang mempengaruhi turunnya kepesertaan jamsostek salah satunya adalah sebagian perusahan masih bersifat sentralistik artinya pekerjanya di Makassar tapi terdaftar BPJS ketenagakerjaannya di Jakarta dan tidak terlaporkan di Makassar. Kemudian ada peserta yang keluar masuk BPJS ketanagakerjaan terutama pekerja kontrak atau pekerja di sektor konstruksi.

Tantangan dan Permasalahan pada tujuan 10 antara lain :

1) Tingkat produktivitas pendapatan masih rendah
2) Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usahatani.

3) Pembangunan sektor industri pengolahan (manufacturing industry) masih belum optimal.

4) Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas lahan sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas.

5) Belum optimalnya terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani.

6) Penempatan Industri pengolahan di daerah masih rendah karena pertimbang jarak dengan pasar.

7) Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah;

8) Belum meratanya persebaran industri di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga pertumbuhan lapangan pekerjaan lebih banyak bertumpu pada kawasan perkotaan dibandingkan dengan pedesaan

9) Rendahnya kemampuan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar.

10) Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor baik bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi, terutama industri makanan, tekstil dan logam;

11) Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang;

12) Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah, khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi;

13) Ketransmigrasian Masih kurangnya optimalnya pelaksanaan pemetaan calon transmigran pada saat proses seleksi sehingga pengiriman transmigran tidak sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan dilokasi;

14) Kurangnya kesiapan provinsi penempatan transmigran untuk menyediakan sarana dan prasarana pemukiman.

2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

2.11.1. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa : Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatanbangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada 4 (empat) Kriteria rumah layak huni , yaitu : ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m2), akses air minum layak dan akses sanitasi aman atau layak. Rasio rumah layak huni menggambarkan adanya perbandingan dalam bentuk angka meningkatnya akses rumah tangga terhadap rumah layak huni. Tahun 2019 besaran rasio rumah layak huni di Sulawesi Selatan sebesar 0,200 yang menunjukkan adanya peningkatan rasio dari 0,195 pada tahun 2018. Pencapaian rasio rumah layak huni menunjukkan bahwa target rasio rumah layak huni melampaui target dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,196. Kenaikan pencapaian rasio rumah layak huni didukung tingginya investasi pembangunan rumah bersubsidi di Kawasan strategis nasional (KSN) Mamminasata yang merupakan penyangga Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari permintaan pengembang terkait izin pemanfaatan ruang untuk pembangunan rumah layak huni.Selengkapnya pada tabel berikut. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Rumah Layak Huni	0,192	0,193	0,194	0.195	0,200

Sumber: * Data sementara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel diolah Tahun 2020

Pendataan kawasan kumuh dilakukan melalui pendataan berdasarkan indikator kumuh yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, hingga saat ini masih terdapat kawasan kumuh sebesar 2.680,84 Ha.

Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, luas kawasan kumur yang tertangani tahun 2016-2019 adalah sekitar 1,412,98 Ha atau sekitar 52,70% dari total luas permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan.

2.11.2. Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk

Petugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap

upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari ganggguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan tencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara sedangkan Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/ atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Rasio jumlah Perlindungan Masyarakat per 10.000 penduduk mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban dan penegakan aturan, dan semakin mampu daerah tersebut menjalankan otonomi daerah.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2019 bahwa jumlah aparat linmas di Kabupaten/Kota sebanyak 42.134 Orang, data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2019 sebanyak 8.851.240 jiwa. Nilai Indikator tersebut menunjukkan bahwa realiasi capaian kinerja sebesar 47,60 (45,90 per 10.000 penduduk) lebih tinggi dari target yang ditetapkan

2.11.3. Persentase sampah perkotaan yang tertangani

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada pasal 27 “dalam hal terdapat kondisi khusus, Pemerntah provinsi dapat melakukan pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah” dalam penjelasan PP 81 Tahun 2012 dijelaskan bahwa kondisi khusus dalam ketentuan ini misalnya terjadi bencana alam, bencana non alam, dan terjadi perselisihan pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah terjadi kondisi khusus sehingga Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan pengangkutan, pengelolaan

maupun proses akhir sampah. Penanganan sampah yang terangkut ke TPA Sanitary *Landfill/Control landfill* dan yang terkelola melalui rumah kompos adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37

Persentase Penanganan Sampah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	71,67	74,5	75,41	66.91	73,33

Sumber : Dinas Pengelolaan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa persentase sampah yang tertangani dalam kondisi khusus masih kurang yaitu 17,53% untuk upaya peningkatan persentase sampah tertangani menggunakan Model TPA *Sanitary Landfill* dan *Control Landfill* untuk Kab/Kota khususnya yang berada di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yang persentase timbulan sampahnya cukup besar.

2.11.4. Jumlah kota hijau yang menyediakan rumah terbuka hijau

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penjumlahan nilai dari lima indeks yaitu Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Performance Hutan (IPH), Indeks Kondisi Tutupan Tanah (IKT), Indeks Konservasi Badan Air (IKBA), dan Indeks Kondisi Habitat (IKH). Data IKTL Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan indeks tutupan lahan antara lain kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, penggunaan Kawasan hutan untuk sektor diluar kehutanan, dan pemukiman.

Adanya kecenderungan penurunan IKTL menunjukkan korelasi dengan tutupan lahan berhutan di tingkat tapak yang dimungkinkan dikarenakan terjadi penurunan kelas hutan menjadi non hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hutan seharusnya berfungsi sebagai penjaga tata air, penyedia udara bersih, penyerap polutan, serta penyedia jasa ekosistem lainnya. Perubahan fungsi hutan akan mengganggu kualitas dan kuantitas air, kesuburan tanah, kualitas udara, dan ekosistem hutan secara keseluruhan yang pada akhirnya akan mengganggu keberlangsungan berbagai sektor seperti pertanian dan perkebunan. Kawasan hutan yang tidak berhutan dan secara alamiah harusnya berupa hutan mengindikasikan hutan belum terkelola dengan baik.

Tabel 2.38

Indeks TutupanLahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	50,85	55,43	54,81	60.41	61.14

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan terhadap Pencapaian Kota dan Permukiman Berkelanjutan

1) Timbulan gas rumah kaca sektor limbah domestik dan persampahan.
2) Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata
3) Masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi
4) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat
   miskin dengan keterbatasan akses pembiayaan
5) Belum optimalnya Sistem Data dan Informasi perumahan dan Kawasan permukiman.
6) Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak

2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Masih sangat terbatas kebijakan yang secara eksplisit mendorong pada pola produksi dan konsumsi yang optimal dan berkelanjutan. Selain itu, pola konsumsi yang dikaitkan dengan peningkatan gizi dan kesehatan masih merupakan persoalan utama di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam sebagian kehidupan masyarakat dan budaya perkotaan telah berkembang gaya hidup konsumtif, karena sebagian besar mereka tidak lagi mengkonsumsi berdasarkan nilai guna, nilai pakai, tetapi sesuatu yang hanya merupakan “simbol” di mana image atau citra menjadi sangat penting. Hal ini seiring dengan semakin pesatnya kemajuan dunia informasi dan komunikasi. Permasalahan Lingkungan seperti pencemaran, degradasi lahan kritis, dan kelangkaan sumberdaya alam akan cenderung berkembang sebagai dampak dari pola produksi/ industri dan konsumsi yang berlebihan.

2.12.1. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan tertangani sesuai peraturan perundangan

Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfataan, pengolahan dan/atau penimbunan (Pasal 1 angka 11 PP Nomor 101 tahun 2014). Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3 maka dilaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan atau pelaku usaha/kegiatan. Hasil pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan dan atau kegiatan pengelolaan limbah B3 tahun 2017 diperoleh data limbah B3 sejumlah 667.900 Ton, Tahun 2018 sejumlah 4.365.759 Ton dan Tahun 2019 sejumlah 5.373.629 Ton, dari perusahaan di sektor rumah sakit, pertambangan, energi dan migas, sektor manufaktur, sektor agroindustri serta sektor prasarana dan jasa.

Adapun Faktor Penghambat kinerja pengelolaan limbah b3 adalah,Limbah B3 relatif besar tetapi tidak tersedia pengolahan incinerator,Lokasi Penimbunan LB3 belum ada sehingga masih diangkut ke Pulau Jawa,Sejumlah Mesin Incenerator Rumah Sakit tidak memiliki izin,Masih kurangnya komitmen Institusi dalam melaporkan neraca LB3 secara rutin Realisasi pengelolaan Limbah B3 pada tahun 2018 sebesar 4.365.759 dan tahun 2019 sebesar 2.885.319 ton. Realisasi tersebut lebih besar dibandingkan target RPJMD dimana tahun 2018 sebesar 500.000 Ton dan tahun 2019 sebesar 1.500.000 ton

2.12.2. Timbulan sampah yang di daur ulang

Sistem pengelolaan persampahanterutama untuk daerah perkotaan, harusdilaksanakan secara tepat dan sistemastis. Kegiatan pengelolaan persampahan akanmelibatkan penggunaan dan pemanfaatanberbagai prasarana dan sarana persampahanyang meliputi pewadahan,pengumpulan,pemindahan,pengangkutan, pengolahanmaupun pembuangan akhir. Masalah sampah berkaitan erat dengan dengan pola hidup sertabudaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itupenanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Jumlah

sampah ini setiap tahun terusmeningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya dan disertai jugakemajuan ilmu pengetahuan teknologi yangmenghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah selama 5 tahun terakhir tersajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.39

Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	Ton	1.095	1.460	4.015	1.361	1,380
Total volume sampah	Ton	77.748	78.533	79.297	60,33	61,538
Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	1,41	1,86	5,06	18	20

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tahun 2019

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan terhadap Pencapaian Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan :

1) Kemampuan penanganan sampah khususnya upaya mengurangan sampah dan limbah di Sulawesi Selatan masih terbatas.
2) Belum ada rekomendasi dari pemerintah setempat untuk penunjukan lokasi TPA Regional

2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

2.13.1. Penanggulangan Bencana

Berdasarkan karakteristik wilayah Sulawesi Selatan, sejumlah risiko bencana yang dapat terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain; banjir, banjir bandang, longsor, tsunami, cuaca ekstrim, gempa, kebakaran dan kekeringan. Daerah rawan gempa berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara.

Daerah rawan tsunami meliputi daerah pantai di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kota Makassar.

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan tranportasi). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, konflik dengan alam, alasan ideologi, agama, dan politik. Provinsi Sulawesi Selatan daerah berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam dan non alam. Selain itu kondisi dinamika sosial dan budaya Provinsi Sulawesi Selatan yang unik juga menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan rawan dengan bencana sosial. Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu.

Berdasarkan data BNPB pada tahun 2019, jumlah kejadian bencana di Sulawesi Selatan sebanyak 357 jumlah kejadian, yang didominasi oleh bencana banjir sebanyak 108 jumlah kejadian, bencana kekeringan sebanyak 51 kali jumlah bencana, bencana kebakaran sebanyak 32 jumlah kejadian, dan bencana longsor sebanyak 32 kali jumlah kejadian. Bencana banjir merupakan bencana yang paling banyak menimbulkan kerugian yaitu jumlah korban jiwa yang terdampak dan mengungsi sebanyak 225.801 orang dan sebanyak 64.266 rumah yang terendam, serta kerusakan 780 unit fasilitas kesehatan, sosial dan pendidikan.

Bencana yang paling berdampak pada wilayah Sulawesi Selatan adalah cuaca ekstrim dan tanah longsor selain bencana banjir dan gempa. Data kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian berdasarkan rentang tahun data.

Kecenderungan peningkatan kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rentang waktu tahun 2015 – 2019 yaitu :

1. Bencana banjir yang diklasifikasikan ke dalam bencana Hydrometeorologi ini cukup berdampak besar bagi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 dengan angka kejadian 15 kejadian, pada tahun 2016 dengan angka kejadian 34 kejadian, pada tahun 2017 dengan angka kejadian 59 kejadian, pada tahun 2018 dengan angka kejadian 38 kejadian, frekuensi tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan angka 107 kejadian yang tersebar pada 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan . Bencana banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dibeberapa bagian wilayah Sulawesi

Selatan sehingga mengakibatkan luapan volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu.

2. Bencana gelombang pasang dan abrasi terjadi akibat pengikisan daerah pantai akibat gelombang laut yang sifatnya merusak. Bencana gelombang pasang ini terjadi di beberapa wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah kejadiannya beragam,pada tahun 2015, gelombang pasang ini terjadi di Kabupaten Selayar. Pada tahun 2017 juga terjadi di Kabupaten Barru. Pada Tahun 2018 terdapat 2 kejadian yaitu di Kabupaten Takalar dan Barru. Pada Tahun 2019 juga terdapat 2 kejadian yaitu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Takalar. Jika terjadi pembiaran maka abrasi akan terus menggerogoti bagian pantai sehingga air laut akan menggenangi daerah-daerah yang dulunya dijadikan tempat bermain pasir ataupun pemukiman penduduk dan wilayah pertokoan di pinggir pantai.
3. Bencana longsor bisa diakibatkan oleh banyak hal. Umumnya disebabkan oleh faktor pendorong dan faktor pemicu. Apalagi di musim hujan, ada saja kekhawatiran masyarakat akan bencana banjir dan tanah longsor. Pada Tahun 2015 Bencana Longsor terjadi 7 Kejadian, Pada Tahun 2016 Bencana Longsor terjadi 17 Kejadian, Pada Tahun 2017 Bencana Longsor terjadi 18 Kejadian, Pada Tahun 2018 Bencana Longsor terjadi 37 Kejadian, selanjutnya pada Tahun 20
4. Bencana Longsor terjadi 42 Kejadian. Selama 5 tahun bencana longsor ini mengalami peningkatan melihat jumlah kejadian yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
5. Bencana kekeringan disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Kekurangan sumber air pun dapat menjadi penyebab bencana ini. Pada tahun 2018 kejadian kekeringan ini terjadi di Kabupaten Barru dan puncaknya pada tahun 2019 naik drastis menjadi 51 Kejadian.
6. Bencana cuaca ekstrim (puting beliung) memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 sebanyak 36 kejadian. Pada tahun 2016 sebanyak 30 kejadian, Pada tahun 2017 sebanyak 102 kejadian, Pada tahun 2018 sebanyak 66 kejadian, Pada tahun 2019 sebanyak 130 kejadian. Insiden di atas menunjukkan ancaman yang dipicu oleh fenomena hidrometeorologi bergerak ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. BMKG pun telah memberikan peringatan dini ke sejumlah wilayah dengan status 'Waspada' hingga 'Siaga.'
7. Bencana gempa di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Pad tahun 2018, bencana gempa bumi terjadi di Kabupaten Wajo. Sementara Pada tahun 2019 terjadi di kabupaten Enrekang dan Luwu Timur.

8. Bencana kebakaran hutan cenderung meningkat, dengan frekuensi tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan jumlah 32 Kejadian.

Gambaran potensi kawasan relokasi bencanadi 24 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi, yang ditujukan untuk memacu kembali perkembangan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya suatu wilayah yang terdampak bencana.

Dukungan sarana dan prasarana pengelolaan data kebutuhan pasca bencana yang akurat dan terkoneksi melalui aplikasi/sistem data terpadu antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota harus segera diadakan agar sinergitas data penaggulangan bencana dapat diwujudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2008 tentang Penanggulangan bencana yaitu penyelenggaraan penangulangan bencana yang terencana, terkordinasi, terpadu dan menyeluru

2.13.2. Dokumen pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Profil emisi Gas Rumah di Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 menunjukkan bahwa prediksi emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2030 adalah 63.597.394 ton CO2eq. Dari total emisi GRK tersebut, distribusi emisi GRK terbesar adalah pada bidang energi yang menyumbang 60% emisi gas rumah kaca diikuti dengan bidang penggunaan lahan dengan emisi 26%, bidang pertanian dengan emisi 11% dan terakhir adalah bidang limbah dengan emisi 1,2% dari total emisi GRK Provinsi Sulawesi Selatan.

Emisi GRK di Sulawesi Selatan di bidang energi utamanya berasal dari sub bidang transportasi. Tingginya tingkat emisi GRK bidang transportasi disebabkan karena prediksi penggunaan kendaraan bermotor yang memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menyebabkan berbagai permasalahan transportasi.

Tabel 2.40
Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	1	1	1	1	1

Berdasarkan hasil perhitungan Business as Usual (BaU) baseline untuk masing-masing bidang, maka target penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sulawesi selatan adalah 5,6% di tahun 2030. Mitigasi penurunan emisi GRK diharapkan dapat disumbang oleh bidang penggunaan lahan (kehutanan) yang menyumbang penurunan emisi GRK sebesar (4,39%), bidang energi (0,74%), bidang limbah (0,32%) dan bidang pertanian (0,14%). Rendahnya target penurunan emisi pada bidang energi dibandingan emisi yang ditimbulkan disebabkan karena kegiatan- kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK pada sektor energi membutuhkan biaya yang lebih tinggi per satuan ton penurunan emisi GRK bila dibandingkan dengan biaya penurunan emisi GRK di bidang lainnya.

Hingga tahun 2019 capaian penurunan emisi GRK adalah 0,89 juta ton CO2Eq. Pencapaian penurunan emisi GRK dilaksanakan dengan program/kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK di masing-masing OPD dengan capaian terbesar adalah dari bidang penggunaan lahan dengan kegiatan utama rehabilitasi hutan dan lahan termasuk didalamnya rehabilitasi kawasan pesisir dan penanaman tanaman perkebunan, bidang pertanian dengan kegiatan utama penggunaan pupuk organik serta pengembangan biogas, bidang energi dengan kegiatan utama pengembangan energi baru terbarukan dan sub bidang transportasi dengan kegiatan manajemen pengelolaan lalu lintas/transportasi dan bidang limbah dengan kegiatan utama pengelolaan sampah. Selain itu dalam menunjang aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan mengikuti program kampung iklim sejak tahun 2013 dan mendapatkan tropi Proklim Lestari (1 lokasi), Proklim Utama (18 lokasi) dan sertifikat Proklim Utama (45 lokasi). Selama dua tahun berturut-turut (2018-2019) Prov. Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim dari Kementerikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk lebih jelasnya, capaian penurunan emisi GRK dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut

Tabel 2.41

Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi Penurunan Emisi GRK	(Ton CO2 Equivalen)	483,000	716,000	790,000	840,000	890,000

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan dalam Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana :

1) Masih rendahnya sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi
2) Belum terintegrasinya RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan dokumen perencanaan perangkat daerah
3) Belum dilegalisasinya dokumen RPPLH sebagai acuan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Selatan

2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

2.14.1. Jumlah luas kawasan konservasi perairan di daerah

Luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 674.119,88 Ha, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan maka pada periode tahun 2018-2023 luas kawasan akan dtargetkan seluas 1,038.859,36 Ha dengan penambahan sebesar 97.648,48 Ha. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.42

Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kawasan Lindung Perairan	Ha	92.557,1	95.241,0	95.752,1	433.551,94	433.574,94
Total Luas Perairan Tutorial	Km^2	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	Kawasan Lindung Perairan : Total Luas Perairan Tutorial	0,22	0,22	0,22	1,01	1,01

Sumber : Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel pada tahun 2015 kawasan konservasi yang dikelola bertambah sebesar 92.557,0 Ha kemudian tahun 2016 dengan adanya kewenangan pengelolaan yang diatur dalan UU 23/2014 sehingga pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan telah bertambah 95.241,1 Ha atau seluas 769.360,98 dan tahun 2017 pengelolaan kawasan konservasi bertambah sebesar 95.752,1 Ha sehingga luas kawasan konservasi mencapai 769.871,98, kemudian pada tahun 2018 luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 433.551,94 Ha atau mencapai 353,3 % dari target 122.728 Ha dan tahun 2019 meningkat menjadi 433.574,94 Ha.

2.14.2. Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan

Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan pada Tahun 2019 adalah sebesar 82,4% melalui program Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

2.14.3. Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luar perairan teritorial pada tahun 2015 sebesar 0,22 terjadi perluasan kawasan lindung dpada tahun 2018 sampai tahun 2019 dengan rasio kasawan lindung sebesar 1,01. Sehingga luas kawasan mencapai pencapaian luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan meningkat drastis dengan adanya penetapan teluk Bone sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan hal ini sebagai respon akibat pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi dimana masing-masing kabupaten/kota mengelola sendiri kawasan konservasi perairan daerah diwilayahnya, yang kemudian diserahkan ke Provinsi sebagaimana diatur pada UU 23 tahun 2014. Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi otoritas pengelolaan konservasi

sumberdaya ekosistem dan habitat laut. Indikator ini didukung oleh Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K Prov. Sulsel, Penyusunan Regulasi Pengelolaan kawasan Konservasi dan Penataan Ruang Laut,pesisr dan Pulau - Pulau Kecil dan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Bosowasi, Ajatappareng, Mamminasata, Luwu Raya, Pangkep Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Wilayah Selatan. Jika dibandungkan dengan target akhir akhir RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 sebesar 0,34 maka telah dicapai 297,06 persen atau telah melampaui target akhir RPJMD.

2.14.4. Jumlah nelayan yang terlindungi

Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dibandingkan jumlah kelompok nelayan di daerah. Selama 5 tahun terakhir sekitar 465 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok. Berikut data cakupan bina kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.43
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun	Klp	89	193	78	50	55
Jumlah Kelompok Nelayan	Klp	295	303	308	311	314
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	30,17	63.7	25.32	16.08	17.52

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan dalam Penanganan Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan :

a) Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan infrastruktur dalam usaha budidaya garam.
b) Masih rendahnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.
c) Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan terbatasnya akses dan

tingginya harga pakan ikan.

d) Masih kurangnya ketaatan dan upaya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penyusunan rencana rinci yang diamanatkan oleh RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan;
e) Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan upaya pembinaan kepada petani untuk menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
f) Belum optimalnya upaya penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

2.15.1. Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan

Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 rasio luas Kawasan lindungan terhadap total luas Kawasan hutan sebesar 76,45%. Rasio ini merupakan luas Kawasan hutan lindung dan Kawasan pelestarian alam (hutan suaka alam, cagar alam) seluas 2.083.950 Ha. Kawasan hutan ini merupakan Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luasan tersebut berdasarkan pada keputusan Menteri Kehutanan Nomo 434/Kemenhut-II/2009. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan dihitung dengan membagi luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan. Kawasan hutan di Sulawesi Selatan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 2.145.031 ha (daratan) dan 580.765 ha (perairan) dengan luas total 2.725.796 ha atau 59,56 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seluas 4.576.453 ha. Namun pada tahun 2019 bersamaan dengan review RTRW Provinsi Sulawesi Selatan terjadi perubahan peruntukan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 91.337 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 84.032 Ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.838 Ha. Dengan demikian luas kawasan hutan menjadi 2.610.060 Ha terdiri dari luas kawasan hutan lindung seluas 1.144.899 Ha, luas hutan produksi seluas 144.267 Ha, luas hutan produksi terbatas seluas 476.019 Ha, luas hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 14.844 Ha, luas kawasan konservasi seluas 830.030 Ha. perubahan peruntukan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan dari total luas 2.725.796 Ha

berdasarkan SK. 434/Menhut-II/2009 berubah menjadi 2.610.060 Ha berdasarkan SK. 362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019 atau berkurang 115.736 Ha dengan rincian Kawasan Hutan Lindung dari sebelumnya 1.232.683 Ha menjadi 1.144.899 Ha (43,86 persen) atau berkurang sebanyak 87.784 Ha.

Kawasan Hutan Produksi Terbatas dari sebelumnya 494.846 Ha menjadi 476.019 Ha (18,24 persen) atau berkurang sebanyak 18.827 Ha, Kawasan Hutan Produksi dari sebelumnya 124.024 Ha menjadi 144.268 Ha (5,53 persen) atau berkurang 20.244 Ha, Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dari sebelumnya 22.976 Ha menjadi 14.844 Ha (0,57 persen) atau berkurang sebanyak 8.132 Ha serta Kawasan Hutan Konservasi dari sebelumnya 851.267 Ha menjadi 830.030 Ha (31,8 persen) atau berkurang 21.237 Ha.

2.15.2. Jumlah kesatuan pengelolaan hutan

Pengelolaan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan tetap memperhatikan koridor kelestarian hutan dan kehidupan masyarakat serta menjunjung hukum yang berlaku. Oleh karena itu dilakukan pembentukan wilayah KPH yang saat ini telah berjumlah 16 KPH

2.15.3. Proporsi luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan

Kondisi kerusakan hutan dan lahan di Sulawesi Selatan selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan kualitas melalui penanganan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebsesar 20.508 Ha

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan :

1) Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2) Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3) Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
4) Belum Optimlnya Pemanfaatan potensi sumber daya hutan, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
5) Menurunnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

6) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah
7) Masih terbatasnya SDM tenaga teknis kehutanan yang berkompetensi Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan
8) Belum selesainya penataan batas kawasan hutan, sehingga belum terwujud secara fisik dan belum terpenuhinya aspek yuridis kawasan hutan.
9) Perubahan/ alih fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, pertanian dan penambangan yang berimplikasi pada bertambahnya lahan kritis dan degradasi fungsi kawasan hutan.
10) Tingginya dinamika konflik penguasaan lahan di daerah akibat belum tersosialisasikannya secara baik rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan hingga pada tahap penetapan kawasan hutan dan kawasan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan.
11) Belum maksimalnya pelayanan publik bidang keplanologian, antara lain disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia dan minimnya fasilitas penunjang kegiatan seperti pengambilan dan penyusunan data spasial bidang kehutanan.
12) Fasilitas berupa peralatan kegiatan inventarisasi hutan masih terbatas
13) Tidak seimbangnya kapasitas izin industri kehutanan dengan ketersediaan bahan baku kayu.
14) Belum tertibnya penatausahaan hasil hutan.
15) Pelayanan terhadap masyarakat masih terkesan berbelit, lamban dan mahal akibat personil belum ditunjang oleh profesionalisme dan kompetensi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
16) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta kontribusinya terhadap penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan
17) Belum adanya layanan informasi on-line terkait potensi pengembangan Kawasan hutan dan hasil hutan bukan kayu sebagai pendorong optimalisasi kerjasama dengan pihak terkait.
18) Data detail kondisi dan karaekteristik DAS sebagai dasar perencanaan dalam menyusun rencana kegiatan dan rencana pengelolaan belum ada, sehingga efektifitas pelaksanaan kegiatan tidak dapat mencapai sasaran secara tepat sesuai skala prioritas.
19) Kewenangan kegiatan RHL dan Pengelolaan DAS Provinsi Sulawesi Selatan berada di

luar kawasan hutan, sementara kawasan hutan merupakan hulu dari kegiatan RHL.

20) Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
21) Adanya kerusakan wilayah DAS yang diindikasikan dengan adanya banjir, erosi dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Selatan
22) Tingkat sedimentasi sungai masih relatif tinggi, banyak dibutuhkan bangunan perangkap sedimen (gully plug, dam penahan dan Pengendali, rorak dan embung).
23) Tingkat erosi permukaan masih tinggi ditandai dengan tingginya laju aliran permukaan (run off), rendahnya penyerapan (infiltrasi) dan mempengaruhi jumlah kandungan air tanah
24) Konflik Tenurial yang masih berkepanjangan
25) Pengrusakan hutan oleh masyarakat karna alasan ekonomi, batas kawasan yang tidak jelas dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan.
26) Rasio jumlah tenaga Pengamanan Hutan/ Polisi Kehutanan dibanding dengan luas

2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

2.16.1. Mengurangi segala bentuk kekerasan

Berdasarkan data yang tercantum, bahwa Untuk cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum kurun waktu lima tahun (2015-2019) data terus meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 100% pada tahun 2019. Korban/Klien yang melaporkan diri di tempat pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tetap diberikan layanan hukum, namun pada kondisi tertentu beberapa klien (pelapor) mencabut laporan dan ditempuh dengan jalan damai.

2.16.2. keadilan untuk semua

Dalam rangka mendapatkan akses keadilan maka masyarakat dapat terpenuhi dengan Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk merupakan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin yang ber KTP dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin. Untuk tahun 2018, jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin yang ber KTP di Sulawesi Selatan mencapai 5.852.672 jiwa dari total penduduk Sulawesi Selatan usia 17 tahun ke atas atau telah kawin sebanyak 6.680.487 jiwa sedangkan pada tahun 2019 mencapai 6.062.519 jiwa dari total penduduk Sulawesi Selatan usia 17 tahun ke atas atau telah kawin sebanyak 6.422.849 jiwa.

2.16.3. Membangun kelembagaan yang tangguh

Kelembagaan dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil dan Indeks Hak Politik. Berdasarkan data BPS, Indeks Lembaga Demokrasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 adalah 81,34, mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang mencapai 79,75. Indeks Kebebasan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 adalah 68,32, mengalami penurunan dari tahun 2018 yang mencapai angka 72,44. Kemudian Indeks Hak Politik Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2019 mencapai 81,34, juga mengalami penurunan menjadi 79,75 di tahun 2018.

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan dalam :

1) Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.
2) Penegakan PERDA belum optimal
3) Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media

komunikasi public

4) Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai
5) Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah.
6) Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
7) Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi;
8) Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral.

2.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

2.17.1. Mobilisasi Sumberdaya Domestik

Mobilisasi Sumberdaya Domestik Provinsi Sulawsi Selatan dapat Tergambarkan pada perkembangan kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017 s/d 2019 dimana menunjukkan kinerja yang semakin membaik yang dengan ditandai peningkatan Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 9,05 Triliun lebih, sedangkan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 9,25 Triliun lebih atau mengalami kenaikan 2,17 persen. Realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 9,57 Triliun atau mengalami kenaikan 3,49 persen, dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018. Rata- rata pertumbuhan pendapatan daerah tahunan selama tahun 2017-2019 mencapai 2,83 persen.

2.17.2. Kemitraan Multipihak

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Target RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2020 dan Tahun 2021 hanya bertambah 1 kelompok binaan permasing-masing LPM pertahun di karenakan cakupan LPM yang cukup besar sehingga tidak dapat diakomodir secara keseluruhan untuk dilakukan pembinaan dalam peningkatan kelompok binaan. Peningkatan kelompok bianaan LPM pada skala Provinsi belum maksimal dilakukan di karena keterbatasan anggaran sebagaimana di katahui bahwa setiap desa memiliki LPM yang sampai saat ini

berjumlah 2.255 desa, belum lagi LPM ditingkat kelurahan yang secara keseluruhan berjumlah 3.038 LPM, pada tingkat pemerintah Kabupaten intervensi DPMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk pelaksanaan pembinaan LPM dalam peningkatan kelompok binaannya mengalami permasalahan yang sama berupa keterbatasan anggaran belum lagi banyaknya program prioritas dari Kementerian Desa yang harus dilaksanakan. Dari identifikasi yang dilakukan DPMD Provinsi Sulawesi Selatan kebanyakan LPM yang berada di desa tidak aktif dalam melaksanakan peran dan fungsinya sehingga kelompok binaan LPM masih sangat sedikit. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah LPM	Lembaga	3.037	3.037	3.038	3.038	3.038
Jumlah Klp Binaan LPM	Klp	51.650	56.431	60.866	3.038	3.038
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Klp	17	19	20	1	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

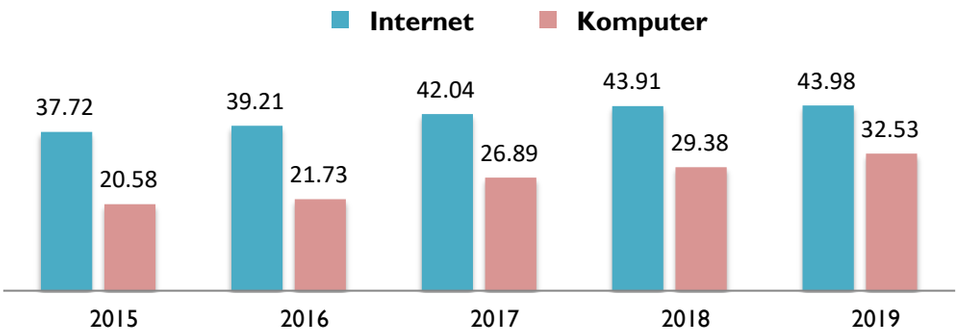
2.17.1. Teknologi Informasi

Persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan tiap tahun dikarenakan penggunaan akses internet pada rumah tangga, dan banyaknya daerah yang terpencil tercoverage sehingga akses internet wilayahnya lebih meluas dan tingginya jual beli secara online yang bisa dilakukan di rumah secara mandiri.

Grafik 2.2

Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet dan Kepemilikan Komputer Pribadi

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan dalam :

1. Belum adanya layanan informasi on-line terkait potensi pengembangan Kawasan hutan dan hasil hutan bukan kayu sebagai pendorong optimalisasi kerjasama dengan pihak terkait.
2. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi



BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Target dan Indikator TPB/SDGs.

3.1.1. Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, Ditetapkan 4 Target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

3.1.2. Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs.

Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) TPB/SDGs, telah membuat Arah Kebijakan yang mendukung tujuan ini antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial;

2. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan ORSOS/LSM dalam pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan dalam mendayagunaan sumber kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningktan pemberdayaan kelompok rentan sosial lainnya;
4. Penyediaan Bantuan Berupa Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Miskin;
5. Penguatan Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) dalam Pembrian bantuan.

Adapun program yang mendukung Tujuan Tanpa Kemiskinan ini berdasarkan target dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh OPD mencakup:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
7. Program Rehabilitasi Sosial
8. Program Penanganan Bencana
9. Program Kesejahteraan Rakyat
10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
11. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
12. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
13. Program Pengelolaan Persampahan
14. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
15. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
16. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
17. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
18. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
19. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
20. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
21. Program Pencatatan Sipil
22. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan

Kemandirian Pangan

23. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
24. Program Penanganan Kerawanan Pangan
25. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Program tersebut dilaksanakan oleh pihak **AISYIYAH** (Program Perlindungan Anak berbasis Keluarga, amal usaha Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial dan Peningkatan Income Usaha Keluarga) , **Yayasan BaKTI** (Program Financial benchmarking on Child Protection dan Perlindungan Anak - Peningkatan cakupan akte kelahiran di Sulawesi Selatan), **YKPM** (Program Model Pemantauan Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif), **Lemina** (Program Seragam Untuk Sobat), Dompet Dhuafa (Program Sosial Trust Fund (STF), Program Rumah Produksi (RUMPRO), Program Perwira (perempuan Wirausaha)), **Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan** (Program Lapak Berkah, Program Kumm/Kube, Program Pk (Pelatihan Keterampilan Menjahit), Program Pemberian Kaki Palsu, Program Emergency Respons Bencana IZI), dan **Yayasan Haji Kalla** (Program Paket Sembako Ramadhan dan Program Disabilitas Mandiri)

Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, lebih detailnya dapat dilihat pada Lampiran 1 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 1.

Tabel 3.1 Target dan Indikator Tujuan 1 SDGs Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target		
					2021	2022	2023
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN							
TARGET 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	%	8,56	9,80	9,19	9,16
TARGET 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas kesehatan	%	87,02	97	99	100
1.3.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tenaga kerja dan transmigrasi	%	63,55	71,44	71,51	71,58
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas sosial	%	5,54	100	100	100
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas sosial	Jiwa	232.935	332,090	348,694	366,129
TARGET 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							

1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	BPS	%	83,84	92,5	93	93
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	Dinas kesehatan	%	95,5	94,5	95	95
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas kesehatan	%	73	73,57	73,87	74,17
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	BPS	%	85,84	98,63	100	100
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	BPS	%	80,54	83,97	85,80	87,64
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	11,59	PM	PM	PM

1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Dinas pendidikan	%	67,23	63,95	64,45	65
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	BPS	%	86,18	86,2	87,37	90,1
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	98,36	PM	PM	PM

TARGET 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

1.5.1*	Jumlah korban meninggal,dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	0,03	PM	PM	PM
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	153,81	PM	PM	PM
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	NA	PM	PM	PM

	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	NA	PM	PM	PM
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lokasi	24	20	23	24
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas sosial	%	100	100	100	100
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas sosial	Jiwa	50	PM	PM	PM
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	160,05	155,05	152,55	150,05
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	2,281,256,323	PM	PM	PM
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1

TARGET 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas kesehatan	%	91,11%	91,5%	92%	92,5%	93%	93%
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas kesehatan	%	102,9%	93,5%	94%	94,5%	95%	95%
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	66,34	66,54	66,74	66,94	67,14	67,34
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	%	74.77	76.82	78.86	80.91	82.95	85
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	%	64.4	70.92	77.44	83.96	90.48	97
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Dinas pendidikan	%	70,54%	81,45%	84,5%	87,31%	89,23%	91,10%

1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	67,28	73.55%	74.56%	75.65%	76.63%	77.53%

TARGET 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

1.5.1*	Jumlah korban meninggal,dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.								
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	0,218635	0,00227	0,002043	0,001839	0,001655	0,001489
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	0,218636	0,00227	0,002043	0,001839	0,001655	0,001489
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	0,3107	0,1820	0,1638	0,1474	0,1326	0,1194
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	0,06904	0,2390	0,2151	0,193	0,1742	0,1568
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lokasi	24	15	18	20	23	24

1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas sosial	%	82,15%	100%	100%	100%	100%	100%

1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas sosial	Jiwa	50 Jiwa	50 Jiwa	55 Jiwa	60 Jiwa	65 Jiwa	70 Jiwa
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	211	166	155	140	128	120
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	65 Milyar	65 Milyar	60 Milyar	55 Milyar	50 Milyar	50 Milyar
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



3.2. Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

3.2.1. Target dan Indikator Tujuan 2 TPB/SDGs.

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 9 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: **Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula**

3.2.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 2 TPB/SDGs

Arah kebijakan pilar sosial dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs Menghilangkan Kelaparan, yakni:

1. Perbaikan pelayanan kesehatan kesehatan sesuai SPM khususnya perbaikan 1000 hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan kesehatan;
2. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan;
3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura;
4. Peningkatan Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan;
5. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
6. Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama;
7. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan;
8. Pengembangan BPP sebagai Sentra Informasi Pertanian;
9. Pembinaan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani.

Adapun Program yang mendukung Tujuan 2 TPB/SDGs yang akan dilaksanakan oleh OPD antara lain terkait dengan :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
6. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
7. Program Pengawasan Keamanan Pangan
8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
9. Program Pendidik Dan Tenaga Pendidikan
10. Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas
11. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
12. Program Pengembangan Ukm
13. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
14. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
15. Program Perlindungan Khusus Anak
16. Program Pembinaan Keluarga Berencana
17. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
18. Program Kawasan Pemukiman
19. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
20. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
21. Program Penyuluh Pertanian
22. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
23. Program Kesejahteraan Rakyat

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan Tanpa Kelaparan. Program tersebut dilaksanakan oleh pihak **AISYIYAH** (Program Pendirian dan Pengelolaan Rumah Gizi Balai Sakinah 'Aisyiyah di Kelurahan), **Yayasan Haji Kalla** (Program Pelatihan piringku pencegahan stunting dengan pendekatan keluarga dan Penanggulangan Stunting,) dan **Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan** (Program Paket Sembako dan Program Jumat Berbagi). Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, lebih detailnya dapat dilihat pada Lampiran 1 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 2.

Tabel 3.2 Target dan Indikator Tujuan 2 SDGs Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target		
					2021	2022	2023
TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN							
TARGETN 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	7,63	6,89	6,55	6,22
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas kesehatan	%	15,30	20,3	18,5	17
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	4,43	4,00	3,80	3,61
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	9,00	8,12	7,71	7,32
TARGET 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas kesehatan	%	30,59	24,59	21,59	18,59
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas kesehatan	%	14% E-PPGBM	32,0	31,5	31,0

2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas kesehatan	%	5,8% E-PPGBM	7,75	7,50	7,25
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas kesehatan	%	17,64	27,0	26,5	26,0
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas kesehatan	%	70,82	79	80	85
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	94,70	86,4	88,3	90,3
	Konsumsi ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	64,7	59,32	60,51	61,72



3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

3.3.1. Target dan Indikator Tujuan TPB/SDGs

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 28 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: **Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang**, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua dan Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

3.3.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs

Strategi pembangunan Sulawesi Selatan yang mendukung pencapaian target Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera adalah "***Meningkatkan keterpenuhan sarana prasarana pelayanan Kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya peventif dalam penanganan kesehatan***". Arah kebijakan dari strategi tersebut, yaitu Peningkatan Promosi Kesehatan, Penyehatan Lingkungan, Perbaikan Status Gizi Masyarakat serta Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Peningkatan Upaya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana/Kedaruratan di Sulawesi Selatan, Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan, Penyediaan dan Peningkatan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan, serta Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan kefarmasian.

Program yang mendukung Tujuan 3 TPB SDGs antara lain :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Kesejahteraan Rakyat
3. Program Pengendalian Penduduk

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahterah. Program tersebut dilaksanakan oleh pihak **Unicef** (Program Imunisasi, Malaria, Program Gizi, Program Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)), **AISYIYAH** (Program Sosialisasi dan Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil, Program Penanggulangan penyakit tidak menular kanker servik dan kanker payudara melalui test IVA dan sadarmis dan Program Membangun Kesadaran dan komitmen anggota sekolah kepemimpinan perempuan (SKP)), **YKPM** (Program Membangun kesadaran dan komitmen anggota sekolah perempuan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan), **Sikola Cendikia Pesisir** (Program Klinik Pesisir), **1000 Guru** (Program Smart Centre), **BMH Hidayatullah** (Program Sahabat Peduli), **Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan** (Program Rumah Singgah Pasien) dan **Yayasan Haji Kalla** (Program Pengurangan Angka kematian Ibu dan bayi)

Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, lebih detailnya dapat dilihat pada Lampiran 1 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 3.

Tabel 3.3 Target dan indikator Tujuan 3 SDGs Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target		
					2021	2022	2023
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERAH							
TARGET 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	BPS	%	97,21	97	97	98
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas kesehatan	kematian per 100.000 kelahiran hidup	144	92/100.000 KH	91/100.000 KH	90/100.000 KH
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	BPS	%	87,99	92,5	93	93
TARGET 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	kematian per 1000 kelahiran hidup	991	5/1.000KH	5/1.000KH	4/1.000KH
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	kematian per 1000 kelahiran hidup	714	3/1.000KH	3/1.000KH	3/1.000KH

3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	kematian per 1000 kelahiran hidup	919	5/1.000KH	5/1.000KH	4/1.000KH
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas kesehatan	%	96,15	95,5	95,5	96
TARGET 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas kesehatan	Per 1.000 Penduduk	0,10/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas kesehatan	%	0.02%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas kesehatan	Per 100.000 penduduk (Capaian dihitung hanya pada data penemuan di faskes/ DOTS)	216/100.000 Penduduk	212/100.000 Penduduk	217/100.000 Penduduk	222/100.000 Penduduk
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas kesehatan	Kabupaten	2	4	5	6
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas kesehatan	%	100	100	100	100
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas kesehatan	Filariasis : Orang	81	81	81	81
			Kusta : Orang	1.147	1.026	975	930

3.3.5.(a)	Jumlah Provinsi / Kab / Kota dengan eliminasi Kusta	Dinas kesehatan	Kab/ Kota	11	18	21	24
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas kesehatan	%	NA	4	4	4
TARGET 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas kesehatan	%	3,10	7,06	7,04	7,02
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas kesehatan	%	4,7	18,58	18,08	17,58
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas kesehatan	%	4,35	10,11	10,11	10,11
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas kesehatan	Kab/ Kota	18	24	24	24
TARGET 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membayakan							
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN	%	2,10	1,92%	1,91%	1,90%
TARGET 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas kesehatan	%	73	73,57	73,87	74,17
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas kesehatan	%	17,13	18,5	20	21,5

3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DP3A	kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	31	18	16	14
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	DP3A	%	2,74	2,20	2,15	2,10
TARGET 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	BPS	%	5,80	PM	PM	PM
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Dinas kesehatan	Jiwa	8.200 Jiwa	900 Jiwa	950 Jiwa	1.000 Jiwa
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas kesehatan	%	87,02	97%	99%	100%
TARGET 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat							
3.a.1*	Presentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS	%	25,59	PM	PM	PM
TARGET 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua							
3.b.1.(a)	Presentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas kesehatan	%	90%	90%	93%	95%
TARGET 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.							

3.c.1*	Rasio Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tenaga Kesehatan/100.000 penduduk	17/100.000 penduduk	23/100.000 penduduk	23/100.000 penduduk	23/100.000 penduduk



3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

3.4.1. Target dan Indikator Tujuan 4 TPB/SDGs

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari : **Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang disabilitas, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.**

3.4.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 4 TPB/SDGs

Arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan berkualitas adalah Perluasan Akses Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu, Perbaikan fasilitas pembelajaran pendidikan menengah dan khusus, Peningkatan Mutu Pendidik / Tenaga Kependidikan yang Inovatif dan kreatif Penyediaan Bantuan Berupa Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Miskin serta Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi, dan kompetensi sumber daya manusia

Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan diperlukan program-program yang terencana dengan baik. Program yang direncanakan dan diimplementasikan oleh OPD mencakup:

1. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pembinaan Perpustakaan

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pendidikan berkhualitas. Program tersebut dilaksanakan oleh pihak **Unicef** (*Program Positive change is created in the knowledge and attitudes of parents and community members in Indonesia towards children with disabilities and their rights that will increase demand for inclusive education*, Program *Increased understanding and commitment from targeted provincial and district government to support inclusive education*, Program *Modelling Innovative Approaches using Sports as a Tool to Promote Inclusion and Participation of children with disabilities* dan Program Dukungan bagi Pemerintah Daerah untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)), **AISYIYAH (**Program Pendidikan Anak Usia Dini), **Sahabat Pulau** (Program PAnDa (Harapan Anak Indonesia), Program RuBaH (Rumah Baca Harapan), dan Program OSK (Olimpiade Sains Kuark)), **Satu Atap** (Program Satap Mengajar), **TuSiWork** (Program Bahasa Inggris, literasi, komputer dasar dan pemprograman) **Sikola Cendikia Pesisir** (Program Pustaka Pesisir), **1000 Guru** (Program Traveling And Teaching, Sharing Knowledge (SK), Program Satu Bulan Mengabdi Di Pedalaman (SBMP), Dan Program Renovasi Sekolah, Beasiswa Guru Pedalaman (BGP)), **Lemina** (Program Nulis Bareng Sobat (NBS) dan Program Peningkatan Kapasitas Relawan), **Gomel** (Program Literasi Sekolah, Program Reading Challenge, Program Ceritakan Bukumu, dan Program Baca Keliling), **Bine** (Program *Sharing Inspiration* (SI), dan Bine Program *Educative Expedition* dan Program *Bine Youth Volunteer*), **Yayasan Haji Kalla** (Program Desa Bangkit Sehajtera dan Program Beasiswa Mahasiswa Sulsel) dan **YKPM** (Program Mengembangkan komunitas belajar perempuan (*learning community*) melalui sekolah perempuan yaitu wadah pembelajaran sepanjang hayat untuk perempuan terutama kelompok rentan dari kalangan akar rumput) dan Program PEDULI (Anak Yang Dilacurkan)).

Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, lebih detailnya dapat dilihat pada Lampiran 1 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 4.

Tabel 3.4 Target dan indikator Tujuan 4 SDGs Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	2021	2022	2023
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas							
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	%	68,67	61,67	62,02	62,45
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	BPS	%	86,09	82,99	83,31	83,65
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	Tahun	8,73	8,40	8,42	8,44
TARGET 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	BPS	%	86,09	82,99	83,31	83,65
TARGET 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	BPS	% remaja (15-24)	83,30	PM	PM	PM

			% dewasa (15-59)	54,85	PM	PM	PM
TARGET 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	BPS	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/sederajat (%)	106,11	87,31	89,23	91,10
TARGET 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	%	92,45	95,91	96,21	96,51
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	BPS	% (umur 15-24 tahun)	99,68	PM	PM	PM
			% (umur 15-59 tahun)	95,78	PM	PM	PM
TARGET 4.5 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan	%	NA	SD = 55,09	SD = 57,16	SD = 6,02
			%	NA	SMP = 81,58	SMP = 52,44	SMP = 83,60
			%	NA	SMA = 82,89	SMA = 83,77	SMA = 86,29
			%	NA	SMK = 81,22	SMK = 82,08	SMK = 85,30
			%	NA	SLB = 57,19	SLB = 59,54	SLB = 63,71



3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

3.5.1. Target dan Indikator Tujuan 5 TPB/SDGs

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 13 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: **Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.**

3.5.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs

Arah kebijakan pencapaian pilar social, dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan yakni dengan adanya Optimalisasi pelaksanaan regulasi dan perumusan kebijakan maupun pengawasan regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan lintas sector, Akselerasi penguatan pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender di daerah serta perluasan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, DU dan Media termasuk lembaga Profesi, Akselerasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan penyediaan kader / fasilitator layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, poltik dan hukum yang terstandar, Meningkatkan keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social politik dan hukum melalui pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender pilot project di kab/kota, Akselerasi perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan, Optimalisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan termasuk layanan rujukan , dan meningkatkan kapasitas SDM petugas layanan maupun penyediaan sarpras layanan perlindungan perempuan sesuai standar, Meningkatkan jaringan kemitraan dan sinergi layanan antar lembaga penyedia layanan maupun intesitas KIE lembaga layanan korban kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO yang memiliki standar layanan pada tingkat propinsi dan kab/kota, kselerasi Perumusan Kebijakan dan Pengawasan pelaksanaan kebijakan ketahanan dan kualitas keluarga, Akselerasi pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan, serta meningkatkan kapasitas petugas lembaga layanan ketahanan dan kualitas keluarga di provinsi dan kab/kota, Meningkatkan jaringan kemitraan dan sinergi layanan antar lembaga penyedia layanan peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga yang ada di daerah.

Terwujudnya pelaksanaan indicator-indikator ketahanan dan keluarga, Akselerasi Perumusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di daerah, Peningkatan capaian KLA dngan melibatkan Lembaga Non Pemerintah , DU, Media Massa dan Forum Anak, Meningkatkan Kualitas Lembaga Penyedia Layanan PUHA dan Perlindungan Khusus Anak yang terstandar, Akselerasi Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan system data gender dan anak di daerah, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem data gender dan anak serta sumberdaya pengelola data dan informasi, Peningkatan pengelolaan data dan informasi ktP/ktA dan data terpilah berbasis system website ditingkat provinsi dan kab/kota, dan Optimalisasi pembinaan Kab/Kota dalam penyediaan system informasi gender dan anak dan SIMFONI PPA di Provinsi.

Adapun Program yang mendukung Tujuan 5 TPB/SDGs antara lain adalah :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
2. Program Pug Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan (Prioritas)
4. Program Perlindungan Khusus Anak (Prioritas)
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Program tersebut dilaksanakan oleh pihak **AISYIYAH** (program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan), **Yayasan Bakti** (Program Perlindungan Anak - Pencegahan perkawinan usia anak, Program Perlindungan Anak- Piloting Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, dan Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan)), **1000 Guru** (Program *Rural Women Empowerment* (RWE)) dan **YKPM** (Program Model Pemantauan

Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif, Program PEDULI (Anak Yang Dilacurkan), Program Membangun kesadaran dan komitmen untuk penghapusan sunat perempuan melalui "sekolah perempuan" di 4 desa, Program Membangun kesadaran dan komitmen untuk memahami beban kerja perempuan yang diakibatkan oleh pembagian kerja berdasar jenis kelamin dan memberikan beban pekerjaan rumah tangga yang tidak berbayar kepada perempuan melalui "sekolah perempuan" di 4 desa, Program Membangun kesadaran dan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan (Musrenbang) melalui "sekolah perempuan" di 4 desa, dan Program Membangun kesadaran dan komitmen untuk membuat keputusan terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi melalui "Sekolah Perempuan" di 4 desa).

Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, lebih detailnya dapat dilihat pada Lampiran 1 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 5.

Tabel 3.5 Target dan indikator Tujuan 5 SDGs Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	2021	2022	2023
Tujuan 5 : KESETARAAN GENDER							
TARGET 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kebijakan	7	7	7	7
TARGET 5.2 Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0,66	0,64	0,63	0,62
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0,0010	0,0008	0,0007	0,0006
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	90	92	95

5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0,66	0,64	0,63	0,62
TARGET 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	% 18 tahun	12,11	12,10	12,8	12,8
			% 15 tahun	NA	1,20	1,19	1,19
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	21	23	24	24
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	31	18	16	14
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	%	86,09	82,99	83,31	83,65
TARGET 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							

5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	19	16,72	16,72	16,72
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	21,13	41,9	43,4	44,9
TARGET 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.							
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	13,3	13,63	13,46	13,29
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas komunikasi & informatika	%	65,07	73	78	83



3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

3.6.1. Target dan Indikator Tujuan 6 TPB/SDGs

Tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak terdiri atas 4 target dan 11 indikator provinsi sebagai berikut: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.

3.6.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs

Arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan Air Bersih dan Sanitasi adalah Pemenuhan kualitas dan kuantitas Air Minum Curah Lintas Kab/Kota, Pemenuhan kualitas dan kuantitas Air Limbah Domestik Regional, Peningkatan koordinasi pengelolaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air, Peningkatan Sarana Sumber Air Bersih dari Sumur Bor, Penguatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran air minum dan sanitasi, Memfasilitasi penyediaan sistem penyediaan air minum di kawasan pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air, Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, Pembangunan infrastruktur sumberdaya air.

Program yang mendukung Tujuan 6 TPB/SDGs, berdasarkan target dan arah kebijakan maka program yang akan dilaksanakan OPD antara lain :

1. Program Pengendalian Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

7. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
9. Program Pengelolaan Persampahan
10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
11. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
12. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
13. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
14. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
15. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
16. Program Pengelolaan Hutan

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak . Program tersebut dilaksanakan oleh pihak Kelompok Kerja AMPL Provinsi dan Kabupaten serta **Unicef** (Program Air dan Sanitasi Masyarakat, Air dan Sanitasi di Sekolah), **USAID IUWASH** (Meningkatkan kinerja PDAM (kelembagaan, operasional. Dll), Penguatan Rencana Pengamanan Air Minum, Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA), Dukungan Program Hibah MBR, Micro Finance, Pendampingan GIS, Peningkatan Akses Sanitasi Individu di tingkat masyarakat, Peningkatan Akses Sanitasi skala Komunal, Membentuk pengusaha Sanitasi, LLTT / LLTTT, Mekanisme Pelibatan masyarakat di bid. Komunikasi WASH, Promosi Sanitasi, Pembentukan UPTD PALD, Pendampingan UPTD PALD, Peningkatan / Pembangunan IPLT, Pendampingan Pokja AMPL, Penyusunan / Revisi Peraturan Daerah / Perkada), **Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan** (Program IZI To Smart, Mulia Insiatif), dan **Yayasan Haji Kalla** (Program Pembangunan 30 unit jamban sehat untuk 30 KK (warga dhuafa))

Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, lebih detailnya dapat dilihat pada Lampiran 1 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 6.

.

Tabel 3.6 Target dan indikator Tujuan 6 SDGs Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)			
					2021	2022	2023
Tujuan 6 : AIR BERSIH DAN SANITASILAYAK							
TARGET 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	%	74,08	82,47	86,28	89,62
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	m3/detik	8,432	9,648	11,509	13,370
6.1.1.(C)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	**%**	15.13	21.03	23.57	28.11
TARGET 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	BPS	%	85,34	PM	PM	PM

6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	%	77,97	87,80	91,02	93,55
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas kesehatan	Desa / Kelurahan	3,047	3,047	3,047	3,047
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	Desa / Kelurahan	2070	2.000	2.250	2.500
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	Kab/ Kota	24	24	24	24
TARGERT 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	Kab/ Kota	9	15	18	21

6.3.2.(a)	kualitas air danau	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	0.23	2.82	3.57	6.66
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	64.76	72.25	72.25	72.63
TARGET 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.							
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas kehutanan	RPDAST	4 RPDAST	4 RPDAST	4 RPDAST	4 RPDAST
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	jaringan informasi	NA	21	21	21
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Dinas kehutanan	Ha	80425.79	100,425.79	110,425.79	120,425.79
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	wilayah sungai	4	4	4	4

6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	lembaga	5	5	5	5
TARGET 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Dinas kehutanan	Ha	20,508	35,508	45,508	55,508
6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas kehutanan	DAS	2	2	2	2



3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

3.7.1. Target dan Indikator Tujuan 7 TPB/SDGs

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, energi dirumuskan di dalam Tujuan 7 yang bertujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini diterjemahkan ke dalam 3 target dan 5 indikator terkait listrik yaitu **Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.**

3.7.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 7 TPB/SDGs

Ketersediaan energi merupakan salah satu pendukung utama peningkatan daya saing perekonomian. Prioritas pemerintah dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi adalah Peningkatan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dikhususkan bagi para kontraktor dan penambang yang tidak patuh pada aturan yang berlaku, Peningkatan pelayanan perizinan bagi penambang skala menengah dan skala kecil, Peningkatan kualitas pelayanan pengujian bagi usaha mineral, para pengguna air tanah dan masyarakat umum, Penyediaan Sarana dan Prasarana Energi, Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Keterampilan masyarakat terutama dalam produksi energi baru terbarukan, Peningkatan pengelolaan konservasi energi dan ketenagalistrikan

Arah kebijakan pencapaian tujuan ini yaitu pembangunan infrastruktur energi terbarukan, penyediaan energi listrik yang semakin luas dan merata ke seluruh wilayah.

Program Tujuan 7 TPB/SDGs

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat. Program tersebut dilaksanakan oleh pihak **Yayasan Haji Kalla** (Program Bantuan Lampu Tenaga Surya)

Tabel 3.7 Target dan indikator Tujuan 7 SDGs Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target		
					2021	2022	2023
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU							
TARGET 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	98	98	98,5	99
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	KWh	730,03	969,88	1.056,63	1.148,48
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	88,47	92	93.4	95
TARGET 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	14,73	21,28	22,99	23,66
TARGET 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.							
7.3.1*	Intensitas energi primer	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	SBM (setara barrel minyak)	10,4	14,30	14,00	13,80



3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

3.8.1. Target dan Indikator Tujuan 8 TPB/SDGs

Tujuan 8 TPB/SDGs adalah mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Dalam rangka mencapai tujuan mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 16 indikator. **Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.**

3.8.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs

Arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu:

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan melalui Pemenuhan sarana prasarana dasar di permukiman transmigrasi serta pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigrasi;
2. Peningkatan keterampilan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing,

3. Pengembangan dan perluasan penciptaan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif;
4. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja di sektor informal;
5. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis, dinamis, bermartabat dan berkeadilan;
6. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
7. Pemetaan wilayah pertumbuhan ekonomi baru berbasis data akurat pada sumber- sumber pertumbuhan pada wilayah tersebut serta peletakan dasar infrastruktur pendukung pertumbuhan;
8. Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi, dan micro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru
9. Pengembangan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dengan destinasi unggulan berbasis wisata alam, budaya dan buatan dalam standar nasional dan internasional
10. Penguatan kerjasama antar daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
11. Pemantapandan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

Program yang mendukung Tujuan 8 TPB/SDGs ini yang akan dilaksanakan OPD adalah :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
4. Program Pemasaran Pariwisata

Selain melalui program OPD, terdapat program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Program tersebut dilaksanakan oleh pihak **Yayasan Haji Kalla** (Program Pemberdayaan Umat Rentan Aqidah)

Tabel 3.8 Target dan Indikator Tujuan 8 SDGs Provinsi Sulawesi Selatan.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	2021	2022	2023
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
TARGET 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	RPJMD	**%**	5,96	PM	PM	PM
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	RPJMD	Juta Rupiah	57,03	59,32	62,43	66,01
TARGET 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS	%	42,35	44,1	45,6	45,9
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS	%	39,45	40,86	41,26	41,61
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	BPS	%	92,48	86,63	84,93	83,23
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	%	28,3	29,5	30	30,5
TARGET 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							

8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja (Rupiah/Jam)	BPS	%	16.744	PM	PM	PM
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	%	4,62	7,2	6,95	6,27
8.5.2(a)	Tingkat setengah pengangguran	BPS	%	7,34	PM	PM	PM
TARGET 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	%	40,22	41,22	40,91	40,59
TARGET 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan	%	2,85	1,02	1,02	1,03
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan	Jiwa	174.817	87,500	93,750	100,000
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan	Jiwa	8.681.275	2.000.000	2.062.000	2.125.000

8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	%	3,73	18,25	18,29	18,33
TARGET 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	%	29,90	30,5	31	32



3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrasruktur

3.9.1. Target dan Indikator Tujuan 9 TPB/SDGs

Dalam rangka mencapai tujuan 9 ditetapkan 5 target yang diukur melalui 12 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. Meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

3.9.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 9 TPB/SDGs

Arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan Industri, Inovasi dan Infrastruktur pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah : Pembinaan pembangunan sumber daya alam

dan usaha ekonomi desa, Mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana Transportasi, Peningkatan sarana dan prasana dalam rangka mendukung penyelenggaran urusan lingkungan hidup, Meningkatkan fasilitas, kapasitas dan pengendalian operasional di rest area

Program Tujuan 9 TPB/SDGs

1. Program Pengendalian Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan industry,inovasi dan infrastruktur. Program tersebut dilaksanakan oleh pihak **Yayasan Bakti** dengan Program Mobil Angkutan untuk Anak Sekolah (Pasikola)

Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, lebih detailnya dapat dilihat pada Lampiran 1 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 9.

Tabel 3.9 Target dan indikator Tujuan 9 SDGs Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target		
					2021	2022	2023
TUJUAN 9 : INDUSTRI,INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
TARGET 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Dinas perhubungan	Km	47,85	67,78	88,56	91,92
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas perhubungan	Unit	1	4	5	6
TARGET 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Dinas perindustrian	**%**	13,56	3,85	4,00	4,15
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas perindustrian	**%**	5,36	4,75	5	5,30
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	**%**	8,93	8,51	8,92	9,33
TARGET 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Dinas perindustrian	**%**	20	51	52	54

TARGET 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	**%**	6,4	6	6	6
TARGET 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	65	65	70	75
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	65,07	73	78	83
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	43,91	54	58	62



3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

3.10.1. Target Dan Indikator Tujuan 10 TPB/SDGs

Tujuan pengurangan kesenjangan yang terdiri dari 2 Target dan 5 indikator. Target - Target tersebut terdiri dari: **Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.**

3.10.2. Arah Kebijkan Pencapaian Tujuan 10 TPB/SDGs

Kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan secara keseluruhan diarahkan untuk menurunkan kesenjangan yang tergambar pada angka koefisien gini. Pencapaian target tujuan ini selaras dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan pada pencapaian target Tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengarusutamaan kebijakan pembangunan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang layak dan kewirausahaan. Arah Kebijakan pembangunan yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan ini adalah :

1. Peningkatan keterampilan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
2. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja di sektor informal;
3. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
4. Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi, dan micro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru;
5. Pengembangan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dengan destinasi unggulan berbasis wisata alam, budaya dan buatan dalam standar nasional dan internasional;
6. Penguatan kerjasama antar daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

7. Pemantapandan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Program yang mendukung Tujuan 10 TPB/SDGs, yang akan dilaksanakan OPD adalah :

1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan berkurangnya kesenjangan yaitu dari Organisasi **Bine** dengan Program Bine Educative Expedition dan Indonesian Essay Presentation Awards

Tabel 3.10 target dan indicator tujuan 10 SDGs provinsi Sulawesi selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)			
					2021	2022	2023
TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN							
TARGET 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Koefisien Gini	RPJMD	Indeks	0,391	0,414	0,398	0,396
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	%	8,56	9,80	9,19	9,16
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten	1	-	-	-
TARGET 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	%	68,32	PM	PM	PM
TARGET 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tenaga kerja dan transmigrasi	%	63,55	71,44	71,51	71,58



3.11. Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Berkelanjutan

3.11.1 Target Dan Indikator Tujuan 11 TPB/SDGs

Tujuan 11 kota dan pemukiman berkelanjutan terdiri dari 7 target yang dijabarkan dalam 15 indikator target tersebut terdiri dari : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

3.11.2 Arah kebijakan pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs

Kota dan permukiman yang berkelanjutan yang merupakan tujuan 11 dari TPB yang menargetkan pengurangan jumlah kematian dan jumlah orang terdampak bencana. Target pembangunan ini sesuai dengan kebijakan prioritas Pemerintah Sulawesi Selatan yang sasarannya adalah meningkatnya kapasitas penanganan bencana skala lintas kabupaten/kota. Tujuan pembangunan ini juga menargetkan pengurangan kawasan kumuh dengan menjamin akses terhadap perumahan yang layak, aman dan terjangkau yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan yaitu Meningkatkanya kapasitas dan kualitas jasa konsultansi dan produk perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman, Memfasilitasi penyediaan prototipe rumah instan sederhana sehat dan penunjangnya untuk mengantisipasi bencana skala provinsi serta relokasi program pemerintah provinsi, Memfasilitasi penanganan kawasan kumuh perkotaan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dan Menyebarluaskan informasi kebencanaan hingga lapisan masyarakat paling bawah (keluarga)

Program yang mendukung Tujuan 11 TPB/SDGs antara lain :

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Pengelolaan Persampahan
3. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Tabel 3.17 Target dan indicator tujuan 11 SDGs provinsi Sulawesi selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	2021	2022	2023
TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
TARGET 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.							
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akases terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	%	60,93	PM	PM	PM
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	kawasan perkotaan	NA	100	100	100
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota sedang & Kota baru	NA	PM	PM	PM
TARGET 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.							
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas perhubungan	%	23,30	29.20	30.80	32.40
TARGET 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.							
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota sedang	7	PM	PM	PM

11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota	1	PM	PM	PM
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappelitbangda	Institusi/ Kota	NA	PM	PM	PM
TARGET 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota Pusaka	NA	PM	PM	PM
TARGET 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	0,03	PM	PM	PM
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	153,81	PM	PM	PM
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	NA	PM	PM	PM
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulanga	Jiwa	NA	PM	PM	PM

		n Bencana Daerah					
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	160,05	155,05	152,55	150,05
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kab/Kota	1	6	8	10
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem	2	4	5	6
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	2,281,256,323	PM	PM	PM
TARGET 11.6 Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	80	74	73	72



3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

3.12.1. Target dan Indikator Tujuan 12 TPB/SDGs

Tujuan 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab terdiri atas 4 target utama yang terdiri dari 4 indikator Provinsi Sulawesi selatan, target tersebut terdiri dari : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek- praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.

3.12.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs

Arah kebijakan pencapain pilar pembangunan lingkungan dalam mewujudkan TPB/SDGs tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, adalah Pemantauan dan pengawasan, serta ketersediaan peningkatan sarana prasarana LB3 dan persampahan, Mendorong keterlibatan masyarakat dan kab/kota untuk menjaga kualitas lingkungan, serta Peningkatan sarana dan prasana dalam rangka mendukung penyelenggaran urusan lingkungan hidup

Program Tujuan 12 TPB/SDGs

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
2. Program Pengelolaan Persampahan

Tabel 3.12 target dan indicator tujuan 12 SDGs provinsi Sulawesi selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	2021	2022	2023
TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
TARGET 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ton	3.003.844,443ton	4.091.998,220 Ton	4.589.838,184 Ton	5.089.634,947 Ton
TARGET 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ton/ Hari	45,44 Ton/ Hari	45,50 Ton/Hari	45,55 Ton/Hari	45,60 Ton/Hari



3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

3.13.1. Target dan Indikator Tujuan 13 TPB/SDGs

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah pengurangan risiko bencana, pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terdiri atas 2 target dari 3 indikator, target tersebut terdiri dari : **Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua Negara dan Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.**

3.13.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs

Arah kebijakan pencapaian pilar pembangunan lingkungan dalam mewujudkan TPB/SDGs tujuan penanganan perubahan iklim, yaitu:

1. Penerapan secara efektif RPPLH dan KLHS dalam mengadaptasi dan memitigasi dampak lingkungan dari perubahan yang berlangsung serta koordinasi antar sector dalam implementasi pembangunan rendah karbon;
2. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
3. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemeliharaan keanekaragaman hayati dan pelaksanaan pembangunan rendah karbon;
4. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon;
5. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tamping lingkungan serta pembangunan rendah karbon;
6. Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana.

Program Tujuan 13 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah:

1. Program Penanngulangan Bencana

Tabel 3.13 Target dan indicator tujuan 13 SDGs provinsi Sulawesi selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	2021	2022	2023
TUJUAN 13 :PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
TARGET 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	0,03	PM	PM	PM
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	153,81	PM	PM	PM
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	NA	PM	PM	PM
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	NA	PM	PM	PM
TARGET 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.							
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Bappelitbangda	Dokumen	1	-	-	-



3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

3.13.1. Target dan Indikator Tujuan 14 TPB/SDGs

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan dengan 2 target yang diukur melalui 4 indikator. Target-target tersebut terdiri dari : **Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.**

3.13.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs

Tujuan Ekosistem Lautan menargetkan pelestarian wilayah pesisir dan laut serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya lautan, Arah kebijakan pembangunan yang melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan melalui Akselerasi peningkatan daya saing dan nilai tambah produk melalui kemitraan usaha, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan yang berkelanjutan, Pengembangan usaha pengolahan perikanan, Menjaga Ketersediaan stock ikan, Penataan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

Program Tujuan 14 TPB/SDGs

1. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tabel 3.14 Target dan indikator Tujuan 14 SDGs Provinsi Sulawesi selatan

Kode Indikator	Target/Indikato r	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)			
					2021	2022	2023
TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN							
TARGET 14.Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.							
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Dinas kelautan dan perikanan	**%**	82,40	87,48	88,73	89,95
TARGET 14.Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.							
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Dinas kelautan dan perikanan	Regulasi/ Kebijakan	NA	-	-	-
14.b.1.(a)	Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Dinas kelautan dan perikanan	Kab/ Kota	19	19	19	19
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas kelautan dan perikanan	Nelayan	11,827	11,820	11,840	11,860



3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

3.15.1. Target dan Indikator Tujuan 15 TPB/SDGs

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Dalam rangka mencapai tujuan tata kelola kehutanan, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 6 indikator. Target tersebut terdiri dari : **Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global. Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.**

3.15.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs

Arah kebijakan pembangunan yang mendukung Ekosistem Daratan khususnya ekosistem hutan adalah : percepatan pemberian akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat yang akan memberikan akses kepada masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan di Sulawesi Selatan agar dapat lestari dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan ini juga sesuai dengan arah kebijakan prioritas yakni Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan lestari, Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, Mewujudkan upaya preventif dan persuasif dalam rangka pengamanan hutan melalui kegiatan patroli rutin dan penyuluhan dan Mewujudkan masyarakat serta pelaku industri yang peduli terhadap kelestarian hutan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan

Program Tujuan 15 TPB/SDGs

program yang akan dilaksanakan OPD adalah :

1. Program penataan dan pemanfaatan hutan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
4. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tata Lingkungan
5. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan Ekosistem Daratan yaitu dari Organisasi Yayasan Kalla dengan Program Penghijauan Hulu Sungai dan DAS (Daerah Aliran Sungai)

Tabel 3.15 target dan indicator tujuan 15 SDGs provinsi Sulawesi selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	2021	2022	2023
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN							
TARGET 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas kehutanan	%	57,03	56.64	56.64	56.64
TARGET 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Dinas kehutanan	Ha	275	100	100	100
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Dinas kehutanan	Ha	18.350 Ha	12.000 Ha	12.000 Ha	12.000 Ha
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas kehutanan	KPH	16	16	16	16
TARGET 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							

15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas kehutanan	%	0.45	0.78	0.99	1.21
TARGET 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.							
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen Keanekaragaman hayati Pucak	1 Dokumen Keanekaragaman hayati Pucak	1 Dokumen Keanekaragaman hayati Pucak



3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

3.16.1. Target dan Indikator Tujuan 16 TPB/SDGs

Tujuan 16 memiliki 2 target dan 4 indikator SDGs Sulawesi selatan yang ingin dicapai pada tahun 2030. Target tersebut terdiri dari : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

3.16.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujaun 16 TPB/SDGs

Arah kebijakan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan tujuan 16 yakni Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dapat dilihat dari menurunnya angka kriminalitas dan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan serta angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan pencapaian tujuan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh diprioritaskan pada Akselerasi Perumusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di daerah, Peningkatan capaian KLA dngan melibatkan Lembaga Non Pemerintah , DU, Media Massa dan Forum Anak, Meningkatkan Kualitas Lembaga Penyedia Layanan PUHA dan Perlindungan Khusus Anak yang terstandar, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem data gender dan anak serta sumberdaya pengelola data dan informasi

Program Tujuan 16 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD

adalah:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Penataan Organisasi

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Program tersebut dilaksanakan oleh pihak **Lemina** dengan Program Aku Sayang Badanku (ASB)

Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, lebih detailnya dapat dilihat pada Lampiran 1 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 16.

Tabel 3.16 Target dan indikator Tujuan 16 SDGs provinsi Sulawesi selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	2021	2022	2023
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
TARGET 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	BPS	Kasus	NA	PM	PM	PM
		POLDA	Kasus	NA	68	52	41
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS	%	NA	PM	PM	PM
		POLDA	%	NA	88	92	93
TARGET 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.							
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	1,96	1,94	1,93	1,93
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	0,00080	0,00079	0,00078	0,00078

16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	NA	0,027	0,025	0,023
TARGET 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	95,76	96	96	97
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	100	100	100	100
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	4,00 (B)	PM	PM	PM
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	65,06 (B)	76,00(BB)	80,00(A)	85,00(A)
				Jumlah Kab/Kota yang mendapat nilai **"B"** pada akhir Renstra sebanyak 3 Kab/Kota	15	20	24

16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro Pembangunan Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	61,24 (B)	75,00 (BB)	78,00 (BB)	80,00 (A)
TARGET 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS	%	81,34	PM	PM	PM
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	%	68,32	PM	PM	PM
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik	BPS	%	65,61	PM	PM	PM
TARGET 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1.(a)	Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40% bawah yang memiliki akta kelahiran	BPS	%	86,18	PM	PM	PM



3.17. Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

3.17.1. Target dan Indikator Tujuan 17 TPB/SDGs

Tujuan menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan dengan memfokuskan pada upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari TPB 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 3 target dengan 5 indikator. Target tersebut terdiri dari : **Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.**

3.17.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs

Arah kebijakan pencapaian pilar pembangunan ekonomi dalam mewujudkan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan yakni dengan menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Perkuatan mobilitas sumber daya domestik tergambar pada meningkatnya rasio penerimaan pajak terhadap PDRB untuk membiayai pembangunan merupakan salah satu target Tujuan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Selain itu penggunaan teknologi dan informasi merupakan salah satu sarana pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang indikator pentingnya antara lain adalah Rasio penerimaan pajak terhadap PDB serta Proporsi individu yang menggunakan internet.

Arah kebijakan pembangunan yang mendukung pencapaian target tujuan 17 TPB/SDGs tersebut diprioritaskan pada Merwujudkan Ketersediaan dan Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika untuk mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK, Meningkatkan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Keamanan dan Sarana Pendukung Keamanan Informasi

Program Tujuan 17 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan kemitraan untuk mencapai suatu tujuan. Program tersebut dilaksanakan oleh pihak **Lemina** dengan Program Festival Anak

Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, lebih detailnya dapat dilihat pada Lampiran 1 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 17.

Tabel 3.17 target dan indicator tujuan 17 SDGs provinsi Sulawesi selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)			
					2021	2022	2023
TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
TARGET 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan pendapatan daerah	%	0.82	0.82	0.79	0.70
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Badan pendapatan daerah	%	0.74	0.76	0.71	0.63
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Badan pendapatan daerah	%	39,09	35.68	40.43	40.92
TARGET 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	NA	65	70	75
TARGET 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	44	57	62	67
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	NA	100	100	100

	akses telekomunikasi universal dan internet.						
TARGET 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	100	PM	PM	PM
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	NA	PM	PM	PM
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	%	NA	PM	PM	PM
TARGET 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DP3A	%	Ada	Ada	Ada	Ada
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	%	NA	PM	PM	PM
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	NA	PM	PM	PM



BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs.

Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs yang ditetapkan dalam pasal 7 butir b Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut, yang menugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan

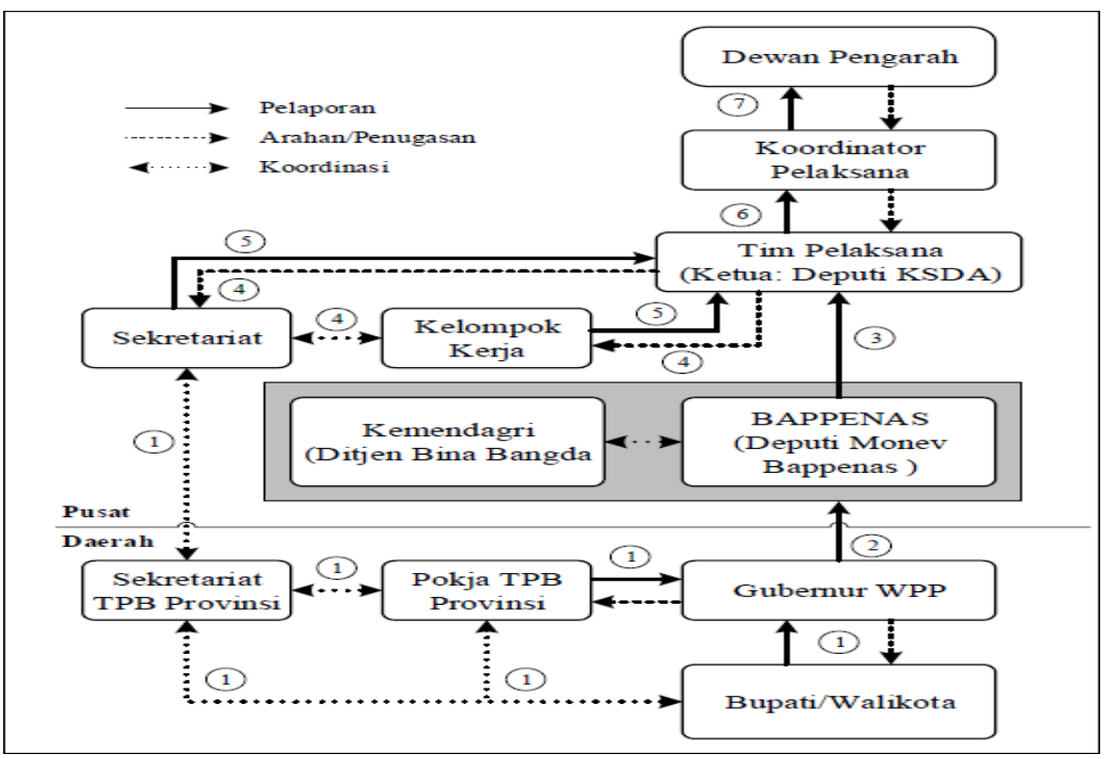
sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs

Lingkup Pemantauan dan Evaluasi. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan global dan 94 target nasional yang selaras dengan target global yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMD 2015-2019. Masing-masing target dilaksanakan oleh instansi pelaksana. Pencapaian 94-174, target nasional diukur dengan 319 indikator. Keseluruhan Tujuan, Target dan Indikator tersebut dikategorikan ke dalam empat pilar (Gambar 48.). Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program-program yang dibiayai oleh APBD.

4.1. Mekanisme Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017.

Gambar 6 Alur pemantauan RAD TPB/SDGs



Mengikuti langkah-langkah (Gambar 6) sebagai berikut:

1. **Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. **Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat (Langkah 1).
2. **Gubernur selaku WPP** menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah *(Langkah 2).*
3. **Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS** menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada **Tim Pelaksana** melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS *(Langkah 3)*.
4. **Ketua Tim Pelaksana** mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).
5. **Masing-masing Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).
6. **Ketua Tim Pelaksana** melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Nasional *(Langkah 6).*
7. **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS** selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (*Langkah 7).*

4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres nomor 59 tahun 2017 khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut:

Enam bulan setelah Perpres nomor 59 tahun 2017 diberlakukan, Rencana Aksi Nasional 2017-2019 harus dapat disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGS kepada Presiden RI, yaitu tanggal 10 Januari 2018. Sedangkan Rencana Aksi Daerah harus dilaporkan setelah satu tahun setelah Perpres nomor 59 tahun 2017 diundangkan.. Perpres tersebut juga mengamanatkan bahwa Peta Jalan TPB/SDGS 2017-2030 harus sudah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 12 bulan setelah Perpres nomor 59 tahun 2017 diundangkan

Gambar 7 Diagram jadwal pelaporan dan pemantauan TPB/SDGS Nasional dan Daerah



4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGS telah Menyiapkan laman sdgs.BAPPENAS.go.id sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya. Halaman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia.

Sementara Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs masih memakai laman sdgs.BAPPENAS.go.id sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya. Halaman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia.



BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Apabila Dalam pelaksanaan tahun berjalan Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan

dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi-aksi atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Provinsi. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

5.2. Penguatan Sarana Pelaksanaan TPB/SDGs

5.2.1. Perluasan Penggunaan Teknologi.

Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Provinsi Sulawesi Selatan akan mencoba merancang aplikasi pemantauan data capaian SDGs dimana dengan memanfaatkan teknologi dapat memudahkan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

5.2.2. Kemitraan Multipihak.

Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global, juga telah diterapkan Indonesia prinsip di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi

Kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya wakil-wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB/SDGs tertuang dalam SK Gubernur Nomor 453/II/Tahun 2019. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (online) dan luring (offline)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini akan menjadi dasar kerangka kerjasama antar multi piihak dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan dimana akan melibatkan setiap unsur baik pemangku kebijakan maupun non pemangku kebijakan.

5.2.3. Penguatan Koordinasi.

Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat Provinsi dan Kab/Kota. BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs, serta Bappeda juga akan berencana melakukan penguatan kapasitas kesekretariatan SDGs.

5.2.4. Peningkatan Kapasitas.

Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB/SDGs di daerah diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Kementerian/Lembaga/Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

5.2.5. Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak.

SDGs Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh Tim Koordinasi TPB/SDGs sehingga dengan pemberian penghargaan ini dapat menimbulkan motivasi serta tanggungjawab dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

5.2.6. Penguatan Strategi Komunikasi.

Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan kerjasama dengan media untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai SDGs dan pencapaiannya sehingga seluruh masyarakat bisa memahami dan bisa bersama memantau pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.

5.2.7. Pemutakhiran Dokumen

Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (online) dan luring (offline). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST.

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019-2023



Program/Kegiatan/Indikator Output (1)				Indikator	Satuan (2)	Tahun Dasar (2019) (3)	Target Tahunan (4)			Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)
							2021	2022	2023			
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN												
INDIKATOR SDGs: 1.2.1*Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur												
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang		-	1.408	1.408	1.408	10.405.000.000	APBD	Dinas Sosial
		1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang		-	700	700	700	12.033.000.000	APBD	Dinas Sosial
		1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	KUBE		-	150	150	150	8.061.000.000	APBD	Dinas Sosial
				UEP		-	110	110	110			
TOTAL											**30.499.000.000**	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
(2.09.02 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan)												
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai	2.09.02.1.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Yang Dibangun	Unit	0	3	3	3	1.575.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.02.1.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur Yang Dibangun	Unit	0	3	3	3	1.575.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.02.1.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian	Unit	0	1	1	1	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan

	Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Kemandirian Pangan Lainnya	Pangan Lainnya Yang Dibangun								
		2.09.02.1.01.04	Koordinasi dan Singkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Frekwensi Koordinasi dan Singkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.02.1.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan	Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
TOTAL											**4.395.000.000**	
(2.09.03 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat)												
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka	2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen	1	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.800.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Ketersediaan Pangan Lokal	%	0	20 %	20 %	20 %	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Distribusi Pangan Pokok	Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan

	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.	Jumlah Dokumen Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan/Frekwensi Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Serta Harga Pangan	Dokumen/Kali	-	4 Dokumen/6 Kali	4 Dokumen/6 Kali	4 Dokumen/6 Kali	1.298.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Pasar Mitra Tani Dengan Mitra Distributor/Pemasok Pangan	Dokumen	0	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	7.200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
TOTAL											**11.498.000.000**	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Frekwesi Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi	Dokumen/Kali	0	1 Dokumen/2 Kali	1 Dokumen/2 Kali	1 Dokumen/2 Kali	85.037.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Singkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi CPP Provinsi/Volume CPP Provinsi	Dokumen/Ton	0	1 Dokumen/5 Ton	1 Dokumen/10 Ton	1 Dokumen/15 Ton	674.005.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan

		2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Dengan Bulok Dalam Pemeliharaan Cadangan Pangan Provinsi	Dokumen/Kali	0	1 Dokumen/2 Kali	1 Dokumen/2 Kali	1 Dokumen/2 Kali	72.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
TOTAL											**846.042.580**	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Frekwesi Promosi Konsumsi Pangan Lokal	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	9.268.175.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Frekwesi Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Frekwesi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Pangan	Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
TOTAL											**10.468.175.400**	
(2.09.04 Penanganan Kerawan												

an Pangan)												
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Singkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Frekwensi Koordinasi dan Singkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Beras Yang Disalurkan	Ton	0	10 Ton	10 Ton	10 Ton	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
TOTAL											**3.150.000.000**	
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP												

3.25.03.1.01	Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.03	Sub Kegiatan; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Alat Bantu Tangkap	Unit	5.540	270	270	270	8.200.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
TOTAL											**8.200.000.000**	
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA												
3.25.04.1.05	Kegiatan: Pengelolaan Pembudidaya Ikan Di Laut	3.25.04.1.05.02	Sub Kegiatan; Penyediaan Sarana Prasarana Pembudsdiaya Ikan di Laut	Jumlah Sarana Prasarana Budidaya Laut	Unit	130	130	130	130	7.552.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
TOTAL											**7.552.000.000**	
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT												
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	rumusan kebijakan kesra bidang kesehatan yang dihasilkan	-	-	1	1	1	203.000.000	APBD	Biro Kesra
TOTAL											**203.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 1.3.1(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.												
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												

1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta Pertemuan Evaluasi dalam rangka Pemantapan Kesehatan Gratis Integrasi ke Program JKN	Orang	45 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	225.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Sosialisasi dan informasi Kesehatan Gratis Integrasi ke program JKN melalui Media Cetak dan Elektronik	Kali	4 Kali Kegiatan	4 kali	4 kali	4 kali	195.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kab./Kota sasaran Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi JKN	Kab/Kota	24 Kab./kota	24 Kab./Kota	24 Kab./Kota	24 Kab./Kota	250.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Petugas/pengelola JKN Kab/Kota mendapat bimbingan teknis dan jumlah pengelola JKN Provinsi yang melakukan konsultasi ke Pusat	Orang	-	168 Orang	168 Orang	168 Orang	245.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kab./Kota sasaran Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Yankes Penduduk Miskin di Fasilitas Kesehatan	Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	237.500.000	APBD	Dinas Kesehatan

				Jumlah kab./kota sasaran advokasi dan sosialisasi dalam rangka Sulawesi Selatan menuju Universal Health Coverage (UHC) 2019	Kab/Kota	24 kab./kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	105.500.000	APBD	Dinas Kesehatan
TOTAL											**1.258.000.000**	
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT												
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	rumusan kebijakan kesra bidang kesehatan yang dihasilkan	-	-	1	1	1	203.000.000	APBD	Biro Kesra
TOTAL											**203.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 1.3.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.												
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT												
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan	rumusan kebijakan kesra bidang kesehatan yang dihasilkan	-	-	1	1	1	203.000.000	APBD	Biro Kesra

			Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja									
TOTAL											**203.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.												
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.04	jumlah penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu	Orang	-	-	20	20	20	698.000.000	APBD	Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.06	Jumlah penyandang disabilitas produktif yang mendapatkan pengembangan wirausaha	Orang	-	-	50	50	50	483.000.000	APBD	Dinas Sosial
TOTAL											**1.181.000.000**	
KODE DAN NAMA PROGRAM												
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	rumusan kebijakan kesra bidang kesehatan yang dihasilkan	-	-	1	1	1	telah di idem di indikator 1.2.1*	APBD	Biro Kesra
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.												

KODE DAN NAMA PROGRAM												
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.			KPM	-	-	332.090	348.694	366.129	3.350.576	PUSAT	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan												
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kab/Kota sasaran pemantauan Antenatal Care Terpadu	Kab/Kota	-	10 Kab/Kota	14 Kab/Kota	24 Kab/Kota	245.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Regulasi Penurunan AKI dan AKB	Kab/Kota	-	30 Orang	0 Orang	0 Orang	82.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
TOTAL											**327.000.000**	
KODE DAN NAMA PROGRAM												
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan	4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	rumusan kebijakan kesra bidang kesehatan yang dihasilkan	-	-	1	1	1	telah di idem di indikator 1.3.1(b)	APBD	Biro Kesra

	Rakyat Pelayanan Dasar		Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan									
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap												
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.14.04.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Imunisasi	Orang	-	24 Orang	0 Orang	24 Orang	118.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Peserta Workshop Advokasi Imunisasi	Orang	-	25 Orang	0 Orang	0 Orang	40.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan program imunisasi	Kab/Kota	-	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	87.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kab/Kota dilaksanakan EVM (Effective Vaccine Management)	Kab/Kota	-	0 Kab/Kota	8 Kab/Kota	0 Kab/Kota	25.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
		1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan investigasi dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Kab/Kota	-	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	110.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
TOTAL											**380.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.												
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan,	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kab/Kota sasaran pemantauan Antenatal Care Terpadu	Kab/Kota	-	10 Kab/Kota	14 Kab/Kota	24 Kab/Kota	245.000.000	APBD	Dinas Kesehatan

	UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Regulasi Penurunan AKI dan AKB	Orang	-	30 Orang	0 Orang	0 Orang	82.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
2.14.03.1.02	Pemberdayaan & Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keikutsertaan Ber KB	2.14.03.1.02,01	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peneingkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Keikutsertaan Ber-KB	Jumlah kab/kota lokasi pelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB lintas kemitraan	Kab/Kota		sama dengan 5.6.1.a	sama dengan 5.6.1.a	sama dengan 5.6.1.a	sama dengan 5.6.1.a		
TOTAL											**327.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.												
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-	5	2	2	16.500.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Ruang	-	8	20	21	24.789.306.000	APBD	

		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	3	20	21	9.318.448.000	APBD	
		1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	2	20	21	9.202.904.000	APBD	
		1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	4	20	21	10.224.514.000	APBD	
		1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	5	20	21	10.645.591.000	APBD	
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	9	20	21	11.337.029.000	APBD	
		1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	3	20	21	9.183.171.000	APBD	
		1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	10	20	21	11.245.714.000	APBD	
		1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	20	21	10.455.000.000	APBD	

		1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	66	20	21	24.968.486.000	APBD	
		1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	4	20	21	9.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	55	25	25	40.565.503.000	APBD	
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	32	25	25	16.908.932.000	APBD	
		1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	9	25	25	12.653.151.000	APBD	
		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang		Ruang	-	8	25	25	13.790.099.000	APBD	

			Laboratorium Fisika									
		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	8	25	25	12.088.877.000	APBD	
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	4	25	25	10.641.450.000	APBD	
		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	1	25	25	10.209.123.000	APBD	
		1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	25	25	10.209.263.000	APBD	
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	6	25	25	11.405.470.000	APBD	
		1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	25	25	11.700.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	

		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	185	25	25	47.976.707.000	APBD	
		1.01.02.1.01.32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-	3	25	25	10.500.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.33	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	35	25	25	14.800.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	1	25	25	22.320.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-	1	25	25	10.800.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	40	25	25	17.900.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	44	25	26	22.485.000.000	APBD	

		1.01.02.1.01.42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		Paket	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-	24	25	26	10.735.612.000	APBD	
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas		Sekolah	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	18	25	26	29.033.756.250	APBD	
		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan		Paket	-	24	25	26	10.320.784.500	APBD	

			Sekolah Menengah Atas									
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Paket	-	24	25	26	10.375.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	24	586	586	1.483.476.300	APBD	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	840.611.150.000	APBD	
		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	3.864.250.996	APBD	
TOTAL											**1.530.647.768.046**	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menenga	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-		1	1	3.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-		20	20	8.000.000.000	APBD	

	h Kejuruan	1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	1	20	20	9.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa		Ruang	-	26	20	20	37.410.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium		Ruang	-	16	20	20	13.835.680.000	APBD	
		1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	20	20	8.155.397.000	APBD	
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	8	20	20	10.957.179.000	APBD	
		1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	20	20	9.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	20	8.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	41	20	20	14.700.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.11	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	11	20	20	10.150.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-	1	20	20	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	20	8.000.000.000	APBD	

		1.01.02.1.02.14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-	1	20	20	8.150.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	21	24	24	14.988.476.000	APBD	
		1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Ruang	-	2	24	24	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	24	24	9.800.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.22	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-	1	24	24	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	68	24	24	21.825.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.25	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	

		1.01.02.1.02.26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	1	24	24	9.700.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	2	24	24	13.879.800.000	APBD	
		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	14	24	24	12.050.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	84	24	24	60.401.299.000	APBD	
		1.01.02.1.02.34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	

			Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah									
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		Sekolah	-	24	24	24	9.717.050.000	APBD	
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	24	24	24	23.012.928.000	APBD	
		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	1	24	24	9.718.550.000	APBD	
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan		Paket	-	11	24	24	11.730.000.000	APBD	

			Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
		1.01.02.1.02.44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	1.012.750.000	APBD	
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	495.976.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	3.354.249.001	APBD	
TOTAL											**1.036.924.358.001**	
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.												
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	orang, kab/kota	-	50 Orang, 24 Kab/Kota	50 Orang, 24 Kab/Kota	50 Orang, 24 Kab/Kota	600.000.000	APBD	Dukcapil
		2.12.03.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	orang, kab/kota	-	50 Orang, 24 Kab/Kota	50 Orang, 24	50 Orang, 24	1.207.500.000	APBD	Dukcapil

								Kab/Kota	Kab/Kota			
TOTAL											**1.807.500.000**	
2.12.03.1,03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.1,03.01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	kab/kota, kab/kota	-	24 Kab/Kota, 6 Kab/Kota	24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	24 Kab/Kota, 24 Kab/Kota	887.500.000	APBD	Dukcapil
TOTAL											**887.500.000**	
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal,dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.												
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB) yang diadakan	Paket	-	1 Paket	1 Paket	0 Paket	1.600.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
TOTAL											**1.600.000.000**	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis	Jumlah Ambulans Laut siap siaga	Unit	6 Unit	6 unit	7 unit	8 unit	1.500.000.000	APBD	Dinas Kesehatan

	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana									
				Jumlah peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan	Orang	-	30 Orang	30 Orang	30 Orang	60.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan	Kab/Kota	-	24 Kab/kota	24 Kab/kota	24 Kab/kota	120.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kab/Kota sasaran Bimtek dan Supervisi Supportif Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan	Kab/Kota	-	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	150.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Pengelola Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelolaan Program	Orang	-	24 Orang	24 Orang	24 Orang	120.000.000	APBD	Dinas Kesehatan

				Bencana/Krisis Kesehatan Kab/Kota								
				Jumlah paket penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Krisis Kesehatan	Paket	-	2 paket	2 paket	2 paket	1.010.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang dipelihara (Bencana dan KLB)	Unit	-	36 unit	43 unit	57 unit	1.049.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Terlaksananya Pelatihan BTCLS (Basic Trauma and Cardiac Life Support)	Angkatan	-	4 angkatan	4 angkatan	4 angkatan	1.100.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Medis dan Paramedis	Angkatan	-	4 angkatan	4 angkatan	5 angkatan	1.150.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Terlaksananya Sosialisasi Krisis Kesehatan	Kali	-	2 kali	2 kali	2 kali	850.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah hari pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemantauan	Hari	-	365 hari	365 hari	365 hari	600.000.000	APBD	Dinas Kesehatan

				kejadian krisis kesehatan								
				Jumlah Kabupaten/Kota yang diberi penguatan dan fasilitasi Public Safety Centre (PSC)	Kab/Kota	-	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	450.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Ambulans Laut yang diadakan	Unit	6 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	4.500.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Ambulans Laut yang dipelihara	Unit	6 Unit	6 unit	7 unit	8 unit	700.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Ambulans Darat yang diadakan	Unit	12 unit	3 unit	3 unit	3 unit	4.000.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kendaraan Operasional Roda Empat (R-4) yang diadakan (Bencana/Krisis Kesehatan)	Unit	-	1 unit	0 unit	1 unit	950.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Perahu Karet yang diadakan (Bencana/Krisis Kesehatan)	Unit	-	2 unit	5 unit	5 unit	1.050.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah pemakaian bahan bakar untuk pemanasan dan operasional (Bencana/Krisis Kesehatan)	Liter	-	5000 liter	10000 liter	12500 liter	275.000.000	APBD	Dinas Kesehatan

				Jumlah kejadian Krisis Kesehatan yang ditangani	Kejadian	-	40 kejadian	40 kejadian	40 kejadian	1.305.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Aplikasi Sistem Panggilan Darurat Terpadu (SPDT) yang tersedia	Paket	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.000.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Mobil Ambulans BSB yang diadakan	Unit	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	7.000.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
										0		
		1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Jumlah KLB Penyakit Menular yang tertangani	Kejadian	-	15 Kejadian	15 Kejadian	15 Kejadian	850.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Tertanganinya Pandemi Kesehatan (Covid-19 dan Pandemi Kesehatan lainnya)	%	-	100%	100%	100%	75.786.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
										0		
		1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Kegawatdaruratan BSB	Orang	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	255.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Klinik BSB	Orang	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	255.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Mobiler BSB	Paket	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	300.000.000	APBD	Dinas Kesehatan

TOTAL											**116.385.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah												
(1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA)												
(1.05.03.1.04)	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	(1.05.03.1.04.05)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi		kab/kota		-	8	8	503.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPBD PROV SULSEL
TOTAL											**503.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial												
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Kab/Kota		-	24	24	24	11.722.000.000	APBD	Dinas Sosial
		1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Kab/Kota		-	24	24	24	4.382.000.000	APBD	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial												
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang		-	150	150	150	2.897.000.000	APBD	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												

(1.05.03.1.02)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	(1.05.03.1.02.07)	Penanganan Pascabencana Provinsi		dokumen	-	5	5	5	45.260.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPBD PROV SULSEL
											45.260.000.000	
INDIKATOR SDGs: 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
(1.05.03.1.02)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	(1.05.03.1.02.01)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		Dokumen	-	1	-	-	6.740.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPBD PROV SULSEL
		(1.05.03.1.02.09)	Penyusunan Rencana Kontijensi			-	-	1	1	13.090.000.000		
TOTAL											**19.830.000.000**	
(1.05.03.1.01)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	(1.05.03.1.01.01)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi		Dokumen	-	-	1	-	5.900.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPBD PROV SULSEL
TOTAL										**2.828.940.694.603**		
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).												
(2.09.03 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat)												
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan	2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan	Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan

	Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Neraca Bahan Makanan (NBM)									
		2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Ketersediaan Pangan Lokal	%	0	20 %	20 %	20 %	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Distribusi Pangan Pokok	Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.	Jumlah Dokumen Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan/Frekwensi Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Serta Harga Pangan	Dokumen/Kali	0	4 Dokumen/6 Kali	4 Dokumen/6 Kali	4 Dokumen/6 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Pasar Mitra Tani Dengan Mitra Distributor/Pemasok Pangan	Dokumen	0	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
										-		
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Frekwesi Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi	Dokumen/Kali	0	1 Dokumen/2 Kali	1 Dokumen/2 Kali	1 Dokumen/2 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan

		2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Singkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi CPP Provinsi/Volume CPP Provinsi	Dokumen/Ton	0	1 Dokumen/5 Ton	1 Dokumen/10 Ton	1 Dokumen/15 Ton	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Dengan Bulok Dalam Pemeliharaan Cadangan Pangan Provinsi	Dokumen/Kali	0	1 Dokumen/2 Kali	1 Dokumen/2 Kali	1 Dokumen/2 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
										-		
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaiyan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Frekwesi Promosi Konsumsi Pangan Lokal	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Frekwesi Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Frekwesi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Pangan	Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN / Indikator Outputnya: 1. Produksi Daging 2. Produksi Telur 3. Produksi Susu**												
3.27.02.1.04	Kegiatan : Peningkata	3.27.02.1.04.02	Sub Kegiatan : Pengembangan	Penyediaan Ternak Ayam Petelur	Ekor	10.615	21600	70000	75000		APBD	Dinas Peterna

	n Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyediaan Ternak Ayam Lokal/Kampung	Ekor	30.038	3975	65000	75000	62.883.000.000		kan dan Kesehatan Hewan
				Jumlah Penyediaan Ternak Itik	Ekor	4.780	41258	55000	60000			
				Jumlah Penyediaan Ternak Sapi Bali Bibit Betina	Ekor	1.369	1484	3000	3500			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kerbau Betina	Ekor	113.100	25	30	35			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kambing PE Betina	Ekor	755.588	411	650	700			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kambing PE Jantan	Ekor		57	80	85			
				Jumlah Penyediaan Ternak Babi Betina	Ekor	821.508	120	130	140			
				Mandiri Bibit (Pengembangan Straw Sapi bali, kerbau dan kuda) Produksi Semen Beku (Strow)	Straw	65.000		65000	70000			
				Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	Ekor	9000		56	65			
TOTAL											**62.883.000.000**	
3.27.02.1.05	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	3.27.02.1.05.01	Sub Kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Perbibitan Berbasis Teknologi Emrio Transfer dan IB Bantengcross	Ekor	0	0	60	70	9.815.000.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Jumlah Emrio Sapi Wagyu	Dosis	0	20	30	60			
				Jumlah Betina Produktif yang diselamatkan di RPH-R	Ekor	0	0	100	100			

	Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi											
TOTAL											**9.815.000.000**	
3.27.02.1.07	Kegiatan :Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.27.02.1.07.01	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Ternak Sapi Perah	Ekor	0	0	10	10	250.000.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Jumlah PengadaanTernak Kuda	Ekor	0	0	10	10			
											250.000.000	
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita												
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pendamping / Operator		-	50	50	50	1.402	APBD	Dinas Sosial
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaiyan Target Konsumsi Pangan Perkapita/	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Frekwesi Promosi Konsumsi Pangan Lokal	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan

	Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Frekwesi Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Frekwesi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Pangan	Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
(2.09.05 Pengawasan Keamanan Pangan)												
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Frekwensi Pengawasan Keamanan PSAT/Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Kali/Dokumen	12 kali/12 dok	12 Kali/12 Dok	12 Kali/12 Dok	12 Kali/12 Dok	2.193.870.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi PSAT	Sertifikat	28 Sertifikat	25 Sertifikat	25 Sertifikat	25 Sertifikat	1.200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nomor Registrasi PSAT	Nomor Registr	29 No. Register	15 No. Register	15 No. Register	15 No. Register	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi PSAT	Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan

		2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	Paket	0	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
TOTAL											**7.443.870.000**	
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.01.09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hasil Pertama Kelahiran (HPK)		Kab	-	40	60	60	345.000.000	APBD	
		2.14.04.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK		Kab/Kota	-	6	6	6	345.000.000	APBD	
TOTAL											**690.000.000**	
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemesyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga	2.14.04.1.02.04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Keluarga Melalui Bina Keluarga(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia(BKL)), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera		Orang	-	96	96	96	345.000.000	APBD	

	Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		(UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga									
TOTAL											**345.000.000**	
3.25.06 PROGRAM PENGOILAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN												
3.25.06.1.02	Kegiatan; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.01	Sub Kegiatan; Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil KP Konsumsi dan Non Konsumsi	jenis produk inovasi	-	1	1	1	195.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
TOTAL											**195.000.000**	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN / Indikator Outputnya: 1. Produksi Daging 2. Produksi Telur 3. Produksi Susu**												
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Ternak Ayam Petelur	Ekor	10.615	21600	70000	75000	Telah di idem di indikator 2.1.1	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Jumlah Penyediaan Ternak Ayam Lokal/Kampung	Ekor	30.038	3975	65000	75000			
				Jumlah Penyediaan Ternak Itik	Ekor	4.780	41258	55000	60000			
				Jumlah Penyediaan Ternak Sapi Bali Bibit Betina	Ekor	1.369	1484	3000	3500			

	Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Indikator Output : 1. Sapi Potong 2. Sapi Perah 3. Kerbau 4. Kuda 5. Ternak Kecil 6. Ternak Unggas			Jumlah Penyediaan Ternak Kerbau Betina	Ekor	113.100	25	30	35			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kambing PE Betina	Ekor	755.588	411	650	700			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kambing PE Jantan	Ekor		57	80	85			
				Jumlah Penyediaan Ternak Babi Betina	Ekor	821.508	120	130	140			
INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.												
(2.09.04 Penanganan Kerawanan Pangan)												
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.01	Penusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Singkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Frekwensi Koordinasi dan Singkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu)	Jumlah Cadangan Pangan Beras Yang Disalurkan	Ton	0	10 Ton	10 Ton	10 Ton	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan

			Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
INDIKATOR SDGs: 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.												
(2.09.03 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat)												
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaiyan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Frekwesi Promosi Konsumsi Pangan Lokal	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Frekwesi Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Frekwesi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Pangan	Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
INDIKATOR SDGs: 2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.												
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-						
			Pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil GERAKAN	Jumlah Tenaga pendamping gizi dalam rangka pendampingan pemanfaatan paket intrevensi gizi		-	85 orang	240 orang	240 orang	13.268.963.500		

	daerah Provinsi		MASYARAKAT MENCEGAH STUNTING (GAMMARA'NA)	jumlah peserta pelatihan pendamping gizi di kabupaten lokus		-	100 orang	255 orang	255 orang			
				jumlah peserta pertemuan evaluasi tenaga pendamping gizi tingkat kabupaten		-	70 orang	85 orang	85 orang			
				jumlah peserta pertemuan evaluasi tenaga pendamping gizi tingkat provinsi		-	60 Orang	80 orang	80 orang			
				pengadaan multi vitamin bagi balita		-	1700 Orang	1800 Orang	1900 Orang			
				pengadaan suplemen makanan bagi ibu hamil vit K		-	1030 orang	1100 Orang	1200 Orang			
				pengadaan suplemen makanan bagi ibu hamil susu soya		-	4744 orang	5000 orang	5100 orang			
TOTAL											**13.268.963.500**	
1.01.04 rogram Pendidik dan Tenaga Kependidikan												
01.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Provinsi											

		01.01.04.1.01	*Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang didistribusikan Pada Satuan Pendidikan		-	16000 orang	1115 orang	1115 orang	5.496.683.636		
TOTAL											**5.496.683.636**	
2. 09. 03 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat												
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari		**-**	61 Kelompok pada 8 Kab/Kota	60 Klpk pada 12 Kab/Kota	70 Klpk pada 24 Kab/Kota	**18.795.000.000**		
				Jumlah Anggota Kelompok Penerima P2L		**-**	1.220 - 1.830 KK	1.830 KK	2.100 KK			
TOTAL											**18.795.000.000**	
3. 25. 6 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan												
3. 25. 006. 1.02	Kegiatan; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	3. 25. 006. 1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil KP Konsumsi dan Non Konsumsi	Jenis	**-**	IDEM	IDEM	IDEM	**-**		

	Menengah dan Besar											
TOTAL											**#REF!**	
Pengembangan UKM												
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha		-	3000 Orang	3300	3630	8.410.248.222		
				Jumlah UMKM yang terfasilitasi Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM		-	1000 orang	1100	1210	-		
TOTAL											**8.410.248.222**	
Peningkatan Kualitas Keluarga												
2.08.04.1.01	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan terkait Peningkatan Kualitas Keluarga		-	24 Kab/kota	24 Kab/kota	24 Kab/kota	270.000.000		
		2.08.04.1.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Tenaga Penyedia Layanan terlatih		-	80 orang	80 orang	80 orang	210.000.000		

			Kewenangan Provinsi									
		2.08.04.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga		-	2 Unit Layanan	2 Unit Layanan	2 Unit Layanan	427.470.300		
				Jumlah kader organisasi/pemerintah dan non pemerintah yang difasilitasi edukasi pengasuhan berbasis hak anak		-	100 orang	100 orang	100 orang	-		
		2.08.04.1.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jmh Jejaring Penyedia Layanan Peningkatna kUalitas Kel.		-	24 kab/kota	24 kab/kota	24 kab/kota	200.000.000		
TOTAL											**1.107.470.300**	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)												
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang memiliki kebijakan pelembagaan PHA yang aktif		-	kab/kota	kab/kota	kab/kota	615.073.140		
				Jumlah kab/kota yang mendapatkan pendampingani PHPA menuju KLA		-	kab/kota	kab/kota	kab/kota	-		
		2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah APSAI, Media Peduli Anak yang terbentuk		-	Lembaga	Lembaga	Lembaga	676.000.000		
				Jumlah lembaga yang mengikuti pengembangan layanan informasi , Komunikasi dan		-	Lembaga	Lembaga	Lembaga	-		

				edukasi (KIE) pencegahan kekerasan anak								
TOTAL											**1.291.073.140**	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.02	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Anggota Gugus Tugas yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Penyelengggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)		-	GT KLA	GT KLA	GT KLA	463.667.812		
				Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi ramah anak		-	24 Kab/kota	24 Kab/kota	24 Kab/kota	-		
		2.08.06.1.02…….	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama sinergitas antar lembaga dalam penyediaan layanan pemenuhan hak anak tingkat provinsi dan lintas kab/kota		-	Dokumen	Dokumen	Dokumen	250.000.000		
TOTAL											**713.667.812**	
Program Perlindungan Khusus Anak												
2.08.07.1.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang	2.08.07.1.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	jmh Kab/kota yang telah memiliki kebijakan Pencegahan kekerasan terhadap		-	kab/kota yang belum mempunya PERDA SPA/KLA	kab/kota yang belum mempunya PERDA	kab/kota yang belum mempunya	210.000.000		

	Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	anak **(PERDA PA/KLA**)				SPA/KLA	PERDA SPA/KLA			
				jmh kelompok anak/forum anak yang terlatih sebagai agen perubahan (Pelapor dan Pelopor/2P)		-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	-		
TOTAL											**210.000.000**	
2.08.07.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	2.08.07.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus(SLB, Lembaga Layanan Anak Berkebutuhan Khusus, Sekolah Inklusi) yg dikembangkan		-	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	297.993.600		
		2.08.07.1.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang mengembangan PATBM ber basis desa/kelurahan		-	100 orang	100 orang	100 orang	595.802.412		
				Jmh fasilitator PATBM kab/kota berbasis Desa/Kelurahan		-	100 orang	100 orang	100 orang	-		
		2.08.07.1.02.03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitator dan Motivator terlatih dalam pengembangan KIE		-	Fasilitator dan Motivator	Fasilitator dan Motivator	Fasilitator dan Motivator	698.669.300		
				Jumlah Kab/Kota yang memiliki layanan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)		-	Kab/kota	Kab/kota	Kab/kota	-		

-											**1.592.465.312**	
2.08.07.1.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	2.08.07.1.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan yang melaksanakan layanan anak yg membuthkan perlindungna Khusus (kampanye perkawinan anak)		-	kab/kota	kab/kota	kab/kota	426.000.000		
Program Pembinaan Keluarga Berencana												
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian		Persentase kab/kota yang mengembangkan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal			-						
		2.14.03.1.01.04	Pelaksanaan Advokasi, dan KIE Program KKBPK melalui Mitra Kerja	Jumlah lembaga/ormas mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam advokasi dan KIE program KKBPK		-	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	438.204.300		

	Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.1.01.08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan strategi percontohan promosi dan konseling kespro		-	4 kab/kota	4 kab/kota	6 kab/kota	330.000.000		
TOTAL											**768.204.300**	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera												
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan IPK daerah			-						
		2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan pengasuhan 1000 HPK		-	-	4 kab/kota	6 kab/kota	265.000.000		
				Jumlah fasilitator pengasuhan 1000 HPK yang terlatih		-	-	40 orang	60 orang	200.000.000		
		2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kab/kota yg difasilitasi dlm perumusan strategi IPK		-	-	4 Kab/Kota	6 kab/kota	205.000.000		
TOTAL											**670.000.000**	
Program Kawasan Pemukiman												
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di		Sub Kegiatan Penyadaran Publik pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Aparat dan KSM yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi			200 orang	200 orang	200 orang	2.407.779.000		perkimtan

	Bawah 15 (Lima Belas) Ha											
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kembali permukiman kumuh			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	991.582.608		
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Pembangunan Perumahan/Peremajaan Permukimankumuh dengan luas 10(sepuluh)ha sampai dengan dibawah 15 ha			9 Kawasan	9 Kawasan	9 Kawasan	22.496.576.144		
TOTAL											**25.895.937.752**	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik												
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi /		Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pemanfaatan Media Komunikasi Publik		-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.387.000.000		diskominfo

			Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Advetorial		-	7 Advetorial	14 Advetorial	21 Advetorial	240.750.000		
TOTAL											**6.627.750.000**	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral												
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi/		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Sumber	Jumlah Laporan Pengumpulan Pengelolaan Data Statistik Sektoral		-	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	216.292.300		
3.27.02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian												
	Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		1. Pengawasan mutu,penyediaan dan peredaran benih/bibit hortikutura	Jumlah kelompok tani penerima bibit buah			6	35	37	3.239.214.150		
				Jumlah kelompok tani penerima bibit sayuran			2	25	27	2.699.681		
				Frekuensi Gelar Pangan (kali)			2	5	5	2.150.000.000		
			2. Pengawasan mutu,penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman pangan	Jumlah kelompok tani penerima bibit jagung			343	70	70	7.813.000.000		
				Jumlah kelompok tani penerima bibit padi			-	-	80	226.012.500		
				Jumlah kelompok tani penerima bibit kacang-kacangan			-	-	16	968.625.000		
TOTAL											**14.399.551.331**	
3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian												
	Pengembangan Penerapan			Jumlah peserta bimtek pengolahan keju		-	50 orang	100 orang	100 orang	518.600.000	**APBD**	

	Penyuluhan Pertanian			Jumlah peserta bimtek pengolahan telur asin								
TOTAL											**518.600.000**	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat												
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			Jumlah kader Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		-	120 kader Linmas (3 angk)	Is	Is	578.962.500		
4.01.4.01.04 Program Kesejahteraan Rakyat												
4.01.04.1.02	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.04.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan		-	1	1	1	199.350.400		
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Dokumen	0	0	2	2	5.000.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Cakupan pembinaan pengelolaan SPAM	Kab/Kota	24	24	24	24	709.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan

												Tata Ruang
TOTAL											**5.709.000.000**	
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
1.03.03.1.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	0	0	0	2	300.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan pembinaan SDM dan kelembagaan pengelola air limbah domestik	Kab/Kota	24	24	24	24	561.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TOTAL											**861.000.000**	
(2.09.03 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat)												
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaiyan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Frekwesi Promosi Konsumsi Pangan Lokal	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Frekwesi Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan

		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Frekwesi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Pangan	Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.01.09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hasil Pertama Kelahiran (HPK)		Kab	-	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	APBD	
		2.14.04.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK		Kab/Kota	-	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	APBD	
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemesyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan	2.14.04.1.02.04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Keluarga Melalui Bina Keluarga(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia(BKL)), Unit Peningkatan Pendapatan		Orang	-	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	APBD	

	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga									
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN / Indikator Outputnya: 1. Produksi Daging 2. Produksi Telur 3. Produksi Susu**												
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Indikator Output : 1. Sapi Potong 2. Sapi Perah 3. Kerbau 4. Kuda 5. Ternak Kecil 6. Ternak Unggas	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Ternak Ayam Petelur	Ekor	10.615	21600	70000	75000	Telah di idem di indikator 2.1.1	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Jumlah Penyediaan Ternak Ayam Lokal/Kampung	Ekor	30.038	3975	65000	75000			
				Jumlah Penyediaan Ternak Itik dara	Ekor	4.780	41258	55000	60000			
				Jumlah Penyediaan Ternak Sapi Bali Bibit Betina	Ekor	1.369	1484	3000	3500			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kerbau Betina	Ekor	113.100	25	30	35			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kambing PE Betina	Ekor	755.588	411	650	700			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kambing PE Jantan	Ekor		57	80	85			
				Jumlah Penyediaan Ternak Babi Betina	Ekor	821.508	120	130	140			
INDIKATOR SDGs: 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.												
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												

1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Dokumen	0	0	2	2	IDEM PADA INDIKATOR 2.2.1	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Cakupan pembinaan pengelolaan SPAM	Kab/Kota	24	24	24	24	IDEM PADA INDIKATOR 2.2.1	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TOTAL											**-**	
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
1.03.03.1.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	0	0	0	2	IDEM PADA INDIKATOR 2.2.1	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan pembinaan SDM dan kelembagaan pengelola air limbah domestik	Kab/Kota	24	24	24	24	IDEM PADA INDIKATOR 2.2.1	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TOTAL												
(2.09.03 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat)												
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaiyan Target Konsumsi Pangan Perkapita/	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Frekwesi Promosi Konsumsi Pangan Lokal	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan

	Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Frekwesi Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Frekwesi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Pangan	Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN / Indikator Outputnya: 1. Produksi Daging 2. Produksi Telur 3. Produksi Susu**												
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Indikator Output : 1. Sapi Potong 2. Sapi Perah 3. Kerbau 4. Kuda 5. Ternak Kecil 6.	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Ternak Ayam Petelur	Ekor	10.615	21600	70000	75000			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Jumlah Penyediaan Ternak Ayam Lokal/Kampung	Ekor	30.038	3975	65000	75000			
				Jumlah Penyediaan Ternak Itik	Ekor	4.780	41258	55000	60000			
				Jumlah Penyediaan Ternak Sapi Bali Bibit Betina	Ekor	1.369	1484	3000	3500			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kerbau Betina	Ekor	113.100	25	30	35	Telah di idem di indikator 2.1.1	APBD	
				Jumlah Penyediaan Ternak Kambing PE Betina	Ekor	755.588	411	650	700			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kambing PE Jantan	Ekor		57	80	85			
				Jumlah Penyediaan Ternak Babi Betina	Ekor	821.508	120	130	140			

	Ternak Unggas											
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.												
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pendamping / Operator		-	50	50	50	Telah di Idem dengan Indikator 2.1.1	APBD	Dinas Sosial
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.01.09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hasil Pertama Kelahiran (HPK)		Kab	-	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	APBD	
		2.14.04.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK		Kab/Kota	-	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	APBD	
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemesyarakatan	2.14.04.1.02.04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Keluarga Melalui Bina Keluarga(BKB),		Orang	-	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	sama dengan 2.1.1.a	APBD	

	Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia(BKL)), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga									
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN / Indikator Outputnya: 1. Produksi Daging 2. Produksi Telur 3. Produksi Susu**												
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Indikator Output : 1. Sapi Potong 2. Sapi Perah 3. Kerbau 4. Kuda 5. Ternak	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Ternak Ayam Petelur	Ekor	10.615	21600	70000	75000			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Jumlah Penyediaan Ternak Ayam Lokal/Kampung	Ekor	30.038	3975	65000	75000			
				Jumlah Penyediaan Ternak Itik	Ekor	4.780	41258	55000	60000	Telah di idem di indikator 2.1.1	APBD	
				Jumlah Penyediaan Ternak Sapi Bali Bibit Betina	Ekor	1.369	1484	3000	3500			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kerbau Betina	Ekor	113.100	25	30	35			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kambing PE Betina	Ekor	755.588	411	650	700			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kambing PE Jantan	Ekor		57	80	85			
				Jumlah Penyediaan Ternak Babi Betina	Ekor	821.508	120	130	140			

	Kecil 6. Ternak Unggas											
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.												
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Intervensi Micronutrient pada Anak Umur 6-24 Bulan	Orang	-	4.878 Orang	35.000 Orang	35.000 Orang	2.100.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah Intervensi Gizi pada Ibu Hamil	Orang	-	5.642 Orang	26.810 Orang	26.810 Orang	5.000.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi Gizi pada Anak yang terlaksana	Kab/Kota	-	2 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	1.150.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
				Jumlah pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi Gizi pada Ibu Hamil yang terlaksana	Kab/Kota	-	2 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	1.150.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
TOTAL											**9.400.000.000**	
KODE DAN NAMA PROGRAM (2.09.03 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat)												
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaiyan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Frekwesi Promosi Konsumsi Pangan Lokal	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi	Frekwesi Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan

	Gizi Melalui Media Provinsi		Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)									
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Frekwesi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Pangan	Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.												
KODE DAN NAMA PROGRAM (2.09.03 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat)												
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Ketersediaan Pangan Lokal	%	0	20 %	20 %	20 %	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
		2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Distribusi Pangan Pokok	Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.	Jumlah Dokumen Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan/Frekwensi Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Serta Harga Pangan	Dokumen/Kali	0	4 Dokumen/6 Kali	4 Dokumen/6 Kali	4 Dokumen/6 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Pasar Mitra Tani Dengan Mitra	Dokumen	0	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan

				Distributor/Pemasok Pangan								
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Frekwesi Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi	Dokumen/Kali	0	1 Dokumen/2 Kali	1 Dokumen/2 Kali	1 Dokumen/2 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
		2.09.03.1.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Singkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi CPP Provinsi/Volume CPP Provinsi	Dokumen/Ton	0	1 Dokumen/5 Ton	1 Dokumen/10 Ton	1 Dokumen/15 Ton	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
		2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Dengan Bulok Dalam Pemeliharaan Cadangan Pangan Provinsi	Dokumen/Kali	0	1 Dokumen/2 Kali	1 Dokumen/2 Kali	1 Dokumen/2 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaiyan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Frekwesi Promosi Konsumsi Pangan Lokal	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Frekwesi Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan	Kali	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan

		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Frekwesi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Pangan	Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Telah di teg pada Indikator 1.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Ketahanan Pangan
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN / Indikator Outputnya: 1. Produksi Daging 2. Produksi Telur 3. Produksi Susu**												
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Indikator Output : 1. Sapi Potong 2. Sapi Perah 3. Kerbau 4. Kuda 5. Ternak Kecil 6. Ternak Unggas	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Ternak Ayam Petelur	Ekor	10.615	21600	70000	75000			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Jumlah Penyediaan Ternak Ayam Lokal/Kampung	Ekor	30.038	3975	65000	75000			
				Jumlah Penyediaan Ternak Itik	Ekor	4.780	41258	55000	60000			
				Jumlah Penyediaan Ternak Sapi Bali Bibit Betina	Ekor	1.369	1484	3000	3500			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kerbau Betina	Ekor	113.100	25	30	35	Telah di idem di indikator 2.1.1	APBD	
				Jumlah Penyediaan Ternak Kambing PE Betina	Ekor	755.588	411	650	700			
				Jumlah Penyediaan Ternak Kambing PE Jantan	Ekor		57	80	85			
				Jumlah Penyediaan Ternak Babi Betina	Ekor	821.508	120	130	140			
TOTAL										**198.778.091.907**		
TUJUAN 4 : Pendidikan Berkualitas												
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B												
KODE DAN NAMA PROGRAM												

1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.04.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
		1.01.04.1.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-	5	2	2	16.500.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Ruang	-	8	20	21	24.789.306.000	APBD	
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	3	20	21	9.318.448.000	APBD	
		1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	2	20	21	9.202.904.000	APBD	
		1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	4	20	21	10.224.514.000	APBD	
		1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	5	20	21	10.645.591.000	APBD	

		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	9	20	21	11.337.029.000	APBD	
		1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	3	20	21	9.183.171.000	APBD	
		1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	10	20	21	11.245.714.000	APBD	
		1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	20	21	10.455.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	66	20	21	24.968.486.000	APBD	
		1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	4	20	21	9.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	

		1.01.02.1.01.18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	55	25	25	40.565.503.000	APBD	
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	32	25	25	16.908.932.000	APBD	
		1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	9	25	25	12.653.151.000	APBD	
		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	8	25	25	13.790.099.000	APBD	
		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	8	25	25	12.088.877.000	APBD	
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	4	25	25	10.641.450.000	APBD	
		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	1	25	25	10.209.123.000	APBD	
		1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	

			Ruang Laboratorium IPA									
		1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	25	25	10.209.263.000	APBD	
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	6	25	25	11.405.470.000	APBD	
		1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	25	25	11.700.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	185	25	25	47.976.707.000	APBD	
		1.01.02.1.01.32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-	3	25	25	10.500.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.33	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	35	25	25	14.800.000.000	APBD	

		1.01.02.1.01.37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	1	25	25	22.320.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-	1	25	25	10.800.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	40	25	25	17.900.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	44	25	26	22.485.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		Paket	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		25	26	10.200.000.000	APBD	

		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-	24	25	26	10.735.612.000	APBD	
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas		Sekolah	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	18	25	26	29.033.756.250	APBD	
		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Paket	-	24	25	26	10.320.784.500	APBD	
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Paket	-	24	25	26	10.375.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	24	586	586	1.483.476.300	APBD	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	840.611.150.000	APBD	

		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	3.864.250.996	APBD	
TOTAL											**1.530.647.768.046**	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-		1	1	3.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-		20	20	8.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	1	20	20	9.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa		Ruang	-	26	20	20	37.410.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium		Ruang	-	16	20	20	13.835.680.000	APBD	
		1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	20	20	8.155.397.000	APBD	
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	8	20	20	10.957.179.000	APBD	
		1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	20	20	9.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	20	8.000.000.000	APBD	

		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	41	20	20	14.700.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.11	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	11	20	20	10.150.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-	1	20	20	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	20	8.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-	1	20	20	8.150.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	21	24	24	14.988.476.000	APBD	
		1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Ruang	-	2	24	24	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	

		1.01.02.1.02.21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	24	24	9.800.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.22	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-	1	24	24	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	68	24	24	21.825.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.25	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	1	24	24	9.700.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	2	24	24	13.879.800.000	APBD	
		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	14	24	24	12.050.000.000	APBD	

		1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	84	24	24	60.401.299.000	APBD	
		1.01.02.1.02.34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		Sekolah	-	24	24	24	9.717.050.000	APBD	
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	24	24	24	23.012.928.000	APBD	

		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	1	24	24	9.718.550.000	APBD	
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	11	24	24	11.730.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi		Paket	-		24	24	9.600.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	1.012.750.000	APBD	
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	495.976.000.000	APBD	
		1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	3.354.249.001	APBD	

TOTAL											**1.036.924.358.001**	
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-	5	2	2	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Ruang	-	8	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	3	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	2	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	4	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	5	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	9	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	3	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	10	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	66	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	4	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	55	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	32	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	9	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	8	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	8	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	4	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	6	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	185	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-	3	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.33	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	35	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	40	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	44	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala		Ruang	-		25	26	Idem pada	APBD	

			Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah							indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas		Sekolah	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	18	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

			Sekolah Menengah Atas									
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	24	586	586	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
	TOTAL											
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-		1	1	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa		Ruang	-	26	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium		Ruang	-	16	20	20	Idem pada	APBD	

										indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	8	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	41	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.11	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	11	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	21	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Ruang	-	2	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.22	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	68	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-		24	24	Idem pada	APBD	

										indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.02.25	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	2	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	14	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	84	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		Sekolah	-	24	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	24	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	11	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

						-				Idem pada indikator 4.1.1 (f)		
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Unit	-		1	1	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	7	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.07	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.09	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-		20	20	Idem pada	APBD	

										indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.12	Pembangunan Ruang Laboratorium		Ruang	-	4	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas		Ruang	-	6	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)		Ruang	-	6	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	4	22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	2	22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	1	22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.23	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	11	22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.26	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah,		Ruang	-		22	22	Idem pada	APBD	

			Guru, Penjaga Sekolah							indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.03.28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.03.36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	4	22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.03.45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus		Sekolah	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		Sekolah	-	86	86	86	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah		Sekolah	-	86	86	86	Idem pada	APBD	

			Pendidikan Khusus							indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		Sekolah	-	86	86	86	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
INDIKATOR SDGs: 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-	5	2	2	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Ruang	-	8	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	3	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	2	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	4	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	5	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang		Ruang	-	9	20	21	Idem pada	APBD	

			Laboratorium Komputer							indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	3	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	10	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	66	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	4	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	55	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	32	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	9	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	8	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	8	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	4	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	6	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	185	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-	3	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.33	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	35	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	40	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	44	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana,		Paket	-		25	26	Idem pada	APBD	

			Prasarana dan Utilitas Sekolah							indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.01.44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas		Sekolah	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	18	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	24	586	586	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-		1	1	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa		Ruang	-	26	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium		Ruang	-	16	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	8	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	41	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.11	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	11	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	21	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Ruang	-	2	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.22	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana,		Paket	-	68	24	24	Idem pada	APBD	

			Prasarana dan Utilitas Sekolah							indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.02.24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.25	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	2	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	14	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	84	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		Sekolah	-	24	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	24	24	24	Idem pada	APBD	

										indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	11	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

			Sekolah Menengah Kejuruan									
INDIKATOR SDGs: 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah		Paket	-	1	1	1	1.641.396.250,00		
		1.01.03.1.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah		Paket	-		1	1	1.150.000.000,00		
		1.01.03.1.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah		Paket	-		1029	1029	1.215.950.000,00		
		1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		Paket	-	1	1	1	1.452.927.250,00		
TOTAL											**5.460.273.500,00**	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.01.03.1.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus		Paket	-		86	86	989.000.000,00		
		1.01.03.1.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus		Paket	-		86	86	645.000.000,00		

		1.01.03.1.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus		Paket	-		86	86	151.638.296,00		
		1.01.03.1.02.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		Paket	-		86	86	989.000.000,00		
TOTAL											**2.774.638.296,00**	
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2. 23. 02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengungjung Perpustakaan	Jumlah Orang	-	631.801.000,00	500.000.000	500.000.000	1.632.000.000	APBD	DISPUSARSIP
INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-	5	2	2	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Ruang	-	8	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	3	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	2	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	4	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	5	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	9	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	3	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	10	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana,		Paket	-	66	20	21	Idem pada	APBD	

			Prasarana dan Utilitas Sekolah							indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	4	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	55	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	32	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	9	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	8	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	8	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	4	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	6	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	185	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-	3	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.33	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	35	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	40	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan		Paket	-	44	25	26	Idem pada	APBD	

			Peraga Peserta Didik							indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.01.42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas		Sekolah	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	18	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	24	586	586	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			-						
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-		1	1	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

	Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa		Ruang	-	26	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium		Ruang	-	16	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	8	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	41	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.11	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	11	20	20	Idem pada	APBD	

										indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	21	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Ruang	-	2	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.22	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	68	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.25	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	2	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	14	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	84	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		Sekolah	-	24	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	24	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	11	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

			Menengah Kejuruan									
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Unit	-		1	1	3.000.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	7	20	20	10.150.430.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	1	20	20	8.209.680.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		20	20	8.000.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		20	20	8.000.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-		20	20	8.000.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.07	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	20	8.000.000.000,00	APBD	

		1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	1	20	20	8.200.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.09	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-		20	20	8.000.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-		20	20	8.000.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	20	8.000.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.12	Pembangunan Ruang Laboratorium		Ruang	-	4	20	20	9.119.920.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas		Ruang	-	6	20	20	9.466.450.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)		Ruang	-	6	20	20	9.466.450.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)		Ruang	-		20	20	8.000.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)		Ruang	-	1	20	20	8.260.500.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan		Ruang	-		20	20	8.000.000.000,00	APBD	

			Sosial untuk Tunalaras (E)									
		1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	4	22	22	9.600.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	2	22	22	9.200.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	1	22	22	9.000.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.23	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	11	22	22	11.032.756.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.26	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	

		1.01.02.1.03.28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	

		1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	4	22	22	9.085.400.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		Paket	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan		Sekolah	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	

			Pendidikan Khusus									
		1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		Paket	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		Paket	-		22	22	8.800.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		Sekolah	-	86	86	86	703.659.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		Sekolah	-	86	86	86	39.268.000.000,00	APBD	
		1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		Sekolah	-	86	86	86	744.294.000,00	APBD	

											472.907.539.000,00	
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun												
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-	5	2	2	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Ruang	-	8	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	3	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	2	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	4	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	5	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	9	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	3	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	10	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	66	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	4	20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	55	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	32	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	9	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	8	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	8	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	4	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	6	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	185	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-	3	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.33	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.01.35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	35	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	40	25	25	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	44	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala		Ruang	-		25	26	Idem pada	APBD	

			Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah							indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas		Sekolah	-		25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	18	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

			Sekolah Menengah Atas									
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	24	586	586	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-		1	1	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa		Ruang	-	26	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium		Ruang	-	16	20	20	Idem pada	APBD	

										indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	8	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	41	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.11	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	11	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	21	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Ruang	-	2	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.22	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	68	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-		24	24	Idem pada	APBD	

										indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.02.25	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	2	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	14	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	84	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		Sekolah	-	24	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	24	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	11	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Unit	-		1	1	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	7	20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.07	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.09	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-		20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	

		1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.12	Pembangunan Ruang Laboratorium		Ruang	-	4	20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas		Ruang	-	6	20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)		Ruang	-	6	20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	4	22	22	Idem pada	APBD	

										indikator 4.6.1 (a)		
		1.01.02.1.03.19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	2	22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	1	22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.23	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	11	22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.26	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah,		Ruang	-		22	22	Idem pada	APBD	

			Guru, Penjaga Sekolah							indikator 4.6.1 (a)		
		1.01.02.1.03.28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	

		1.01.02.1.03.36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	4	22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	

		1.01.02.1.03.45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus		Sekolah	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		Paket	-		22	22	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		Sekolah	-	86	86	86	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS		Sekolah	-	86	86	86	Idem pada	APBD	

			Sekolah Pendidikan Khusus							indikator 4.6.1 (a)		
		1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		Sekolah	-	86	86	86	Idem pada indikator 4.6.1 (a)	APBD	
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustkaan Sekolah yang dibina	Perpustakaan Sekolah	-	122.770.000,00			123.000.000	APBD	DISPUSARSIP
		2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengunjung perpustakaan	Orang	-	1.878.949.000,00	122.770.000	122.770.000	2.125.000.000	APBD	DISPUSARSIP
										-		
TOTAL											**2.248.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidika	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-	5	2	2	16.500.000.000	APBD	

	n Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Ruang	-	8	20	21	24.789.306.000	APBD	
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	3	20	21	9.318.448.000	APBD	
		1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	2	20	21	9.202.904.000	APBD	
		1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	4	20	21	10.224.514.000	APBD	
		1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	5	20	21	10.645.591.000	APBD	
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	9	20	21	11.337.029.000	APBD	
		1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	3	20	21	9.183.171.000	APBD	
		1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	10	20	21	11.245.714.000	APBD	
		1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	

		1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	20	21	10.455.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	66	20	21	24.968.486.000	APBD	
		1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	4	20	21	9.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		20	21	8.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	55	25	25	40.565.503.000	APBD	
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	32	25	25	16.908.932.000	APBD	
		1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	9	25	25	12.653.151.000	APBD	

		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	8	25	25	13.790.099.000	APBD	
		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	8	25	25	12.088.877.000	APBD	
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	4	25	25	10.641.450.000	APBD	
		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	1	25	25	10.209.123.000	APBD	
		1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	25	25	10.209.263.000	APBD	
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	6	25	25	11.405.470.000	APBD	
		1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	25	25	11.700.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	

		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	185	25	25	47.976.707.000	APBD	
		1.01.02.1.01.32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-	3	25	25	10.500.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.33	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	35	25	25	14.800.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		25	25	10.000.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	1	25	25	22.320.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-	1	25	25	10.800.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	40	25	25	17.900.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	44	25	26	22.485.000.000	APBD	

		1.01.02.1.01.42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		Paket	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-	24	25	26	10.735.612.000	APBD	
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas		Sekolah	-		25	26	10.200.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	18	25	26	29.033.756.250	APBD	
		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan		Paket	-	24	25	26	10.320.784.500	APBD	

			Sekolah Menengah Atas									
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Paket	-	24	25	26	10.375.000.000	APBD	
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	24	586	586	1.483.476.300	APBD	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	840.611.150.000	APBD	
		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	3.864.250.996	APBD	
TOTAL											**1.530.647.768.046**	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-		1	1	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa		Ruang	-	26	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium		Ruang	-	16	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	8	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	41	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.11	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	11	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-	1	20	20	Idem pada	APBD	

										indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.02.13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	21	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Ruang	-	2	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.22	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	68	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.25	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	2	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	14	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	84	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		Sekolah	-	24	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	24	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	11	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-	5	2	2	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Ruang	-	8	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	3	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	2	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	4	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	5	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	9	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	

		1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	3	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	10	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	66	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	4	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,		Ruang	-		20	21	Idem pada	APBD	

			Guru, Penjaga Sekolah							indikator 4.6.1 (b)		
		1.01.02.1.01.18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	55	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	32	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	9	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	8	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	8	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	4	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang		Ruang	-	1	25	25	Idem pada	APBD	

			Laboratorium Bahasa							indikator 4.6.1 (b)		
		1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	6	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	185	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-	3	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.33	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah,		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	

			Guru, Penjaga Sekolah									
		1.01.02.1.01.35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	35	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	40	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	44	25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	

		1.01.02.1.01.44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas		Sekolah	-		25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	18	25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	

			Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	24	586	586	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustkaan Sekolah yang dibina	Perpustakaan Sekolah	-	telah idem			telah diidem	APBD	DISPUSARSIP
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	2.23.01.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan	Jumlah Peserta dalam sosialisasi budaya baca dan literasi ditingkat pendidikan	Orang	-	100.850.000,00	-	-	101.000.000	APBD	DISPUSARSIP

			Pendidikan Khusus serta Masyarakat									
		2.23.01.1.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah pengunjung	orang	-	3.321.960.000,00	-	-	3.322.000.000	APBD	DISPUSARSIP
		2.23.01.1.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta Penerima Penghargaan gemar membaca	Orang	-	-	200.000.000	200.000.000	400.000.000	APBD	DISPUSARSIP
		2.23.01.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah buku dalam pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	exp	-	214.600.000,00	214.600.000	214.600.000	644.000.000	APBD	DISPUSARSIP
		2.23.01.1.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Orang dalam pemilihan Duta Baca tingkat daerah provinsi	Orang	-	49.820.000,00	49.820.000	49.820.000	150.000.000	APBD	DISPUSARSIP
TOTAL											**4.617.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik												**Dinas Pendidikan**
KODE DAN NAMA PROGRAM												
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga	1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan			-	16.000	1.115	1.115	43.250.005.000,00		

	Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Menengah dan Pendidikan Khusus									
		1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			-	16.000	1.115	1.115	9.803.567.200,00		
TOTAL											**53.053.572.200,00**	
TOTAL										**4.640.912.917.089**		
Tujuan 5 : KESETARAAN GENDER												
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Dokumen	-	2	2	2	470.690.000	APBD	

2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan,Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, sosial, Dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Orang	-	350	200	300	1.072.663.000	APBD	
TOTAL											**1.543.353.000**	
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/kota		Korban	-				965.110.000	APBD	

	dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.08.07.1.01	Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota	2.08.07.1.01.01	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Anak kewenangan Provinsi		Kab/Kota	-	9	9	9		APBD	
2.08..07.1.02	Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan	2.08.07.1.02.01	Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Provinsi		%	-		95%	95%	1.100.000.000	APBD	
		2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan Anak yang memerlukan		Dokumen	-		2	2	550.000.000	APBD	

	koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		perlindungan khusus kewenangan Provinsi									
2.08..07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penydia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenanaga Provinsi		Jenis	-	14	22	22	235.000.000	APBD	
		2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Orang	-	9	9	11	235.000.000	APBD	
TOTAL											**2.120.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif												
KODE DAN NAMA PROGRAM												

2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan provinsi		Kasus	-	90	90	90	1.200.014.000	APBD	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Kab/Kota	-	7	5	5	965.110.000	APBD	
		2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi		Orang	-	30	30	30	720.306.000	APBD	

			Perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi									
TOTAL											**2.885.430.000**	
INDIKATOR SDGs: 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.08.03.1.03	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.02.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/kota		Korban	-	sama dengan 5.2.1*	sama dengan 5.2.1*	sama dengan 5.2.1*	sama dengan 5.2.1*	APBD	
INDIKATOR SDGs: 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun												
KODE DAN NAMA PROGRAM												

2.08.03.1.03	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.14.04.1.02.04	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/kota		Korban	-	sama dengan 5.2.1*	sama dengan 5.2.1*	sama dengan 5.2.1*	sama dengan 5.2.1*	APBD	
INDIKATOR SDGs: 5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-	5	2	2	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Ruang	-	8	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	3	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang		Ruang	-	2	20	21	Idem pada	APBD	

			Laboratorium Biologi							indikator 4.6.1 (b)		
		1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	4	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	5	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	9	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	3	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	10	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	

		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	66	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	4	20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		20	21	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	55	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	32	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi		Ruang	-	9	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika		Ruang	-	8	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	

		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia		Ruang	-	8	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-	4	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa		Ruang	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	6	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	2	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	185	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	

		1.01.02.1.01.32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-	3	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.33	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	35	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-	1	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	40	25	25	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan		Paket	-	44	25	26	Idem pada	APBD	

			Peraga Peserta Didik							indikator 4.6.1 (b)		
		1.01.02.1.01.42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas		Sekolah	-		25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	18	25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	

		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Paket	-	24	25	26	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	24	586	586	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Sekolah	-	586	586	586	Idem pada indikator 4.6.1 (b)	APBD	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Unit	-		1	1	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa		Ruang	-	26	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium		Ruang	-	16	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-	8	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	41	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.11	Pembangunan Fasilitas Parkir		Unit	-	11	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah		Ruang	-	1	20	20	Idem pada	APBD	

										indikator 4.1.1 (f)		
		1.01.02.1.02.13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca		Ruang	-	1	20	20	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruang	-	21	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Ruang	-	2	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula		Ruang	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.22	Rehabilitasi Asrama Sekolah		Ruang	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-	68	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir		Unit	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.25	Rehabilitasi Kantin Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah		Paket	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Paket	-	2	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah		Paket	-	14	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Paket	-	84	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Ruang	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		Sekolah	-	24	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Paket	-	24	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	1	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Paket	-	11	24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi		Paket	-		24	24	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	

		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
		1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Sekolah	-	443	443	443	Idem pada indikator 4.1.1 (f)	APBD	
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah												
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		orang	-	200	200	300	740.886.000	APBD	
INDIKATOR SDGs: 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberd	2.08.02.1.03.01	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan		Lembaga	-	5	7	8	240.000.000	APBD	

	ayaan Perempuan Kewenangan provinsi		Kewenangan Provinsi									
		2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapsitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		orang	-	90	120	150	240.000.000	APBD	
TOTAL											**480.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,14.03.1.01.01	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi sesuai kearifan Lokal		Kab/Kota	-	6	6	6	1.470.000.000	APBD	
		2.14.03.1.01.04	Pelaksanaan Advokasi KIE Program KKBPK melalui Mitra Kerja		Orang	-	60	60	60	705.204.000	APBD	
		2.14.03.1.01.08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi		Kab/Kota	-	6	6	6	500.000.000	APBD	

TOTAL											**2.675.204.000**	
2.14.03.1.02	Pemberdayaan & Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keikutsertaan Ber KB	2.14.03.1.02,01	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peneingkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Keikutsertaan Ber-KB		Kab/Kota	-	6	6	6	645.000.000	APBD	
INDIKATOR SDGs: 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.20.02 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah laporan Pengumpulan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Laporan	-	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	280.000.000	APBD	DISKOMINFO
		2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan Penyediaan Data Informasi yang Terstruktur	Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	131.000.000	APBD	DISKOMINFO

TOTAL											**411.000.000**	
TOTAL										**12.465.983.000**		
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak												
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Dok	0	0	2	2	2.000.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah SPAM terbangun yang di supervisi	lokasi	0	0	1	1	1.840.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri	liter/detik	0	0	1000	1100	46.000.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	kerjasama	0	0	1	1	280.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan	Cakupan pembinaan pengelolaan SPAM	kab/kota	0	24	24	24	709.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum

			Pengelolaan SPAM Provinsi									dan Tata Ruang
		1.03.03.1.01.12	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggraan SPAM	lembaga	0	0	1	0	279.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TOTAL											**51.108.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.												
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah SPAM terbangun yang di supervisi	lokasi	0	0	1	1	1.840.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri	liter/detik	0	0	1000	1100	46.000.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TOTAL											**47.840.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(C) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan												
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan,	Jumlah dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Dok	0	0	2	2	Idem pada indikator 6.1.1 (a)	APBD	Dinas Pekerjaan Umum

	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Strategi dan Teknis SPAM									dan Tata Ruang
		1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah SPAM terbangun yang di supervisi	lokasi	0	0	1	1	Idem pada indikator 6.1.1 (a)	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri	liter/detik	0	0	1000	1100	Idem pada indikator 6.1.1 (a)	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	kerjasama	0	0	1	1	Idem pada indikator 6.1.1 (a)	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Cakupan pembinaan pengelolaan SPAM	kab/kota	0	24	24	24	Idem pada indikator 6.1.1 (a)	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.1.01.12	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggraan SPAM	lembaga	0	0	1	0	Idem pada indikator 6.1.1 (a)	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air												

1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan pembinaan SDM dan kelembagaan pengelola air limbah domestik	Kab/Kota	24	24	24	24	561.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.												
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	0	0	1	1	300.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan pembinaan SDM dan kelembagaan pengelola air limbah domestik	Kab/Kota	24	24	24	24	561.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.05.1.01.08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi	Kab/Kota	0	0	3	3	200.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TOTAL											**1.061.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).												
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												

1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan pembinaan SDM dan kelembagaan pengelola air limbah domestik	Kab/Kota	24	24	24	24	561.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).												
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan pembinaan SDM dan kelembagaan pengelola air limbah domestik	Kab/Kota	24	24	24	24	561.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(a) kualitas air danau												
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	2.11.03.1.01.01	koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah sungai, danau, dan pesisir laut dan lokasi udara ambien yang ditetapkan status mutunya	Lokasi	1	2	2	2	1.053.290.512	APBD	DPLH
		2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah sampel yang diuji	Sampel	1.198	900	1.000	1.100	4.030.583.642	APBD	DPLH
TOTAL											**5.083.874.154**	
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku												
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												

2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	2.11.03.1.01.01	koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah sungai, danau, dan pesisir laut dan lokasi udara ambien yang ditetapkan status mutunya	Lokasi	29	23	25	27	Idem Pada Indikator 6.3.2(a)	APBD	DPLH
		2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah sampel yang diuji	sampel	1.198	900	1.000	1.100	Idem Pada Indikator 6.3.2(a)	APBD	DPLH
INDIKATOR SDGs: 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).												
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)												
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penerapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	RPDAST	2 RPDAST	4 RPDAST	4 RPDAST	4 RPDAST	750.000.000	APBD / DAK	
INDIKATOR SDGs: 6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.												
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												

1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah jaringan informasi Sumber Daya Air	Jaringan Informasi	-	40	40	40	257.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Sumber Daya Air	Lembaga	-	24	24	24	420.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TOTAL											**677.000.000**	
INDIKATOR SDGs:6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.												
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas areal budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ha	-	100.425,79	110.425,79	120.425,79	375.000.000	APBD	
INDIKATOR SDGs: 6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.												
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas	1.03.02.1.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan danau pada WS	Wilayah Sungai	0	150	150	150	458.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

	Daerah Kabupaten/Kota											
INDIKATOR SDGs: 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.												
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah jaringan informasi Sumber Daya Air	Jaringan Informasi	-	40	40	40	Idem pada indikator 6.5.1 (c)	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Sumber Daya Air	Lembaga	-	24	24	24	Idem pada indikator 6.5.1 (c)	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
INDIKATOR SDGs: 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.												
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat Diluar Kawasan Hutan Negara	Luas pembuatan dan pemeliharaan tanaman Hutan Rakyat	Ha	11.460,97	35.508,00	45.508,00	55.508,00	69.820.732,00	APBD, DAK dan DBH Dana Reboisasi	
INDIKATOR SDGs: 6.6.1.(e) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.												
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)												
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS	3.28.06.1.01.02	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah DAS yang dioptimalkan fungsi dan daya dukungnya	DAS	-	2	2	2	200.000.000	APBD, DAK dan DBH Dana Reboisasi	

	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS									
TOTAL										**109.305.694.886**		
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU												
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah pembangkit listrik yang terbangun	Unit	-	898 Unit	890 Unit	937 Unit	46,400,834,303	APBD	Dinas ESDM
INDIKATOR SDGs: 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistr ikan	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Legalitas Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Izin	-	15	15	20	527.447.690	APBD	Dinas ESDM

INDIKATOR SDGs: 7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Biogas untuk rumah tangga yang terbangun	Unit	-	19	19	19	701.739.225	APBD	Dinas ESDM
INDIKATOR SDGs: 7.2.1* Bauran energi terbarukan												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistr ikan	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah pembangkit listrik yang terbangun	Unit	-	898 Unit	890 Unit	937 Unit	46.400.834.303	APBD	Dinas ESDM
TOTAL										**47.630.021.218**		
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI												
INDIKATOR SDGs: 8.1.1* Pertumbuhan PDRB												
INDIKATOR SDGs: 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun												
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA												
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Rupiah	-	87.882.496	90.664.371	93.325.387	148.029.700	APBD	
INDIKATOR SDGs: 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*		%	-	44,10	45,60	45,90	Idem pada indikator 8.2.1*	APBD	

INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*			-	40,86	41,26	41,61	Idem pada indikator 8.2.1*	APBD	
-												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*		%	-	86,63	84,93	83,23	Idem pada indikator 8.2.1*	APBD	
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.												
2 17 02 1.01PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam 24 Izin	izin	-	195.891.192	215.480.311	237.028.342	649.000.000,00	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 24 izin	izin	-	308.122.562	338.934.818	372.828.300	1.020.000.000,00	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
TOTAL											**1.669.000.000,00**	
INDIKATOR SDGs: 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*			-				Idem pada indikator 8.2.1*	APBD	
INDIKATOR SDGs: 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur												
KODE DAN NAMA PROGRAM												

Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*		%	-	6,13	5,94	5,76	Idem pada indikator 8.2.1*	APBD	Menyesuaikan RPJMD
INDIKATOR SDGs: 8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*			-				Idem pada indikator 8.2.1*	APBD	Menyesuaikan RPJMD
INDIKATOR SDGs: 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*		%	-	41,22	40,91	40,59	Idem pada indikator 8.2.1*	APBD	
INDIKATOR SDGs: 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB												
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen (Data dan Informasi) Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri yang disediakan	Dokumen	-	0	1	1	635.000.000	APBD	
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.												
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												

3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	-	6	6	7	1.986.000.000	APBD	
		3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri	Kali		0	4	4	30.262.945.025	APBD	
				Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Luar Negeri	Kali		0	4	4			
				Jumlah Fasilitasi Event Pariwisata Daerah	Kali		10	12	14			
		3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan		1	2	2	468.743.750	APBD	
TOTAL											**32.717.688.775**	
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.												
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya	3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	-	6	6	7	idem pada indikator 8.9.1(b)	APBD	

	Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri	Kali		0	4	4	idem pada indikator 8.9.1(b)	APBD	
				Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Luar Negeri	Kali		0	4	4	idem pada indikator 8.9.1(b)		
				Jumlah Fasilitasi Event Pariwisata Daerah	Kali		10	12	14	idem pada indikator 8.9.1(b)		
		3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan		1	2	2	idem pada indikator 8.9.1(b)	APBD	
INDIKATOR SDGs: 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*	Idem pada indikator 8.2.1*		%	-	18,25	18,29	18,33	Idem pada indikator 8.2.1*	APBD	
INDIKATOR SDGs: 8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.												**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.17.06.1.01 PROGRAM PEMBER	Pemberdayaan dan Perlindungan	2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen,	jumlah produk KUMKM yang mengikuti pameran dalam rangka perluasan	produk	-	209.165.000	230.081.500	253.089.650	693.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil

DAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	akses pasar 150 produk								dan Menengah
		2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah KUMKM yang mengikuti peningkatan Produktivitas,nilai tambah, akses pasar, akses pembiyaan, penguatan kelembangan, penataan manajemen serta stardarisasi dan rekstrurisasi usaha	orang	-	190.410.000	190.410.000	190.410.000	572.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
TOTAL											**1.265.000.000**	
TOTAL										**36.434.718.475**		
TUJUAN 9 : INDUSTRI,INOVASI DAN INFRASTRUKTUR												
INDIKATOR SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita												
3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri												
3.31.02.1.01	3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah sumber daya manusia industri yang dibina (orang).	orang	100 orang	300	350	400	14.233.000.000	APBD Provinsi	Dinas Perindustrian
				Jumlah potensi sumberdaya unggulan daerah yang dikembangkan menjadi potensi sumberdaya industri (potensi).	potensi	1 potensi	2	1	1		APBD Provinsi	

				Jumlah inovasi teknologi dan peralatan industri yang dikembangkan (unit).	unit	5 unit	15	15	15		APBD Provinsi	
		3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah sarana dan prasarana sentra industri yang dibina dan dikembangkan (sentra)	sentra	8 sentra	10	10	10	12.491.000.000	APBD Provinsi	Dinas Perindustrian
		3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah sumber daya manusia industri yang dibina (orang) Jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian (pelayanan) Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait tekstil (pelayanan) Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait logam (pelayanan)	pelayanan	158 pelayanan	200	200	200	11.931.000.000	APBD Provinsi	Dinas Perindustrian
TOTAL											**38.655.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur												
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri												

3.31.02.1.01	3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah sumber daya manusia industri yang dibina (orang)	orang	100 orang	300	350	400	telah di idem di indikator 9.2.1*	APBD Provinsi	Dinas Perindustrian
				Jumlah potensi sumberdaya unggulan daerah yang dikembangkan menjadi potensi sumberdaya industri (potensi)	potensi	1 potensi	2	1	1		APBD Provinsi	
				Jumlah inovasi teknologi dan peralatan industri yang dikembangkan (unit)	unit	5 unit	15	15	15		APBD Provinsi	
		3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah sarana dan prasarana sentra industri yang dibina dan dikembangkan (sentra)	sentra	8 sentra	10	10	10	telah di idem di indikator 9.2.1*	APBD Provinsi	Dinas Perindustrian
		3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah sumber daya manusia industri yang dibina (orang) Jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian (pelayanan) Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait tekstil (pelayanan) Jumlah pelayanan	pelayanan	158 pelayanan	200	200	200	telah di idem di indikator 9.2.1*	APBD Provinsi	Dinas Perindustrian

				dan pendampingan masyarakat industri terkait logam (pelayanan)								
INDIKATOR SDGs: 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri												
3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri												
3.31.02.1.01	3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah sumber daya manusia industri yang dibina (orang).	orang	100 orang	300	350	400	telah di idem di indikator 9.2.1*	APBD Provinsi	Dinas Perindustrian
				Jumlah potensi sumberdaya unggulan daerah yang dikembangkan menjadi potensi sumberdaya industri (potensi).	potensi	1 potensi	2	1	1		APBD Provinsi	
				Jumlah inovasi teknologi dan peralatan industri yang dikembangkan (unit).	unit	5 unit	15	15	15		APBD Provinsi	

		3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah sarana dan prasarana sentra industri yang dibina dan dikembangkan (sentra)	sentra	8 sentra	10	10	10	telah di idem di indikator 9.2.1*	APBD Provinsi	Dinas Perindustrian
		3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah sumber daya manusia industri yang dibina (orang) Jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian (pelayanan) Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait tekstil (pelayanan) Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait logam (pelayanan)	pelayanan	158 pelayanan	200	200	200	telah di idem di indikator 9.2.1*	APBD Provinsi	Dinas Perindustrian
INDIKATOR SDGs: 9.4.1(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca												
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	2.11.03.1.01.01	koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah sungai, danau, dan pesisir laut dan lokasi udara ambien yang ditetapkan status mutunya	Lokasi	29	23	25	27	1.053.290.512	APBD	

		2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah lokasi pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Dokumen/Lokasi	1 dokumen	24 Lokasi	24 Lokasi	24 Lokasi	1.080.886.500	APBD	
		2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah sampel yang diuji	sampel	1.198	900	1.000	1.100	4.030.583.642	APBD	
TOTAL											**6.164.760.654**	
INDIKATOR SDGs: 9.c.1* Proporsi Penduduk yang terlayani dengan mobile Broadband												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.20.02 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Pengumpulan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Laporan	-	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	telah di idem di indikator 5.b.1*	APBD	DISKOMINFO
		2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan Penyediaan Data Informasi yang Terstruktur	Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	telah di idem di indikator 5.b.1*	APBD	DISKOMINFO
INDIKATOR SDGs: 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam												
KODE DAN NAMA PROGRAM												

2.20.02 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Pengumpulan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Laporan	-	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	telah di idem di indikator 5.b.1*	APBD	
		2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan Penyediaan Data Informasi yang Terstruktur	Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	telah di idem di indikator 5.b.1*	APBD	
INDIKATOR SDGs: 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.20.02 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Pengumpulan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Laporan	-	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	telah di idem di indikator 5.b.1*	APBD	
		2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan Penyediaan Data Informasi yang Terstruktur	Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	telah di idem di indikator 5.b.1*	APBD	
TOTAL										**44.819.760.654**		
TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN												
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.												
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang		-	1.408	1.408	1.408	Telah di Idem dengan Indikator 1.2.1	APBD	Dinas Sosial
		1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang		-	700	700	700	Telah di Idem dengan	APBD	Dinas Sosial

										Indikator 1.2.1		
		1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	KUBE/UEP		-	260	260	260	Telah di Idem dengan Indikator 1.2.1	APBD	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.												
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.01	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		%	-	71,44	71,51	71,58	Jumlah Anggaran idem pada Indikator SDGs : 1.3.1(b) Proporsi Peserta Jaminan Sosial Bidang ketenaga kerjaan	APBD	
TOTAL										-		
TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN												
TARGET 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.												
INDIKATOR SDGs: 11.3.1.(a) Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.												
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA												

1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	Dok	-	13	2	2	18.868.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan yang disupervisi	Lokasi	-	16	2	2	15.912.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kawasan Strategis dikembangkan	Kawasan	-	3	1	1	258.288.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.09.1.01.01	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan yang terpantau	lokasi	-	16	5	5	630.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TOTAL											**293.698.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).												
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA												

1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	Dok	-	13	2	2	Idem pada indikator 11.3.1 (a)	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan yang disupervisi	Lokasi	-	16	2	2	Idem pada indikator 11.3.1 (a)	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kawasan Strategis dikembangkan	Kawasan	-	3	1	1	Idem pada indikator 11.3.1 (a)	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.09.1.01.01	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan yang terpantau	lokasi	-	16	5	5	Idem pada indikator 11.3.1 (a)	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TARGET 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.												
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
					orang	-	200	200	200			

(1.05.03.1.02)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana							1.570.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
(1.05.03.1.03)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		paket	-	8.700	9.000	9.500	8.256.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
TOTAL											**9.826.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
(1.05.03.1.01)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	(1.05.03.1.01.02)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)		orang	-	200	200	200	1.586.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
INDIKATOR SDGs: 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
(1.05.03.1.02)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	(1.05.03.1.02.07)	Penanganan Pascabencana Provinsi		dokumen	-	5	5	5	Telah di idem di INDIKATOR SDGs: 1.5.2.(a)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
TARGET 11.6 Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta												

mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.												
INDIKATOR SDGs: 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
(1.05.03.1.02)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	(1.05.03.1.02.01)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		Dokumen	-	1	-	-	Telah di idem di indikator INDIKATOR SDGs: 1.5.3*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPBD PROV SULSEL
		(1.05.03.1.02.09)	Penyusunan Rencana Kontijensi			-	-	1	1	Telah di idem di indikator INDIKATOR SDGs: 1.5.3*		
(1.05.03.1.01)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	(1.05.03.1.01.01)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi		Dokumen	-	-	1	-	Telah di idem di indikator INDIKATOR SDGs: 1.5.3*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPBD PROV SULSEL
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.												
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah rencana, kebijakan, dan teknis penanganan sampah yang disusun	Dokumen	0	1	2	1	1.872.815.512	APBD	
		2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan	Jumlah lokasi pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah	lokasi	10	3	4	4	1.701.350.000	APBD	

			Sampah di TPA/TPST Regional									
TOTAL										**308.684.165.512**		
TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB												
TARGET 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.												
INDIKATOR SDGs: 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)												
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (Limbah B3)												
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin pengumpulan limbah b3	Perusahaan	100	100	150	200	840.635.500	APBD	
		2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah limbah b3 yang diolah di insenerator	Ton	448	340	400	500	22.289.680.157	APBD	
TOTAL											**23.130.315.657**	

TARGET 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.												
INDIKATOR SDGs: 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang												
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah rencana, kebijakan dan teknis penanganan sampah yang disusun	Dokumen	0	1	2	1	Idem pada Indikator 11.7.1 (a)	APBD	
		2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah lokasi pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah	lokasi	10	3	4	4	Idem pada Indikator 11.7.1 (a)	APBD	
TOTAL										**23.130.315.657**		
TUJUAN 13 :PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM												
TARGET 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.												
INDIKATOR SDGs: 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
(1.05.03.1.02)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	(1.05.03.1.02.01)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		Dokumen	-	1	-	-	Telah di idem di indikator INDIKATOR SDGs: 1.5.3*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPBD PROV SULSEL
		(1.05.03.1.02.09)	Penyusunan Rencana Kontijensi			-	-	1	1	Telah di idem di indikator INDIKATOR SDGs: 1.5.3*		

(1.05.03.1.01)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	(1.05.03.1.01.01)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi		Dokumen	-	-	1	-	Telah di idem di indikator INDIKATOR SDGs: 1.5.3*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPBD PROV SULSEL
						-						
TOTAL												
TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN												
TARGET 14.Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.												
INDIKATOR SDGs: 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha												
3.25.05 PROGRAM; PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN												
3.25.05.1.01.	Kegiatan: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.02	Sub Kegiatan; Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai dengan 12 Mil	Jumlah Unit Usaha Perikanan Tangkap Yang Mendapoatkan Pengawasan dan Pemantauan Kapal	Unit Usaha Nelayan	446	360	370	380	2.682.500.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	s.d.a	3.25.05.1.01.03	Sub Kegiatan; Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaa Ikan di Laut Sampai 12 Mil	Jumlah Unit Usaha Pembudidaya di Laut sampai dengan 12 Mil Yang Mendapatkan Pengawasan	Unit Usaha Pembudidaya	178	190	200	210			

3.25.05.1.02.	Kegiatan: Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat diUsahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 Daerah Propinsi	3.25.05.1.02.03	Sub Kegiatan;Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha pemnasaran dan Pengolahan Ikan Yang Mendapatkan Pengawasan	Unit Usaha Pengolah dan Pemasar	178	190	200	210			
TARGET 14.Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.												
INDIKATOR SDGs: 14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil												
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP												
3.25.03.1.01	Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.03	Sub Kegiatan; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Regulasi Yang Mengatur Tentang Akses Nelayan Skala Kecil Terhadap Sumber Daya Laut dan Pesisir	regulasi	0	-	-	-	-	Perda telah terbit yang difasilitasi dari sumber pembiayaan APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR SDGs: 14.b.1.(a) Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan												
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP												
3.25.03.1.01	Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.03	Sub Kegiatan; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kab/Kota Yang Mendapatkan Akses Usaha Nelayan	Kab/Kota	19	19	19	19	100.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR SDGs: 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.												
032.03.HB PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN												
032.03.HB	Kegiatan: Pengelolaan Perizinan dan kenelayanan	- ,-	Sub Kegiatan; Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Nelayan	Jumlah Nelayan Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Asuransi/Premi	orang	11.827	7.500	7,550	7,600	800.000.000	APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan
TOTAL										**3.582.500.000**		
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN												
TARGET 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.												
INDIKATOR SDGs: 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.												
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat Diluar Kawasan Hutan Negara	Luas pembuatan dan pemeliharaan tanaman Hutan Rakyat	%	59,56	56,64	56,64	56,64	1.500.000.000	APBD	
TARGET 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.												

INDIKATOR SDGs: 15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.												
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) KPH	UPT	16	24	24	24	1.500.000.000	APBD	
TARGET 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.												
INDIKATOR SDGs: 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan												
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat Diluar Kawasan Hutan Negara	Luas pembuatan dan pemeliharaan tanaman Hutan Rakyat	%	0,25	0,77	0,99	1,20	69.820.732	APBD, DAK dan DBH Dana Reboisasi	
TOTAL										**3.069.820.732**		
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH												
INDIKATOR SDGs: 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.08.07.1.01	Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatka	2.08.07.1.01.01	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan		Kab/Kota	-	Sama dengan 5.2.1.a	Sama dengan 5.2.1.a	Sama dengan 5.2.1.a	Sama dengan 5.2.1.a	APBD	

	n para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota		kekerasan terhadap Anak kewenangan Provinsi									
2.08..07.1.02	Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	2.08.07.1.02.01	Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Provinsi		%	-	Sama dengan 5.2.1.a	Sama dengan 5.2.1.a	Sama dengan 5.2.1.a	Sama dengan 5.2.1.a	APBD	
		2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi		Dokumen	-	Sama dengan 5.2.1.a	Sama dengan 5.2.1.a	Sama dengan 5.2.1.a	Sama dengan 5.2.1.a	APBD	
INDIKATOR SDGs: 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.08.07.1.01	Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak	2.08.07.1.01.01	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Anak		Kab/Kota	-	Sama dengan 5.2.1.a	Sama dengan 5.2.1.a	Sama dengan 5.2.1.a	Sama dengan 5.2.1.a	APBD	

	Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota		kewenangan Provinsi									
2.08..07.1.02	Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	2.08.07.1.02.01	Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Provinsi		%	-		95%	95%	1.100.000.000		
		2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi		Dokumen	-		2	2	550.000.000		
TOTAL											**1.650.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.												
5.02.02. Program Pengelolaan Keuanagn Daerah												

5.02.02. Program Pengelolaan Keuanagn Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	05.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Nota Keuangan APBD yang disusun Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dikembangkan dan Dipelihara		-	2.175	2.300	2.350	6.825.000.000	APBD	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	05.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil koordinasi terkait pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan atas SP2D		-	165	170	175	510.000.000	APBD	Badan Pengelola Keuangan Daerah

				Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan atas SP2D								
TOTAL											**7.335.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).												
KODE DAN NAMA PROGRAM												

5.02.02. Program Pengelolaan Keuanagn Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	05.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Buku LKPD Audited yang disusun Jumlah Buku LKPD Unaudited yang disusun Jumlah Buku Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Jumlah Buku Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Jumlah Buku Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Disusun Jumlah Buku Rancangan Pergub Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang		-	1.232	1.100	1.150	3.482.000.000	APBD	Badan Pengelola Keuangan Daerah

				DIsusun Jumlah dokumen klarifikasi hasil evaluasi Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jumlah laporan hasil koordinasi terkait Evaluasi Ranperda dan Ranpergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jumlah laporan hasil koordinasi terkait rancangan Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi								
INDIKATOR SDGs: 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).												
(4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI)												

4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) Provinsi yg difasilitasi	Indeks	3,51	4,01	4,01	4,51	3.257.000.000	APBD Provinsi	
				Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang difasilitasi		(B)	(A-)	(A-)	(A)			
				Jumlah Kab/Kota yg difasilitasi								
				Jumlah peserta Forum Konsultasi Publik								
TOTAL											**3.257.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).												
(4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI)												
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dimonev	Nilai	65,06	76,00	80,00	85,00	2.694.000.000	APBD Provinsi	
				Jumlah Kab/Kota yang dimonev								
				Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang disusun								
				Jumlah peserta coaching clinic SAKIP Perangkat Daerah Provinsi		(B)	(BB)	(A)	(AA)			
TOTAL											**2.694.000.000**	
INDIKATOR SDGs: 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).												

(4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI)												
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dibina	Indeks	61,24	75,00	78,00	80,00	3.804.000.000	APBD Provinsi	
				Jumlah Kab/Kota yang dibina								
				Jumlah laporan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi		(B)	(BB)	(BB)	(A)			
TOTAL											**3.804.000.000**	
TOTAL										**22.222.000.000**		
TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN												
INDIKATOR SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.												
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
5.02.04.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01.01	PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH		LAPORAN	0	12	15	20	1.987.000.000	APBD	
		5.02.04.1.01.02	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH		DOKUMEN	0	4	5	6	654.000.000	APBD	
					PERATURAN/JUKNIS	0	5	5	5	983	APBD	
		5.02.04.1.01.03	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH		ORANG	0	300	300	300	275	APBD	
					JENIS	0	2	2	2	61	APBD	
					LEMBAR	0	125	150	175	61	APBD	

					ORANG	0	100	100	100	181.000.000	APBD	
					BUKU	0	100	100	100	113.000.000	APBD	
		5.02.04.1.01.05	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH		SP3D	197.939	132.720	122.585	113.769	4.045.000.000	APBD	
		5.02.04.1.01.06	PENGOLAHAN ,PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH		LAPORAN	0	4	4	4	312.000.000	APBD	
					ORANG	0	75	75	75	185.000.000	APBD	
					INOVASI	0	1	1	1	418.000.000	APBD	
					LAPORAN	0	1	2	2	516.000.000	APBD	
					LAPORAN	0	8	8	8	855.000.000	APBD	
		5.02.04.1.01.08	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH		LAPORAN	0	12	12	12	1.578.000.000	APBD	
		5.02.04.1.01.09	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK		LAPORAN	0	4	4	4	476.000.000	APBD	
		5.02.04.1.01.10	PENAGIHAN PAJAK DAERAH		UNIT	18.200	16.545	14.960	13.535	3.558.000.000	APBD	

TOTAL											**14.878.001.380**	
INDIKATOR SDGs: 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB												
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
5.02.04.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01.01	PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH		LAPORAN	0	12	15	20	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
		5.02.04.1.01.02	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH		DOKUMEN	0	4	5	6	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					PERATURAN/JUKNIS	0	5	5	5	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
		5.02.04.1.01.03	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH		ORANG	0	300	300	300	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					JENIS	0	2	2	2	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					LEMBAR	0	125	150	175	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					ORANG	0	100	100	100	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					BUKU	0	100	100	100	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	

		5.02.04.1.01.05	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH		SP3D	197.939	132.720	122.585	113.769	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
		5.02.04.1.01.06	PENGOLAHAN ,PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH		LAPORAN	0	4	4	4	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					ORANG	0	75	75	75	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					INOVASI	0	1	1	1	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					LAPORAN	0	1	2	2	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					LAPORAN	0	8	8	8	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
		5.02.04.1.01.08	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH		LAPORAN	0	12	12	12	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
		5.02.04.1.01.09	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK		LAPORAN	0	4	4	4	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
		5.02.04.1.01.10	PENAGIHAN PAJAK DAERAH		UNIT	18.200	16.545	14.960	13.535	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
INDIKATOR SDGs: 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik												

5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
5.02.04.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01.01	PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH		LAPORAN	0	12	15	20	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
		5.02.04.1.01.02	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH		DOKUMEN	0	4	5	6	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					PERATURAN/JUKNIS	0	5	5	5	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
		5.02.04.1.01.03	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH		ORANG	0	300	300	300	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					JENIS	0	2	2	2	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					LEMBAR	0	125	150	175	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					ORANG	0	100	100	100	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					BUKU	0	100	100	100	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
		5.02.04.1.01.05	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH		SP3D	197.939	132.720	122.585	113.769	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	

		5.02.04.1.01.06	PENGOLAHAN ,PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH		LAPORAN	0	4	4	4	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					ORANG	0	75	75	75	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					INOVASI	0	1	1	1	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					LAPORAN	0	1	2	2	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
					LAPORAN	0	8	8	8	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
		5.02.04.1.01.08	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH		LAPORAN	0	12	12	12	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
		5.02.04.1.01.09	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK		LAPORAN	0	4	4	4	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
		5.02.04.1.01.10	PENAGIHAN PAJAK DAERAH		UNIT	18.200	16.545	14.960	13.535	idem indikator SDGs 17.1.1	APBD	
INDIKATOR SDGs: 17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.20.02 Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Statistik	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,	Jumlah Laporan Pengumpulan	Laporan	-	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	telah di idem di indikator 5.b.1*	APBD	DISKOMINFO

Statistik Sektoral	Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengelolaan Data Statistik Sektoral								
		2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan Penyediaan Data Informasi yang Terstruktur	Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	telah di idem di indikator 5.b.1*	APBD	DISKOMINFO
INDIKATOR SDGs: 17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.20.02 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Pengumpulan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Laporan	-	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	telah di idem di indikator 5.b.1*	APBD	DISKOMINFO
		2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan Penyediaan Data Informasi yang Terstruktur	Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	telah di idem di indikator 5.b.1*	APBD	DISKOMINFO
INDIKATOR SDGs: 17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.												
KODE DAN NAMA PROGRAM												
2.20.02 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Pengumpulan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Laporan	-	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	telah di idem di indikator 5.b.1*	APBD	DISKOMINFO
		2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan Penyediaan Data Informasi yang Terstruktur	Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	telah di idem di indikator 5.b.1*	APBD	DISKOMINFO
TOTAL										**14.878.001.380**		

MATRIKS BAGIAN III: PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2017) (3)	Target Tahunan (4)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Ribu) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Instansi/ Lembaga Pelaksana (8)
				2019	2020	2021	2022	2023				
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN												
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase tingkat Kemiskinan												
PROGRAM 1: Sosial Trust Fund (STF)												
kegiatan 1: menginisiasi kerjasama dengan steakholder setempat untuk melaksanakan sosialisasi program	1.1. tersampaikannya kepada sasaran program terkait tujuan dan alur program	kegiatan	1	-	-	-	-	-		100% dana zakat	Makassar	DOMPET DHUAFA SULSEL
kegiatan 2: pelatihan bagi peserta program	2.1. meningkatnya kapasitas peserta melalui pelatihan berkelanjutan	kegiatan	2	2	3	-	-	-		100% dana zakat	Makassar	DOMPET DHUAFA SULSEL
kegiatan 3: pendekatan dakwah yang terintegrasi	3.1. peserta program terlepas dari riba	%	30 % peserta tidak lagi melakukan peminjaman kepada rentenir	60 % peserta tidak lagi melakukan peminjaman kepada rentenir	-	-	-	-		100% dana zakat	Makassar	DOMPET DHUAFA SULSEL
kegiatan 4: pembentukan unit usaha (rumah makan) sebagai bentuk pemandirian program	4.1. terciptanya lapangan pekerjaan baru	orang	-	7 orang	15 orng	-	-	-		100% dana zakat	Gowa	DOMPET DHUAFA SULSEL

PROGRAM 2: Rumah Produksi (RUMPRO)												
kegiatan 1: menginisiasi kerjasama dengan steakholder setempat untuk melaksanakan sosialisasi program	1.1. tersampaikannya kepada sasaran program terkait tujuan dan alur program	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	100% dana zakat	Makassar	DOMPET DHUAFA SULSEL
kegiatan 2: pelatihan bagi peserta program yang terintegrasi terhadap peningkatan kapasitas dan pendapatan	2.1. peserta mampu membuat produk berkualitas	item	2	3	-	-	-	-	-	100% dana zakat	Makassar	DOMPET DHUAFA SULSEL
	2.2. produk yang dihasilkan peserta memiliki pasar yang tetap	tempat	-	2	-	-	-	-	-	100% dana zakat	Makassar	DOMPET DHUAFA SULSEL
PROGRAM 3: Perwira (perempuan Wirausaha)												
kegiatan 1: menginisiasi kerjasama dengan steakholder setempat untuk melaksanakan sosialisasi program	1.1. tersampaikannya kepada sasaran program terkait tujuan dan alur program	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	100% dari dana kerjasama infaq via kasir MPPA	Makassar	DOMPET DHUAFA SULSEL
kegiatan 2: pelatihan bagi peserta program yang terintegrasi terhadap peningkatan kapasitas dan pendapatan	2.1. meningkatnya kapasitas peserta melalui pelatihan berkelanjutan	kegiatan	4	3	-	-	-	-	-	100% dari dana kerjasama infaq via kasir MPPA	Makassar	DOMPET DHUAFA SULSEL
kegiatan 3: pembentukan unit usaha berupa grosir yang dijadikan sebagai tempat belanja induk para penerima banuan	3.1. menjadi pusat belanja bagi para peserta program	%	100	100	-	-	-	-	-	100% dari dana kerjasama infaq via kasir MPPA	Makassar	DOMPET DHUAFA SULSEL
	3.2. peserta program mendapatkan bagi hasil dari keuntungan kios grosir	%	100	100	-	-	-	-	-	100% dari dana kerjasama infaq via kasir MPPA	Makassar	DOMPET DHUAFA SULSEL

PROGRAM 4: LAPAK BERKAH												
kegiatan 1: Sosialisasi program ke masyarakat	1.1. adanya pemahaman prosedur kerjasama antara calon penerima dengan IZI	kegiatan	1	1	1	1	1	1		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
kegiatan 2: melakukan survey, verifikasi dan perekrutan calon peserta program	2.1 Jumlah survey ke tempat calon penerima manfaat	kegiatan	20	25	28	31	34	37		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	2.2. tersedianya data calon peserta program	dokumen	20	25	28	31	34	37		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	2.3. Jumlah Peserta program yang lulus verifikasi	orang	14	13	14	15	17	19		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
kegiatan 3: Melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas kepada pelaku usaha	4.1. Menfasilitasi peserta pendampingan dan penguatan kapasitas peserta program	kegiatan	3	3	3	3	4	4		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	4.2. Meningkatnya wawasan dan pemahaman usaha mikro oleh penerima manfaat	%	60	90	99	109	120	132		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	4.3 Jumlah peserta pendampingan dan penguatan	orang	5	8	9	10	11	12		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia

	kapasitas pelaku usaha											Sulawesi Selatan
PROGRAM 5: KUMM/KUBE												
kegiatan 1: Sosialisasi program KUMM/KUBE ke masyarakat	1.1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang program KUMM/KUBE	kegiatan	-	1	1	1	1	1		Dana ZIS	Kab. Jeneponto	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 2: Melakukan survey, verifikasi data calon peserta KUMM/KUBE	2.1 Tersedianya data calon peserta program	dokumen	-	15	17	18	20	20		Dana ZIS	Kab. Jeneponto	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	2.2 Jumlah peserta/ kelompok Usaha peserta program	orang	-	10	11	12	13	13		Dana ZIS	Kab. Jeneponto	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 3: Memberikan pelatihan hard skill dan soft skill	3.1. Melaksanakan kegiatan pelatihan hard skill dan soft skill	kegiatan	-	2	2	2	3	3		Dana ZIS	Kab. Jeneponto	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	3.2 Persentase peserta pelatihan hard skill dan soft skill yang memahami tentang pengelolaan usaha dan administrasi keuangan	item	-	3	3	4	4	4		Dana ZIS	Kab. Jeneponto	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 4: Monitoring dan intervensi modal kelompok usaha	4.1 Adanya data laporan keuangan	dokumen	-	1	1	1	1	1		Dana ZIS	Kab. Jeneponto	Inisiatif Zakat Indonesia

	kegiatan kelompok usaha											Sulawesi Selatan
	4.2 Jumlah kelompok usaha yang menerima intervensi modal	item	-	1	1	1	1	1		Dana ZIS	Kab. Jeneponto	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 5 : Melaksanakan pendampingan dan pembinaan hard skill dan soft skill	5.1 Jumlah peserta pendampingan dan pembinaan hard skill dan soft skill	kelompok	-	1	1	1	1	1		Dana ZIS	Kab. Jeneponto	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
PROGRAM 6: PK (Pelatihan Keterampilan) Menjahit												
kegiatan 1: Sosialisasi program PK ke masyarakat	1.1 Pemberian pemahaman tetntang prosedur keikutsertaan menjadi peserta PK	kegiatan	-	1	1	1	1	1		Dana ZIS	Kota Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 2: Melakukan pengecekan data base dan wawancara dengan calon peserta PK untuk menentukan peserta yang tepat dan sesuai kebutuhan program	2.1 Adanya data base calon peserta pelatihan	dokumen	-	15	17	18	20	22		Dana ZIS	Kota Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	2.2 Jumlah peserta calon penerima manfaat pelatihan keterampilan	orang	-	15	17	18	20	22		Dana ZIS	Kota Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 3: Melakukan pelatihan keterampilan (hard skills dan soft skills) yang telah disesuaikan dengan *background* peserta	3.1 Pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan yang telah disepakati dengan peserta PK	kegiatan	-	1	1	1	1	1		Dana ZIS	Kota Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan

	3.2 Jumlah peserta yang mengikuti pelatiha keterampilan	orang	-	10	11	12	13	15		Dana ZIS	Kota Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	3.3 Persentase peserta yang memahami materi pelatihan dan praktek lapangan	%	-	90	99	109	120	132		Dana ZIS	Kota Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 4: Memberikan fasilitas yang dapat menunjang keterampilan peserta	4.1 Tersedianya alat keterampilan bagi peserta pelatihan ketermpilan	unit	-	10	11	12	13	15		Dana ZIS	Kota Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
PROGRAM 7: Paket Sembako Ramadhan												
Pemberian bantuan paket sembako	Memberikan bantuan sembako ke kaum dhuafa di 24 kabupaten di sulawesi selatan	Paket		15,000	62,772				7,232,147,000	YHK	24 Kab/kota di prov. Sulsel	YHK
PROGRAM 8: Sahabat Peduli												
Senyum Yatim Dhuafa		Mustahik/ Tahun	4631	4681	4721	4771	4821		9,262,000,000	Donatur dan Perusaahan CSR	Di 27 Provinsi seluruh Indonesia	BMH Hidayatullah
Khitam Berkah		Mustahik/ Tahun	2412	2462	2512	2562	2612		7,236,000,000	Donatur dan Perusaahan CSR	20 Provinsi diseluruh indonesia	BMH Hidayatullah

INDIKATOR SDGs: Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar												
Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan												
PROGRAM 1: INDONESIAN DOMESTIC BIOGAS PROGAM (IDBP) atau PROGRAM BIRU (BIOGAS RUMAH) - PHASE OUT PROJECT												
Kegiatan 1: Membangun & memperkuat Pusat Layanan Biogas	1.1: Pusat Layanan Biogas didirikan untuk memastikan penyediaan peralatan dan layanan purna jual 1.2: Penguatan sektor biogas melalui proses mempengaruhi kebijakan	Kegiatan	-	3	-	-	-	-		Hivos		Yayasan Rumah Energi
Kegiatan 2: Melakukan sosialisasi biogas program (termasuk biomiru) ke berbagai stakeholder melalui jaringan komunitas offline (promotional events) dan online (website, linkedin, facebook, youtube, instagram).	1.3: Meningkatkan kesadaran potensial klien (laki-laki & perempuan) tentang usaha seperti biogas	Kegiatan	-	-	-	-	-	-		Hivos	Luwu Utara, Enrekang, Pinrang, Barru, Wajo, Bone, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai	
Kegiatan 3: Production of promotion materials		Dokumen	-	100	-	-	-	-		Hivos		
Kegiatan 4: Melakukan program pengembangan kapasitas untuk UKM biogas (CPO) tentang manajemen bisnis dan Biogas Mini Rumah (BioMiRu	SMEs/UKM Biogas (CPO) dilengkapi dengan pelatihan bisnis yang relevan termasuk didalamnya konstruksi Biogas/BioMiRu	Kegiatan	-	1	-	-	-	-		Hivos	Makassar	

INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.												
PROGRAM 1: Model Pemantauan Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif												
Menyusun konsep dan tools pemantauan	Jumlah uji coba modul pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) yang responsif gender, inklusif dan transformatif	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	5,000	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	4 desa di Kab. Pangkep	YKPM
Memberikan penguatan kapasitas kepada komite pemantau	Melakukan workshop penguatan kapasitas Komite Pemantau	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	9,450	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	4 desa di Kab. Pangkep	YKPM
	Jumlah anggota Komite Pemantau yang mendapatkan penguatan kapasitas melalui workshop Komite Pemantau	Orang	-	35	-	-	-	-	-	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	Pangkep	YKPM
Melakukan pemantauan dengan metode monitoring	3.1 Penulisan profil wilayah pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH)	Dokumen	-	1	-	-	-	-	500	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	5 desa di Kab. Pangkep	YKPM

	3.2 Jumlah pertemuan persiapan pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) responsif gender, inklusif dan transformatif	Kegiatan	-	4	-	-	-	-	3,000	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	5 desa di Kab. Pangkep	YKPM
	3.3 Jumlah pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) yang responsif gender, inklusif dan transformatif (AGBK Tahap 2)	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	18,000	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	5 desa di Kab. Pangkep	YKPM
	3.4 Jumlah kegiatan verifikasi dan validasi data hasil pemantauan Program Keluarga Harapan yang responsif gender, inklusif dan transformatif (AGBK Tahap 2)	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	3,000	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	5 desa di Kab. Pangkep	YKPM
	3.5 Jumlah uji publik data hasil pemantauan Program Keluarga Harapan yang responsif gender, inklusif dan	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	5,000	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	5 desa di Kab. Pangkep	YKPM

	transformatif (AGBK Tahap 2)											
	3.6 Jumlah laporan hasil pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) yang responsif gender, inklusif dan transformatif (AGBK Tahap 2)	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	300	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	5 desa di Kab. Pangkep	YKPM
	3.7 Jumlah publikasi hasil-hasil pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) yang responsif gender, inklusif dan transformatif (AGBK Tahap 2)	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	2,500	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	Pangkep	YKPM
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.												
PROGRAM 1 : Pemberian Kaki Palsu												
kegiatan 1: Sosialisasi program kaki palsu kepada masyarakat	1.1 Pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang program kaki palsu	kegiatan	1	1	1	1	1	1		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 2: Melakukan survey, verifikasi data calon penerima kaki palsu	2.1 Ada data calon penerima kaki palsu	dokumen	20	7	8	8	9	10		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia

												Sulawesi Selatan
	2.2 Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan kaki palsu	orang	13	7	8	8	9	10		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 3: Melakukan pengukuran pembuatan kaki palsu bagi penerima	3.1 Jumlah kaki palsu yang disediakan untuk penyandang disabilitas	unit	13	7	8	8	9	10		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegaitan 4: *Launching* dan penyerahan kaki palsu bagi penerima	4.1 Pelaksanaan kegiatan penyerahan kaki palsu	kegiatan	1	1	1	1	1	1		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	4.2 Jumlah peserta launching program kaki palsu	orang	13	7	8	8	9	10		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	4.3 Jumlah kaki palsu yang tersalurkan ke penerima	unit	13	7	8	8	9	10		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
PROGRAM 2: Disabilitas Mandiri												
Mengadakan Pelatihan, pendampingan dan monitoring	50 orang dengan disabilitas memahami dan mampu mempraktekkan ilmu IT	Orang			50				236,000,000	YHK	Makassar dan Mamuju	YHK
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.												
PROGRAM 1: Kemanusiaan												
Bantuan Kemanusian	Memberi bantuan dalam bidang kemanusiaan	Orang		100	120	140	160	180	700,000	BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan
PROGRAM 2: Sahabat Peduli												

Peduli Bencana Nusantara		disesuiakan dengan konsisi dan kebutuha di lokasi	–	–	–	–	–		–	Donatur dan Perusaahan CSR	Tersebar diseluruh Indonesia	BMH Hidayatullah
Solidaritas Kemanusiaan		Program Donasi disesuiakan dengan konsisi dan kebutuhan di lapangan	–	–	–	–	–		–	Donatur dan Perusaahan CSR	Tersebar diseluruh Indonesia	BMH Hidayatullah
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.												
PROGRAM : Perlindungan Anak - Peningkatan cakupan akte kelahiran di Sulawesi Selatan												
Kegiatan 1. Pengelolaan Seminar untuk pengembangan analisis Bottleneck dan Teori Perubahan pada akta kelahiran	Laporan Analisis sumbatan Pencatatn akta kelahiran di Kota Makassar dan kabupten Gowa	dokumen				1			77,400,000	UNICEF	Kota Makassar dan Kab. Gowa	Yayasan BaKTI
Kegiatan 2. Mendukung pendataan online pada setiap kelahiran baru di Rumah Sakit dan Puskesmas	Prosedur pencatatan kelahiran bagi bayi baru lahir di R.S/ RSB/ puskesmas di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa tersedia	dokumen	0				2		126,175,000	UNICEF	Kota Makassar dan Kab. Gowa	Yayasan BaKTI
	Jumlah sistem online yang menghubungi kantor capil dan fasilitas kesehatan tersedia di Makassar & Gowa	jaringan	0		0		10			UNICEF	Kota Makassar dan Kab. Gowa	Yayasan BaKTI
Kegiatan 3. Mengadakan rapat pengumpuulan data pada Desa dan Daerah Terpencil	Persentase cakupan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun	persen	Makassar 68			80	90	80	42,300,000	UNICEF	Sulawesi Selatan	Yayasan BaKTI

Kegiatan 4. Mendukung pengumpulan data pad 3 desa di Kabupaten Gowa			Gowa 52			61	90					
Kegiatan 5. Membantu penerbitan akta kelahitan pada desa	Strategi (equity focus) untuk pencatatan kelahiran di Gowa tersedia.	dokumen	0				1		24,650,000	UNICEF	Kabupaten Gowa	Yayasan BaKTI
	Prosedur pencatatan kelahiran di tingkat kecamatan/ kelurahan/ desa tersedia	dokumen	0				1		33,305,000	UNICEF	Kota Makassar dan Kab. Gowa	Yayasan BaKTI
Kegiatan 6. Mendukung data SIAK untuk pemanfaatan CRVS	Utilisasi data SIAK untuk Statistik Hayati (CRVS)	dinas	0				2		12,750,000	UNICEF	Sulawesi Selatan	Yayasan BaKTI
Kegiatan 7. Membentuk pertemuan lintas sektor untuk kolaborasi dan kerjasama yang efektif antara *stakeholders* pada CVRS	Jumlah peserta	orang	0				30		18,375,000	UNICEF	Sulawesi Selatan	Yayasan BaKTI
Kegiatan 8. Seminar strategi dalam rangka meningkatkan Inisiatif registrasi kelahiran (termasuk infografik dan mekanisme)	Strategi untuk scale up model pencatatan kelahiran di tingkat provinsi	dokumen	0				1		23,125,000	UNICEF	Sulawesi Selatan	Yayasan BaKTI
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial												
PROGRAM 1: Emergency Respons Bencana IZI												
Kegiatan 1:Membentuk tim emergency respons bencana IZI	1.1 Jumlah anggota tim emergency respons bencana IZI	orang	-	10	11	12	13	15		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 2: Memberikan bantuan kedaruratan secara cepat	21.Adanya pelayanan medis bagi korban bencana	kegiatan	-	1	1	1	1	1		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan

	2.2 Jumlah korban bencana yang mendapatakan pelayanan medis	orang	-	300	330	363	399	439		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 3: Memberikan bantuan logistik bagi korban bencana	3.1 Jumlah paket logistik yang didistribusikan kepada korban bencana	paket	-	2533	2786	3065	3371	3709		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 4: Menyediakan sarana dan prasarana bagi korban bencana	4.1 Penyediaan alat transportasi bagi korban bencana	unit	-	1	1	1	1	1		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	4.2 Penyediaan musholla darurat bagi korban bencana	unit	-	3	3	4	4	4		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
INDIKATOR SDGs: Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasiona;												
PROGRAM 1: Program Perlindungan Anak berbasis Keluarga, amal usaha Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial												
Kegiatan 1 Perlindungan anak dari tindak kekerasan	1.1 Melakukan TOT Relawan Gerakan 'Aisyiyah Cinta Anak	Kegiatan		1		1		1		Aisyiyah	Makassar	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
	1.2. Jumlah peserta yang berasal dari 24 Kabupaten yang siap menjadi tim Relawan GACA di 24 Kabupaten terkait Program Gerakan 'Aisyiyah Cinta Anak (GACA)	Orang		1						Aisyiyah	24 Kabupaten se-Sulsel	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah se-Sulawesi Selatan
	1.3.Workshop Perlindungan Sosial	Kegiatan		1		1		1		Aisyiyah	Makassar	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel

	1.4. Jumlah peserta yang berasal dari 24 Kabupaten yang siap menjadi tim Perlindungan Sosial di 24 Kabupaten	Orang		1						Aisyiyah	24 Kabupaten se-Sulsel	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah se-Sulawesi Selatan
PROGRAM 2: Peningkatan Income Usaha Keluarga												
Kegiatan 1 Pelatihan UMKM Perempuan dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dalam bentuk sekolah wirausaha	1.1. Terbentuknya Sekolah Wirausaha 'Aisyiyah (SWA) yang memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang akses kontrol terhadapa sumber daya ekonomi	Kegiatan		1	1	1	1	1		Aisyiyah	Makassar, Pangkep, Bulukumba	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
Kegiatan 2 Pelatihan Keamanan Pangan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan Keamanan Pangan	orang		1	1	1	1			Aisyiyah dan PEMDA	Makassar, Gowa, Takalar	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
PROGRAM 3: SERAGAM UNTUK SOBAT												
Pembagian Seragam		Bulan/anak	131	120 anak	120 anak	120 anak	120 anak		200	Donasi	Sulawesi Selatan	Sobat LemINA
INDIKATOR SDGs: 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.												
INDIKATOR SDGs: 1.a.2 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.												
PROGRAM 1: Financial benchmarking on Child Protection												
Kegiatan 1. Seminar pengelolaan pengumpulan data dan validasi pada 3 kabupaten	1. Jumlah matrik program perlndungan anak yang disetujui	Matriks	0		1	1	1	1	111,450,000	UNICEF	Sulawesi Selatan	Yayasan BaKTI

	7 dokumen policy brief Perlindungan Anak (Anggaran utnuk Perlindungan Anak, Layanan Terpadu Anak Integratif, Pemenuhan Akta Kelahiran, Reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum, Pencegahan Bullying, Pernikahan Anak Usia Dini, Pengasuhan di Pondok pesantren)	dokumen					1					Yayasan BaKTI, YIM, PSGA UIN, Yayasan Karampuang
Kegiatan 2. Pengumpulan data Financial benchmarking di 4 Lokasi target	2. Jumlah perangkat keuangan yang terkumpul	set	0			2	1		82,275,000	UNICEF	Sulawesi Selatan	Yayasan BaKTI
Kegiatan 3. Rapat pembentukan steering committee.	3. 'Jumlah stakeholder yang menghadiri	orang	0		50	0	50	50			Sulawesi Selatan	Yayasan BaKTI
Kegiatan 5. Program aasistensi	5. Jumlah program asisten	orang	0			1	1			UNICEF	Sulawesi Selatan	Yayasan BaKTI
PROGRAM 2: IZI To Smart												
Kegiatan 1: Melakukan survey, verifikasi data, dan wawancara calon penerima beasiswa	1.1 Data calon penerima beasiswa pelajar dan mahasiswa	dokumen	-	40	44	48	53	59		Dana ZIS	Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	1.2 Jumlah anak-anak yatim dan dhuafa yang menerima beasiswa pelajar dan mahasiswa	orang	-	31	34	38	41	45		Dana ZIS	Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 2: Memberikan pendampingan, pembinaan dan training motivasi serta pelatihan soft skills dan kewirausaahan	2.2 Pelaksanaan training motivasi berprestasi untuk penerima beasiswa	kegiatan	-	12	13	15	16	18		Dana ZIS	Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan

kepada penerima beasiswa pelajar dan mahasiswa	pelajar dan mahasiswa											
	2.3 Pelaksanaan pelatihan manajemen diri, *soft skills* dan kewirausahaan	kegiatan	-	12	13	15	16	18		Dana ZIS	Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	2.4 Jumlah peserta yang mengikuti training motivasi berprestasi	orang	-	14	15	17	19	20		Dana ZIS	Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	2.5 Persentase peserta yang mampu mengembangkan kapasitas intelektual melalui pelatihan yang telah diikuti	%	-	90	99	109	120	132		Dana ZIS	Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
PROGRAM 3: Mulia Insiatif												
Kegiatan 1:Memberikan bantuan materil kepada masyarakat yang membutuhkan	1.1 Jumlah masyarakat yang menerima bantuan logistik	orang	996	1224	1346	1481	1629	1792		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	1.2 Jumlah siswa(i) yang menerima bantuan langsung tunai dan paket perlengkapan sekolah	orang	378	330	363	399	439	483		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	1.3 Jumlah mahasiswa(i) yang menerima bantuan *living cost*	orang	-	5	6	6	7	7		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 2: Melakukan pelayanan terhadap orang sakit	2.1 Jumlah pasien yang mendapatkan biaya perawatan	orang	423	550	605	666	732	805		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan

	2.2 Penyediaan obat-obatan bagi pasien yang membutuhkan	pack	-	-	-	-	-	-		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	2.3 Jumlah pasien yang menerima alat bantu kesehatan	orang	5	15	17	18	20	22		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	2.5 Jumlah pasien yang mendapatkan layanan antar jemput	orang	-	10	11	12	13	15		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 3: Memberikan edukasi bagi masyarakat dalam proses penyelenggaraan jenazah	3.1 Pelaksanaan kegiatan edukasi dan pelatihan jenaiz	kegiatan	2	6	7	7	8	9		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	3.2 Persentase peserta kegiatan edukasi dan pelatihan jenaiz yang memahami proses penyelenggaraan jenazah	%	90	90	99	109	120	132		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 4: Menyediakan sarana dan perlengkapan jenazah	4.1 Pengadaan paket perlengkapan jenazah	item	15	60	66	73	80	88		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	4.2 Jumlah kaum dhuafa yang menerima paket perlengkapan jenazah	orang	15	55	61	67	73	81		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	4.3 Jumlah pengantaran jenazah	kali	-	62	68	75	83	91		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 5: Memberikan layanan terpadu bagi masyarakat	5.1 Jumlah masyarakat yang terlilit hutang dan mendapatkan bantuan pelunasan hutang	item	-	34	37	41	45	50		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan

	5.2 Jumlah Mahasiswa yang menerima fasilitas mudik	orang	-	23	25	28	31	34		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN												
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).												
PROGRAM : Paket Sembako												
Kegiatan 1: Melakukan survey, verifikasi data calon penerima paket sembako	1.1 Tersedianya data calon penerima paket sembako	dokumen	3300	1000	1100	1210	1331	1,464		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	1.2 Jumlah calon penerima paket sembako	orang	3316	1000	1100	1210	1331	1,464		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 2: Menyediakan dan menyalurkan paket sembako pada bulan ramadhan	2.1 Jumlah paket semabako yang tersalurkan	paket	3316	942	1036	1140	1254	1,379		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
	2.1 Jumlah kaum dhuafa yang menerima paket semabako	orang	3316	942	1036	1140	1254	1,379		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
Kegiatan 3: Melaksanakan buka puasa bersama dengan masyarakat wilayah terpencil, masjid dan panti asuhan	2.1 Jumlah masyarakat yang mengikuti buka puasa bersama	orang	1327	1458	1604	1764	1941	2,135		Dana ZIS	Sulawesi Selatan	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
PROGRAM : Jumat Berbagi												
kegiatan 1: Melaksanakan FGD anatara pihak donatur dan IZI	1.1 Pemberian pemahaman kepada pihak donatur terkait program penyaluran makanan	kegiatan	-	1	1	1	1	1		Dana ZIS	Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
		dos	-	4320	4752	5227	5750	6325		Dana ZIS	Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia

Kegiatan 2: Memesan paket makanan yang akan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan	2.1 Jumlah paket makanan yang disediakan											Sulawesi Selatan
Kegiatan 3: Menyalurkan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan	3.1 Jumlah kaum dhuafa yang menerima paket makanan	orang	-	4320	4752	5227	5750	6325		Dana ZIS	Makassar	Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita												
PROGRAM 1: Kesehatan												
Bantuan Bidang Kesehatan	Jumlah Penerima Bantuan Bidang Kesehatan	Orang		300	320	340	360	380	3,150,000	BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan
INDIKATOR SDGs: 2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.												
PROGRAM 1:												
Kegiatan 1: Dukungan teknis dalam kebijakan, advokasi, peningkatan kapasitas dan "penurunan angkah stunting di Sulawesi Selatan	Kunjungan advokasi dan monitoring ke Kabupaten Focus Stunting	Jumlah	0	2	2							
	Bantuan Tehnis untuk pengembangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Sulawesi Selatan	Dokumen	0	0	1							
Kegiatan 2: Dukungan teknis untuk memperkuat pelayanan Gizi dalam kondisi darurat	Berpatisipasi dalam pertemuan yang diadakan oleh pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan untuk persoalan Gizi dalam tanggap darurat	Dokumen	tdk ada	tidak	ya							
PROGRAM 1: Pendirian dan Pengelolaan Rumah Gizi Balai Sakinah 'Aisyiyah di Kelurahan												

Kegiatan 1. Sosialisasi Gizi Remaja Putri, ibu hamil, ibu dengan balita, ibu dengan anak stunting, gizi buruk, gizi kurang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman bagi Remaja Putri, ibu hamil, ibu dengan balita, ibu dengan anak stunting, gizi buruk, gizi kurang dan keluarga tentang gizi dan keutamaannya	Kegiatan		1	1	1				Aisyiyah	Kota Parepare, Pinrang, Pangkep dan Bantaeng	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
Kegiatan 2. Konseling Gizi bagi Ibu hamil dan menyusui bagi masyarakat	Menurunnya jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, jumlah malnutrisi anemia pada Ibu hami serta meningkatkan bayi yang mendapatkan ASI Ekslusif			1	1	1				Aisyiyah	2 Kelurahan di Pangkep dan Bantaeng	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
Kegiatan 3 Pengelolaan Kebun Gizi Masyarakat	Terkelolanya kebun gizi masyarakat			1	1	1				Aisyiyah	2 Kelurahan di Pangkep dan Bantaeng	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.												
PROGRAM 1 : Penanggulangan Stunting												
Pemberian supplement tambah darah kepada ibu hamil selama masa 1000 HPK	Paket vitamin tambah darah diberikan secara reguler selama masa kehamilan untuk 200 ibu hamil di 4 kabupaten	Paket			200				45,000,000	YHK	Bone, Pangkep, Gowa, Takalar	YHK bekerja sama dengan Poltekkes
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.												
PROGRAM 1: Pelatihan piringku pencegahan stunting dengan pendekatan keluarga												

pembuatan makanan sehat berbahan baku lokal	111 orang yang terdiri dari Ibu hamil, Remaja putri, bidan desa/ Puskesmas yang menjadi peserta pelatihan	Orang		111					24,500,000	YHK	Kab. Maros Pov. Sulses	YHK bekerja sama dengan Poltekkes
PROGRAM 2 : Penanggulangan Stunting												
Pemberian makanan tambahan dengan kadar yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil pada 1000 HPK	200 paket makanan tambahan diberikan untuk 200 ibu hamil dari kalangan dhuafa di 4 kabupaten	Paket			200				45,800,000	YHK	Bone, Pangkep, Gowa, Takalar	YHK bekerja sama dengan Poltekkes
PROGRAM 3: Sahabat Peduli												
Peduli Gizi Nusantara		Mustahik/Tahun	7524	7554	7584	7614	7634		1,128,000,000	Donatur dan Perusaahan CSR	Tersebar diseluruh Indonesia	BMH Hidayatullah
INDIKATOR SDGs: Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.												
Penetapan kawasan pangan berkelanjutan												
PROGRAM 1: INDONESIAN DOMESTIC BIOGAS PROGAM (IDBP) atau PROGRAM BIRU (BIOGAS RUMAH) - PHASE OUT PROJECT												
Kegiatan 1: Identification of support for each potential SME	1.1: Meningkatkan penggunaan bioslurry	Dokumen	-	1	-	-	-	-		**Hivos**	**Makassar**	
Kegiatan 2: Small business training in Biogas service and bioslurry business ----composting, agri/aquaculture, worm production, mushroom cultivation, value chain MSME		Kegiatan	-	2	-	-	-	-		**Hivos**	**Makassar**	

Kegiatan 3: Membuat sukses story mengenai dampak dan pengalaman pengguna biogas dan bagaimana program bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari mereka; berupa seri video pendek, artikel, dan seri foto yang bisa menjadi bahan pembelajaran bersama		Dokumen	-	6	-	-	-	-		Hivos	Pinrang, Bone, Sinjai, Bulukumba	
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERAH												
INDIKATOR SDGs: 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih												
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).												
3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan												
PROGRAM 1: Membangun kesadaran dan komitmen anggota sekolah perempuan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan												
Pertemuan regular sekolah perempuan dalam membangun kesadaran dan komitmen untuk melahirkan di fasilitas kesehatan	Jumlah pertemuan sekolah perempuan dalam membangun kesadaran dan komitmen untuk melahirkan di fasilitas kesehatan	Kegiatan	3	2	-	-	-	-	2,000	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	4 desa di Kab. Pangkep	YKPM
	Jumlah anggota sekolah perempuan yang meningkat kesadaran kritisnya untuk melahirkan di fasilitas kesehatan	Orang	400	450	450	450	450	450	-	-	4 desa di Kab. Pangkep	YKPM
	Jumlah anggota sekolah perempuan yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Orang	5	2	-	-	-	-	-	-	4 desa di Kab. Pangkep	YKPM
PROGRAM 2:	**Program Pengurangan Angka kematian Ibu dan bayi**											

Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas kepada tenaga kesehatan dan warga untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan anak	25 tenaga kesehatan perawat/ bidan puskesmas menjadi peserta pelatihan	Orang		25					25,000,000	YHK	Kab. Bone	YHK berkerjasama dengan USAID Jalin dan Dinkes Bone
PROGRAM 3: Sosialisasi dan Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil												
Kegiatan 1 Penyantunan Ibu hamil untuk menekan AKI dengan melakukan Gerakan Infak Sayang Ibu (GISI)	1.1. Tersantuninya Ibu hami untuk menekan AKI melalui Gerakan Infak Sayang Ibu	Kegiatan		1	1					Aisyiyah	Pangkep, Bantaeng	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
Kegiatan 2 Sosialisasi Kesehatan Bagi Ibu Hamil	2.1 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Ibu Hamil tentang pelayanan antenatal K-4	Kegiatan		1	1					Aisyiyah dan PEMDA	Makassar, Parepare, Pinrang	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Makassar, Kota Parepare dan Pinrang
PROGRAM 4: Pprgram Penanggulangan penyakit tidak menular kanker servik dan kanker payudara melalui test IVA dan sadarmis												
Kegiatan 1 Sosialisasi terntang kanker Servik dan kanker Payudara	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman bagi perempuan usi subur tentang kanker servik dan kanker payudara	kegiatan		1	1	1	1	1		Aisyiyah dan PEMDA	24 Kabupaten se-Sulsel	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah se-Sulsel
Kegiatan 2 Deteksi dini kanker Servik melalui test IVA	Terdeteksinya kanker servik secara dini melalui test IVA	Kegiatan		1	1					Aisyiyah dan PEMDA	Makassar, Pangkep, Bantaeng	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah
PROGRAM 5: Membangun Kesadaran dan komitmen anggota sekolah kepemimpinan perempuan (SKP)												

Kegiatan 1. Pemetaan partisipatif untuk perencanaan pemberdayaan oleh peserta Sekolah Kepemimpinan Perempuan	1.1. Tersedianya peta persoalan, kebutuhan, dan potensi di desa	Dokumen		1	1					Aisyiyah dan anggaran dana desa	Desa Bialo Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
	1.2. Tersedianya peta kebijakan desa	Dokumen		1	1					Aisyiyah dan anggaran dana desa	Desa Bialo Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
Kegiatan 2 Diskusi pemetaan/assessment dan rancangan program pemberdayaan desa antara fasilitator (Aisyiyah) dengan peserta SKP	2.1. Tersedianya hasil pemetaan dan rancangan program pemberdayaan desa	Dokumen		1	1					Aisyiyah dan anggaran dana desa	Desa Bialo Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
Kegiatan 3. Konfirmasi rancangan program pemberdayaan dengan kebutuhan di komunitas oleh Peserta SKP	3.1. Tersedianya Rancangan program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan komunitas	Dokumen		1	1					Aisyiyah dan anggaran dana desa	Desa Bialo Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
Kegiatan 4 Lokakarya mini proposal Program Pemberdayaan Sekolah Kepemimpinan Perempuan (SKP)	4.1. Tersedianya proposal karya pemberdayaan perempuan	Dokumen		1	1					Aisyiyah dan anggaran dana desa	Desa Bialo Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
Kegiatan 5 Implementasi Karya Program Pemberdayaan SKP	5.1. terlaksananya karya program pemberdayaan di komunitas	kegiatan		1	1					Aisyiyah dan anggaran dana desa	Desa Bialo Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
Kegiatan 6 Pendampingan Karya Program Pemberdayaan	6.1. terdampinginya peserta Sekolah Kepemimpinan Perempuan	kegiatan		1	1					Aisyiyah dan anggaran dana desa	Desa Bialo Kec. Gantarang Kab.	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel

											Bulukumba	
Kegiatan 7 Penyusunan hasil karya program pemberdayaan peserta Sekolah Kepemimpinan Perempuan	7.1. tersusunnya publikasi hasil karya program peserta sekolah Kepemimpinan Perempuan	kegiatan		1	1					Aisyiyah dan anggaran dana desa	Desa Bialo Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.												
3.2.2*Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.												
3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.												
3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.												
PROGRAM 1: Imunisasi												
Kegiatan 1: OJT dan supervisi suportif untuk strategi REC (Reaching Every Community/Child) dan penguatan manajemen rantai suplai imunisasi di Tingkat Puskesmas	Puskesmas yang melaksanakan Strategi REC	%	30%	60%	80%				910.000.	UNICEF	Makassar, Maros	UNICEF
	Puskesmas yang membuat dan melaksanakan "EVM continous immprovement plan"	%	30%	60%	80%							
Kegiatan 2: Demand generation: Penguatan strategi Komunikasi dan pemberdayaan masyarakat	Kader dan petugas kesehatan yang terlatih dalam teknik komunikasi, Imunisasi dan Kesehatan anak	%	0%	60%	80%				560.000.	UNICEF	Makassar, Maros	UNICEF
	Posyandu yang melaksankan kelas ibu	%	0%	60%	80%							

Kegiatan 3: Data for action: Dukungan teknologi informasi dalam perencanaan pengjangkauan dan monitoring status imunisasi	Posyandu yang melaksankan sistem monitoring status imunisasi terpadu dengan layanan kesehatan anak lainnya	%	0	60%	80%				1.120.000	UNICEF	Makassar, Maros	UNICEF
PROGRAM 2: Program Gizi												
Kegiatan 1: Dukungan teknis dalam kebijakan, advokasi, peningkatan kapasitas dan "penurunan angkah stunting di Sulawesi Selatan	Kunjungan advokasi dan monitoring ke Kabupaten Focus Stunting	Jumlah	0	2	2					UNICEF		UNICEF
	Bantuan Tehnis untuk pengembangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Sulawesi Selatan	Dokumen	0	0	1					UNICEF		UNICEF
Kegiatan 2: Dukungan teknis untuk memperkuat pelayanan Gizi dalam kondisi darurat	Berpatisipasi dalam pertemuan yang diadakan oleh pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan untuk persoalan Gizi dalam tanggap darurat	Dokumen	tdk ada	tidak	ya					UNICEF		UNICEF
INDIKATOR SDGs: 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang												
3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.												
3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.												
3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria												
3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.												
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).												
3.3.5.(a) Jumlah Kab/ Kota dengan eliminasi Kusta												
3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).												

PROGRAM 1: Malaria												
Kegiatan 1: Dukungan teknis dalam kebijakan, advokasi, peningkatan kapasitas dan "knowledge management" untuk eliminasi malaria di wilayah sulit	Kunjungan advokasi, penilaian dan monitoring ke Kabupaten yang belum eliminasi	Jumlah	0	2	2							
	Praktek baik dalam eliminasi malaria di wilayah sulit	Dokumen	0	0	1							
	kasus lokal	jumlah	<1	<1	0							
Kegiatan 2: Dukungan teknis untuk memperkuat analisa strategis dan 'enabling environment' dalam mencapai eliminasi malaria	Peratural lokal yang mendukung eliminasi malaria khususnya surveilans migrasi berbasis masyarakat	Peraturan	tdk ada	tidak	ya							
Kegiatan 3: Dukungan teknis untuk meningkatkan kualitas diagnosis dan pengobatan malaria di kabupaten terpilih	Supervisi Suportif dan OJT dalam rangka peningkatan kualitas diagnosis dan pengobatan malaria di puskesmas terlaksana	Jumlah	3	4	4							
	Puskesmas melakukan diagnosis dan memberikan pengobatan yang tepat	%	**67%**	**90%**	**100%**							
Kegiatan 4: Dukungan teknis untuk meningkatkan sistem surveilans, penemuan kasus dan pengendalian vektor di Provinsi dan Kabupaten terpilih	PE dan pemetaan fokus diimplementasikan oleh puskesmas	%	**67%**	**90%**	**100%**							
	Sistem Notifikasi dan respon metode 1-2-5 dimplemetasikan oleh puskesmas	%	**67%**	**90%**	**100%**							

	Surveilans migrasi berbasis masyarakat dilaksanakan oleh desa dan puskesmas	%	**67%**	**90%**	**100%**							
	Pemetaan kerentanan	Jumlah	**0**	**1**	**2**							
	Pemetaan kerentanan	Jumlah	**0**	**1**	**2**							
PROGRAM 4: Program Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)												
Kegiatan 1: Dukungan teknis untuk memperkuat layana HIV?AIDS pada Ibu hamil dan anak-anak di Kota Makassar dan Kab. Toraja Utara	Supervisi Supportive Penguatan Publik Private Mix (PPM) untuk memperkuat layanan HIV/AID di Kota Makassar	Jumlah	0	1	2							
	Supervisi Suportive untuk penguatan desentralisasi layanan HIV/AIDS di Kab. Toraja Utara	Jumlah	1	3	3							
INDIKATOR SDGs: 3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri												
PROGRAM 1: Dakwah Advokasi												
Bantuan Bidang Dakwah Advokasi		Orang		10	12	14	16	18	1,170,625	BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan
INDIKATOR SDGs: 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk												
PROGRAM 1 : RUMAH SINGGAH PASIEN												
Kegiatan 1 : Menyediakan sarana dan prasarana bagi pasien	1.1 Penyediaan tempat tinggal yang aman dan nyaman	unit	1	2	2	2	3	3		Dana ZIS	Makassar	IZI SULSEL
	1.2 Jumlah mobil operasional (Ambulance)	unit	1	2	2	2	2	2		Dana ZIS	Makassar	IZI SULSEL
Kegiatan 2 : Memberikan Pelayanan terpadu	2.1 Penyediaan makanan yang	hari	365	365	402	442	486	534		Dana ZIS	Makassar	IZI SULSEL

	hygienis & halal (3 kali sehari)											
	2. 2 pelayanan antar-jemput pasien ke rumah sakit	kegiatan	500	1,000	1,100	1210	1,331	1464		Dana ZIS	Makassar	IZI SULSEL
	2. 3 Jumlah prasarana alat bantu kesehatan	unit	2	2	2	2	3	3		Dana ZIS	Makassar	IZI SULSEL
PROGRAM 2: Klinik Pesisir												
Menyediakan layanan pemeriksaaan kesehatan		Bulan/Masyarakat Umum (Klasifikasi Usia, Gender dan Mata Pencaharian)	2 tahun/ 300 orang	100 orang	180 orang	250 orang	300 orang		60,000,000	Donatur personal	Pulau Bonetambu	Sikola Cendekia Pesisir
Sosialisasi dan Pendampingan PHBS		Bulan/anak	2 tahun/ 200 anak	120 anak	120 anak	120 anak	120 anak		30,000,000	Donatur personal	Pulau Bonetambu	Sikola Cendekia Pesisir
INDIKATOR SDGs: Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat												
PROGRAM 1: SMART CENTRE												
Menyediakan sarapan bergizi bagi anak pedalaman		Bulan/anak	2 tahun/ 200 anak	120 anak	120 anak	120 anak	120 anak	120 anak	200.000.000	KFC & DONATUR POTENSIAL	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
Pendidikan Tambahan		Bulan/anak	2 tahun/ 200 anak	120 anak	120 anak	120 anak	120 anak	120 anak	40.000.000	KFC & DONATUR POTENSIAL	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
TUJUAN 4 : Pendidikan Berkualitas												
INDIKATOR SDGs: Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang Pendidikan												
PROGRAM 1: Pendidikan Anak Usia Dini												
Kegiatan 1. Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.1. Terlaksananya pembelajaran pendidikan anak usia dini dan	kegiatan		1	1	1	1			Aisyiyah	TK 'Aisyiyah se-	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel

	Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul 'Athfal										Sulawesi Selatan	
Kegiatan 2 Penyelenggaran Pendidikan inklusif di TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal	1.2. Terselenggaranya pendidikan anak yang berkebutuhan khusus di TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal	kegiatan		1	1	1	1			Aisyiyah	TK 'Aisyiyah se-Sulawesi Selatan	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
Kegiatan 3 Pelatihan Pengembangan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKM)	1.3 terlatihnya peserta dalam mengembangkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKM)	kegiatan		1	1	1	1			Aisyiyah, PEMDA	Takalar dan Gowa	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
INDIKATOR SDGs: 4.1.1. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.												
PROGRAM 1: SLI (seklolah Literasi Indonesia)												
kegiatan 1: pembiasaan calistung bagi sekolah dampingan	1.1. peserta didik mampu membaca dan menuangkan ide pikiran ke dalam teks	%	50	90	-	-	-	-	-	100% dari dana zakat	Makassar, Jeneponto	DOMPET DHUAFA SULSEL
kegiatan 2: pemberian pelatihan literasi kepada para guru dan pegiat literasi di sekolah	2.1. guru mampu menyisipkan kegiatan literasi dan matematis di dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan	%	30	70	-	-	-	-	-	100% dari dana zakat	Makassar, Jeneponto	DOMPET DHUAFA SULSEL
PROGRAM 2: OSK (Olimpiade Sains Kuark)												
Mengasah kemampuan anak-anak Sekolah dasar dalam mata pelajaran di sekolah		anak	64	73	100	120	150		200	Kuark	Bulukumba	Sahabat Pulau Chapter Bulukumba
PROGRAM 2: NULIS BARENG SOBAT (NBS)												

Lokakarya dengan guru		Bulan/guru	2 tahun/ 200 anak	120 anak	120 anak	120 anak	120 anak		200	Donasi kas lembaga	Gowa dan Makassar	Sobat LemINA
Pendampingan		Bulan/anak								Donasi kas lembaga	Gowa dan Makassar	Sobat LemINA
Pentas anak		Bulan/anak							40	Donasi kas lembaga	Gowa dan Makassar	Sobat LemINA
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B												
PROGRAM 2: Dukungan bagi Pemerintah Daerah untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)												
1. Pengembangan model Pendidikan Universal bagi Anak di Desa Terpilih	Terciptanya model pendidikan universal di desa	dokumen	0	10					901,156,000	Unicef	Bone dan Takalar	Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Takalar (YPMT) bekerjasama Bappeda Kab/Provinsi
2. Pengembangan mekanisme pemenuhan KIP bagi Anak Tidak Sekolah yang kembali bersekolah	Terdistribusinya KIP (Kartu Indonesia Pintar) bagi Anak Tidak Sekolah yang kembali bersekolah	dokumen	0	2					305,510,000	Unicef	Bone dan Takalar	Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Takalar (YPMT) bekerjasama

												Bappeda Kab/Provinsi
3. Pengembangan mekanisme monitoring keberlanjutan pendidikan Anak Tidak Sekolah menggunakan Rapid Pro	Mekanisme monitoring keberlanjutan pendidikan anak tidak sekolah dengan Rapid Pro	dokumen	0	2					150,921,000	Unicef	Bone dan Takalar	Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Takalar (YPMT) bekerjasama Bappeda Kab/Provinsi
4. Moniotring dan Koordinasi hasil program oleh pemerintah provinsi	Rencana desimenasi hasil program oleh Pemerintah Provinsi	dokumen	0	1					151,625,000	Unicef	Bone dan Takalar	Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Takalar (YPMT) bekerjasama Bappeda Kab/Provinsi
Indikator SDG 4.3.1 : Tingkat Partisipasi Remaja dan Dewasa dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal												
Program 1: Sharing Inspiration (SI)												
Workshop		Sesi	2018	12 sesi	12 sesi	1 2 sesi	1 2 sesi	1 2 sesi	Rp. 30.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Makassar	BINE
Sosialisasi Beasiswa		Sesi	2018	2 sesi	2 sesi	2 sesi	2 sesi	2 sesi	Rp. 5.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE

Program 2: Sharing Inspiration (SI)												
Attractive workshop		sesi	2018	1 sesi	1 sesi	1 sesi	1 sesi	1 sesi	Rp. 25.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE
educative Expedition		sesi	2018	1 sesi	1 sesi	1 sesi	1 sesi	1 sesi	RP. 50.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE
Project Challange		sesi	2018	1 sesi	1 sesi	1 sesi	1 sesi	1 sesi	Rp. 5.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE
Project Presentation		Sesi	2018	1 sesi	1 sesi	1 sesi	1 sesi	1 sesi	Rp. 5.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE
Pelantikan		sesi	2018	1 sesi	1 sesi	1 sesi	1 sesi	1 sesi	Rp. 5.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE
PROGRAM 3: PENINGKATAN KAPASITAS RELAWAN												
Pelatihan		Bulan/orang	20	20	20	20	20		1	Kas Lembaga	Makassar	Sobat LemINA
PROGRAM 4: PUSTAKA PESISIR												
Menyediakan sarana pendidikan bagi anak anak pesisir		Bulan/anak	2 tahun/ 200 anak	50 anak	100 anak	150 anak	200 anak		40,000,000		Pulau Langkai	Sikola Cendekia Pesisir
mengadakan kelas edukasi kreatif									40			
INDIKATOR SDGs:	**4.3.1.(b)Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).**											
PROGRAM 1:	**Beasiswa Mahasiswa Sulsel**											

Pemberian beasiswa kepada mahasilwa sulsel	Bantuan biaya pendidikan diserahkan ke semua penerima beasiswa sisa tahun ajaran 2019/2020 yang masih memenuhi kriteria (+/- 80 mahasiswa) ditambah 100 mahasiswa baru mulai tahun ajaran 2020/2021	orang		80	100				965.000.000	YHK	Prov. Sulsel	YHK
INDIKATOR SDGs: 4.5 Akses yang sama terhadap semua tingkatan pendidikan												
PROGRAM 1: SATAP MENGAJAR												
Tiru Kata Kita		1 Minggu/ 50 anak	2 tahun/ 100 anak	50 anak	50 anak	50 anak	50 anak		3,5 juta	garage sale, sumbangan volunteer, sponsor dari masyarakat	sekolah SLB	SATU ATAP
Attachment		1 Minggu/ 50 anak	2 tahun/ 100 anak	50 anak	50 anak	50 anak	50 anak		2,5 juta	garage sale, sumbangan volunteer, sponsor dari masyarakat	sekolah SLB	SATU ATAP
Siskamling		1 Minggu/ 50 anak	2 tahun/ 100 anak	50 anak	50 anak	50 anak	50 anak		3 juta	garage sale, sumbangan volunteer, sponsor dari masyarakat	sekolah SLB	SATU ATAP

Berbagi Main		1 Minggu/ 50 anak	2 tahun/ 100 anak	50 anak	50 anak	50 anak	50 anak		3 juta	garage sale, sumbangan volunteer, sponsor dari masyarakat	sekolah SLB	SATU ATAP
Experiment Learning		1 Minggu/ 50 anak	2 tahun/ 100 anak	50 anak	50 anak	50 anak	50 anak		3 juta	garage sale, sumbangan volunteer, sponsor dari masyarakat	sekolah SLB	SATU ATAP
INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.												
PROGRAM 1: Bidang Pendidikan												
Bantuan Bidang Pendidikan		Orang	380	400	420	440	460	480	7,050,000	BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun												
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun												
PROGRAM 1: Desa Bangkit Sehajtera												
PKBM/ Pemberantasan buta aksara latin dan Hijaiyah.	mengadakan pelatihan pemberantasan buta aksara dan hijaiyyah mulai dari usia produktif (15-60 thn),	orang		919					143,143,000	YHK	14 Desa di 6 Kab. Takalar, Jeneponto , Gowa, Pangkep, Barru	YHK
INDIKATOR SDGs: 4.7.1 Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa												
PROGRAM 1: Mengembangkan komunitas belajar perempuan (learning community) melalui sekolah perempuan yaitu wadah pembelajaran sepanjang hayat untuk perempuan terutama kelompok rentan dari kalangan akar rumput												

Kegiatan 1: Memfasilitasi pengembangan sekolah perempuan di komunitas kepulauan terpencil	1.1 Persentase anggota sekolah perempuan yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang perspektif keadilan gender, life skill, advokasi dan kepemimpinan	%	80	90	90	90	90	90	-	-	Pangkep	YKPM
	1.2 Persentase anggota sekolah perempuan yang memiliki kesadaran dan komitmen untuk melakukan aksi-aksi mewujudkan kesetaraan gender dan perdamaian/kebhinekaan di komunitasnya	%	60	70	70	70	70	70	-	-	Pangkep	YKPM
	1.3 Jumlah desa lokasi sekolah perempuan	Wilayah	4	4	-	-	-	-	100	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	Pangkep	YKPM
	1.3 Jumlah desa lokasi replikasi sekolah perempuan	Wilayah	1	1	1	2	-	-	200,000	APBD	Pangkep	YKPM
PROGRAM 3: PEDULI (Anak Yang Dilacurkan)												
Kegiatan 1: Melakukan pelatihan fasilitator anak untuk komunitas AYLA (Anak yang Dilacurkan)	1.1 Jumlah anak yang mengikuti pelatihan fasilitator anak	Orang	35	25	-	-	-	-	15,000	DFAT-TAF	Makassar	YKPM
INDIKATOR SDGs: 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).												
PROGRAM 1. Positive change is created in the knowledge and attitudes of parents and community members in Indonesia towards children with disabilities and their rights that will increase demand for inclusive education												

Kegiatan 1: Mengadakan Gerakan edukasi dan komunikasi untuk merubah nilai dan sikap terhadap disabilitas kepada orangtua	Mengembangkan peralatan gerakan yang berfokus pada pelajar pada kehiodupan sosial inklusif di sekolah pilihan	jumlah	0	20					352,580,000	UNICEF, HKI	Pangkep, Bone	Helen Keller International (HKI)
	Komunitas berbasis kampanye pada 2 komunitas di 2 kabupaten	jumlah	0	4						UNICEF, HKI	Pangkep, Bone	Helen Keller International (HKI)
Kegiatan 2: Festival Olahraga Inklusif dan Kegiatan Komunitas Sosial untuk mendukung pendidikan inklusif\	Festival olahraga inklusif untuk mendukung pendidikan inkusif	jumlah	615	1,000					158,250,000	UNICEF, HKI	Pangkep, Bone	Helen Keller International (HKI)
PROGRAM 2. Increased understanding and commitment from targeted provincial and district government to support inclusive education												
Kegiatan 1: Pembentukan mekanisme lintas sektor dan keahlian teknikal (Bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pokja inklusif)	Monitoring bersama lintas sektor untuk pendidikan inklusif'	dokumen	1	1					135,180,000	UNICEF, HKI	Pangkep, Bone	Helen Keller International (HKI)
	Rapat Advokasi di Kabupaten	jumlah	135	50% of POKJA government use skills for planning & budgeting					119,350,000	UNICEF, HKI	Pangkep, Bone	Helen Keller International (HKI)
PROGRAM 3: Modelling Innovative Approaches using Sports as a Tool to Promote Inclusion and Participation of children with disabilities												
Kegiatan 1: Pelatihan pada tingkatan sekolah dan pengajaran langsung di lokasi	Pelatihan siswa baru	Jumlah	1,071	1,071 (70% received refreshed training)					89,780,000	UNICEF, HKI	Pangkep, Bone	Helen Keller International (HKI)
Kegiatan 2: Institutionalization of modules into pre service training	Seminar untuk menciptakan modul	Dokumen	0	10 lecturers & students from 2 universities					157,360,000	UNICEF, HKI	Pangkep, Bone	Helen Keller International (HKI)
PROGRAM 6 : RENOVASI SEKOLAH												

Survey Sekolah Layak Renovasi		Unit/Bulan	2017	0	1 Unit/ 1 Bulan	0	0	1 Unit/ 1 Bulan	1.000.000	DONATUR POTENSIAL	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
Pembuatan Gambar dan Perhitungan RAB Renovasi		Bulan	2017	0	1 Bulan	0	0	1 Bulan	3.000.000	DONATUR POTENSIAL	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
Pelaksanaan Renovasi Sekolah		Unit	2017	0	6 Bulan	0	0	6 Bulan	80.000.000	DONATUR POTENSIAL	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
INDIKATOR SDGs 4.1.1. (a): Persentasi perempuan dan anak laki-laki yang menguasai berbagai keterampilan dasar, termasuk keterampilan dalam membaca dan keterampilan matematik dasar pada akhir siklus sekola dasar												
PROGRAM 1: Bahasa Inggris, literasi, komputer dasar dan pemprograman												
Kegiatan 1: pembelajaran bahasa inggris dengan model kelas inklusi	1.1 diharapkan setelah berakhirnya program pembelajaran, siswa dapat terampil dalam meperaktekkan percakapan bahasa inggris dalam kehidupan sehari-hari	2x per pekan	20 x pertemuan / 18 anak	30 anak (15 anak berkebutuhan khusus + 15 anak tidak berkebutuhan khusus)	35 anak berkebutuhan khusus	40 anak berkebutuhan khusus	40 anak berkebutuhan khusus		165	Proposal Grant	SLB YAPTI (jl. Kapten Pierre Tendean Blk. M No. 7, Ujung pandang Baru Makassar)	TuSiWork
	1.2 diharapkan setelah berakhirnya program pembelajaran, siswa dapat menguasai grammer dasar dalam menunjang percakap dalam bahasa inggris	2 x per pekan	20 x pertemuan / 18 anak	30 anak (15 anak berkebutuhan khusus + 15 anak tidak berkebutuhan khusus)	35 anak berkebutuhan khusus	40 anak berkebutuhan khusus	40 anak berkebutuhan khusus		134	Proposal Grant	SLB YAPTI (jl. Kapten Pierre Tendean Blk. M No. 7, Ujung pandang Baru Makassar)	TuSiWork
Kegiatan 2: kelas literasi dengan model kelas inklusi	2.1 diharapkan setelah berakhirnya program pembelajaran, siswa dapat menulis cerita pendek	2 x per pekan	20 x pertemuan / 12 anak	30 anak (15 anak berkebutuhan khusus + 15 anak tidak berkebutuhan khusus)	35 anak berkebutuhan khusus	40 anak berkebutuhan khusus	40 anak berkebutuhan khusus		98	Proposal Grant	SLB YAPTI (jl. Kapten Pierre Tendean Blk. M No. 7, Ujung	TuSiWork

											pandang Baru Makassar)	
	2.2 diharapkan setelah berakhirnya program pembelajaran, siswa dapat puisi yang berhubungan dengan kehidupannya	2 x per pekan	20 x pertemuan / 12 anak	30 anak (15 anak berkebutuhan khusus + 15 anak tidak berkebutuhan khusus)	35 anak berkebutuhan khusus	40 anak berkebutuhan khusus	40 anak berkebutuhan khusus		108	Proposal Grant	SLB YAPTI (jl. Kapten Pierre Tendean Blk. M No. 7, Ujung pandang Baru Makassar)	TuSiWork
kegiatan 3: kelas komputer dasar	3.1 diharapkan setelah berakhirnya program pembelajaran siswa dapat mengoprasikan word, dan exel	1 x per pekan	20 x pertemuan / 8 anak	tidak dilaksanakan	7 anak berkebutuhan khusus	7 anak berkebutuhan khusus	7 anak berkebutuhan khusus		110	Proposal Grant	SLB YAPTI (jl. Kapten Pierre Tendean Blk. M No. 7, Ujung pandang Baru Makassar)	TuSiWork
kegiatan 4: Kelas Pemprograman	4.1 diharapkan setelah berakhirnya program pembelajaran siswa dapat membuat program web dan blog sederhana	1 x per pekan	20 x pertemuan / 7 anak	tidak dilaksanakan	7 anak berkebutuhan khusus	7 anak berkebutuhan khusus	7 anak berkebutuhan khusus		113	Proposal Grant	SLB YAPTI (jl. Kapten Pierre Tendean Blk. M No. 7, Ujung pandang Baru Makassar)	TuSiWork
Program 2: Bine Youth Volunteer												

Recruitment Volunteer		Sesi	2019		2 sesi	2 sesi	2 sesi	2 sesi	Rp. 5.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE
Mutual Meeting		meeting	2019		48 meeting	48 meeting	48 meeting	48 meeting	RP. 50.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE
Penyuluhan kesehatan		meeting	2019		4 meeting	4 meeting	4 meeting	4 meeting	Rp. 25.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE
Sosialsasi Pendidikan Karakter		meeting	2019		4 meeting	4 meeting	4 meeting	4 meeting	Rp. 25.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE
Festival		event	2019		1 event	1 event	1 event	1 event	RP. 50.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE
PROGRAM 3: LITERASI SEKOLAH												
Literasi Bulanan		Bulan/anak	39 anak	28 anak	25 anak	39 anak	-	-	3,000,000	Donasi	SD Inpres Mawang	Gowa Menyala
PROGRAM 4: Reading Challenge												
Reading Challenge		Bulan/anak	7 anak	5 anak	-	-	-	-	1,000,000	Donasi	SD Inpres Mawang	Gowa Menyala
PROGRAM 2: Ceritakan Bukumu												
Ceriatakan Bukumu		Bulan	-	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	-	5,500,000	Donasi	SD Inpres Mawang	Gowa Menyala
PROGRAM 2: Baca Keliling												
Baca Keliling		Bulan	159	1000 anak	1800 anak	1800 anak	1800	-	18,000,000	Donasi dan Perpustakaan Abdurrasyid Daeng Lurang	SD Inpres Mawang	Gowa Menyala bekerjasama Perpustakaan Abdurrasyid Daeng

												Lurang, Gowa
INDIKATOR SDGs: Angka Kelulusan SD - Melaksanakan wajib belajar 12 tahun												
PROGRAM 1: TRAVELING AND TEACHING												
Relawan Guru Sehari di Pedalaman		Lokasi/Sekolah	2018	4 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah	100.000.000	Relawan dan Donatur	Pedalaman Sul-Sel	Komunitas 1000 Guru Sulsel
Donasi Perlengkapan Sekolah		Anak	2018	320 anak	320 anak	320 anak	320 anak	320 anak	100.000.000	Relawan dan Donatur	Pedalaman Sul-Sel	Komunitas 1000 Guru Sulsel
PROGRAM 2: TEACHING AND GIVING												
Relawan Guru Sehari		Lokasi/Sekolah	2018	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	50.000.000	Relawan dan Donatur	Kota Mksr & Sekitarnya	Komunitas 1000 Guru Sulsel
Donasi Perlengkapan Sekolah		Anak	2018	200 anak	200 anak	200 anak	200 anak	200 anak	50.000.000	Relawan dan Donatur	Kota Mksr & Sekitarnya	Komunitas 1000 Guru Sulsel
PROGRAM 3: SATU BULAN MENGABDI DI PEDALAMAN (SBMP)												
Relawan Guru Banyu di Pedalaman		Bulan	2018	0	6 Bulan	0	6 Bulan	0	10.000.000	DONATUR POTENSIAL	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat		Bulan	2018	0	6 Bulan	0	6 Bulan	0	10.000.000	DONATUR POTENSIAL	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
Pembinaan Mental Kerohanian Masyarakat Pedalaman		Bulan	2018	0	6 Bulan	0	6 Bulan	0	10.000.000	DONATUR POTENSIAL	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
Sensus Sosial Ekonomi Masyarakat Pedalaman		Bulan	2018	0	2 Bulan	0	2 Bulan	0	6.000.000	DONATUR POTENSIAL	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
PROGRAM 4: PAnDa (Harapan Anak Indonesia)												

Menyediakan perlengkapan sekolah bagi anak Sekolah Dasar		anak	60	80	100	120	150		600	Donatur Perseorangan	Bulukumba	Sahabat Pulau Chapter Bulukumba
PROGRAM 5: RuBaH (Rumah Baca Harapan)												
Menyediakan tempat belajar yang menyenangkan untuk anak-anak		anak	82	96	110	120	130		150	Kuark dan Donatur lainnya	Bulukumba	Sahabat Pulau Chapter Bulukumba
INDIKATOR SDGs: Angka Kelulusan SD - Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru												
PROGRAM 6 : BEASISWA GURU PEDALAMAN (BGP)												
Seleksi Calon Penerima Beasiswa		Orang		1 Orang	0	0	0	0	1.000.000	DONATUR POTENSIAL	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
Proses Perkuliahan		Semeser		8 Semester	0	0	0	0	110.000.000	DONATUR POTENSIAL	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
Assesment (per semester)		Semeser		8 Semester	0	0	0	0	500.000	DONATUR POTENSIAL	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
Program Kembali Ke Desa		Tahun		2 Tahun	0	0	0	0	24.000.000	DONATUR POTENSIAL	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
INDIKATOR SDGs: Peningkatan Kapasitas Kerelawanan yang bergerak di Bidang Pendidikan												
PROGRAM 1: SHARING KNOWLEDGE (SK)												
Pelatihan Dasar Fotography		Sesi	2017	2 Sesi	2 Sesi	2 Sesi	2 Sesi	2 Sesi	5.000.000	Relawan dan Donatur	Kota Mksr & Sekitarnya	Komunitas 1000 Guru Sulsel
Pelatihan Dasar Design Graphic		Sesi	2017	2 Sesi	2 Sesi	2 Sesi	2 Sesi	2 Sesi	5.000.000	Relawan dan Donatur	Kota Mksr & Sekitarnya	Komunitas 1000 Guru Sulsel
Pelatihan Dasar Public Speaking		Sesi	2017	2 Sesi	2 Sesi	2 Sesi	2 Sesi	2 Sesi	5.000.000	Relawan dan Donatur	Kota Mksr & Sekitarnya	Komunitas 1000 Guru Sulsel

TOEFL & IELTS Preparation		Sesi	2017	2 Sesi	2 Sesi	2 Sesi	2 Sesi	2 Sesi	5.000.000	Relawan dan Donatur	Kota Mksr & Sekitarnya	Komunitas 1000 Guru Sulsel
INDIKATOR SDGs: Prevalensi praktek tradisional yang berbahaya - Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah												
PROGRAM 8: RURAL WOMEN EMPOWERMENT (RWE)												
Pemberantasan Buta Aksara bagi Peserta (18-45 tahun)		Bulan	2018-2020			24 Bulan			20.000.000	DANAH HIBAH LUAR NEGERI	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
Pelatihan Keuangan Keluarga (Financial Literacy) bagi peserta (18-35 tahun)		Bulan	2018-2020			24 Bulan			35.000.000	DANAH HIBAH LUAR NEGERI	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
Pelatihan Kewirausahaan Peempuan yang Berbasis di Pedalaman		Bulan	2018-2020			24 Bulan			35.000.000	DANAH HIBAH LUAR NEGERI	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
Pendampingan Unit Usaha Perempuan di Pedalaman		Bulan	2018-2020			24 Bulan			10.000.000	DANAH HIBAH LUAR NEGERI	Pedalaman Sul-Sel	1000 Guru Foundation
Tujuan 5 : KESETARAAN GENDER												
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan												
PROGRAM 1: Model Pemantauan Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif												
Menginisiasi kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pencapaian SDGs yang responsif gender	Memfasilitasi penguatan kapasitas terkait stop perkawinan anak dan SDGs untuk mahasiswa yang akan melakukan KKN	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	1,000	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	Makassar	Institut KAPAL Perempuan, YKPM, Universitas Negeri Makassar

	Memfasilitasi penguatan kapasitas tim pengembangan Pusat Studi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang responsif gender	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	5,000	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	Makassar	Institut KAPAL Perempuan, YKPM, Universitas Negeri Makassar
PROGRAM 2: MAMPU (Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan)												
Peningkatan Kapasitas Anggota Parlemen	Pelatihan Tupoksi, Pelatihan Public Speaking, Pelatihan Penyusunan Anggaran Yang Responsif Gender	Orang	270		135	135	-	-	1,000,000,000	DFAT-Australia	Tana Toraja, Parepare, dan Maros	Yayasan BaKTI
Pembentukan dan Penguatan CBO	Pembentukan Kelompok Konstituen, Pelatihan Kelompok Konstituen	Kelompok	60		60	60	-	-	3,500,000,000	DFAT-Australia	Tana Toraja, Parepare, dan Maros	Yayasan BaKTI
Penguatan Lokal NGO	Pelatihan Advokasi	Kelompok	4		4	4	-	-	800,000,000	DFAT-Australia	Tana Toraja, Parepare, dan Maros	Yayasan BaKTI
Mentoring dan Tehnical Asisten	Memberikan Pendampingan kepada Pemerinta Daerah dan Komunitas	Kelompok	60		60	60	-	-	2,000,000,000	DFAT-Australia	Tana Toraja, Parepare, dan Maros	Yayasan BaKTI
Menyusun Kebijakan yang Responsif Gender	Kebijakan Yang Dihasilkan	Kebijakan (Perda)	11		1	2	-	-	2,000,000,000	DFAT-Australia	Tana Toraja, Parepare, dan Maros	Yayasan BaKTI
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir												
PROGRAM 1:												
Pendampingan Forum Anak dan PATBM	Jumlah Forum Anak dan PATBM yang didampingi	Item	7	7	-	-	-	-	2,800	DFAT-TAF	7 Kecamata	YKPM

											n di Makassar	
Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	orang	-	28	-	-	-	-	7,000	DFAT-TAF	7 Kecamatan di Makassar	YKPM
Serial Workshop Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah masyarakat yang mengikuti workshop	Orang	-	28	-	-	-	-	10,000	DFAT-TAF	7 Kecamatan di Makassar	YKPM
INDIKATOR SDGs: 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun												
INDIKATOR SDGs:5.3.1. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.												
PROGRAM 1: PerlindunganAnak - Pencegahan perkawinan usia anak												
Penyebarluasan penelitian PSGA UIN tentang "Dinamika Perkawinan Anak di Makassar & Gowa"	Jumlah peserta	orang	0	-	-	50	50	50	30,000,000.00			
Kegiatan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan	Persentase peningkatan pengetahuan mengenai dampak perkawinana usai anak.	persen	n/a	-	-	-	30	30	60,000,000.00	UNICEF	Sulawesi Selatan	TBD
INDIKATOR SDGs: 5.3.2 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur (INDIKATOR YANG DIKEMBANGKAN)												
PROGRAM 1: Membangun kesadaran dan komitmen untuk penghapusan sunat perempuan melalui "sekolah perempuan" di 4 desa												
Kegiatan 1: Pertemuan regular sekolah perempuan untuk penghapusan sunat perempuan	1.1 Presentase anggota sekolah perempuan yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pencegahan dan penghapusan sunat perempuan	%	80	90	90	90	-	-	-	10% dana DFAT Program MAMPU, 90% APBD	Pangkep	YKPM

	1.2 Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memiliki kesadaran dan komitmen untuk melakukan upaya pencegahan dan penghapusan sunat perempuan	%	60	70	70	70	-	-	-	10% dana DFAT Program MAMPU, 90% APBD	Pangkep	YKPM
	1.3 Jumlah pertemuan anggota Sekolah Perempuan untuk pembahasan materi pencegahan dan penghapusan sunat perempuan	Kegiatan	12	2	2	2	-	-	5,000	10% dana DFAT Program MAMPU, 90% APBD	Pangkep	YKPM
	1.4 Jumlah anggota yang mengikuti proses penyadaran pencegahan dan penghapusan sunat perempuan	Orang	490	100	20	20	-	-	-	10% dana DFAT Program MAMPU, 90% APBD	Pangkep	YKPM
	1.5 Presentase kasus sunat perempuan yang didata oleh anggota Sekolah Perempuan	%	-	100	100	100	100	100	-	10% dana DFAT Program MAMPU, 90% APBD	Pangkep	YKPM
PROGRAM 2: Membangun kesadaran dan komitmen untuk memahami beban kerja perempuan yang diakibatkan oleh pembagian kerja berdasar jenis kelamin dan memberikan beban pekerjaan rumah tangga yang tidak berbayar kepada perempuan melalui "sekolah perempuan" di 4 desa												
Kegiatan 1: Pertemuan regular sekolah perempuan untuk membangun kesadaran tentang beban kerja perempuan dalam rumah tangga	1.2 Presentase anggota sekolah perempuan yang memahami perhitungan pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan lokasi	%	80	80	80	80	-	-	5,000	10% dana DFAT Program MAMPU, 90% APBD	Pangkep	YKPM

	1.2 Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memahami dampak dari pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang dibebankan kepada perempuan	%	80	80	80	80	-	-	5,000	10% dana DFAT Program MAMPU, 90% APBD	Pangkep	YKPM
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah												
PROGRAM 1: Membangun kesadaran dan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan (Musrenbang) melalui "sekolah perempuan" di 4 desa												
Kegiatan 1: Pertemuan regular sekolah perempuan untuk merumuskan isu-isu perempuan yang diusulkan dalam Musrenbang Desa sampai kabupaten	1.1 Presentase anggota sekolah perempuan yang memiliki pemahaman tentang Musrenbang dan pentingnya perempuan terlibat aktif dalam Musrenbang	%	80	80	80	80	80	80	-	YKPM	Pangkep	YKPM
	1.2 Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memiliki kemampuan merumuskan isu-isu perempuan yang penting diusulkan dalam Musrenbang (penghapusan perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan, sunat perempuan, beban ganda perempuan, meningkatkan partisipasi	%	60	60	60	60	60	60	-	YKPM	Pangkep	YKPM

	perempuan dalam pengambilan keputusan)											
	1.3 Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memahami cara mengawal usulan dalam Musrenbang	%	30	40	40	40	40	40	-	YKPM	Pangkep	YKPM
	1.4 Presentase anggota Sekolah Perempuan yang memahami arti penting mendesakkan Musrenbang Perempuan sebagai strategi mempercepat advokasi isu-isu perempuan	%	30	40	40	40	40	40	-	YKPM	Pangkep	YKPM
Kegiatan 2: Partisipasi perempuan dalam Musrenbang desa sampai kabupaten	2.1 Jumlah delegasi dari anggota sekolah perempuan yang terlibat aktif mengikuti musrenbang tingkat desa-kabupaten	Orang	80	80	80	80	80	80	-	YKPM	Pangkep	YKPM

	2.2 Presentase delegasi sekolah perempuan yang aktif mempengaruhi pengambilan keputusan dalam musrenbang	%	60	60	60	60	60	60	-	YKPM	Pangkep	YKPM
	2.3 Jumlah usulan yang masuk dalam musrenbang	Item	12	12	12	12	12	12	-	YKPM	Pangkep	YKPM
	2.4 Jumlah usulan yang berhasil dimasukkan sebagai program dan disediakan anggaran oleh pemerintah	Item	6	6	6	6	6	6	-	YKPM	Pangkep	YKPM
Kegiatan 3: Penguatan jaringan multipihak dari tingkat desa sampai kabupaten untuk advokasi terbitnya peraturan yang responsif gender terutama pencegahan dan penghapusan perkawinan anak	3.1 Jumlah anggota forum multipihak yang terdiri dari pemerintah, jurnalis, organisasi kemasyarakatan, akademisi yang membahas isu-isu terkait dengan goal 5 SDGs	Orang	100	100	-	-	-	-	5,000	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	Pangkep	YKPM
	3.2 Presentase anggota forum multipihak yang aktif mendukung advokasi yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan terkait goal 5 SGDs	%	75	75	-	-	-	-	5,000	Program MAMPU-DFAT (I=Tersedia)	Pangkep	YKPM
Kegiatan 4: Asistensi penyusunan kebijakan yang responsif gender terutama terkait capaian SDGs goal 5 tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan anak	4.1 Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan kebijakan daerah	Kegiatan	3	1	1	1	1	1	5,000	10% dana DFAT Program MAMPU, 90% APBD	Pangkep	YKPM

	4.2 Presentase pemerintah daerah yang memiliki kapasitas dalam penyusunan kebijakan yang mendukung pencapaian target dan indikator goal 5 SDGs	%	60	65	65	65	65	65	5,000	10% dana DFAT Program MAMPU, 90% APBD	Pangkep	YKPM
	4.3 Presentase pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk menerbitkan kebijakan untuk mendukung pencapaian target dan indikator goal 5 SDGs	%	40	40	40	40	40	40	5,000	10% dana DFAT Program MAMPU, 90% APBD	Pangkep	YKPM
INDIKATOR SDGs: 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi												
PROGRAM 1: Membangun kesadaran dan komitmen untuk membuat keputusan terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi melalui "Sekolah Perempuan" di 4 desa												
Kegiatan 1: Pertemuan regular sekolah perempuan untuk membangun kesadaran tentang otonomi tubuh, seksualitas dan kesehatan reproduksi	1.1 Jumlah pertemuan sekolah perempuan untuk membangun kesadaran tentang otonomi tubuh, seksualitas dan kesehatan reproduksi	Kegiatan	2	1	1	1	-	-	5,000	10% dana DFAT Program MAMPU, 90% APBD	4 desa di Kab. Pangkep	YKPM
	1.2 Presentase anggota Sekolah Perempuan yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan	%	40	45	50	50	-	-	5,000	10% dana DFAT Program MAMPU, 90% APBD	4 desa di Kab. Pangkep	YKPM

	layanan kesehatan reproduksi											
INDIKATOR SDGs: median usia kawin pertama perempuan (usia subur Perempuan)												
PROGRAM 1: program Kesehatan Reproduksi Remaja												
Sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Meningkatnya jumlah remaja yang memahami tentang kesehatan reproduksi Remaja	Kegiatan		1	1	1				Aisyiyah dan PEMDA	Sekolah 'Aisyiyah	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel
PROGRAM 2: Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan												
Pelatihan Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management dan knowlegde sharing) bagi pimpinan 'Aisyiyah dan kader 'Aisyiyah	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pimpinan perempuan dalam mengelola dan mengarahkan gerak organisasi	Kegiatan		1	1	1				Aisyiyah dan PEMDA	Pimpinan Organisasi di semua Level	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah
Pelatihan Sistem Informasi 'Aisyiyah (SIA) mengenai managemen administrasi, penggalian dana untuk organisasi non-profit (fundrising), berjejaring (networking) dan inovasi program untuk Organisasi Kemasyarakat	Peningkatan pengetahuan dan penguasaan Sistem Informasi 'Aisyiyah	Kegiatan		1	1	1				Aisyiyah	Pimpinan Organisasi di semua Level	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah

MATRIKS BAGIAN III: PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2017) (3)	Target Tahunan (4)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Ribu) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Instansi/ Lembaga Pelaksana (8)
				2019	2020	2021	2022	2023				
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU												
INDIKATOR SDGs: 7.1.2 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.												
PROGRAM 1: Bantuan Lampu Tenaga Surya												
Pembagian lampu tenaga surya kepada kaum dhuafa yang belum terjangkau jaringan PLN di Sulsel	Jumlah paket pembantu tenaga listrik mini yang dibagikan	Paket		120					240,000,000	YHK	Kab/Kota di prov. Sulsel	YHK
INDIKATOR SDGs: Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih												
PROGRAM 1: INDONESIAN DOMESTIC BIOGAS PROGAM (IDBP) atau PROGRAM BIRU (BIOGAS RUMAH) - PHASE OUT PROJECT												
Kegiatan 1: Pembangunan digester biogas rumah tangga	Akses terhadap energi bersih untuk bahan bakar memasak (biogas)	Rumah Tangga	-	900	-	-	-	-	1,800,000,000	Hivos	Luwu Utara, Wajo, Pinrang, Bone, Sinjai, Bulukumba, Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, Barru,Enrekang	
Kegiatan 2: Assesment dan identifikasi kebutuhan CPOs	Terbentuknya Biogas Service Centre untuk memastikan	Dokumen	-	1	-	-	-	-		Hivos	Takalar	

terpilih untuk biogas service centre	ketersediaan peralatan dan after sales service (ASS).											
Kegiatan 3: Pengembangan modul dan atau tools oleh konsultan disesuaikan dengan kebutuhan CPO terpilih		Dokumen	-	1	-	-	-	-		Hivos	Takalar	
Kegiatan 4: Training dan workshop berdasarkan kebutuhan hasil assesment		Kegiatan	-	1	-	-	-	-		Hivos		
Kegiatan 5: Memfasilitasi hubungan dengan LPO (Loan Partnership Organisation)/ peminjam / sektor swasta / Bank / lembaga keuangan untuk pengguna potensial dan SMSe Biogas(CPO)	ESTABLISHED PUBLIC AND PRIVATE SECTOR PARTNERSHIP TO SUPPORT BIOGAS DISSEMINATION	Kegiatan	-	3	-	-	-	-		Hivos	Toraja, Toraja Utara	
Melakukan FGD - lokakarya dengan LPO tentang pelajaran yang dipetik dan praktik terbaik, aspek teknis biogas, profil pengguna dan	Memperkuat sektor biogas melalui proses mempengaruhi kebijakan (Lobi & Advokasi)	Kegiatan	-	1	-	-	-	-		Hivos	Luwu Utara, Wajo, Pinrang, Bone, Sinjai, Bulukumba, Takalar,	

mekanisme pengumpulan pembayaran pinjaman											Gowa, Maros, Pangkep, Barru,Enrekang	
Penyebaran materi advokasi melalui jaringan IDBP, platform online dan offline kepada masyarakat umum		Kegiatan	-	10	-	-	-	-		Hivos	Luwu Utara, Wajo, Pinrang, Bone, Sinjai, Bulukumba, Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, Barru,Enrekang	
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI												
INDIKATOR SDGs: 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.												
PROGRAM 1: Pemberdayaan Umat Rentan Aqidah												
Pemberdayaan ekonomi dengan melaksanakan peternakan kambing.	pemberdayaan ekonomi terlaksana pelatihan wirausaha serta pemberian modal usaha	Ekor		34	42				114,400,000	YHK	Desa Borong Bulo Kab.Gowa	YHK Bekerjasama dengan Lembaga IZI
TUJUAN 9 : INDUSTRI,INOVASI DAN INFRASTRUKTUR												
INDIKATOR SDGs: 9.b.1 Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.												
PROGRAM 1: Mobil Angkutan untuk Anak Sekolah (Pasikola)												
Inspirasi BaKTI	Mensosialisasikan ide-ide baik yang terkait dengan inovasi baru yang	Kegiatan	60		12	12	12	12	60,000,000	BaKTI	Kota Makassar	Yayasan BaKTI

	bisa diduplikasikan di wilayah lain											
TUJUAN 10.: BERKURANGNYA KESENJANGAN												
Indikator SDG 10.B.1 (A). Peningkatan Saling Berbagi Pengetahuan dalam Kerangka KerjasamaSelatan-Selatan Triangular.												
Program 4: Indonesian Essay Presentation Awards												
Essay Presentation		tahun	2019		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Rp. 25.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE
Conference		tahun	2019		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Rp. 100.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE
Festival Inovasi		tahun	2019		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Rp. 75.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE
Malam Penganugerahan		tahun	2019		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	RP. 50.000.000	Usaha Kreatif & Donatur	Kota Kabupaten di Sulsel	BINE

MATRIKS BAGIAN III: PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2017) (3)	Target Tahunan (4)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Ribu) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Instansi/ Lembaga Pelaksana (8)
				2019	2020	2021	2022	2023				
Tujuan 6 : AIR BERSIH DAN SANITASILAYAK												
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak												
PROGRAM 1: Meningkatkan kinerja PDAM (kelembagaan, operasional. Dll) .												
1.1 Pelatihan Penurunan NRW	1.1.1 Jumlah staf PDAM mendapat peningkatan kapasitas perihal bagaimana menurukan tingkat kehilangan air.	Orang			8					USAID	Makassar, Barru, Bulukumba & Bantaeng	IUWASH PLUS
	1.2.1 Jumlah PDAM memiliki rencana aksi penurunan NRW	Institusi			1					USAID	Kab. Barru	IUWASH PLUS
1.2 Pendampingan pengendalian NRW	2.1.1 PDAM Kab. Barru mampu menurunkan tingkat NRW.	Paket/PO			1					USAID	Kab. Barru	IUWASH PLUS
1.3 Kajian "Finding & Effective Approach and Incentive to Increase Water Supply Access for B40"	1.3.1 Hasil kajian	Paket/PO			1					USAID	Makassar, Barru, Bulukumba & Bantaeng	IUWASH PLUS
1.4 Penyusunan SOP Keuangan	1.4.1 Jumlah SOP Keuangan PDAM	Dokumen			2					USAID	Kab. Barru, Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS

	1.4.2 Jumlah orang yang mendapat pelatihan penyusunan SOP	Orang								USAID	Kab. Barru, Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS
1.5 Penyusunan/Revisi Bussines plan	1.5.1 Jumlah PDAM yang mendapat pendampingan penyusunan Bussines plan PDAM	Institusi	2		1					USAID	Kab. Bantaeng, Kab. Barru dan Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS
	1.5.2 Jumlah Bussines plan yang mendapat pendampingan	Dokumen	2		1					USAID	Kab. Bantaeng, Kab. Barru dan Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS
1.6 Evaluasi Tarif PDAM	1.6.1 Tarif baru PDAM	FGD			1					USAID, PDAM	Kab. Barru	IUWASH PLUS
1.7 Pendampingan penyusunan RKAP	1.7.1 Jumlah PDAM yang mendapat pendampingan penyusunan RKAP	Institusi		1						USAID	Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS
	1.7.2 Jumlah RKAP yang mendapat pendampingan	Dokumen		1						USAID	Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS
PROGRAM 2: Penguatan Rencana Pengamanan Air Minum												
2.1 Penyusunan dokumen RPAM	2.1.1 Jumlah Dokumen KKMA yang tersusun	Dokumen			2					USAID - APBD	Kab. Bantaeng dan Bulukumba	USAID IUWASH PLUS, Pokja AMPL
	2.1.2 Jumlah orang yang mendapat penguatan penyusunan KKMA	Orang								USAID - APBD	Kab. Bantaeng dan	USAID IUWASH

											Bulukumba	PLUS, Pokja AMPL
PROGRAM 3: Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA)												
3.1 Pemasaran dan Sosialisasi SR	3.1.1 Jumlah sambungan rumah sebagai pelanggan	SR								USAID		
3.2 Penyusunan Feasibility studi	3.2.1 hasil kajian Feasibility studi	Dokumen		1						USAID	Kota Makassar	IUWASH PLUS
PROGRAM 4: Dukungan Program Hibah MBR												
4.1 Membantu menyiapkan readines criteria	4.1.1 Perda Penyertaan Modal	Regulasi	1		1					USAID	Kab. Banateng dan Kab. Barru	IUWASH PLUS
4.2 Sosialisasi Sabungan Rumah	4.2.1 Jumlah sambungan rumah sebagai pelanggan PDAM	SR	1207	506	1000					USAID	Kab. Banateng dan Kab. Barru	IUWASH PLUS
PROGRAM 5: Micro Finance												
5.1 Pelatihan MFI Tools Kit	5.1.1 Jumlah LKM yang mendapat pelatihan MFI Tools kita	Institusi			3					USAID	Kota Makassar, Kab. Barru	IUWASH PLUS
	5.1.2 Jumlah orang yang mendapat pelatiahn MFI Tools kita	Orang								USAID	Kota Makassar, Kab. Barru	IUWASH PLUS
5.2 Pelatihan Promosi WASH perkotaan	5.2.1 Jumlah LKM yang mendapat pelatihan UWP	Institusi		2						USAID	Kota Makassar	IUWASH PLUS
	5.2.2 Jumlah staf LKM yang mendapat pelatihan UWP	Orang								USAID	Kota Makassar	IUWASH PLUS
PROGRAM 6: Pendampingan GIS												

6.1 Peningkatan kapasitas staf PDAM	6.1.1 Jumlah staf PDAM yang mendapat peningkatan kapasitas terkait GS	Orang	8		1					USAID	Kota Makassar, kab. Barru, Kab. Bantaeng, kab. Bulukumba	IUWASH PLUS
	6.1.2 Jumlah PDAM yang mendapat pendampingan GIS	Institusi	1							USAID	Kota Makassar	IUWASH PLUS
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.												
PROGRAM 1: Peningkatan Akses Sanitasi Individu di tingkat masyarakat												
1.1 Penyiapan Masyarakat	1.1.1 Jumlah Kelurahan yang mendapat sosialisasi/promosi	Kelurahan	19	6	14					USAID	Kota Makassar, Kab. Barru. Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS
	1.1.2 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyiapkan masyarakat	Kegiatan	46	12	16					USAID	Kota Makassar, Kab. Barru. Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS

1.2 Peningkatan akses layanan sanitasi	1.2.1 Jumlah Rumah Tangga yang meningkat aksesnya	Rumah tangga	50	150	1,420					USAID	Kota Makassar, Kab. Barru. Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS
PROGRAM 2: Peningkatan Akses Sanitasi skala Komunal												
2.1 Penyiapan Masyarakat	2.1.1 Jumlah kelurahan yang mendapat sosialisasi/promosi	Rumah Tangga	19	17	2					USAID	Kota Makassar, Kab. Barru. Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS
	2.1.2 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyiapkan masyarakat	Kegiatan		20	4					USAID	Kota Makassar, Kab. Barru. Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS
2.2 Penguatan kelembagaan kelompok pengguna dan pemelihara	2.2.1 Sejumlah kelompok Pengguna dan Pemelihara terbentuk	Kelompok								USAID	Kota Makassar, Kab. Barru. Kab. Bantaeng, Kab.	IUWASH PLUS

											Bulukumba	
	2.2.2 Sejumlah kelompok Pengguna dan Pemelihara mendapat penguatan kapasitas	KPP		39	5					USAID	Kota Makassar, Kab. Barru. Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS
2.3 Peningkatan akses layanan sanitasi	2.3.1 Jumlah Rumah Tangga yang meningkat aksesnya	KK		450	100					USAID	Kota Makassar, Kab. Barru. Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS
PROGRAM 3: Membentuk pengusaha Sanitasi												
3.1 Membentuk Pengusaha Sanitasi	3.1.1 Jumlah pengusaha sanitasi yang terlatih	Orang/Lembaga		5	2					USAID	Kota Makassar, Kab. Barru. Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS

	3.1.1 Jumlah tukang yang telah mendapat pelatihan teknis	Orang		26	15					USAID	Kota Makassar, Kab. Barru. Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba	IUWASH PLUS
3.2 Mendampingi lembaga yang akan berfungsi sebagai BDS	3.2 Terpilihnya satu lembaga sebagai BDS yang akan memperkuat strategi pemasaran sanitasi	OP/Paket			1					USAID	Kota Makassar, Kab. Barru	IUWASH PLUS
PROGRAM 4: LLTT / LLTTT												
4.1 Lokakarya sosialisasi program kepada Pokja AMPL/OPD Teknik	4.1.1 jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan								USAID	Kota Makassar, Kab. Bantaeng, Kab. Barru	IUWASH PLUS - UPTD PALD
	4.1.2 Jumlah Pemerintah daerah sepakat menjalankan program LLTT	Pemda	2		1	1				USAID	Kota Makassar, Kab. Bantaeng, Kab. Barru, kab. Bulukumba	IUWASH PLUS - UPTD PALD
4.2 Perhitungan dan penetapan tarif untuk penyedotan	4.2.1 Tarif sedot penyedotan tinja yang disepakati	Hasil perhitungan	2		1	1				USAID	Kota Makassar, Kab. Bantaeng, Kab.	IUWASH PLUS - UPTD PALD

											Barru, kab. Bulukumba	
4.3 Penyusunan Data base pelanggan	4.3.1 Jumlah Pelanggan yang masuk ke dalam Data base.	Rumah Tangga	4,000	40,000	400	500				USAID	Kota Makassar, Kab. Bantaeng, Kab. Barru	IUWASH PLUS - UPTD PALD
PROGRAM 5: Mekanisme Pelibatan masyarakat di bid. Komunikasi WASH												
5.1 Pembentukan Mekanisme pelibatan warga	5.1.1 Jumlah mekanisme pelibatan warga yang berjalan	Mekanisme			4					USAID - APBD	Kota Makassar, Kab. Bulukumba, Kab. Barru, Kab. Bantaeng	IUWASH PLUS, Pemda
PROGRAM 6: Micro finance												
6.1 Peningkatan kapasitas terhadap LKM	6.1.1 Jumlah LKM yang mendapat peningkatan kapasitas	Institusi		2	2					USAID	Kota Makassar, Kab. Barru	IUWASH PLUS
PROGRAM 7: Promosi Sanitasi												

7.1 Pelatihan Promosi WASH Perkotaan	7.1.1 Jumlah pelatihan yang dilakukan untuk promosi WASH Perkotaan	Kegiatan		10						USAID	Kota Makassar, Kab. Bulukumba, Kab. Barru, Kab. Bantaeng	IUWASH PLUS
7.2 Implementasi Monitoring dan evaluasi partisipatif	7.2.1 Jumlah orang yang dilatih menjadi tim monev	Orang		169	78					USAID	Kota Makassar, Kab. Bulukumba, Kab. Barru, Kab. Bantaeng	IUWASH PLUS
	7.2.2 jumlah pelatihan yang dilakukan untuk memperkuat tim monev	Kegiatan		14	8					USAID	Kota Makassar, Kab. Bulukumba, Kab. Barru, Kab. Bantaeng	IUWASH PLUS
	7.2.3 jumlah lokasi yang didampingi secara terpadu	Kelurahan (RT/RW)	19	19	21					USAID	Kota Makassar, Kab. Bulukumba, Kab. Barru, Kab. Bantaeng	IUWASH PLUS
	7.2.4 jumlah kegiatan tahapan monev partisipatif yang difasilitasi	Kegiatan		122	134					USAID	Kota Makassar, Kab. Bulukumba, Kab.	IUWASH PLUS

											Barru, Kab. Bantaeng	
7.3 Pengambilan data wash rumah tangga menggunakan aolikasi mWater	7.3.1 jumlah orang yang telah dilatih menggunakan mWater.	Orang	25	111	60					USAID	Kota Makassar, Kab. Bulukumba, Kab. Barru, Kab. Bantaeng	IUWASH PLUS
	7.3.2 jumlah Pelatihan menggunakan aplikasi mWater.	Kegiatan	4	2	1					USAID	Kota Makassar, Kab. Bulukumba, Kab. Barru, Kab. Bantaeng	IUWASH PLUS
PROGRAM 8: Pembentukan UPTD PALD												
8.1. Pendampingan pembentukan UPTD	8.1.1 Terbentuknya operator pengelola air limbah domestik di tingkat kabupaten	Institusi			2					USAID - APBD	Kab. Bulukumba dan Kab. Barru	IUWASH PLUS
PROGRAM 9: Pendampingan UPTD PALD												
9.1 Review dokumen roadmap dan SOP	9.1.1 Jumlah Roadmap dan SOP yg telah direvisi	dokumen	1 Road Map 31 SOP	1 Road Map 31 SOP						USAID	Kota Makassar dan Kab. Bantaeng	IUWASH PLUS

	9.1.2 Jumlah roadmap dan SOP yang telah disusun	dokumen			3 SOP	7 SOP				USAID	Kab. Barru	IUWASH PLUS
9.2 Pelatihan Teknik dan Non teknik	9.2.1 Jumlah Pelatihan teknik dan non teknik yang diberikan	Kegiatan	2	2	2	3				USAID	Kota Makassar, Kab. Barru dan Kab. Bantaeng	IUWASH PLUS
PROGRAM 10: Peningkatan / Pembangunan IPLT												
10.1 Penilaian Kondisi IPLT	10.1.1 Rencana opsi perbaikan	Kegiatan	2	1						USAID	Kota Makassar, Kab. Bulukumba dan Kab. Bantaeng	IUWASH PLUS
10.2 Penyusunan DED IPLT	10.2.1 Jumlah DED IPLT yg telah disusun	Dokumen			1					USAID	Kota Makassar	IUWASH PLUS
PROGRAM 11: Pendampingan Pokja AMPL												
11.1 Rapat Koordinasi rutin	Jumlah rapat koordinasi untuk membahas berbagai topik/isue terkait air minum dan sanitasi	Kegiatan	1	2	4	4				USAID - APBD	Kota Makassar, Kab. Barru. Kab. Bulukumba dan Kab. Bantaeng	IUWASH PLUS, Pokja AMPL
PROGRAM 12: Penyusunan / Revisi Peraturan Daerah / Perkada												

12.1 Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dalam rangka promosi akses perbaikan layanan WASH	Peraturan tentang air minum, sanitasi dan perilaku hiegine	Regulasi	2	3	3	1				USAID - APBD	Kota Makassar, Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba dan Kab. Barru	USAID IUWASH PLUS
PROGRAM 13: Pembangunan 30 unit jamban sehat untuk 30 KK												
Pembangunan 30 unit jamban sehat untuk 30 KK (warga dhuafa)	30 unit jamban sehat dapat digunakan oleh warga penerima manfaat	Unit		10	30				408,404,700	YHK	Kota Makassar	YHK Bekerjasama dengan Batalyon Kavaleri Mandagiri & Kontraktor Lokal Makassar
INDIKATOR SDGs: 6.b.1. Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi												
PROGRAM 1: Air dan Sanitasi Masyarakat												

Kegiatan 1: Advokasi kebijakan untuk memprioritaskan sektor AMPL di Sulawesi Selatan, sejalan dengan target Akses Sanitasi Universal. Secara khusus kegiatan yg direncanakan adalah: - Lokakarya penggunaan dana ZISWAF untuk pembangunan sanitasi untuk BAZNAS se-Sulsel (termasuk dokumentasi). - Pendampingan teknis untuk advokasi dan kemitraan di Pokja AMPL. - Advokasi dan lokakarya penggunaan Dana Desa untuk mendukung program Desa Sehat dan sanitasi secara khusus (termasuk dokumentasi).	# lokakarya pemanfaatan dana ZISWAF untuk sanitasi di tingkat provinsi. % kab/kota yg berpartisipasi dalam lokakarya pemanfaatan dana ZISWAF untuk sanitasi. # kab/kota dengan model pemanfaatan dana ZISWAF di prov Sulsel. # desa yang mengimplementasikan model pemanfaatan dana desa untuk mendukung program Desa Sehat. # dokumentasi pemanfaatan dana ZISWAF di Sulsel. # documentation on village fund utilisation on village fund for healthy village programme	lokakarya kab/kota kab/kota desa buku/booklet buku/booklet	0 0 1 5 0 0	1 90% 3 15 1 1					287,800	UNICEF & Yayasan Bakti	Sulawesi Selatan	Yayasan Bakti

Kegiatan 2: Mendukung penguatan pendokumentasian praktek baik di bidang AMPL, termasuk di dalamnya penyebarluasan (diseminasi) hasil-hasil praktek baik tersebut ke kabupaten dan kota. Secara khusus kegiatan yg direncanakan adalah: - Mendukung kegiatan Pembelajaran dan Pameran Praktek Baik di bidang AMPL di tingkat Sulawesi Selatan. - Evaluasi manajemen data AMPL dan platform penyebaran pengetahuan. - Pendampingan teknis untuk KM dan manajemen data untuk Pokja AMPL Sulsel.	# Event Pameran dan pembelajaran AMPL yang dilaksanakan di tingkat Provinsi. % kab/kota yg menghadiri kegiatan pameran dan pembelajaran AMPL. # dokumentasi praktek baik dari kab/kota. # lokakarya manajemen data yang dilaksanakan di tingkat provinsi. % kab/kota dengan pemanfaatan peningkatan kualitas manajemen data AMPL.	Event Kab/Kota Buku/Booklet Lokakarya Kab/Kota	1 0 0 1 0	1 90% 1 1 50%					293,050	UNICEF & Yayasan Bakti	Sulawesi Selatan	Yayasan Bakti
PROGRAM 2: Air dan Sanitasi di Sekolah												

Kegiatan 1: Pembuatan advokasi berbasis bukti untuk peran Sanitasi Sekolah, dan sinergi dengan program AMPL lainnya di dalam Pokja AMPL di Sulsel. Termasuk di dalamnya: - Lokakarya pembuatan Strategi Sanitasi Sekolah dan pengintegrasiannya ke Strategi Sanitasi Kabupaten, berdasarkan pengalaman Kab. Luwu Utara. - Lokakarya Implementasi program Sanitasi Sekolah berbasis partisipatif di 1 kabupaten (termasuk dokumentasi). - Pendampingan teknis untuk Sanitasi Sekolah ke Pokja AMPL.	# lokakarya integrasi SSS ke dalam SSK di tingkat Prov. # kab/kota yg membuat SSS # sekolah dengan model penerapan Sanitasi Sekolah di tingkat kab/kota. # dokumentasi penerapan Sanitasi Sekolah di Sulsel.	lokakarya Kab/Kota Sekolah Buku/Booklet	0 1 120 sekolah di 3 kab 1	1 4 penambahan 10 sekolah dari 1 kab 1					217,300,000	UNICEF & Yayasan Bakti	Sulawesi Selatan	Yayasan Bakti
TUJUAN 13 : PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM												
PROGRAM 1: Sahabat Peduli												
Peduli Bencana Nusantara		disesuiakan dengan konsisi dan	–	–	–	–	–		–	Donatur dan Perusaahan CSR	Tersebar diseluruh Indonesia	BMH Hidayatullah

		kebutuha di lokasi										
Solidaritas Kemanusiaan		Program Donasi disesuiakan dengan konsisi dan kebutuhan di lapangan	–	–	–	–	–		–	Donatur dan Perusaahan CSR	Tersebar diseluruh Indonesia	BMH Hidayatullah
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN												
INDIKATOR SDGs: 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan												
PROGRAM 1: Penghijauan Hulu Sungai dan DAS (Daerah Aliran Sungai)												
Menanam Pohon Pelindung di Area Hulu dan DAS	Kegiatan utamanyan adalah membuat kebun 30 bibit tanaman hutan di 30 desa yang tersebar di Hulu sungai Jeneberang	Bibit		33					60,000,000	YHK	33 Desa di Kab. Gowa	YHK Bekerjasama dengan P2KKN UNHAS

MATRIKS BAGIAN III: PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2017) (3)	Target Tahunan (4)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Ribu) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Instansi/ Lembaga Pelaksana (8)
				2019	2020	2021	2022	2023				
TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN												
INDIKATOR SDGs: 17.2.1. Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assisstance - ODA) → Bantuan pembangunan bersih sebagai proporsi terhadap Pendapatan nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan												
PROGRAM 1: Technical Cooperation Projects (Proyek Kerjasama Teknis)												
Kegiatan 1: Pusat Proyek Teknologi (COT), Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin	2016 - 2019	Project		1					no data	JICA Technical Cooperation		JICA
Kegiatan 2: Pengembangan SDM untuk Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa	1. Kerjasama Antar Daerah 2. Workshop/Training 3. Pelatihan Pendamping Desa 4. Pelatihan Aparat Desa	Kegiatan		1. Workshop/ Training = 2						JICA Technical Cooperation		JICA dan Pemprov atau Pemkab
PROGRAM 2: Knowledge Co-creation Program and Training Program for young leaders (KCCP & Training Program)												

Kegiatan 1: Pelatihan Peserta Pengembangan Lokal Sosial (Participatory Local Social Development (PLSD) Training) di Jepang	Peserta	Kegiatan		1	1	1	1	1	no data	JICA Technical Cooperation		JICA
Kegiatan 2: Pelatihan Pemerintah Lokal di Tokyo, Jepang I	peserta	Kegiatan							no data	JICA Technical Cooperation		JICA
Kegiatan 3: Pelatihan Kewirausahaan berbasis pengusaha masyarakat perdesaan (Community based entrepreneurship for rural) di Kyushu, Jepang	Peserta	Kegiatan							no data	JICA Technical Cooperation		JICA
Kegiatan 4: Pelatihan Pengembangan UKM dan Promosi (SME development and promotion) di Hokkaido, Jepang	Peserta	Kegiatan							no data	JICA Technical Cooperation		JICA
Kegiatan 5: KCCP Training Pengembangan Ekowisata di Okinawa, Jepang	Peserta	Kegiatan		1					no data	JICA Technical Cooperation		JICA
PROGRAM 3: Assignment of JICA experts (TA) in South Sulawesi												

Kegiatan 1: Tenaga Ahli selaku Penasihat Kebijakan untuk Wilayah Sulawesi		Orang		TA=1					no data	JICA Technical Cooperation	Bappeda Prov. Sulsel	JICA
Kegiatan 2: Tenaga Ahli pada C-BEST Project, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin		Orang		TA=2					no data	JICA Technical Cooperation	Fak. Teknik UNHAS, Kab Gowa.	JICA
PROGRAM 4: Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV): Junior Expert (JE) and Silver Expert (SE) dispatch to South Sulawesi												
Kegiatan 1: Penugasan Junior Expert Bidang Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan		Orang	0	0					no data	JICA Technical Cooperation		JICA
Kegiatan 2: Penugasan Junior Expert Bidang Pendidikan Dasar		Orang	0	0					no data	JICA Technical Cooperation		JICA
Kegiatan 3: Penugasan Junior Expert Bidang Community Development		Orang	JE=1	JE=1					no data	JICA Technical Cooperation	Kab. Pangkep	JICA
Kegiatan 4: Penugasan Junior Expert Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kebidanan		Orang	JE=2	JE=3					no data	JICA Technical Cooperation	Kab. Takalar, Kab. Barru, Kab. Maros	JICA

Kegiatan 5: Penugasan Junior Expert Bidang Prestasi Olahraga Judo		Orang	0	JE=1	JE=1	JE=1			no data	JICA Technical Cooperation	Dispora, Kota Makassar	JICA
Kegiatan 6: Penugasan Junior Expert Bidang Lingkungan Hidup (Pendidikan)		Orang	JE=2	JE=1					no data	JICA Technical Cooperation	Kab. Bulukumba, Makassar	JICA
PROGRAM 5: Grassroot Technical Cooperation Program												
Kegiatan 1: Projek Kerjasama Penanganan Kebocoran Air Bawah Tanah antara PDAM Kota Makassar dengan Kota Kawasaki Jepang 2019-2022		Project akan dimulai 2019 (terjadwal)	0	1	1	1	1		no data	JICA Technical Cooperation	Kota Makassar	JICA dan PDAM Kota Makassar
INDIKATOR SDGs: 17.17.1 Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil												
PROGRAM 1: FESTIVAL ANAK												
Festival Anak		Bulan/anak		500 anak		800 anak			100	Sponsorship	Makassar	Sobat LemINA

MATRIKS KABUPATEN BULUKUMBA

Nama kabupaten : Kabupaten Bulukumba

Periode RPJMD : 2016-2021

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun												
INDIKATOR SDGs:	**1.1.1**	**Tingkat kemiskinan ekstrim.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Bukan Kewenangan Kab
INDIKATOR SDGs:	**1.2.1***	**Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional**										
PROGRAM 1: ……												
Program												
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Tersedianya bantuan bagi klg miskin	Kecamatan	4	6	5	5	7	6	5	6.5 M	APBD	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs:	**1.2.2**	**Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												BPS
INDIKATOR SDGs:	**1.3.1**	**Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.**										
	1.3.1.(a)	**Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.**										
	1.3.1.(b)	**Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.**										

	1.3.1.(c)	**Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.**										
	1.3.1.(d)	**Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.**										
PROGRAM 1: Jaminan Hari Tua (perluasan kepersertaan)												
Kegiatan 1: perluasan kepersertaan melalui Sosialisasi, Rapat KSO, Peningkatan pelayanan dalam pembayaran premi	meningkatnya jumlah kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta	522	1.392	2802	4000	4400	4840	5324	850jt	BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan
Program												
Kegiatan Pemberian bantuan jaminan sosial dan UEP kepada penyandang disabilitas	Bantuan JS dan UEB	Orang	23	30	30	35	40	50	60	850jt	APBD	Dinas Sosial
Program												
Kegiatan Pengembangan Program Keluarga Harapan	terselenggaranya Program PKH	Orang	0	2.696	6.229	6.229	70.000	80.000	90.000	15M	APBN	Dinas Sosial
PROGRAM 1: Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kegiatan 1: Pelayanan Kesehatan Gratis	Junmlah penduduk yang terlayani	%	10	35	50	50	60	80	85	97.500	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Peserta JKN	%	50	70	70	80	90	95	95	85.500	APBD	
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma												
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma		%	2.12	3	5	7	9	10	12	14	APBD	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial												

Pengembangan Program Keluarga Harapan		Rumah Tangga	2696	3000	10.000	50.000	70.000	80.000	90.000	15M	APBN	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs:	**1.4.1**	**Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.**										
	1.4.1.(a)	**Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.**										
	1.4.1.(b)	**Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.**										
	1.4.1.(c)	**Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.**										
	1.4.1.(d)	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.**										
	1.4.1.(e)	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.**										
	1.4.1.(f)	**Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.**										
	1.4.1.(g)	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.**										
	1.4.1.(h)	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat.**										
	1.4.1.(i)	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/sederajat.**										
	1.4.1.(j)	**Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.**										
	1.4.1.(k)	**Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang pencatatan sipil											DAU	Capil
PROGRAM 1: Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kegiatan 1: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar		Unit	20	20	20	20	20	20	20	518	APBD	Dinas Kesehatan

Kegiatan 2 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	Unit	20	4	5	9	16	20	20	518	APBD	
Kegiatan 3 : Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Unit	20	20	20	20	20	20	20	75.000	APBD	
Kegiatan 4 : Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Unit	5	10	10	15	15	20	25	75.000	APBD	
PROGRAM 2 : Standarisasi Pelayanan Kesehatan											
Kegiatan 1: Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Dokumen	2	4	6	8	12	16	20	725	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	760	APBD	
PROGRAM 3 : Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya											
Kegiatan 1 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Unit	10	2	2	2	2	2	10	12.500	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Unit	39	15	20	20	20	25	95	38.000	APBD	
PROGRAM 4 : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak											
Kegiatan 1 : Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	%	80	83	85	88	90	93	95	632	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu	%	82	83	85	88	91	93	95	1.520	APBD	
Kegiatan 3 : Jaminan Persalinan (Jampersal)	%	88	89	91	93	95	96	97	9.100	APBD	
PROGRAM 5 : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
Kegiatan 1 : Peningkatan Imunisasi	%	91	92	94	95	97	98	99	809	APBD	Dinas Kesehatan
PROGRAM 6 : Pengembangan Lingkungan Sehat											
Kegiatan 1 : Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	%	50	55	61	66	72	76	80	784	APBD	Dinas Kesehatan

Kegiatan 2 : Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat		%	63	67	68	71	73	75	77	778	APBD	
Kegiatan 3 : Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat		%	60	70	75	80	85	90	95	750	APBD	
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	Tersedianya akta kelahiran anak	%	0	38,6%	55,5 %	1	85,00%	87,50%	90,00%		DAU	Doscapil
Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya sapra air minum	%	70,00	72,99	82,19	90,0 0	100	100	100		APBD	DPPP
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Tersedianya sapra air limbah	%	60	74,90	75,63	80	100	100	100		APBD	DPPP
INDIKATOR SDGs:	**1.4.2**	**Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												ATR
INDIKATOR SDGs:	**1.5.1***	**Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.**										
	1.5.1.(a)	**Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.**										
	1.5.1.(b)	**Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.**										
	1.5.1.(c)	**Pendampingan psikososial korban bencana sosial.**										
	1.5.1.(d)	**Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.**										
	1.5.1.(e)	**Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan Penangnan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan KLB	tersedianya bantuan	KK	130	200	200	200	260	270	280	1.057M	APBD	Dinas Sosial

PROGRAM 1: ……												
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan												
Kegiatan Pemantauan Daerah Wilayah Rawan Bencana		Dokumen	Tersedia 2019	NA	NA	NA	Tersedia 2019	Tersedia 2020	Tersedia 2021	100 Juta (Rp)	APBD	BPBD
Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana		Dokumen	Tersedia 2019	NA	NA	NA	Tersedia 2019	Tersedia 2020	Tersedia 2021	200 Juta (Rp)	APBD	BPBD
Kegiatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana		Dokumen	Tersedia 2019	NA	NA	NA	Tersedia 2019	Tersedia 2020	Tersedia 2021	75 Juta (Rp)	APBD	BPBD
PROGRAM 2: ……												
Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam											APBD	BPBD
Kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		Dokumen	Tersedia 2019	NA	NA	NA	Tersedia 2019	Tersedia 2020	Tersedia 2021	250 Juta (Rp)	APBD	BPBD
PROGRAM 3: ……												
Penanggulangan bencana berbasis masyarakat											APBD	BPBD
Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana		Dokumen	Tersedia 2019	NA	NA	NA	Tersedia 2019	Tersedia 2020	Tersedia 2021	110 Juta (Rp)	APBD	BPBD
Kegiatan sosialisasi penganggulangan bencana sekolah		Dokumen	Tersedia 2019	NA	NA	NA	Tersedia 2019	Tersedia 2020	Tersedia 2021	100 Juta (Rp)	APBD	BPBD
Kegiatan pembentukan forum relawan TRC penanggulangan bencana daerah		Dokumen	Tersedia 2019	NA	NA	NA	Tersedia 2019	Tersedia 2020	Tersedia 2021	100 Juta (Rp)	APBD	BPBD
Kegiatan peringatan hari kesiapsiagaan nasional		Dokumen	Tersedia 2019	NA	NA	NA	Tersedia 2019	Tersedia 2020	Tersedia 2021	150 Juta (Rp)	APBD	BPBD

Kegiatan Bulan Peringatan Resiko Bencana		Dokumen	Tersedia 2019	NA	NA	NA	Tersedia 2019	Tersedia 2020	Tersedia 2021	100 Juta (Rp)	APBD	BPBD
INDIKATOR SDGs:	**1.5.2**	**Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.**										
	1.5.2.(a)	**Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												BPBD
INDIKATOR SDGs:	**1.5.3***	**Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.**										
PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan												
Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Peta Resiko Bencana	Tersusunnya Dokumen dan Oeta Resiko	Dokumen	Tersedia 2019	NA	NA	NA	Tersedia 2019	Tersedia 2020	Tersedia 2021	350 Juta (Rp)	APBD	BPBD
Kegiatan Penyusunan Renkon Banjir		Dokumen	Tersedia 2019	NA	NA	NA	Tersedia 2019	Tersedia 2020	Tersedia 2021	350 Juta (Rp)	APBD	BPBD
INDIKATOR SDGs:	**1.a.1***	**Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.**										
	1.a.2*	**Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan Kewenangan Kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**1.b.1**	**Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.**										
PROGRAM 1: ……												

Kegiatan 1: dst...												Bukan Kewenangan Kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**2.1.1***	**Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).**										
	2.1.1.(a)	**Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.**										
	2.1.2*	**Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.**										
	2.1.2.(a)	**Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan Kewenangan Kabupaten
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik serta Peningkatan Pertanian Berkelanjutan												
INDIKATOR SDGs:	**2.2.1***	**Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.**										
	2.2.1.(a)	**Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.**										
Program Pembinaan Pendampingan Konsimsi Pangan, Promosi Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan												
Kegiatan Promosi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbangan dan Aman (B2SA)	Kualitas PPH	%	85.30	85.7	85.00	90	90	90	90	573.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM 1: Perbaikan Gizi Masyarakat												
Kegiatan 1: Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Peta	%	72	74	77	79	82	85	90	512	APBD	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan, Penyediaan Sumber Daya Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan												

Kegiatan Penyusunan Rumusan Kondisi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dokumen	Jiwa	0	0	0	0	0	0	0	375.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
INDIKATOR SDGs:	**2.2.2***	**Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.**										
	2.2.2.(a)	**Prevalensi anemia pada ibu hamil.**										
	2.2.2.(b)	**Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.**										
	2.2.2.(c)	**Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.**										
PROGRAM 1: Perbaikan Gizi Masyarakat												
Kegiatan 1: Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	PKM	%	33	31	28	24	21	18	16	1.250	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	PKM	%	10	12	15	20	40	50	75	480	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**2.3.1***	**Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).**										
PROGRAM 1 : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak												
Kegiatan 1 : Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	PKM	%	80	83	85	88	90	93	95	632	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu	PKM	%	82	83	85	88	91	93	95	1.520	APBD	
Kegiatan 3 : Jaminan Persalinan (Jampersal)	Peserta	%	88	89	91	93	95	96	97	9.100	APBD	

Program Pembinaan Pendampingan Konsimsi Pangan, Promosi Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan												
Kegiatan Promosi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbangan dan Aman (B2SA)	terpenuhinya B25A	%	80	85.70	85.00	87	90	90	90	573.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
INDIKATOR SDGs:	**2.3.2**	**Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan Kewenangan Kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**2.4.1**	**Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Bukan Kewenangan Kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**2.5.1***	**Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan Kewenangan Kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**2.5.2***	**Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Peternakan
INDIKATOR SDGs:	**2.a.1**	**Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian.**										

	2.a.2	**Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Pertanian
INDIKATOR SDGs:	**2.b.1**	**Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen.**										
	2.b.2	**Subsidi ekspor pertanian.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Pertanian
INDIKATOR SDGs:	**2.c.1**	**Indikator anomali harga pangan**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Pertanian
INDIKATOR SDGs:	**3.1.1***	**Angka Kematian Ibu (AKI).**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												D.Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**3.1.2***	**Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.**										
	3.1.2.(a)	**Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												D.Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**3.2.1***	**Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.**										

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												D.Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**3.2.2***	**Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												D.Kesehatan
TUJUAN 3. Menjamin Kehiduoan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahtraan Seluruh Penduduk Smua Usia												
INDIKATOR SDGs:	**3.1.1***	**Angka Kematian Ibu (AKI).**										
PROGRAM 1 : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak												
Kegiatan 1 : Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu		%	80	83	85	88	90	93	95	632	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu		%	82	83	85	88	91	93	95	1.520	APBD	
Kegiatan 3 : Jaminan Persalinan (Jampersal)		%	88	89	91	93	95	96	97	9.100	APBD	
INDIKATOR SDGs:	**3.1.2***	**Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.**										
	3.1.2.(a)	**Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.**										
PROGRAM 1 : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak												
Kegiatan 1 : Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu		%	80	83	85	88	90	93	95	632	APBD	Dinas Kesehatan

Kegiatan 2 : Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu		%	82	83	85	88	91	93	95	1.520	APBD	
Kegiatan 3 : Jaminan Persalinan (Jampersal)		%	88	89	91	93	95	96	97	9.100	APBD	
INDIKATOR SDGs:	**3.2.1***	**Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.**										
PROGRAM 1 : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak												
Kegiatan 1 : Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu		%	80	83	85	88	90	93	95	632	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu		%	82	83	85	88	91	93	95	1.520	APBD	
Kegiatan 3 : Jaminan Persalinan (Jampersal)		%	88	89	91	93	95	96	97	9.100	APBD	
INDIKATOR SDGs:	**3.2.2***	**Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.**										
	3.2.2.(a)	**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.**										
	3.2.2.(b)	**Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.**										
PROGRAM 1 : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak												
Kegiatan 1 : Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu		%	80	83	85	88	90	93	95	632	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu		%	82	83	85	88	91	93	95	1.520	APBD	
Kegiatan 3 : Jaminan Persalinan (Jampersal)		%	88	89	91	93	95	96	97	9.100	APBD	
INDIKATOR SDGs:	**3.3.1**	**Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.**										

	3.3.1.(a)	**Prevalensi HIV pada populasi dewasa.**										
PROGRAM 1 : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular												
Kegiatan 1: Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (IDE) pencegahan dan pemberantasan penyakit		%	5	5,5	7	10	15	20	26	539	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**3.3.2**	**Kejadian TB per 1000 orang.**										
	3.3.2.(a)	**Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.**										
PROGRAM 1 : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular												
Kegiatan 1: Penanggulangan Penyakit TB Paru		%	79	81,0	83	84	85	86	87	547	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**3.3.3***	**Kejadian Malaria per 1000 orang.**										
	3.3.3.(a)	**Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.**										
PROGRAM 1 : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular												
Kegiatan 1: Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Desa/Kel	136	136	136	136	136	136	136	606	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**3.3.4**	**Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.**										
	3.3.4.(a)	**Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.**										
PROGRAM 1 : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular												
Kegiatan 1: Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Desa/Kel	136	136	136	136	136	136	136	606	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**3.3.5***	**Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).**										
	3.3.5.(a)	**Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.**										
	3.3.5.(b)	**Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).**										
PROGRAM 1 : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular												

Kegiatan 1: Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Desa/Kel	136	136	136	136	136	136	136	606	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**3.4.1**	**Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.**										
	3.4.1.(a)	**Persentase merokok pada penduduk umur £18 tahun.**										
	3.4.1.(b)	**Prevalensi tekanan darah tinggi.**										
	3.4.1.(c)	**Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.**										
PROGRAM 1 : Pengendalian Penyakit Tidak Menular												
Kegiatan 1: Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah		%	7	11	20	30	40	50	60	362	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**3.4.2***	**Angka kematian (*insidens rate*) akibat bunuh diri.**										
	3.4.2.(a)	**Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.**										
PROGRAM 1 : Pengendalian Penyakit Tidak Menular												
Kegiatan 1: Pengendalian Penyakit Diabetes Mellitus dan Penyakit Metabolik		%	10	15	20	25	30	40	50	363	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**3.5.1**	**Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.**										
	3.5.1.(a)	**Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.**										
	3.5.1.(b)	**Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.**										
	3.5.1.(c)	**Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.**										
	3.5.1.(d)	**Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.**										
	3.5.1.(e)	**Prevalensi penyalahgunaan narkoba.**										
PROGRAM 1 : Pengendalian Penyakit Tidak Menular												
Kegiatan 1: Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (IDE) pencegahan dan pemberantasan penyakit		%	5	5,5	7	10	15	20	26	539	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2: Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular		Kali	0	0	1	1	1	1	1	160	APBD	
INDIKATOR SDGs:	**3.5.2***	**Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.**										

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												
INDIKATOR SDGs:	**3.6.1**	**Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan Kewenangan Kabupatem
INDIKATOR SDGs:	**3.7.1***	**Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.**										
	3.7.1.(a)	**Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.**										
	3.7.1.(b)	**Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).**										
PROGRAM 1: Program KB												
Kegiatan Pelayanan KIE	Meningkatnya Pelayanan KB	PUS	600	600	600	750	750	800	800	350jt	APBD	PPKB
Kegiatan Pembinaan KB	Meningkatnya Peminaan KB	PUS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	375jt	APBD	PPKB
Program kelembagaan dan Jaringan KB												
Kegiatan orentasi TNI manunggal KB Kesehatan			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	200jt	APBD	PPKB
Kegiatan Bulan bakti KB kesehatan bayangkari			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100jt	APBD	PPKB
Kegiatan Pencanangan PMKK tk Provinsi			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100jt	APBD	PPKB
Kegiatan Hari Keluarga Tingkat nasional			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100jt	APBD	PPKB
INDIKATOR SDGs:	**3.7.2***	**Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ ASFR).**										

	3.7.2.(a)	***Total Fertility Rate* (TFR).**										
PROGRAM Keluarga Berencana												
Kegiatan Pelayanan KIE	Meningkatnya Pelayanan KB	PUS	600	600	600	750	750	800	800	350jt	APBD	PPKB
Program Pelayanan Kontrasepsi												
Kegiatan Pelayanan Konseling KB	Meningkatnya Peminaan KB	PUS	600	600	600	750	750	800	800	230jt	DBHPR	PPKB
PROGRAM 1 : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak												
Kegiatan 1 : Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu		%	80	83	85	88	90	93	95	632	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu		%	82	83	85	88	91	93	95	1.520	APBD	
Kegiatan 3 : Jaminan Persalinan (Jampersal)		%	88	89	91	93	95	96	97	9.100	APBD	
INDIKATOR SDGs:	**3.8.1**	**Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata- rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).**										
	3.8.1.(a)	**Unmet need pelayanan kesehatan.**										
	3.8.2*	**Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.**										
	3.8.2.(a)	**Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).**										
PROGRAM 1: ……												Dinas Kesehatan
Kegiatan 1: dst...												
INDIKATOR SDGs:	**3.9.1**	**Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.**										
	3.9.2	**Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.**										
	3.9.3	**Angka kematian akibat keracunan.**										
	3.9.3.(a)	**Proporsi kematian akibat keracunan.**										

PROGRAM 1: ……												Dinas Kesehatan/RSUD
Kegiatan 1: dst...												
INDIKATOR SDGs:	**3.a.1***	**Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.**										
PROGRAM 1: ……												Dinas Kesehatan
Kegiatan 1: dst...												
	3.b.1	3.b.1 Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan										
	3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.										
PROGRAM 1: ……												Dinas Kesehatan
Kegiatan 1: dst...												
INDIKATOR SDGs:	**3.b.2**	**Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Kesehatan
TUJUAN 4. Menjamin Kualitas pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesemoatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua												
INDIKATOR SDGs:	**2.2.1***	**Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.**										
	2.2.1.(a)	**Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.**										
	4.1.1*	**Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.**										
	4.1.1.(a)	**Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.**										
	4.1.1.(b)	**Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.**										
	4.1.1.(c)	**Persentase SMA/MA**										
	4.1.1.(d)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.**										
	4.1.1.(e)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.**										
	4.1.1.(f)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.**										

	4.1.1.(g)	**Rata-rata lama sekolah penduduk umur ³15 tahun.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs:	**4.2.1**	**Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs:	**4.2.2**	**Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.**										
	4.2.2.(a)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs:	**4.3.1**	**Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.**										
	4.3.1.(a)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/sederajat.**										
	4.3.1.(b)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).**										
PROGRAM 1: Program Peningkatan Pendidikan Nonformal dan Informal												
Kegiatan 1: Pembinaan Pendidikan Nonformal dan Informal		Dalam Jutaan	550	550	650	690	790	325	325	1,016,737,949,000	APBD Kab. Bulukumba	Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs:	**4.4.1***	**Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).**										
PROGRAM 1: Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).												

Kegiatan 1: Jumlah sekolah yang memanfaatkan jaringan dan sumber pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) jenjang TK/PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK.		Dalam Jutaan	300	300	500	550	610	680	680		APBD Kab. Bulukumba	Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs:	**2.5.2***	**Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs:	**4.5.1***	**Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs:	**4.6.1**	**Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.**										
	4.6.1.(a)	**Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.**										
	4.6.1.(b)	**Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15 -59 tahun.**										
PROGRAM 1: Program Intensifikasi dan Perluasan Akses Pendidikan Keaksaraan Fungsional.												
Kegiatan 1: Pencapaian pembinaan Keaksaraan Fungsional Angka Melek Huruf.		Dalam Juataan	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	NA	1,016,737,949,000	APBD Kab. Bulukumba	Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs:	**4.7.1**	**Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.**										
PROGRAM 1: ……												

Kegiatan 1: dst...												Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs:	**4.a.1***	**Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs:	**4.b.1***	**Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs:	**4.c.1***	**Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.**										
PROGRAM 1: Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.												
Kegiatan 1: Persentase Pendidik Yang Bersertifikasi Semua Jenjang satuan Pendidikan.		Dalam Jutaan	170.105	170.105	180.000	185.000	189.000	190.000	NA	1,016,737,949,000	APBD Kab. Bulukumba	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan Kaum Perempuan												
INDIKATOR SDGs:	**5.1.1***	**Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.**										
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan												
Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan di Bidang IPTEK	Terlaksanakanya perumusan kebijakan Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang IPTEK	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	150jt	APBD	PPPA

Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan politik	Terlaksananya sosialisasi kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan politik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	150jt	APBD	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak												
Kegiatan advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Terlaksananya kegitan sosialisasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300jt	APBD	
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG	terlaksananya evaluasi PUG	kali	1	1	1	1	1	1	1	600jt	APBD	
INDIKATOR SDGs:	**5.2.1***	**Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.**										
	5.2.1.(a)	**Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.**										
PROGRAM Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan												
Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi	Kali		1	1	1	1	1	1	300jt		PPPA
Kegiatan Fasilitasi P2TP2A	terbentukanya P2TP2A	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	500jt		PPPA
INDIKATOR SDGs:	**5.2.2***	**Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.**										

	5.2.2.(a)	**Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.**										
PROGRAM Keserasian dan kebijakan oeningkatan kualitas anak dan perempuan												
Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi	Kali		1	1	1	1	1	1	300jt		PPPA
Kegiatan Fasilitasi P2TP2A	terbentukanya P2TP2A	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	500jt		PPPA
INDIKATOR SDGs:	**5.3.1***	**Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.**										
	5.3.1.(a)	**Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.**										
	5.3.1.(b)	**Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).**										
	5.3.1.(c)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DPPPA/DEPAG-KUA/RSUD
INDIKATOR SDGs:	**5.3.2**	**Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**5.4.1**	**Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.**										

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DPPPA
INDIKATOR SDGs:	**5.5.1***	**Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.**										
PROGRAM Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan												
Kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan eran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik	Terlaksananya Sosialisasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	420jt	APBD	DPPPA
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuutamaan Gender dan anak												
Kegiatan Workshop peningkatan peran perempuan Gender dan Anak	Terlaksananya pelatihan	Kali	1	1	1	1	1	1	1	350jt	APBD	DPPPA
INDIKATOR SDGs:	**5.5.2***	**Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.**										
												Bukan Kewenangan Kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**5.6.1***	**Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.**										
	5.6.1.(a)	***Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).**										
	5.6.1.(b)	**Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.**										
PROGRAM 1: Program KB												
Kegiatan Pelayanan KIE	Meningkatnya Pelayanan KB	PUS	600	600	600	750	750	800	800	350jt	APBD	PPKB
Kegiatan Pembinaan KB	Meningkatnya Peminaan KB	PUS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	375jt	APBD	PPKB

Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Meningkatnya pelayanan KB	PUS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	830jt	DBHPR	PPKB
Program Pelayanan Kontrasepsi												
Kegiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi	Tersedianya alkon	Akseptor	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,725M	DBHPR	PPKB
INDIKATOR SDGs:	**5.6.2***	**Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.**										
												Bukan Kewenangan Kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**5.a.1**	**(1)Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.**										
PROGRAM 1: ……												Dinas Pertanian
Kegiatan 1: dst...												
INDIKATOR SDGs:	**5.a.2**	**Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DPPPA
INDIKATOR SDGs:	**5.b.1***	**Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												No Data
INDIKATOR SDGs:	**5.c.1**	**Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan**										
PROGRAM 1: ……												

Kegiatan 1: dst…..												NO Data
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua												
INDIKATOR SDGs:	**6.1.1**	**Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.**										
	6.1.1.(a)	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.**										
	6.1.1.(b)	**Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.**										
	6.1.1.(c)	**Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.**										
PROGRAM 1 : Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan		%	10	18	29	42	54	66	78	954	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	%	70	80,5	81,99	82	100	100	100		APBD	DPPP
INDIKATOR SDGs:	**6.2.1**	**Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.**										
	6.2.1.(a)	**Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.**										
	6.2.1.(b)	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.**										
	6.2.1.(c)	**Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).**										
	6.2.1.(d)	**Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).**										
	6.2.1.(e)	**Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.**										
	6.2.1.(f)	**Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.**										
PROGRAM 1 : Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan		%	10	18	29	42	54	66	78	954	APBD	Dinas Kesehatan

PROGRAM 2 : Pengembangan Lingkungan Sehat												
Kegiatan 1: Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat		%	63	67	68	71	73	75	77	778	APBD	Dinas Kesehatan
PROGRAM 3 : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat												
Kegiatan 1: Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat		%	50	52	60	65	70	75	80	450	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana air limbah	Tersedianya sapra air limbah	%	71	74,9	75,6	76	100	100	100		APBD	DPPP
INDIKATOR SDGs:	**6.3.1**	**Proporsi limbah cair yang diolah secara aman**										
	6.3.1.(a)	**Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).**										
	6.3.1.(b)	**Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**6.3.2**	**Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.**										
	6.3.2.(a)	**Kualitas air danau.**										
	6.3.2.(b)	**Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**6.3.2**	**Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.**										
	6.3.2.(a)	**Kualitas air danau.**										

	6.3.2.(b)	**Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												
INDIKATOR SDGs:	**6.4.1**	**Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.**										
	6.4.1.(a)	**Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.**										
	6.4.1.(b)	**Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**6.4.2**	**Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												D. Pemukiman, perumahan & pertanahan/ Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs:	**6.5.1**	**Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).**										
	6.5.1.(a)	**Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).**										
	6.5.1.(b)	**Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.**										
	6.5.1.(c)	**Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.**										
	6.5.1.(d)	**Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.**										
	6.5.1.(e)	**Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.**										
	6.5.1.(f)	**Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.**										
	6.5.1.(g)	**Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.**										

	6.5.1.(h)	**Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.**										
	6.5.1.(i)	**Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												PSDA
INDIKATOR SDGs:	**6.5.2**	**Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												PSDA
INDIKATOR SDGs:	**6.6.1**	**Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.**										
	6.6.1.(a)	**Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.**										
	6.6.1.(b)	**Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.**										
	6.6.1.(c)	**Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.**										
	6.6.1.(d)	**Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												PSDA
INDIKATOR SDGs:	**6.a.1**	**Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												D. Pemukiman, perumahan & pertanahan/ Dinas Kesehatan

INDIKATOR SDGs:	**6.b.1**	**Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												D. Pemukiman, perumahan & pertanahan/ Dinas Kesehatan
TUJUAN 7. Menjamin Akses Energi yang terjangkau, Adil dan Berkelanjutan Modern untuk Semua												
INDIKATOR SDGs:	**7.1.1***	**Rasio elektrifikasi.**										
	7.1.1.(a)	**Konsumsi listrik per kapita.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												PLN
INDIKATOR SDGs:	**7.1.2**	**Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.**										
	7.1.2.(a)	**Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.**										
	7.1.2.(b)	**Rasio penggunaan gas rumah tangga.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bag.Ekonomi, SDM
INDIKATOR SDGs:	**7.2.1***	**Bauran energi terbarukan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Bag.Ekonomi, SDM
INDIKATOR SDGs:	**7.3.1***	**Intensitas energi primer.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bag.Ekonomi, SDM

INDIKATOR SDGs:	**7.a.1**	**Termobilisasikan dana per tahun (US $) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US $100 Miliar.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												No data
INDIKATOR SDGs:	**7.b.1**	**Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												No data
TUJUAN 8.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelnjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan menyeleuruh serta Pekerjaan yang Layak bagi Semua												
INDIKATOR SDGs:	**8.1.1***	**Laju pertumbuhan PDB per kapita.**										
	8.1.1.(a)	**PDB per kapita.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												BAPPEDA, Cq.Bidang Ekonomi
INDIKATOR SDGs:	**8.2.1***	**Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.**										
Program 1 : tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya												
Kegiatan padat Karya	1.1 Kegiatan padat Karya	%	5,4	6,90	7,05	74,5	8,10	8,75	9,00	750.000.000	APBN	Dinas Tenaga Kerja
INDIKATOR SDGs:	**8.3.1***	**Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.**										
	8.3.1.(a)	**Persentase tenaga kerja formal.**										
	8.3.1.(b)	**Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.**										
	8.3.1.(c)	**Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.**										
Program 1: Penciptaan wirausaha baru tenaga kerja mandiri												

Kegiatan 1: Penciptaan wirausaha baru	tersedianya lapangan usaha	Paket	4 paket	5 paket	5 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	2.000.500.000	Bulukumba	Kementerian Ketenagakerjaan
INDIKATOR SDGs:	**8.4.1**	**Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												BPS
INDIKATOR SDGs:	**8.4.2**	**Konsumsi material domestik (domestic material consumption).**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												BPS
INDIKATOR SDGs:	**8.5.1***	**Upah rata-rata per jam pekerja.**										
Program: Perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan.												
Kegiatan 1: Fasilitasi Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1.1. Pembinaan dan penyelesaian kasus PHI dan PHK dan sosialisasi pembentukan sarana HI	Rupiah	101.000.000	115.000.000	130.000.000	145.000.000	170.000.000	130.000.000	130.000.000	661.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
Kegiatan 2 : Transmigrasi Lokal	2.1. Terlaksananya sosialisasi Ketransmigrasian	Rupiah	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	35.000.000	35.000.000	150.000.000	APBD	
Program : Perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan												
Kegiatan 1 : Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan yang berhubungan industrial		Rupiah		115.000.000	130.000.000							
Kegiatan 2 : Transmigrasi Lokal		Rupiah		20.000.000	30.000.000							
INDIKATOR SDGs:	**8.5.2***	**Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.**										
Program 1: Peningkatan Kesempatan Kerja												

Kegiatan 1: Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	1.1. Bimtek penggunaan teknologi komunikasi dan informasi bursa tenaga kerja	Rupiah	250.000.000	288.000.000	312.000.000	337.000.000	362.000.000	337.000.000	337.000.000	28.000.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
Kegiatan 2: Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja	2.1. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Rupiah	59.000.000	64.000.000	74.000.000	79.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000	390.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
Kegiatan 3: Pendayagunaan para penyandang cacat	3.1. Meningkatnya pengetahuan bagi para penyandang cacat	Rupiah	63.000.000	60.000.000	73.000.000	78.000.000	83.000.000	83.000.000	83.000.000	390.000.000	APBD	
Kegiatan 4: Penyiapan tenaga kerja siap pakai	4.1. pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja	Rupiah	140.000.000	151.000.000	165.000.000	180.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	9.010.000.000	APBD	
Kegiatan 5: Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	5.1. Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana modal usaha bagi wirausaha baru	Rupiah	72.000.000	77.000.000	82.000.000	87.000.000	92.000.000	92.000.000	92.000.000	435.000.000	APBD	
Program 2 : Peningkatan Kesempatan Kerja												
Kegiatan 1 : Penyebarluasan Formasi Bursa tenaga kerja		Rupiah		250.000.000	288.000.000							

Kegiatan 2 : Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja		Rupiah		59.000.000	64.000.000							
Kegiatan 3 : Pendayagunaan para penyandang cacat		Rupiah		60.000.000	73.000.000							
Kegiatan 4 : Penyiapan Tenaga kerja siap pakai		Rupiah		151.000.000	165.000.000							
Kegiatan 5 : Pengembangan kelembagaan produktifitas dan latihan kewiraswastaan		Rupiah		72.000.000	77.000.000							
	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.										
PROGRAM 1 : Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri Kegiatan												
Kegiatan 1 : Penciptaan Wirausaha Baru	Terciptanya usaha kerja	Paket	4 Paket	5 paket	5 Paket	7 paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	2.000.500.000	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
Program 2 : Penciptaan kualitas dan produktifitas tenaga kerja												
Kegiatan 1 : Pelatihan berbasis kompetensi	meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Rupiah		363.000.000	380.000.000							
Kegiatan 1: dst...												Dinas Tenaga Kerja
INDIKATOR SDGs:	**8.6.1***	**Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: Pelatihan Berbasis Kompetensi	1.1. Meningkatanya kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	363.000.000	380.000.000	400.000.000	420.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	2.003.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja

	1.2. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rupiah	400.000.000	450.000.000	500.000.000	550.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	2.500.000.000	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
INDIKATOR SDGs:	**8.7.1**	**Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Tenaga Kerja
INDIKATOR SDGs:	**8.8.1**	**Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.**										
	8.8.1.(a)	**Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Tenaga Kerja
INDIKATOR SDGs:	**8.8.2**	**Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Tenaga Kerja
INDIKATOR SDGs:	**8.9.1***	**Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.**										
	8.9.1.(a)	**Jumlah wisatawan mancanegara.**										
	8.9.1.(b)	**Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.**										
	8.9.1.(c)	**Jumlah devisa sektor pariwisata.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Pariwisata
INDIKATOR SDGs:	**8.9.2***	**Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.**										

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Pariwisata
INDIKATOR SDGs:	**8.10.1***	**Jumlah kantor bank dan ATM per100.000 penduduk dewasa**										
	8.10.1.(a)	**Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).**										
	8.10.1.(b)	**Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												BPKD/D.Perdagangan
INDIKATOR SDGs:	**8.10.2***	**Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												BPKD
INDIKATOR SDGs:	**8.a.1**	**Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												BPKD/D.Perdagangan
INDIKATOR SDGs:	**8.b.1**	**Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												D.Perdagangan
TUJUAN 9. Imembangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta mendorong inovasi												
INDIKATOR SDGs:	**9.1.1**	**Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.**										
	9.1.1.(a)	**Kondisi mantap jalan nasional.**										
	9.1.1.(b)	**Panjang pembangunan jalan tol.**										
	9.1.1.(c)	**Panjang jalur kereta api.**										

Program Pengembangan IKM												
Kegiatan Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan Sumber Daya											APBD	Disoerindag/data tdk lengkap
Kegiatan pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan Klaster Indutri											APBD	Disoerindag/data tdk lengkap
INDIKATOR SDGs:	**9.1.2**	**Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.**										
	9.1.2.(a)	**Jumlah bandara.**										
	9.1.2.(b)	**Jumlah dermaga penyeberangan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs:	**9.2.1***	**Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.**										
	9.2.1.(a)	**Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Perdagangan
INDIKATOR SDGs:	**9.2.2***	**Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Perdagangan
INDIKATOR SDGs:	**9.3.1***	**Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Perdagangan

INDIKATOR SDGs:	**9.3.2***	**Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Perdagangan
INDIKATOR SDGs:	**9.4.1***	**Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.**										
	9.4.1(a)	**Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Perdagangan
INDIKATOR SDGs:	**9.5.1***	**Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												No Data
INDIKATOR SDGs:	**9.5.2**	**Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												No Data
INDIKATOR SDGs:	**9.a.1**	**Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas PUTR
INDIKATOR SDGs:	**9.b.1**	**Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Kominfo
INDIKATOR SDGs:	**9.c.1***	**Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.**										
	9.c.1.(a)	**Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.**										
	9.c.1.(b)	**Proporsi individu yang menggunakan Internet.**										
PROGRAM 1: ……												

Kegiatan 1: dst...												Kominfo
TUJUAN 10. Bmengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara												
INDIKATOR SDGs:	**10.1.1***	**Koefisien Gini.**										
	10.1.1.(a)	**Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.**										
	10.1.1.(b)	**Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.**										
	10.1.1.(c)	**Jumlah desa tertinggal.**										
	10.1.1.(d)	**Jumlah Desa Mandiri.**										
	10.1.1.(e)	**Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.**										
	10.1.1.(f)	**Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.**										
Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Usaha bagi keluarga miskin	Tersedianya sapra	%	8,15	8,15	8,06	7,5	7	6	5	650000000	APBD	Dinas Sosial
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas APD									2.135.771.134		BPS/Bappeda dan Kab.Bulukumba tidak termasuk daerah tertinggal
Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Pelatihan peningkatan sdm									1.995.500.534	APBD	DPMD
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Monev									140.270.600	APBD	DPMD
Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat perdesaan										1.307.749.600		
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat perdesaan	Pelatihan peningkatan sdm									1.187.749.600	APBD	DPMD
Kegiatan Pekan Inovasi Desa	Terselenggaranya PID									120.000.000	APBD	DPMD
INDIKATOR SDGs:	**10.2.1***	**Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.**										

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan Pengadaan sarana dan pendukung usaha bagi keluarga miskin	Tersedianya sapra	%			8,06	7,97	7	6	5			Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs:	**10.3.1**	**Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.**										
	10.3.1.(a)	**indeks Kebebasan Sipil.**										
	10.3.1.(b)	**Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).**										
	10.3.1.(c)	**Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.**										
	10.3.1.(d)	**Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												POLRES/ BPS
INDIKATOR SDGs:	**10.4.1**	**Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.**										
	10.4.1.(a)	**Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.**										
	10.4.1.(b)	**Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Tenaga Kerja/BPS ketenagakerjaan /Dinas Kesehatan/BPJS
INDIKATOR SDGs:	**10.5.1**	**Financial Soundness Indicator.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												No Data
INDIKATOR SDGs:	**10.6.1**	**Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.**										

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan Kewenangan Kab
INDIKATOR SDGs:	**10.7.1**	**Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Bukan Kewenangan Kab
INDIKATOR SDGs:	**10.7.2**	**Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.**										
	10.7.2. (a)	**Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.**										
	10.7.2. (b)	**Jumlah fasilitasi pelayanan**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan Kewenangan Kab
INDIKATOR SDGs:	**10.a.1**	**Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Bukan Kewenangan Kab
INDIKATOR SDGs:	**10.b.1**	**Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Penanaman Modal

INDIKATOR SDGs:	**10.c.1**	**Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												No Data
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan												
INDIKATOR SDGs:	**11.1.1**	**Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.**										
	11.1.1.(a)	**Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.**										
	11.1.1.(b)	**Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).**										
	11.1.1.(c)	**Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.**										
PROGRAM 1: ……												
Penyusunan Data Rumah Umum Khusus Negara komersil dan swadaya	Data Rumah Umum Khusus Negara komersil dan swadaya	%		88,850	91%		92%	99%	100%	7.000.000.000	APBD	D. Pemukiman, perumahan & pertanahan/PUTR
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		%		88,85	91	91,5	92	95	97	8.000.000.000		D. Pemukiman, perumahan & pertanahan/PUTR
Penyusunan Data Rumah Umum Khusus Negara komersil dan swadaya		Unit		93.464,00	102.744,00	132.563,00	132.600,00	133.000,00	133.500,00			D. Pemukiman, perumahan & pertanahan/PUTR
Program Pengembangan Permukiman												

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman kumuh		unit		884	884	700	300	300	300	3.000.000.000		D. Pemukiman, perumahan & pertanahan/PUTR
INDIKATOR SDGs:	**11.2.1**	**Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.**										
	11.2.1.(a)	**Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.**										
	11.2.1.(b)	**Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Perhubungan/BPS
INDIKATOR SDGs:	**11.3.1**	**Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.**										
	11.3.1.(a)	**Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.**										
	11.3.1.(b)	**Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												PUTR/Bappeda
INDIKATOR SDGs:	**11.3.2**	**Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.**										
	11.3.2.(a)	**Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.**										
	11.3.2.(b)	**Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												PUTR/Bappeda/ DPKD

INDIKATOR SDGs:	**11.4.1**	**Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).**										
	11.4.1.(a)	**Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Pedidikan dan Kebudayaan
INDIKATOR SDGs:	**11.5.1***	**Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.**										
	11.5.1.(a)	**Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).**										
	11.5.1.(b)	**Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.**										
	11.5.1.(c)	**Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												BPBD/DLHK
INDIKATOR SDGs:	**11.5.2**	**Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.**										
	11.5.2.(a)	**Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												BPBD
INDIKATOR SDGs:	**11.6.1**	**Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.**										
	11.6.1.(a)	**Persentase sampah perkotaan yang tertangani.**										
	11.6.1.(b)	**Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.**										
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan												

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sapra Persampahan	%	100	100	100	100	100	100	100	7.950.534.075	APBD	DLHK
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan	terpeliharanya sapra persampahan	%	100	100	100	100	100	100	100	6.358.677.800	APBD	DLHK
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup												
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura		%	100	100	100	100	100	100	100	518.285.000	APBD	DLHK
INDIKATOR SDGs:	**11.6.2**	**Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk) .**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**11.7.1**	**Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.**										
	11.7.1.(a)	**Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												PUTR
INDIKATOR SDGs:	**11.7.2**	**Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).**										
	11.7.2.(a)	**Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												POLRES
INDIKATOR SDGs:	**11.a.1**	**Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												BAPPEDA, Cq.Bidang Praswil
INDIKATOR SDGs:	**11.b.2***	**Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.**										

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												BPBD
INDIKATOR SDGs:	**11.c.1**	**Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												BPBD
TUJUAN 12.Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan												
INDIKATOR SDGs:	**12.1.1***	**Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Bukan kewenangan Kab
INDIKATOR SDGs:	12.2.1	Jejak material (material footprint).										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bappeda, Cq. Bidang Ekonomi
INDIKATOR SDGs:	**12.2.2**	**Konsumsi material domestik (domestic material consumption).**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Bappeda, Cq. Bidang Ekonomi
INDIKATOR SDGs:	**12.3.1**	**Indeks kehilangan makanan global.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bappeda, Cq. Bidang Ekonomi
INDIKATOR SDGs:	**12.4.1**	**Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.**										
	12.4.1.(a)	**Jumlah peserta Proper yang**										

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Bukan kewenangan Kab
INDIKATOR SDGs:	**12.4.2**	**Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.**										
	12.4.2.(a)	**Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**12.5.1**	**Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.**										
	12.5.1.(a)	**Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**12.6.1**	**Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.**										
	12.6.1.(a)	**Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												
												Dinas perdagangan
INDIKATOR SDGs:	**12.7.1**	**Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.**										
	12.7.1.(a)	**Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Bukan kewenangan Kab
INDIKATOR SDGs:	**12.8.1**	**Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.**										
	12.8.1.(a)	**Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister**										

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**12.a.1**	**Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**12.b.1**	**Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Pariwisata
INDIKATOR SDGs:	**12.c.1**	**Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan kewenangan Kab
TUJUAN 13.Mengambil Tindakan cepat untuk Mengangtisipasi Perubahan Iklim dan Dampaknya												
INDIKATOR SDGs:	**13.1.1***	**Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												BPBD
INDIKATOR SDGs:	**13.1.2***	**Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												BPBD
INDIKATOR SDGs:	**13.2.1***	**Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.**										
	13.2.1.(a)	**Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).**										
PROGRAM 1: ……												

Kegiatan 1: dst...												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**13.3.1**	**Jumlah negara yang telah mengitegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan kewenangan Kab
INDIKATOR SDGs:	**13.3.2**	**Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**13.a.1**	**Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan kewenangan Kab
INDIKATOR SDGs:	**13.b.1**	**Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Bukan kewenangan Kab
TUJUAN 14. melestarikan dan memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber daya kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan												
INDIKATOR SDGs:	**14.1.1**	**Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												DLHK

INDIKATOR SDGs:	**14.2.1**	**Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.**											
	14.2.1.(a)	**Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.**											
	14.2.1.(b)	**Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.**											
PROGRAM 1: ……													
Kegiatan 1: dst…..													DLHK/PUTR/D.Perikanan
INDIKATOR SDGs:	**14.3.1**	**Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.**											
PROGRAM 1: ……													
Kegiatan 1: dst...													DLHK
INDIKATOR SDGs:	**14.4.1***	**Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.**											
PROGRAM 1: ……													
Kegiatan 1: dst…..													Dinas Perikanan
INDIKATOR SDGs:	**14.5.1***	**Jumlah luas kawasan konservasi perairan.**											
PROGRAM 1: ……													
Kegiatan 1: dst...													Bukan Kewenangan Kab
INDIKATOR SDGs:	**14.6.1**	**Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).**											
	14.6.1.(a)	**Persentase kepatuhan pelaku usaha.**											
PROGRAM 1: ……													
Kegiatan 1: dst…..													Dinas Perikanan
INDIKATOR SDGs:	**14.7.1**	**Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara- negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.**											
PROGRAM 1: ……													
Kegiatan 1: dst...													Bukan Kewenangan Kab
INDIKATOR SDGs:	**14.a.1**	**Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.**											

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Dinas Perikanan
INDIKATOR SDGs:	**14.b.1***	**Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.**										
	14.b.1.(a)	**Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan**										
	14.b.1(b)	**Jumlah nelayan yang terlindungi.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas Perikanan
INDIKATOR SDGs:	**14.c.1***	**Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Bukan Kewenangan Kab
TUJUAN 15.Melindungi, Merestorasi dan meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem daratan, Mengelola Hutan secara lestari, menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan serta menghentikan kehilangan Keanekaragaman hayati												
INDIKATOR SDGs:	**15.1.1**	**Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.**										
	15.1.1.(a)	**Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.**										
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan												
Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan		%								379049950	APBD	DLHK/Bukan kewenangan Kabupaten
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		%										
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		%								144167375	APBD	
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDH		%								214164050	APBD	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		%										
Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan & Lahan		%								150143875	APBD	

INDIKATOR SDGs:	**15.1.2**	**Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**15.2.1**	**Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.**										
	15.2.1.(a)	**Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.**										
	15.2.1.(b)	**Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.**										
	15.2.1.(c)	**Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.**										
	15.2.1.(d)	**Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**15.3.1**	**Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.**										
	15.3.1.(a)	**Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**15.4.1**	**Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**15.4.2**	**Indeks tutupan hijau pegunungan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**15.5.1***	**Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												DLHK

INDIKATOR SDGs:	**15.6.1***	**Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**15.7.1**	**Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.**										
	15.7.1.(a)	**Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.**										
	15.7.1.(b)	**Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**15.8.1**	**Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).**										
	15.8.1.(a)	**Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**15.9.1**	**Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.**										
	15.9.1.(a)	**Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**15.a.1**	**Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**15.b.1**	**Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DLHK
INDIKATOR SDGs:	**15.c.1**	**Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.**										
	15.c.1.(a)	**Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.**										

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												DLHK
TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan												
INDIKATOR SDGs:	**16.1.1**	**Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.**										
	16.1.1.(a)	**Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												POLRES/No Data
INDIKATOR SDGs:	**16.1.2**	**Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah**										
	16.1.2.(a)	**Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												POLRES/No Data
INDIKATOR SDGs:	**16.1.3**	**Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.**										
	16.1.3.(a)	**Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												POLRES/No Data
INDIKATOR SDGs:	**16.1.4***	**Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												POLRES/No Data
INDIKATOR SDGs:	**16.2.1**	**Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir**										
	16.2.1.(a)	**Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.**										
	16.2.1.(b)	**Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.**										
PROGRAM 1: ……												

Kegiatan 1: dst…..												POLRES/No Data
INDIKATOR SDGs:	**16.2.2**	**Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												POLRES/No Data
INDIKATOR SDGs:	**16.2.3**	**Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.**										
	16.2.3.(a)	**Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												POLRES/No Data
INDIKATOR SDGs:	**16.3.1**	**Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.**										
	16.3.1.(a)	**Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.**										
	16.3.1.(b)	**Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.**										
	16.3.1.(c)	**Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												POLRES/Pengadilan
INDIKATOR SDGs:	**16.3.2**	**Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.**										
	16.3.2. (a)	**Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Lapas
INDIKATOR SDGs:	**16.4.1**	**Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US$).**										
PROGRAM 1: ……												

Kegiatan 1: dst...												Bukan kewenangan Kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**16.4.2**	**Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan kewenangan Kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**16.5.1**	**Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.**										
	16.5.1.(a)	**Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												No Data
INDIKATOR SDGs:	**16.5.2**	**Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas- petugas, selama 12 bulan terakhir.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												No Data
INDIKATOR SDGs:	**16.6.1***	**Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.**										
	16.6.1.(a)	**Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).**										
	16.6.1.(b)	**Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).**										
	16.6.1.(c)	**Persentase penggunaan**										
	16.6.1.(d)	**Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).**										
PROGRAM peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH												

KEGIATAN Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokraasi (PMPRB)	Penilaian PMPRB	%		66,46	67,39	67,5	67,5	7	7	909.960.000	APBD	ORTALA
INDIKATOR SDGs:	**16.6.2**	**Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.**										
	16.6.2.(a)	**Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).**										
PROGRAM peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH												
KEGIATAN Pengawasan internal secara berkala	Penghargaan WTP	Penghargaan		ada	ada	ada	ada	ada	ada	74.612.900.000	APBD	BPKD
PROGRAM peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH												
KEGIATAN Khusus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Capaian SAKIP	%		CC (100%)	CC (100%)	CC (100%)	CC (100%)			2.679.460.000	APBD	ORTALA, Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pemerintah												
Kegiatan Kajian Peraturan perundang-undangan daerah	Meningkatnya kepatuhan terhadap UU pelayanan publik	Penilaian	0	0	0	C (zona hijau)	C (zona hijau)	C (zona hijau)	C (zona hijau)	463.755.000	APBD	Balitbangda
INDIKATOR SDGs:	**16.7.1**	**Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.**										
	16.7.1.(a)	**Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).**										
	16.7.1.(b)	**Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).**										
PROGRAM 1: ……												
Program pembinaan dan pengembangan aparatur												

Penempatan ASN	Terlaksananya pengisian jabatan struktural dan fungsional aparat pemerintah daerah	Orang		4	4	5	8	8	8	500.000.000	APBD	Bappeda Cq.Bid.Makro (BKPSDM)
INDIKATOR SDGs:	**16.7.2**	**Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.**										
	16.7.2.(a)	**Indeks Lembaga Demokrasi.**										
	16.7.2.(b)	**Indeks Kebebasan Sipil.**										
	16.7.2.(c)	**Indeks Hak-hak Politik.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bappeda Cq.Bid.Makro
INDIKATOR SDGs:	**16.8.1**	**Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara- negara berkembang di Organisasi Internasional.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan kewenangan Kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**16.9.1***	**Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.**										
	16.9.1.(a)	**Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.**										
	16.9.1.(b)	**Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: Penatausahaan kelahiran	Tersedianya akta kelahiran bagi anak	%	66,5	66,21	70,5	83,92	22,88	23,17	23,46		DAU	Capil

INDIKATOR SDGs:	**16.10.1**	**Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.**										
	16.10.1.(a)	**Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).**										
	16.10.1.(b)	**Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												POLRES/No Data
INDIKATOR SDGs:	**16.10.2***	**Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.**										
	16.10.2.(a)	**Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.**										
	16.10.2.(b)	**Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non litigasi.**										
	16.10.2.(c)	**Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan kewenangan Kabupaten/Kesbangpol/Polres
INDIKATOR SDGs:	**16.a.1***	**Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Kesbangpol
INDIKATOR SDGs:	**16.b.1**	**Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.**										
	16.b.1.(a)	**Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Lapas
TUJUAN 17. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua												

INDIKATOR SDGs:	**17.1.1***	**Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.**										
	17.1.1.(a)	**Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...	Penerimaan Pajak	%	12,74	11,81	11,98	13,00	13,19	13,39	13,19		APBD	Dinas Pendapatan
INDIKATOR SDGs:	**17.1.2***	**Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												BPKD
INDIKATOR SDGs:	**17.2.1**	**Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara- negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Bukan wewenang kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**17.3.1**	**Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												no data
INDIKATOR SDGs:	**17.3.2**	**Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.**										
	17.3.2.(a)	**Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												no data/D.Pendapatan Daerah
INDIKATOR SDGs:	**17.4.1***	**Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.**										

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												BPKD
INDIKATOR SDGs:	**17.5.1**	**Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												no data
INDIKATOR SDGs:	**17.6.1**	**Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/ atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.**										
	17.6.1.(a)	**Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan wewenang kabupaten/Bappeda
INDIKATOR SDGs:	**17.6.2**	**Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.**										
	17.6.2.(a)	**Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/ Kota (IKK).**										
	17.6.2.(b)	**Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.**										
	17.6.2.(c)	**Proporsi penduduk terlayani mobile broadband**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Kominfo/Bag.Pemerintahan
INDIKATOR SDGs:	**17.7.1**	**Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan wewenang kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**17.8.1***	**Proporsi individu yang menggunakan internet.**										
	17.8.1.(a)	**Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses**										

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst...												Kominfo
INDIKATOR SDGs:	**17.9.1**	**Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan- Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.**										
	17.9.1.(a)	**Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan wewenang kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**17.10.1**	**Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).**										
	17.10.1.(a)	**Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan wewenang kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**17.12.1**	**Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan wewenang kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**17.13.1***	**Tersedianya Dashboard Makroekonomi.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bappeda
INDIKATOR SDGs:	**17.14.1**	**Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan wewenang kabupaten
INDIKATOR SDGs:	**17.15.1**	**Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.**										

PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												No Data
INDIKATOR SDGs:	**17.16.1**	**Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bappeda
INDIKATOR SDGs:	**17.17.1**	**Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).**										
	17.17.1.(a)	**Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).**										
	17.17.1.(b)	**Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Bukan Kewenangan Kab/Badan Penanaman Modal/Bappeda
INDIKATOR SDGs:	**17.18.1**	**Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.**										
	17.18.1.(a)	**Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.**										
	17.18.1.(b)	**Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.**										
	17.19.1.(c)	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/ Lembaga.**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												Dinas penanaman Modal/BPS
INDIKATOR SDGs:	**17.19.2**	**Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.**										
	17.19.2 (a)	**Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.**										
	17.19.2.(b)	**Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)**										
	17.19.2.(c)	**Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.**										
	17.19.2.(d	**Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).**										

	17.19.2.(e)	**Persentase konsumen yang**										
PROGRAM 1: ……												
Kegiatan 1: dst…..												BPS

MATRIKS KABUPATEN BANTAENG

Nama kabupaten : Kabupaten Banteng

Periode RPJMD : 2019-2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2019	2020	2021	2022	2023	
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN										
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (BPS)	%	9,51	8,93	8,65	8,39	8,13	7,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas PMD PPPA, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan .	Dinas Sosial	KPM	3.598	7125,5	10027,6	14111,5	19858,8	27946,7	Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata.
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro										
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	33,63	35,08	35,82	36,59	37,37	38,16	Dinas Kesehatan

1.4.1.(c)	Prevalensi pengguna metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Kesehatan	%	_	_	_	_	_	_	Dinas Kesehatan
1.4.1.(d)	Indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Dinas PUPR	%	80,15	96,54	106,45	117,01	128,61	141,37	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan.
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Dinas PUPR	%	74,35	75,78	76,51	77,25	77,99	78,73	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup.
1.4.1.(h)	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	47,90	36,86	33,78	30,95	28,37	26,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Kementrian Agama, Dinas PUPR.
Target 1.5 : Pada tahun 2030, membangun masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan goncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD	%	_	_	_	_	_	_	BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian.
Target 1.a : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumberdaya, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi										
1.a.1*	Proporsi sumberdaya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Dinas Sosial	%	19,31	28,91	35,38	43,29	52,97	64,81	Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Dinas Sosial	Rp	624.371,300	788.913,658	886.794,001	996.818,336	1.120.493,366	1.259.512,730	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan.
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN										
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun										
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Dinas Pertanian	%	14,80	11,59	10,26	9,08	8,03	7,11	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PUPR.
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula										
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi ekslusif	Dinas Kesehatan	%	9,81	10,10	10,24	10,38	10,52	10,66	Dinas Kesehatan
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Dinas Pertanian	%	88,8	90,16	90,85	91,54	92,24	92,94	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan.
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA										
Target 3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesmelahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	%	33,45	34,15	34,57	34,87	35,24	35,61	Dinas Kesehatan

3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	%	25,07	16,04	19,39	17,79	12,40	11,38	Dinas Kesehatan
Target 3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan angka kematian balita 25 per 1000										
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	–	–	–	–	–	–	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	1,000	0,091	0,027	0,008	0,002	0,001	Dinas Kesehatan
3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	–	–	–	–	–	–	Dinas Kesehatan
Target 3.3 : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya										
3.3.3*	Kejadian malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	%	500,00	457,41	437,50	418,45	400,23	382,81	Dinas Kesehatan
Target 3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	28,2	5,19	2,22	0,95	0,41	0,18	Dinas Kesehatan
Target 3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional										
3.7.1 (b)	Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	–	–	–	–	–	–	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	BPS	%	_	_	_	_	_	_	Dinas Kesehatan
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	BPS	%	_	_	_	_	_	_	Dinas Kesehatan
Target 3.8 : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang										
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	47,57	28,09	21,49	16,44	12,58	9,62	Dinas Kesehatan, BPJS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA										
Target 4.1 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif										
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	87,51	65,66	61,11	56,88	52,94	49,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
Target 4.2 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar										
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	55,52	59,91	61,44	63,02	64,04	66,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD PPPA, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Target 4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi di kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi										
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	_	_	_	_	_	_	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan, Dinas PMD PPPA

4.6.1 (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	–	–	–	–	–	–	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan, Dinas PMD PPPA
Target 4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil										
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB yang bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	42,95	42,50	42,34	42,19	42,05	41,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN										
Target 5.6 : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi sperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development ab the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut										
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	%	5,53	6,94	7,98	8,72	9,77	10,94	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA										
Target 8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahun di negara kurang berkembang										
8.1.1 (a)	PDB per kapita	BPS	%	34,06	48,04	53,88	60,43	67,77	76,00	Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Dinas Pariwisata
Target 8.3 : Manggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreatifitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan										
8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	%	48,00	61,62	69,82	79,11	89,63	101,55	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Target 8.9 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal										
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Dinas Pariwisata	%	–	–	–	s	–	–	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	%	–	–	–	–	–	–	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR
Target 8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua										
8.10.1 (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	%	480,00	586,93	649,01	717,67	793,59	847,54	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI										
Target 9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang										
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	%	7,43	7,46	7,47	7,48	7,50	7,51	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal PTSP
9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	%	4,5	4,33	4,25	4,18	4,16	4,08	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Sosial
Target 9.3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil khusunya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar										
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	%	0,90	0,97	1,00	1,04	1,21	1,25	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial

9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	%	0,90	0,97	1,00	1,04	1,21	1,25	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTAR NEGARA										
Target 10.1 : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional										
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Dinas Sosial	%	9,51	8,93	8,65	8,39	8,13	7,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas PMD PPPA
10.1.1 (b)	Jumlah desa mandiri	Dinas PMD, PP dan PA	%	–	–	–	–	–	–	Dinas PMD, PPPA, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Sosial
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN										
Target 11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh										
11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	%	–	–	–	–	–	–	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal PTSP

MATRIKS KABUPATEN JENEPONTO

Nama Kabupaten : Jeneponto

Periode RPJMD : 2019-2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
Target 1.2 : Pada Tahun 2030 Mengurangi setikdaknya setengah proporsi lakilaki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	%	14.86%	15.53%	15.58%	15.64%	15.69%	15.75%
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun .2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan/ Kesehatan	%	**105,89**	83,2	82,1	81,0	79,9	78,8
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Sosial/Sosial			110	990	880	715	605
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial/Sosial	%	57.46	8,78	7,54	6,30	5,05	3,81
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Progr am Keluarga Harapan	Dinas Sosial/Sosia	KPM	23,455	26,276	30,870	35,463	40,057	44,650

1.4 Pada Tahun 2030 Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	**Dinas Kesehatan/ Kesehatan**	%	**90,1**	96,5	97,5	98,5	99,5	99,5
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	**Dinas Kesehatan/ Kesehatan**	%	**81,85**	95	95	95	95	95
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKB	**%**	81.94	84.4	86.7	86.9	87.1	88.3
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	DPUPR (POKJA AMPL)/ Pekerjaan umum & penataan ruang	%		76,23	77,33	78,43	79,54	80,64
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DPUPR (POKJA AMPL)/ Pekerjaan umum & penataan ruang	%		89,79	95,68	100,00	100,00	100,00
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan/ Pendidikan	%	98,28	98	98.5	99	99.5	100
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan/ Pendidikan	%	71,14	80	81	82	82.5	83
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Dinas Sosial/Sosia		85.94	4050	3614	3236	1550	1500
Target 1.5 : Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.									
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial/Sosia			500.000.000	550.000.000	575.000.000	470.000.000	450.000.000
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinas Sosial/Sosia			30	25	20	15	10
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Dinas Sosial/Sosial			42	32	28	22	17
Target 1.a : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.									

1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dinas Sosial/Sosial			28,31	27,29	26,27	25,25	24,23
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Dinas Sosial/Sosia			187.673 .473.10 0	193.199 .037.00 0	198.724 .600.90 0	204.250 .164.80 0	209.775 .728.70 0
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
Target 2.1 : Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**11,43**	6,54	6,93	7,32	7,71	8,1
Target 2.2 : Pada Tahun 2030 menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		18,57	35.9	34.2	33.2	32.2	30
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		18,57	35.9	34.2	33.2	32.2	30
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Instalasi Gizi RSUD	Laporan	0,92	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Instalasi Gizi RSUD	Laporan	7,17	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		78,99	50	52.5	54.5	56.5	58.5
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		36.98	38.98	41.81	44.91	48.31	52.04
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3.1 Masih adanya rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan/ Kesehatan	Kasus		85	58	32	5	0
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**90,6**	95	96.5	97.5	98.5	99.5

3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**90,1**	91,7	92,5	94,5	96,5	98
3.2 Masih adanya kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**3,5**	2	3	3	4	4
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**9,9**	13	14	15	16	17
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**3,0**	2	2	2	2	2
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**81,85**	95	95	95	95	95
3.3Masih adanya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**0,030**					
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**166,30**	803	816	826	842	855
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**0,2**	<1	<1	<1	<1	<1
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**0**	1	1	1	1	1
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**0**	1	1	1	1	1
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**61**	0	0	0	0	0
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**0**	53	53	53	53	53
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**1**					
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**2,6**	0.07	0.068	0.065	0.055	0.05
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan	**%**	**20**	0.28	0.26	0.24	0.22	0.2

3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan/ Kesehatan	**%**	**7**					
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan							
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan	**%**	**1**	100	100	100	100	100
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan			0.05	0.04	0.03	0.03	0.02
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan			2 liter per kapita	2 liter per kapita	1 liter per kapita	1 liter per kapita	0.8 liter per kapita
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DPPKB	**%**	81.94	84.4	86.7	86.9	87.1	88.3
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKB	**%**	81.94	84.4	86.7	86.9	87.1	88.3
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DPPKB	**%**	15.46	18.84	18.87	18.9	18.93	18.96
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DPPKB	**%**	46.62	39.51	40.86	42.14	42.85	43.76
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DPPKB	**%**	2.17	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**0**	24.5	22.5	21.5	19.5	17.47
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**385**	345 Per 1000 Penduduk	365 Per 1000 Penduduk	365 Per 1000 Penduduk	365 Per 1000 Penduduk	365 Per 1000 Penduduk
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**105,9**	95	100	100	100	100
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan	**%**	**0**	30	28	26	25	24
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan			89	90	95	97	100
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan		**100**	89	90	95	97	100

3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan/ Kesehatan			data di matrik Tidak sesuai petunjuk meta data pada saat asistensi tim KLHS(perlu perbaikan)				
4.1 Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan/ Pendidikan							
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan/ Pendidikan	%	71,5	66,61	76,41	86,20	96,00	100,00
4.1.1(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan/ Pendidikan	%	66,6	85,46	99,22	100,00	100,00	100,00
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederaj at.	Dinas Pendidikan/ Pendidikan	%	110,53	112,30	113,60	114,90	116,10	117,40
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sede rajat.	Dinas Pendidikan/ Pendidikan	%	105,97	95,73	94,77	93,80	92,83	91,84
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan/ Pendidikan			11,1	13,6	16,2	18,8	21,3
4.2Belum terjaminnya bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan/ Pendidikan	%	52,28	36,20	36,71	37,23	37,74	38,26
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		**4.31**	4.97	5.03	5.07	5.11	5.15
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan/ Pendidikan			data di matrik Tidak terisi oleH opd pada saat asistensi tim KLHS(perlu perbaikan)				
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan/ Pendidikan	**%**	**95,29**	98	98,5	99	99,2	99,5

4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan/ Pendidikan			91,5	92	92,3	92,8	93
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dinas Pendidikan/ Pendidikan							
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan/ Pendidikan			a. SD 5% SMP 2% b. SD 41%, SMP 50% c. SD 11%, SMP 30%	a. SD 5% SMP 2% b. SD 45%, SMP 52% c. SD 16%, SMP 35%	a. SD 5% SMP 2% b. SD 45%, SMP 52% c. SD 20%, SMP 45%	a. SD 5% SMP 2% b. SD 45%, SMP 52% c. SD 25%, SMP 55%	a. SD 5% SMP 2% b. SD 45%, SMP 52% c. SD 25%, SMP 55%
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
5.1 Masih adanya segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DPPPA/ Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		0	0	5	20	4	50
5.2 Masih adanya bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenisekploitasi lainnya.									
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DPPPA/ Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		0.005	0.006	0.012	0.003	0.004	0,0032
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DPPPA/ Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		0.005	0.007	0.004	0.015	0.005	

5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DPPPA/ Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		0.002	0.001	0.002	0.003	0.000	0,0032
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DPPPA/ Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		100	100	100	100	100	100
5.3 Masih adanya praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DPPPA/ Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		0	0	0	0	0	0,0065
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DPPPA/ Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		TD	TD	TD	TD	TD	TD
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DPPKB/ Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	%	46.62	39.51	40.86	42.14	42.85	43.76
5.5 Belum terjaminnya partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DPPPA/ Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		20	20	20	20	20	20
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DPPPA/ Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		3.33	3.23	3.23	13.16	20.00	5.00
5.6 Belum terjaminnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopmen t and the Beijing Platform serta dokumendokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut.									
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DPPPA/ Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	**Tdk ada data di Matriks**						
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	DPPKB/ Kesehatan	%	10.47	8.5	7.49	6.48	5.47	4.46
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	DPPKB/ Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100

5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskominfo & Statistik	%	65,01	73	76	79	82	85
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									
6.1 Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DPUPR (POKJA AMPL)/ Pekerjaan umum & penataan ruang	%		76,23	77,33	78,43	79,54	80,64
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	DPUPR/ Pekerjaan umum & penataan ruang			51,44	51,44	51,44	51,44	51,44
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DPUPR (POKJA AMPL)/ Pekerjaan umum & penataan ruang	%		80,71	82,48	84,25	86,03	87,80
6.2 Belum tercapainyai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DPUPR (POKJA AMPL)			50	60	70	90	100
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DPUPR (POKJA AMPL)/ Pekerjaan umum & penataan ruang	%		78,62	81,73	84,84	87,95	91,06
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinkes (POKJA AMPL)		113 Desa/Kel	113 Desa/Kel	113 Desa/Kel	113 Desa/Kel	113 Desa/Kel	113 Desa/Kel
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinkes (POKJA AMPL)		113 Desa/Kel	113 Desa/Kel	113 Desa/Kel	113 Desa/Kel	113 Desa/Kel	113 Desa/Kel
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	DPUPR	Kws		1	1	1	1	1
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DPUPR	%		50	55	60	65	70
6.3 Belum optimalnya kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global									
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	DPUPR	**Kab**		1	1	1	1	1

6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DPUPR	%		50	55	60	65	70
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	DLH			**Tdk ada data di Matriks (NA)**				
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	DLH/ Lingkungan hidup			-4	-1	3	6	9
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	DLH			NA (mungkin karena di meta data yg di perlukan regulasi pengaturan air)				
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	DLH			4	4	4	4	4
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	DLH			NA (Salah OPD harusnya PUPR)				
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	DPUPR	WS		5	5	5	5	5
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	DLH			NA (Salah OPD harusnya PUPR)				
7.2.1* Bauran energi terbarukan									
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	**Bagian Administrasi Sumberdaya Alam (SETDA)**	%	0	-	30	30	20	20
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Bagian Administrasi Sumberdaya Alam (SETDA)	%	0	-	18.182%	22.727%	27.273%	31.818%
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
8.2 Belum optimalnya penggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif,penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan novasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		6.55	7.67	7.78	7.89	8.00	8.11
8.3 Belum tercapainya pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilita, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		156.578	159.578	161.758	163.96	166.208	168.487

8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		165.17	169.17	171.082	173.008	124.985	176.993
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi /Tenaga kerja	%	49	51%	51%	51%	51%	51%
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi &UKM	%	21%	25%	30%	45%	45%	50%
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		120,000	120,000	120,000	130,000	140,000	150,000
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ Tenaga kerja	%	36.12	38,12	35,09	32,06	29,02	25,99
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Tenaga kerja	%	49	61%	61%	61%	61%	61%
8.4 Masih kurangnya kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk local									
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		85	105	120	129	135	140
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata							
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Pariwisata		550	588	1,500	2,500	3,700	4,500
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata		99.01	99.33	99.35	99.38	99.40	99.42
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Dinas Pariwisata		4,000,000	39,000,000	20,000,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Tenaga kerja		2	5%	3%	1%	0%	0%
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	SETDA Bagian Ekonomi	%	1.75	15%	2	2	2	-
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Dinas Koperasi &UKM			NA				
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi &UKM	/UKM	10.000.000/ UKM	10.000.000/ UKM	25.000.000/UKM	25.000.000/UKM	25.000.000/UKM	25.000.000/UKM

Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									
9.1 Belum Signifikannya proporsi industri dalam lapangan kerja dan produkdomestik bruto,sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya dinegara kurang berkembang.									
9.1.1	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Tenaga kerja	%	2.35	4.03	3.906	3.782	3.658	3.533
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	DPUPR	Km		30	40	50	60	80
9.1.1. (c)	Panjang jalur kereta api.	DINAS PERHUBUNGAN			0	0	1	1	1
9.1.2. (b)	jumlah dermaga penyeberangan	DINAS PERHUBUNGAN			2	2	3	3	3
9.1.2. (c)	jumlah pelabuhan strategis	DINAS PERHUBUNGAN			0	0	0	0	0
9.2.1 *	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			NA				
9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			NA				
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Tenaga kerja		2.35	5,009	5,245	5,489	5,741	6,000
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Perdagangan & Perindustrian	**%**	**91**	92	92.5	93	93.5	94
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Dinas Pendidikan			NA				
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Diskominfo & Statistik		430RT	500 RT	550 RT	600 RT	650 RT	700 RT
9.c.1. (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Diskominfo & Statistik		65,01	73%	76%	79%	82%	85%
9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo & Statistik		242000	245000	247000	250000	253000	255000

Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA									
10.1 Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1*	Koefisien Gini.	Bappeda	Nilai	0.309	0.3063	0,3062	0,3061	0,3060	0,3059
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial		54,050	207,821	223,263	237,538	246,793	260,402
10.1.1 (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	DPMD		0	30	22	27	10	
10.1.1 (c)	Jumlah desa tertinggal.	DPMD		42	30	22	27	10	
10.1.1 (d)	Jumlah Desa Mandiri.	DPMD		0	10	20	30	40	
10.1.1 (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	DPMD		0.0000033284	10	30	60	80	
10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dinas Sosial		14.86%	0.08%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%
10.2 Belum terjaminnya kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil,termasuk dengan menghapus hukum,kebijakan dan praktik yang diskrintif,dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									
10.2.1.(a)	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	DINAS SOSIAL		64.64	59.128	55.178	54.898	56.348	56.528
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	DINAS SOSIAL			0	0	0	0	0
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DINAS SOSIAL			40	35	30	25	20
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
11.1 Masih adanya dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan,termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara,termasuk penanganan sampah kota.									

11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DINAS PERKIMTAN	Unit	413	500 unit	600 unit	600 unit	600 unit	600 unit
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	DPUPR	Kws		5	5	5	5	5
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	DPUPR	KWs		5	5	5	5	5
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	DPUPR			NA				
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	DPUPR	Kws		3	3	3	3	3
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH			25,000	25,000	25,000	30,000	30,000
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DPUPR	Kws		3	3	3	3	3
11.b.2.*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	DPUPR			31.10	31.18	31.36	31.47	31.68
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
12.1 Belum tercapainya pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH/ Lingkungan hidup			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
12..5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH/ Lingkungan hidup			5	5	5	10	10
12..6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLH/ Lingkungan hidup			15	20	20	20	25

Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI									
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH			80	80	85	85	90
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN									
	Isu Konsultasi Publik:								
	Masih adanya tindak kekerasan								
	Kurangnya ketersediaan data dan informasi								
	Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia								
16.1 Masih adanya segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
16.1.1.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Badan Kesbangpol	kasus	3	3	6	4	2	1
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Badan Kesbangpol	kasus	0.82	0.82	1.64	1.08	0.54	0.27
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Kesbangpol	%	0.0068%	0.0068%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	DPPPA		75.16	100	100	100	100	100
16.2 Masih adanya perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DPPPA		0	0	0	0	0	0
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DPPPA		0.012	0.012	0.020	0.026	0	0
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DPPPA		0.014%	0.014%	0.01%	0.017%	0	0

16.3 Masih adanya korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.									
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Diskominfo dan Statistik/ Statistik			0	4.3	4.5	4.7	5.0
16.4 Belum dikembangkannya lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	BPKAD	Persen	92.33	92.41	100	100	100	100
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPKAD	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bappeda	%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	SETDA Bagian ORTALA	%	1.48	8%	10%	15%	20%	25%
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	SETDA Bagian ULP	%	61%	80%	80%	80%	80%	80%
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bappeda	%		80%	80%	80%	80%	80%
16.5 Belum terjaminnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DPPPA/ Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		20	20	20	20	25	20
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	DPPPA/ Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		3.33	3.23	3.23	13.16	20.00	10.20
16.6 Belum optimalnya pemberian identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahira									

16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Disdukcapil		83.47%	44.75%	46.00%	47.25%	48.50%	48.50%
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo & Statistik		2 Org	0	10 Org	15 Org	20 Org	25 Org
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	SETDA Bagian Hukum	%	0%	95%	95%	95%	95%	100%
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17.1. Belum Kuatnya mobilisasi sumber daya domestik, termasuk memlalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Bapenda dan BPS	%	1.45%	2.16%	1.86%	1.79%	1.72%	1.62%
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda dan BPS	%	0.22%	0.28%	0.25%	0.25%	0.26%	0.26%
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Bapenda dan BPKAD	%	1.35%	1.26%	1.26%	1.33%	1.38%	1.43%
17.2. Belum optimalnya operasionalisasi secara penuh bank teknologi dan sains mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi									
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Diskominfo & Statistik		67%	0	75%	77%	80%	85%
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Diskominfo & Statistik		50%	50%	50%	55%	60%	65%
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Diskominfo & Statistik		242000	245000	247000	250000	253000	255000
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Diskominfo & Statistik		76%	80%	85%	90%	93%	95%
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BPKAD		0	0	2	3	3	3
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BPKAD		0	0	2	3	3	3

17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Diskominfo & Statistik		50%	50%	55%	60%	65%	70%
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Diskominfo & Statistik		50%	50%	55%	60%	65%	70%
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Diskominfo & Statistik		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Bappeda	%	23%	60%	65%	70%	75%	80%
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Diskominfo & Statistik		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Diskominfo & Statistik		5500	6000	7000	8000	9000	10000
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Diskominfo & Statistik		92,3%	95%	95%	95%	95%	95%

MATRIKS KABUPATEN TAKALAR

Nama kabupaten : Kabupaten Takalar

Periodes RPJMD : 2018-2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	
Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun										
1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional										
(1.2.1*)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Bidang Fakir Miskin	Persen	8,43						Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS	Persen	1.102,48				90,39	93,78	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan	Persen	1.872,92				1000	1500	Dinas PMPTSP Nakertrans
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Bidang Rehabilitasi sosial	Persen	0,00				234	250	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Bidang Rehabilitasi sosial	Persen					29.021	30.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		Persen	100,00				100	100	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		Persen	25,38				100	100	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Persen	0				67.82	67.92	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Bidang Binkesmas	Persen	0,00				100	100	Dinas PUPRPKP dan Dinas Kesehatan
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.		Persen	122,57				100	100	Dinas PUPRPKP dan Dinas Kesehatan
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.		Persen	0,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.		Persen	0,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Data Agregat Kependudukan	Persen	0				100	100	Dinas Kependudukan dan Capil

1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Surat rekomendasi pengajuan subsidi listrik (Bidang Rehabiitasi Sosial)	Persen	0						PLN
1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1*	Jumlah korban meninggal akibat bencana per 100.000 orang.	Laporan kejadian bencana BPBD Kab. Takalar Tahun 2020	Per 100.000 Orang	1,33				PM		BPBD dan Dinas Sosial PMD
	Jumlah korban hilang akibat bencana per 100.000 orang.	Laporan kejadian bencana BPBD Kab. Takalar Tahun 2020	Per 100.000 Orang	0,33				PM		
	Jumlah korban terluka akibat bencana per 100.000 orang.	Laporan kejadian bencana BPBD Kab. Takalar Tahun 2020	Per 100.000 Orang	0,00				PM		
	Jumlah korban mengungsi akibat bencana per 100.000 orang.	Laporan kejadian bencana BPBD Kab. Takalar Tahun 2020	Per 100.000 Orang	0,00				PM		
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Renstra BPBD 2018 - 2022	Lokasi	0,00						BPBD dan Dinas Sosial PMD

1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Bidang Rehabilitasi Sosial	Persen					70	80	BPBD dan Dinas Sosial PMD
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.		Persen							BPBD dan Dinas Sosial PMD
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)		Persen	0,00						BPBD dan Dinas Sosial PMD
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		Persen							BPBD dan Dinas Sosial PMD
1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.										
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Bidang FAkir Miskin (KUBE)	Persen	0						Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Laporan Realisasi APBD	Persen	29,72				21	30	BPKD
Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan										
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										

2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Bidang Ketahanan Pangan	Persen	13,95				14	15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.		Persen	0,93				7,7	7,7	Dinas Kesehatan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Bidang Ketahanan Pangan	Persen	28,12				25	25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Bidang Ketahanan Pangan	Persen	148,97				14	14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2.2.1*	Prevalensi stunting (sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		Persen	9,20				2,4	2,4	Dinas Kesehatan
	Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		Persen	3,10				7,8	7,8	
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		Persen	7,99						Dinas Kesehatan
	Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		Persen	3,10						
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak		Persen	3,20				2,25	2,25	Dinas Kesehatan

	pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe									
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Kurus		Persen	3,20				2,25	2,25	
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Sangat Kurus		Persen	0,59				0,75	0,75	
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Gemuk		Persen	1,95				0,68	0,68	
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Sangat Gemuk (Obesitas)		Persen	0,57				0,26	0,26	
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.		Persen	10,39				7,75	7,75	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.		Persen	100,00				100	100	Dinas Kesehatan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.		Kkal/Kapita/Hari	2.152				2200	2300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).		Persen	86,65				PM	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia										
3.1.Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).		Per 100.000 KH	103,15				0	0	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		Persen	100,00				100	100	Dinas Kesehatan
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		Persen	100,00				100	100	Dinas Kesehatan
3.2.Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.										
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.		Per 1000 KH	4,99				0	0	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.		Per 1000 KH	4,47				0	0	Dinas Kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		Per 1000 KH	0,52				0	0	Dinas Kesehatan
3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya										
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.		Persen	1,29						Dinas Kesehatan

3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		Per 100.000 Penduduk	546,66				159	166,7	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.		Per 1000 Penduduk	225,35				API <1/1000 pddk	API <1/1000 pddk	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis).		Persen	0				0	0	Dinas Kesehatan
	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta).		Persen	92,86						
3.4.Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		Persen	0,00				0	0	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.		Persen	1,53				63,443	63,443	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		Persen	1,43				-	-	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.		Persen	0				0	0	Dinas Kesehatan dan Kepolisian
3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.										
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		Persen	0						Dinas Kesehatan dan Satpol PP Damkar
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		Persen							Dinas Kesehatan dan Satpol PP Damkar
3.7.Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional										

3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		Persen	0				30777	30777	Dinas PPKBPPPA
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Persen	0				67.82	67.92	Dinas PPKBPPPA
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		Persen	0				15.3	15.5	Dinas PPKBPPPA
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Persen	0,00				16,24	16,2	Dinas PPKBPPPA
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		Persen	0,00				2.32	2.30	Dinas PPKBPPPA
3.8.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang										
3.8.1.(a)	*Unmet need pelayanan kesehatan.*		Persen	0,00				-	-	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		Persen	92,99				95	95	Dinas Kesehatan

3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		Persen	92,99				95	95	Dinas Kesehatan
3.9.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.										
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.		Persen	0				0	0	Dinas Kesehatan
3.a.Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		Persen	0				0	0	Dianas Kesehatan
3.b.Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.										
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.		Persen	100,00				100	100	Dianas Kesehatan
3.c.Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		Per 1000 Penduduk	3,54				-	-	Dianas Kesehatan
Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua										
4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.		Persen	0,00				99	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		Persen	77,82				91	96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.		Persen	64,44				95	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.		Persen	62,62				82	87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.		Persen	66,84				87	92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.		Tahun	7,00				8	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.2.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		Persen	48,79				68	73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.4.Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).		Persen	0,00				N/A		Dinas Komunikasi dan Informatika
4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)		Persen	25,12				40	45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.									
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki SD/MI/sederajat		Persen	84,21						
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki SMP/MTs/sederajat		Persen	66,84						
4.6.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		Persen	0,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.		Persen	0,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.										
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		Persen	100,00				100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.c.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.										
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.		Persen	89,90				1726	1800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan										
5.1.Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.										
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		Dokumen	1,00						Dinas PPKBPPPA
5.2.Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. (Kekerasan Fisik)		Persen	0,003				0		Dinas PPKBPPPA
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. (Kekerasan Seksual)		Persen	0,00				0		

	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. (Kekerasan Fisik dan/atau Seksual)		Persen	0,02				0		
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. (Kekerasan Emosional)		Persen	0,01				0		
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Persen	3%						Dinas PPKBPPPA
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.		Persen	0,003				0		Dinas PPKBPPPA
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		Persen	100,00				0		Dinas PPKBPPPA
5.3.Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										

5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun.		Persen	0,00				0		Dinas PPKBPPPA
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.		Persen	0,00						
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		Tahun					21.50	21.52	Dinas PPKBPPPA
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Persen	0,00				16,24 %	16,20 %	Dinas PPKBPPPA
5.5.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		Persen	0						Dinas PPKBPPPA
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.		Persen	0						Dinas PPKBPPPA
5.6.Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.										
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi,		Persen	0,00						Dinas PPKBPPPA

	dan layanan kesehatan reproduksi.									
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		Persen	0				16.33	16.53	Dinas PPKBPPPA
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.		Persen	0				100	100	Dinas PPKBPPPA
5.b.Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.										
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.		Persen	0,00				17		Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan										
6.1.Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.		Persen	0				100	100	Dinas Kesehatan dan Dinas PUPRPKP
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		M3	150,00						Dinas PUPRPKP
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.		Persen	0,00				100	100	Dinas Kesehatan dan Dinas PUPRPKP
6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										

6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. (Rumah Tangga)		Persen	0				-	-	Dinas Kesehatan
	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. (Penduduk)		Persen	0,00				-	-	
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		Persen	0				100	100	Dinas Kesehatan dan Dinas PUPRPKP
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		Desa/Kelurahan	100,00				100	100	Dinas Kesehatan dan Dinas PUPRPKP
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		Desa/Kelurahan	100,00				100	100	Dinas Kesehatan dan Dinas PUPRPKP
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.		Persen	0				-	-	Dinas Kesehatan dan Dinas PUPRPKP
6.3.Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		Persen	0						Dinas PUPRPKP
6.3.2.(a)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.		Pollution Index	0						Dinas PUPRPKP

6.4.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.										
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.									Dinas PUPRPKP
6.5.Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.										
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).									Dinas PUPRPKP
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.									Dinas PUPRPKP
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.		Wilayah Sungai							Dinas PUPRPKP
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Kegiatan							Dinas PUPRPKP
Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua										
7.2.Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.										
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		Persen	0,00						Dinas LHP
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua										
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										

8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.		Persen	198,51						BPS
8.1.1.(a)	PDB per kapita.			0,03						BPS
8.2.Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.		Persen	0						BPS
8.3.Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.		Persen	57,87						Dinas PMPTSP Nakertrans
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.		Persen	30,26						Dinas PMPTSP Nakertrans
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.		Persen	0,00						Dinas PMPTSP Nakertrans
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.		Persen	15,34						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
8.5.Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.		Persen	9.350,18						Dinas PMPTSP Nakertrans
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.		Persen	4,16						Dinas PMPTSP Nakertrans

8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.		Persen	59,80						Dinas PMPTSP Nakertrans
8.6.Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).		Persen	256,92						Dinas PMPTSP Nakertrans
8.9.Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.		Persen	0				0		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.		Orang	5				0		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.		Orang	6.500,00				10.643		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.		Rupiah	466.028.667,00				241.135.191		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.		Persen	0,00				174		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.10.Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa		Per 100.000 penduduk	0,00						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).		KM							Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.		Persen	53,28						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi										
9.1.Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.		Dermaga	12				11	11	Dinas Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.		Pelabuhan	1				1	1	Dinas Perhubungan
9.2.Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.		Persen	0						BPS
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.		Persen	0,00						BPS
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.		Persen	0,00						Dinas PMPTSP Nakertrans
9.3.Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Persen	0						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		Persen	0,00						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
9.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.										

9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.		Persen	0,00						Bappelitbangda
9.c.Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.										
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.		Persen	0,00						Dinas Komunikasi dan Informatika
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam		Persen	0,00				17		Dinas Komunikasi dan Informatika
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet		Persen	80,57				55		Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara										
10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1*	Koefisien Gini.									BPS
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		Persen	8,43						Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.		Desa	5,00				2		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.		Desa							Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10.2.Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,		Persen	0,00						Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

	menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.									
10.3.Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.			0						Bappelitbangda dan Bagian Hukum
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.									Bappelitbangda dan Bagian Hukum
10.4.Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		Persen	1.872,92						Dinas PMPTSP Nakertrans
Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan										
11.1.Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		Persen	0,00						Dinas PUPRPKP
11.3.Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.										
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		Lembaga							Dinas PUPRPKP
11.5.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										

11.5.1*	Jumlah korban meninggal akbiat dampak bencana per 100.000 orang.		Per 100.000 Penduduk	1,33						BPBD
	Jumlah korban hilangakibat terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Per 100.000 Penduduk	0,33						
	Jumlah korban terluka akibat terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Per 100.000 Penduduk	0,00						
	Jumlah korban mengungsi akibat terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Per 100.000 Penduduk	0,00						
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Unit							Dinas LHP
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		Indeks Risiko Bencana							Dinas LHP
11.6.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		Persen	88,00						Dinas LHP
11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.										
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		Dokumen	2,00						BPBD
Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan										
12.4.Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										

12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			0,00						Dinas LHP
12.5.Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.									Dinas LHP
12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Perusahaan							Dinas PMPTSP Nakertrans
12.7. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.										
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Produk							Dinas PMPTSP Nakertrans dan Dinas Kesehatan
12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.									Bagian Ortala dan Bappelitbangda
Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya										
13.1.Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Per 100.000 Penduduk	1,33						BPBD
Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati										

15.3.Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.										
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		Persen	0,00						Dinas LHP
15.9.Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.										
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.			Dokumen						Dinas LHP
Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan										
16.1.Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		Kasus							Satpol PP dan Damkar dan Kepolisian
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		per 100.000 penduduk	0,00						Satpol PP dan Damkar dan Kepolisian
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		Persen	0,00						Satpol PP dan Damkar dan Kepolisian
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.		Persen	0,00						Satpol PP dan Damkar dan Kepolisian
16.2.Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami		Persen	0,00						Dinas Sosial dan PMD dan Dinas PPKBPPPA

	hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.									
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki		Persen	0,04						Dinas PPKBPPPA
	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Persen	0,00						
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		Persen	0,01						Dinas PPKBPPPA
	Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		Persen	0,00						
16.5.Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).			0,00						Inspektorat
16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.		Persen	74,19				68	40	BPKD
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan		Persen					WTP	WDP	BPKD

	Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).									
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		Persen					219.615.000	241.576.500	Bagian Ortala
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.		Persen	44,56				665.500.000	732.050.000	Bagian ULP
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		Persen					41.682.927	45.851.220	Bagian Ortala
16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		Persen	0						Dinas PPKBPPPA
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		Persen	0						Dinas PPKBPPPA
16.9.Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh		Persen	121,50				100	100	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil

	lembaga pencatatan sipil, menurut umur.									
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		Persen	0						Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		Persen	96,51				100	100	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
16.10.Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.									Dinas Komuniksi dan Informatika
16.b.Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.										
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		Kebijakan							Bagian Hukum dan Bappelitbangda
Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan										
17.1.Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		Persen	0,00						BPS

17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		Persen	0,00						BPS
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.		Persen	0,00						BPS
17.6.Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.		Persen	0,00						Dinas Komuniksi dan Informatika
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband		Persen	0,00						Dinas Komuniksi dan Informatika
17.8.Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.										
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.		Persen	80,57				55		Dinas Komuniksi dan Informatika
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.		Persen					N/A		Dinas Komuniksi dan Informatika
17.17.Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		Proyek	0,00						Bappelitbangda dan BPKD
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama			0,00						Bappelitbangda dan BPKD

	Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).									
17.18.Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.		Persen	1,22						BPS
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.		Persen	0,89						BPS
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		Persen	6,00						BPS
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		Persen	0,00						Bappelitbangda
17.9. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)									Dinas Kependudukan dan Capil
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.			0,00						BPS

17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).		Persen	1,19						BPS

MATRIKS KABUPATEN SINJAI

Nama Kabupaten : Kabupaten Sinjai

Periode RPJMD : 2019-2023

TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1 *	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS SOSIAL	%	9,24	9,14	9	8,9	8,8	8,7
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	75,00	85,00	95,00	95,50	97,75	100
1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	%	100	100	100	100	100	100

1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan .	DINAS SOSIAL	KPM	8500	8586	8651	8800	8900	9000
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro									
1.4.1. (a)	Persentase perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan .	Dinas Kesehatan	%	90	92	94	96	98	100
1.4.1. (b)	Persentase Anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	90	92,9	93,6	94,1	94,6	95
1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Kesehatan	%	73	65	65	65	65	65
1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	DINAS PUPR	%	71,10%	72,04 %	100%	100%	100%	100%
1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR	%	90	95	100	100	100	100
1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	BADAN PUSAT STATISTIK	%	99,02	99,12	100	100	100	100

		(BPS), DINAS PENDIDIKAN							
1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS PENDIDIKAN	%	78,77	73,79	75,73	80,11	86,67	80,93
1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	100	100	100	100	100	100
TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINAS KESEHATAN	%	18	17%	16%	15%	14%	13%
2.1.2 *	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	%	8,66	8,66	6,66	6,66	6,66	6,66

Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1 *	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN	%	43,7	28	24,1	21,1	18,4	14
2.2.1. (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	DINAS KESEHATAN	%	43,7	28	24,1	21,1	18,4	14
2.2.2 *	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	DINAS KESEHATAN	%	10	9,5	8,1	7,5	7,5	7,3
2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINAS KESEHATAN	%	10	45	45	39	39	36
2.2.2. (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINAS KESEHATAN	%	80	85	90	95	97,5	100
2.2.2. (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Skor	86,8	87,1	90,1	90,5	93,7	95,0
Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.									

2.3.1 *	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp/Tenaga Kerja	NA	PM	PM	PM	PM	PM
2.4 : Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.									
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	BPS, DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Ha	24.686	26.677	25.764	24.856	24.626	27.000
TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1 *	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Kasus	6	12	10	8	6	4
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									

3.2.1 *	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Kasus	10	10	10	8	6	4
3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Kasus	9	8	7	6	5	4
3.2.2. (b)	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi lengkap pada bayi	DINAS KESEHATAN	%	95	95	95	95	95	100
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.1. (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINAS KESEHATAN	%	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3.3.2. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Per 100.000 pddk	70	75	80	85	85	85
3.3.3 *	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	per 1000 org	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3.3.3. (a)	Jumlah Kecamatan Yang mencapai eliminasi Malaria	Dinas Kesehatan	Kec	9	9	9	9	9	9
3.3.4. (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	%	80	85	90	90	90	90
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1. (a)	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 18 tahun	Dinas Kesehatan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM

3.4.1. (b)	Prevalensi Tekanan Darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.4.1. (c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk umur 18 Tahun	Dinas Kesehatan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.4.2 *	Angka Kematian (insidens rate) Akibat Bunuh Diri	Dinas Kesehatan		PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
3.5.1. (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	DINAS KESEHATAN	Sekolah (Lokasi Penyuluhan)	0	0	0	5	5	5
3.5.1. (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	DINAS KESEHATAN	Sekolah (Lokasi Penyuluhan)	0	0	0	5	5	5
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1 *	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	77,21	74,48	71,53	73,88	72,47	72,47

3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	77,21	74,48	71,53	73,88	72,47	72,47
3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	24,55	23,54	23,86	24,79	24,98	24,98
3.7.2 *	Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-49 tahun (Age Spesific Fertiliti)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	11,36	11,36	11,43	11,24	11,03	11,03
3.7.2. (a)	Total Fertility Rate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	2,76	2,31	2,21	1,91	1,91	1,91
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.1. (a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	DINAS KESEHATAN	orang	0	82	30	80	90	100
3.8.2 *	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Org	0	600	700	800	900	1000
3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINAS KESEHATAN	%	80	85	87	90	92	95
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									
3.c.1 *	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINAS KESEHATAN	Tenaga Medis : 100.000 Penduduk	0	0	0	0	0	0
TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2016)**	**Target Pencapaian**				
					2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									

4.1.1 *	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DINAS PENDIDIKAN	%	NA	70,00	71,00	72,00	73,00	75,00
4.1.1. (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN	%	NA	80,00	85,00	90,00	95,00	99,00
4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN	%	NA	80,00	85,00	90,00	95,00	99,00
4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	113,98	114,00	114,50	114,90	115,00	115,50
4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	115,35	115,00	116,00	117,00	118,00	119,00
4.1.1. (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN	Tahun	7,06	7,10	7,15	7,20	7,25	7,30
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DINAS PENDIDIKAN	%	96,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									

4.5.1 *	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	DINAS PENDIDIKAN	%	87,21	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.6.1 (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59	DINAS PENDIDIKAN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
5.1.1 *	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DP3AP2KB	Dokumen (Perda/SK Bupati)	6	10	10	12	12	16

5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1 *	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2KB	Orang	14	10	10	10	10	10
5.2.1. (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DP3AP2KB	%	34	20	20	15	15	10
5.2.2 *	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2KB	Orang	9	5	5	5	5	5
5.2.2. (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DP3AP2KB	%	100	100	100	100	100	100
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1 *	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DP3AP2KB							
5.3.1. (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DP3AP2KB							

5.3.1. (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	BPS/DP3AP2 KB	Jumla h	38,1	38	38	38	38	38
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DP3AP2KB	Orang	38	35	35	35	35	35
5.5.2 *	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DP3AP2KB							
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.									
5.b.1 *	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS, DISKOMINFO	Org	144.725	149.1 50	153.2 00	157.2 51	160.0 31	163.3 25
TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK									
Kode Indik ator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satua n**	**Baseline (2016)**	**Target Pencapaian**				
					2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DINAS PUPR	%	28,09	63	70	75	80	85

6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	DINAS PUPR	%						
6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DINAS PUPR	%						
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1. (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINAS KESEHATAN							
6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DINAS PUPR	%	90,00	93	95	100	100,00	100
6.2.1. (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DINAS KESEHATAN	Desa/ Kel	43	65	80	80	80	80
6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DINAS KESEHATAN	Desa/ Kel	43	65	80	80	80	80
6.2.1. (f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	Unit	0	0	6	14	10	10

6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
6.3.2. (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	%	68.75	75	81.25	87.5	87.5	87.5
6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.									
6.4.1. (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	BALITBANGDA	Dok	8	0	0	1	0	0
TUJUAN 07 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tujuan SDGs 07 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA									
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.									
7.2.1 *	Bauran energi terbarukan	DISPERINDAG	Unit	130	130	135	140	145	150
TUJUAN 08 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI									
	Target/Indikator				**Target Pencapaian**				

Kode Indikator		Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
8.1.1 *	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BAPPEDA	%	7,23	7,44	7,46	7,5	7,51	7,52
8.1.1. (a)	PDB per kapita.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BAPPEDA	Juta	37,89	38,00	38,67	39,04	40,24	42
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.									
8.2.1 *	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	%	7,20	7,60	7,80	8,00	8,20	8,40
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									
8.3.1 *	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	%	30	30	30	30	30	30

8.3.1. (a)	Persentase tenaga kerja formal.	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	%	59,65	30	30	30	30	30
8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	DINAS PERTANIAN	%						
8.3.1. (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	DINAS KOPERASI & UMKM	%						
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5.1 *	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA							
8.5.2 *	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS KETENAGAKERJAAN	%	4,53	4,12	3,92	3,72	3,52	3,33
8.5.2. (a)	Persentase setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA	%						
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
8.6.1 *	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS, DINAS KOPERASI , UKM DAN	%	24,8	79,5	84	88,5	93	97,5

		TENAGA KERJA							
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.									
8.8.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	DINAS TENAGA KERJA	%						
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1 *	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	DISPARBUD	%						
8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DISPARBUD	Org	30	33	40	46	53	60
8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DISPARBUD	Org	39.324	36935	38782	40722	42759	44897
8.9.1. (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	DISPARBUD	Rupiah	582.919.500	718.350.000	749.017.500	786.468.375	825.791.794	867.081.384
TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**

Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	DINAS PUPR	%	30	20	7	8	6	8
9.1.2. (b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DINAS PERHUBUNGAN	Unit	0	1	0	0	1	0
9.1.2. (c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DINAS PERHUBUNGAN	Unit	0	1	0	0	1	0
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan kedalam rantai nilai dan pasar.									
9.3.1 *	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	DINAS PERDAGANGAN							
9.3.2 *	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	DINAS PERDAGANGAN							
9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.									
9.c.1 *	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	DISKOMINFO	Org	169.920	216.000	233.280	247.680	267.840	288.000

9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	DISKOMINFO	Org	144.725	149.150	153.200	157.251	160.301	163.325
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	DISKOMINFO	Org	147.137	156.200	165.263	174.326	183.389	192.452
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA									
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	DPMD	Desa Tertinggal	13	10	8	6	4	2
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Desa Mandiri	0	0	0	0	0	1
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									

11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN PERTANAHAN	Unit	49.248	49.323	49.398	49.473	49.548	49.623
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD	Kecamatan	0	1	1	2	2	3
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	Jumlah Sistem	1	1	1	1	1	1
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	jumlah	0	0	0	0	0	0
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	24	24	25	26	27	28
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									

11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DINAS PENATAAN RUANG	Lokasi	3	5	7	7	7	7
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	Peta/ Kecamatan	0	2	2	2	2	1
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dok	0	0	0	1	0	1
TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perusahaan						

12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ton						
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ton						
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.									
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dok	NA	0	0	0	0	1
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUT									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									

14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.									
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	DINAS PERIKANAN	Perda						
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DINAS PERIKANAN	Org	1.019	847	860	900	930	950
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARAT									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI									
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.									
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%						
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.									
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%						

15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.									
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laporan						
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN									
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES, KESBANGPOL	Orang	2	3	0	0	0	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POLRES, KESBANGPOL	Orang	65	64	30	25	20	15
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	SATPOL - PP	%	100	100	100	100	100	100
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									

16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DP3AP2KB	%	0	0	0	0	0	0
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DP3AP2KB	%	0	0	0	0	0	0
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DP3AP2KB	%	0	0	0	0	0	0
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.									
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	POLRES							
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	KEJAKSAAN NEGERI							
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	PENGADILAN NEGERI							
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.									
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BADAN PUSAT	%	0	80	90	93	94	96

		STATISTIK (BPS),INSPEKTORAT							
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	%	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPK-RI PERWAKILAN MAKASSAR & INSPEKTORAT	%	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB SINJAI	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	DINAS KOMINFO	%	21	75	70	70	70	70
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	DINAS KOMINFO	%	75,13	75	77	79	80	83
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									

16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SEKREDARIAT DEWAN	%	30	30	30	30	30	30
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	%	10	20	30	35	40	45
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	KESBANG-POL							
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	100	100	100	100	100	100
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	0	0	0	40	45	50
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	100	100	100	100	100	100
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									

16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%						
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jumlah	1	2	2	3	3	3
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN									
Kode Indikator	**Target/Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline (2017)**	**Target Pencapaian**				
					2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BADAN PENDAPATAN DAERAH							

17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%	23,2	37,11	43	50	57	60
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	%	0	100	100	100	100	100
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	%	0	60	65	70	75	80
17.18.1.(c)	Jumlah Metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam sistem informasi rujukan Statistik (SiruSa)	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	Kegiatan	32	38	44	45	50	55
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Bappeda	%						
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									

17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	Pengunjung	5.986	6.529	9.953	10.000	10.000	10.000
17.19.2.(d)	Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	%	0	98,75	89,25	85	90	95

MATRIKS KABUPATEN BONE

Nama Kabupaten : Kabupaten Bone

Periode RPJMD : 2019-2023

TUJUAN 01 : TANPA KEMISKINAN											
Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			
8.6 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.											
INDIKATOR SDGs :	**8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.**										
PROGRAM 1 : Program pembinaan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan PPLH											
Sub Kegiatan 1 : Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan, izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	Persen	-	-	-	60	65	70	310.000.000	APBD DAK-DAU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TUJUAN 01 : TANPA KEMISKINAN											
Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			
8.6 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.											

INDIKATOR SDGs :	**1.4.1.(f) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.**										
	1.4.1 (g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi sederajat										
PROGRAM 1 : Program Pengelolaan Pendidikan											
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Lomba O2SN dan OSN Tingkat Kabupaten	Orang	-	-	250	250	250	250	700.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dibina dalam Penerapan 7 (tujuh) pilar MBS; Bimtek MBS, Pembinaan UKS, Sekolah Ramah Anak, Lomba Budaya Mutu, Lomba Sekolah Sehat SD	Sekolah	-	-	135	135	135	135	137.772.000	APBD	Dinas Pendidikan
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar yang Tersusun	Dokumen	-	-	672	672	672	672	221.808.300.000	APBN	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	-	-	27	27	27	27	500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
Sub Kegiatan : Pembinaan Minat,	Jumlah siswa SMP yang mengikuti Festifal dan Lomba	Orang	-	-	600	600	600	600	760.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

Bakat dan Kreativitas Siswa	seni (FLS2N),Olimpiade Sains dan Lomba Olahraga Tingkat Kabupaten										
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Pertama yang Tersusun	Dokumen	-	-	123	123	123	123	75.930.000.000	APBN	Dinas Pendidikan
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	-	-	54	54	54	54	300.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
TUJUAN 02 : TANPA KELAPARAN											
Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN											
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
INDIKATOR SDGs :	**2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).**										
	2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita										

PROGRAM 1 : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat											
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Kkl	13%	7%	6%	5.5%	5%	4.5%	300.000.000	APBD	DINAS KETAPANG
Kegiatan 2 : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan atau berat berdasarkan pangan, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan	%	10%	9%	8.8%	8.6%	8.4%	8%	200.000.000	APBD	DINAS KETAPANG
Kegiatan 3 : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum 1400kkl/kapita/hari	%	12%	11.00%	10%	9.5%	9%	8.5%	500.000.000	APBD	DINAS KETAPANG
Kegiatan 4 : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH	86.90	87.50.00	88.00.00	88.50.00	90.00.00	92.00.00	700.000.000	APBD	DINAS KETAPANG
Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			

									Tahun (Rp Juta)		
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI											
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua											
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan Kabupaten.											
PROGRAM 1 : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Jalan Kabupaten	Persen	-	-	-	100	100	100	728,458,041,832	DAK/DAU	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Sub Kegiatan 1 : Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Km	-	-	-	85.97	10	13	330,678,309,111	DAK/DAU	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Sub Kegiatan 2 : Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Km	-	-	-	1	5	3	35,287,319,860	DAK/DAU	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	-	-	-	70.08.00	5	6	267,946,874,320	DAK/DAU	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Sub Kegiatan 4 : Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (Rutin)	Km	-	-	-	108	108	108	6,533,176,225	DAK/DAU	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN											

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023			
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA											
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
INDIKATOR SDGs :	**10.1.1.(d) Jumlah Desa Swakarya**										
PROGRAM : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan											
Kegiatan : Pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam pendataan profil desa	Jumlah desa swakarya	Desa	42	57	75	-	-	-	625.000.000	APBD	DPMD
PROGRAM : Administrasi Pemerintahan DEsa											
Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa swakarya	Desa	-	-	-	95	125	150	625.000.000	APBD	DPMD
TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN											
Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN											
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.											

11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.											
INDIKATOR SDGs :	**11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.**										
	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.										
	11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.										
PROGRAM 1 : Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana											
Kegiatan 2 : Pemantauan daerah rawan bencana	Jumlah pemantauan daerah rawan bencana	Kec	27	27	27	27	27	27	439.567.200	APBD	BPBD
Kegiatan 3 : Pemberdayaan posko siaga bencana	Jumlah lokasi posko induk siaga bencana	Lokasi	1	1	1	1	1	1	540.382.500	APBD	BPBD
Kegiatan 4 : Workshop/pameran pengurangan resiko bencana	Jumlah workshop/pameran pengurangan resiko bencana	Kali	1	1	1	1	1	1	61.051.000	APBD	BPBD
Kegiatan 5 : Sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah	Jumlah sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah	0	30	30	30	30	30	30	1.422.154.125	APBD	BPBD
Berdasarkan Pemendagri 90/2019											
Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			

Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN											
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.											
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.											
INDIKATOR SDGs :	**11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.**										
	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.										
	11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.										
PROGRAM : Penanggulangan Bencana											
Kegiatan 1 : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Orang / 100%	27	-	700.001 Orang 100%	701.567 Orang 98%	701.678 Orang 100%	701.678 Orang 100%	87.675.000	DID DAN APBD	BPBD
Kegiatan 2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang / 100%	1	-	3900 Orang 100%	4050Orang 100%	4300 Orang 100%	4300 Orang 100%	1.659.461.496	DID DAN APBD	BPBD
Kegiatan 3 : Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang / 100%	1	-	100%	1977 Orang 100%	1977 Orang 100%	1977 Orang 100%	3.520.332.400	DID DAN APBD	BPBD
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.											
INDIKATOR SDGs :	**11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.**										

PROGRAM 1 : Program pengelolaan Sampah											
Sub Kegiatan 1 ; Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan Akhir sampah di tPA	Jumlah Tonase Volume Sampah 3 Kecmatan kota yang ditangani	Ton				14.000	14.000	14.000	APBD	15.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TUJUAN 12 : KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB											
Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN											
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.											
INDIKATOR SDGs :	**12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.**										
	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).										
PROGRAM 1 : Program pembinaan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan PPLH											
Program 2 : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun											

Sub Kegiatan 1 : Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan, izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	Persen	-	-	-	60	65	70	310.000.000	APBD DAK-DAU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Kegiatan 2 : Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Yang dikelola	Ton				43	53	55	248.000.000	APBD DAU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TUJUAN 13 : PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM											
Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA											
13.1 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.											
INDIKATOR SDGs :	**13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).**										
Program ; Pengendalian Pencemaran dan kerusakan LH											

Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilksanakan terhadap air udara dan tanah	Jumlah Pemantauan titik air, udara dan tanah	Titik Pantau		80	80	80	30	30	1.995.000.000	APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Kegiatan 2 : Koordinasi,sinkronisasi pelaksanaan Pengendalian Emisi Das Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	JUmlah Desa Binaan Kampung Iklim	Desa	5	10	10	10	10	10	420.000.000	APBD	
Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN											
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.											
INDIKATOR SDGs :	**14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.**										
	14.b.1(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.										
PROGRAM 1 : PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP											

Kegiatan 1 : Pembinaan kelompok masyarakat ekonomi pesisir	Jumlah petani yang terfasilitasi dengan mitra	KUB	100	20	25	25	27	30	-	APBD	Dinas Perikanan & Kelautan
Kegiatan 2 : Pembinaan izin usaha pembudidayaan ikan	Jumlah penerbitan izin usaha pembudidayaan ikan yang terfasilitasi	Orang	202	2	2	2	2	2	-	APBD	Dinas Perikanan & Kelautan
Kegiatan 3 : Pembinaan pembudidayaan ikan skala kecil	Jumlah penerbitan pencacatan usaha pembudidayaan ikan dan pengangkutan ikan hidup	Orang	100	100	100	100	100	100	-	APBD	Dinas Perikanan & Kelautan
PROGRAM 2 : Pengembangan Perikanan Tangkap (2020)											
PROGRAM 2 : Pengelolaan Perikanan Tangkap (2021)											
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	**Jumlah nelayan yang terlatih/dibina**	**orang**					30		12.400.000,00	DAU	Dinas Perikanan
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Indikator 1 : Jumlah KUB yang memperoleh Bantuan Pemerintah Indikator 2 ; Jumlah Nelayan yang terbina dan Terfasilitasi	KUB					6		170.000.000,00	DAK - DAU	Dinas Perikanan
Kegiatan 1 : Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah nelayan yang terlatih	Orang	30	30	30	30	30	30	135.000.000	APBD	Dinas Perikanan & Kelautan

Kegiatan 2 : Pembinaan kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang dapat bantuan	KUB	14	8	8	9	9	9	13.038.440.000	DAK-DAU	Dinas Perikanan & Kelautan
	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan pendampingan penguatan kelembagaan	KUB	14	8	8	9	9	9	771.561.000	DAK-DAU	Dinas Perikanan & Kelautan
Catatan ; untuk Tahun 2021 nomenklatur baru yang berwarna kuning											
TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUT											
Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN											
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.											
INDIKATOR SDGs :	**14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.**										
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.											
INDIKATOR SDGs :	**17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet.**										
	17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.										
Program 1 : Kerjasama dengan Mas Media											

Kegiatan 1 : Penggadaan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi	Proporsi individu yang menggunakan internet	%		20%	20%	25%	30%	100%	500.000.000	DAU	DINAS KOMINFO & PERSANDIAN
PROGRAM 2 : Pengembangan Komunikasi dan Media Massa											
Kegiatan 1 : Pengandaan infra struktur jaringan komunikasi dan informasi	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam	%		20%	20%	30%	30%	100%	500.000.000	DAU	DINAS KOMINFO & PERSANDIAN
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARAT											
Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI											
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.											
INDIKATOR SDGs :											
15.1.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati											
PROGRAM 1 : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Trbuka Hijau		Paket	1			1	1	1	928.000.000	APBD DAU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
INDIKATOR SDGs :	**15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.**										

PROGRAM 1 : Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran											
Sub Kegiatan 1 : Pemberian nformasn Peringatan Pencemaran dan atau kerusakan LH pada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberian Informasi pencemaran	Paket	-	-	-	24	24	36	124.350.000	APBD DAK	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Kegiatan 2 : Koordinasi,sinkronisasi pelaksanaan Pengendalian Emisi Das Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Pemantauan Lokasi	Lokasi	-	-	-	12	24	24	170.000.000	APBD DAK	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Jumlah binaan kampUng iklim	Desa Binaan	15	-	5	5	10	19	420.000.000	APBD DAU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH											
Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN											
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
INDIKATOR SDGs :	**16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.**										
	16.9.1.(a) Persentase penduduk 0-17 tahun dengan kepemiikan akta kelahiran.										
	16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.										
PROGRAM 1 : Penataan Administrasi Kependudukan											

Kegiatan 1 : Pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terwujudnya pelayanan akta catatan sipil	Bulan	12	12	12				1.043.425.000	APBD (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kegiatan 2 : Pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Persentase pelayanan dokumen kependudukan	Bulan	12	12	12				1.740.950.400	APBD (DAK)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Terwujudnya pelayanan akta catatan sipil	Bulan	12	12	12				1.043.425.000	APBD (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kegiatan 3 : Pelayanan dokumen kependudukan	Persentase pelayanan dokumen kependudukan	Bulan	12	12	12				1.740.950.400	APBD (DAK)	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
PROGRAM 2 : PENCATATAN SIPIL											
Kegiatan 1 : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Akta Pencatatan Sipil	Orang	-	-	-	30.000	31.000	32.000	427.805.000	APBD (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											

Kegiatan 2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk	Orang	-	-	-	36.000	37.200	38.400	943.438.864	APBD (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH											
Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN											
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.											
INDIKATOR SDGs :	**16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).**										
	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).										
	16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik.										
PROGRAM 1 : PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGMEBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	-	-	-	1	1	1	42.590.000	APBD	KESBANG - POL

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2017)**	**Target Tahunan**					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	**SUMBER DANA**	**INSTANSI PELAKSANA**
			2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**			
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
INDIKATOR SDGs :	**17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.**									
	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.									
	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.									
PROGRAM 1 : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah										

Kegiatan 1 : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah peningkatan realisasi pendapatan asli daerah	Rupiah	177,386,937,100	188,448,872,320	198.900.313.090	210,028,469,764	221,883,669,977	234.520.372.741	1.053.781.697.892	APBD	BAPENDA
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah pelayanan kepada wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	pelayanan	6 pelayanan	6 pelayanan	6 pelayanan	6 pelayanan	6 pelayanan	6 pelayanan	2.921.763.529	APBD	BAPENDA
Kegiatan 3: Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya	Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	Rupiah	39.632.650.600	43.694.997.286	45.879.747.150	48.173.734.507	50.582.421.232	53.111.542.293.618	53.299.873.193.793	APBD	BAPENDA
Kegiatan 4: Pemuktahiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Peningkatan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	Objek Pajak	650.441	652.441	653.441	654.441	655.441	656.441	3.272.205	APBD	BAPENDA
Kegiatan 5: Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah data wajib pajak yang tersedia	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	678.631.250	APBD	BAPENDA
Kegiatan 6: Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah penerbitan dan distribusi dokumen ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	794.175.750	APBD	BAPENDA
Kegiatan 7: Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	Rupiah	16.743.531.594	17.591.172.880	18.030.952.202	18.481.726.007	18.943.769.157	19.417.363.385.925	19.490.411.006.171	APBD	BAPENDA

Perdesaan dan Perkotaan Jumlah Penerimaan PBB											
Kegiatan 8: Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah dokumen penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	525.946.500	APBD	BAPENDA
Kegiatan 9: Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah	Dokumen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pajak daerah lainnya	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	470.754.250	APBD	BAPENDA
Kegiatan 10: Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga	Dokumen Laporan Pendapatan Daerah dan Laporan Pendapatan Benda Berharga	Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.900.190.750	APBD	BAPENDA
Kegiatan 11: Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah penerbitan dan distribusi SPPT, STTS, dan DHKP	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.844.509.750	APBD	BAPENDA
Kegiatan 12: Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dari sector retribusi pasar	Real Pasar	2.200.383.000	2.311.777.389	288.971.823.734	288.979.048.029	296.203.524.229	303.608.612.334	1.180.074.785.715	APBD	BAPENDA

PROGRAM 2 : Penataan Peraturan Perundang-undangan											
Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Pertemuan	24	26	28	30	32	34	1.016.782.735	APBD	BAPENDA
PROGRAM 2 : Pengelolaan Keuangan Daerah											
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen				1	1	1	482.417.320	APBD	BAPENDA
Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Orang				200	200	200	460.000.000	APBD	BAPENDA
Pendataan & Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan wajib pajak daerah yang dikelola pendataannya secara berkala	Wajib pajak				610.560	610.660	610.760	513.007.000	APBD	BAPENDA
Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	dokumen				4	4	4	624.642.132	APBD	BAPENDA

Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah jenis pajak yang ditetapkan atas ketetapan pajak daerah	Jenis pajak				7	7	7	390.000.000	APBD	BAPENDA
Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak daerah	pelay ana				6	6	6	2.532.458.92 0	APBD	BAPENDA
Penelitian dan dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dab verifikasi	doku men				4	4	4	465.000.000	APBD	BAPENDA
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak aerah yang ditagih	Wajib pajak				610.560	610.660	610.760	5.538.397.11 0	APBD	BAPENDA
Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daer	kegiat an								APBD	BAPENDA
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajka daerah	kegiat an				1	1	1	770.000.000	APBD	BAPENDA

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah & Pendapatan Daerah	Dokumen				3	3	3	886.060.800	APBD	BAPENDA
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB	Jumlah kegiatan penilaian PBB-P2 dan BPHTB	Kegiatan				1	1	1	1.050.00.000	APBD	BAPENDA

MATRIKS KABUPATEN MAROS

Nama Kabupaten : Kabupaten Maros

Periode RPJMD : 2019-2023

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)					Satuan (2)	Tahun Dasar (2020) (3)	Target Tahunan (4)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)	Keterangan (8)
							2021	2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun																
1.4.1(a)Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan																
1.4.1(b)Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap																
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani difasilitas kesehatan sesuai standar	Ibu Bersalin		7.138	7.208	7.278	7.348	7.418	7.418	1.796.448.034	APBN / APBD	Dinas Kesehatan	Dinkes Bidang Kesmas

1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita lengkap sesuai standar	Balita		29.407	32.407	35.407	35.507	35.651	35.651	5.229.286.406	APBD	Dinas Kesehatan	
1.4.1(c) Prevalensi penggunanaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin																
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayana	2.14.03.2.03.01.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Jenis Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang Didistribusikan	Jenis		5	5	5	5	5	5	Rp 681.787.500	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB

	n KB Di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.02.	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang		27	27	27	27	27	135	Rp 175.705.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.03.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang		420	420	420	420	420	2.100	Rp 491.600.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.04.	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Peserta KB yang mengalami Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP yang mendapatka	Orang		140	140	140	140	140	700	Rp 363.200.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB

				n pertolongan												
		2.14.03.2.03.05.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dokumen rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rencana		1	1	1	1	1	5	Rp 68.176.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang Pelayanan KB	Jenis		3	3	3	3	3	3	Rp 9.925.000.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.07.	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Peserta KB yang mendapatkan pembinaan Pasca Pelayanan	Orang		280	280	280	280	280	1.400	Rp 366.500.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Bidang KB

															Berencana	
		2.14.03.2.03.08.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringan	Jumlah Faskes dan Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Faskes & Jejaring		25	25	25	25	25	125	Rp 893.500.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.09.	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Faskes dan Kelompok Kegiatan yang melakukan promisi dan konseling Kesehatan Reproduksi	Faskes & Klp Keg		25	25	25	25	25	125	Rp 923.500.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.10.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan	Jumlah PLKB/PKB yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang		136	136	134	134	134	134	Rp 285.766.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Bidang KB

			Kesehatan Reproduksi												Berencana	
		2.14.03.2.03.11.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS yang mendapatkan Pelayanan KB	Orang		2.015	280	240	240	240	3.015	Rp 700.000.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.12.	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah PUS Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran yang mendapatkan konseling KB	Orang		350	350	350	350	350	1.750	Rp 442.200.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.13.	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Kesertaan KB Pria	Orang		20	20	20	20	20	100	Rp 811.000.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
1.3.1(c)Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas																

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan ,Pengemis di Luar Panti Sosial		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan Reunifikasi	orang		5	10	15	20	25	75	Rp 298.800.000	APBD	Dinas Sosial	Sub. Bag. Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Peringatan Hari Disabilitas Internasional)	Jumlah PMKS yang tertangani	orang		100	100	100	100	100	500	Rp 165.800.000	APBD	Dinas Sosial	Sub. Bag. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah Peserta yang Menerima Bimbingan Sosial dan Sosialisasi Bantuan Hukum	orang		100	100	100	100	100	500	Rp 95.200.000	APBD	Dinas Sosial	Sub. Bag. Rehabilitasi Sosial dan Anak

			Pengemis dan Masyarakat													
			Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Makanan	orang			50	50	50	50	200	Rp 260.000.000	APBD	Dinas Sosial	
			Penyediaan Sandang	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sandang	orang			100	100	100	100	400	Rp 420.000.000	APBD	Dinas Sosial	
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Alat Bantu	orang			50	50	50	50	200	Rp 900.000.000	APBD	Dinas Sosial	Sub. Bag. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

			Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang menerima akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	orang			100	10	100	100	310	Rp 900.000.000		Dinas Sosial	
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur																
1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan																
1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat program keluarga Harapan																
1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan																
1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.																
1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial																
1.5.1(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)																
1.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																

1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan SLRT)	Jumlah Kepala Keluarga yang Terdata	Rumah Tangga		40000	40000	40000	40000	40000	200000	Rp 2.213.745.000	DINSOS	Dinas Sosial	Sub. Bag. Jaminan Sosial, Penyuluhan dan Pengelolaan Data
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan PKH)	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan dan Jaminan Sosial	KPM		14000	14000	14000	14000	14000	70000	Rp 2.126.350.000	DINSOS	Dinas Sosial	Sub. Bag. Jaminan Sosial, Penyuluhan dan Pengelolaan Data
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	KK			100	100	100	100	400	Rp 1.000.000.000	DINSOS	Dinas Sosial	Sub. Bag. Jaminan Sosial, Penyuluhan dan Pengelolaan Data
		1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang Menerima Bantuan Sosial UEP (Usaha	KUBE			20	20	20	50	110	Rp 900.000.000	DINSOS	Dinas Sosial	Sub. Bag. Jaminan Sosial, Penyuluhan dan Pengelolaan Data

				Ekonomi Produktif)												
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	paket		100	100	100	100	100	500	Rp 290.600.000	APBD	Dinas Sosial	Sub. Bag. Perlindungan Sosial
			Penyediaan Makanan	Jumlah Bantuan Makanan	Paket			20	20	20	20	80	Rp 1.000.000.000	APBD	Dinas Sosial	Sub. Bag. Perlindungan Sosial
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Dukungan Psikososial	KK			50	50	50	50	200	Rp 900.000.000	APBD	Dinas Sosial	Sub. Bag. Perlindungan Sosial
1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan																
1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																

1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp 1.200.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Jaringan Perpipaan	Meter			1000 Meter	1000 Meter	1000 Meter	1000 Meter	1000 Meter	Rp 2.400.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang Jaringan Perpipaan	Meter			2500 Meter	3000 Meter	3000 Meter	3000 Meter	3000 Meter	Rp 9.750.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Jaringan Perpipaan	Meter			2750 Meter	2300 Meter	2300 Meter	2300 Meter	2300 Meter	Rp 10.905.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Sambungan Rumah (SR)	SR		25 SR	200 SR	250 SR	200 SR	250 SR	250 SR	Rp 33.725.248.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi

		1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Bak Hydran/Penampung Air	Unit		18 Unit	16 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	Rp 8.210.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang Jaringan Perpipaan	Meter		25 Meter	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100 Meter	Rp 10.435.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan																
1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah																
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen			1 Dokumen				1 Dokumen	Rp 600.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah MCK Yang Dibangun	Unit		500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	Rp 26.760.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan	Seksi Air Minum dan Sanitasi

															Penataan Ruang	
		1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM	Orang			20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 250.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM	Orang			20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 150.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.05.2.01.12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah IPAL Kombinasi MCK	Unit		2 Unit	5 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Rp 16.939.224.550	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
1.5.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah																
1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah																

1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana																
1.5.3* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang																
1.05.03. Program Penanggulangan Bencana																
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Persentase (%) Penyelesaian Dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen		4	4	4	4	4	4	Rp 823.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Subid Rekonstruksi
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase (%) Terlaksananya Sosialisasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (perjenis Bencana)	Dokumen		4	4	4	4	4	4	Rp 823.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Subid Rehabilitasi
1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran																
PROGRAM PENCATATAN SIPIL																

	Pelayanan Pencatatan Sipil		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen/hari		10 Dokumen/hari	10 Dokumen/hari	10 Dokumen/hari	10 Dokumen/hari	10 Dokumen/hari	300	Rp 415.800.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi Pengolahan data
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen layanan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen/hari		150 Dokumen/hari	150 Dokumen/hari	150 Dokumen/hari	150 Dokumen/hari	150 Dokumen/hari	35	Rp 2.536.800.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi SIAK
			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlha laporan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	25	Rp 377.000.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi SIAK

			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 252.400.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi Pengolahan data
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Jenis Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dokumen		5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 jenis	Rp 274.600.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi Pengolahan data
1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat																

1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat																
1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan																
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru yang disediakan	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 25.000.000	APBD	Kab. Maros	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang disediakan	Unit		10	10	15	15	15	65	Rp 16.250.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang disediakan	Unit		2	5	5	10	10	32	Rp 8.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang disediakan	Unit		5	5	10	10	10	50	Rp 4.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah	Unit		2	5	5	10	10	32	Rp 6.400.000	APBD	Dinas Pendidikan dan	Seksi Sarana Prasarana

				yang yang terbangun										Kebudayaan	Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas sekolah yang disediakan	Unit		25	25	25	25	25	125	Rp 17.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang disediakan	Unit		5	5	10	10	10	40	Rp 14.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	Ruang		150	150	200	200	100	800	Rp 155.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi	Ruang		2	10	10	12	12	46	Rp 4.600.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi	Ruang		2	5	5	10	10	32	Rp 4.800.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar

		1.01.02.2.01.11	Rehabillitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi	Ruang		12	12	15	15	15	69	Rp 9.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	Unit		6	10	15	15	15	61	Rp 610.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhabilitasi	Unit		2	2	5	5	5	19	Rp 2.850.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubelair Sekolah yang disediakan	Ruang		20	20	30	30	30	100	Rp 80.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang disediakan	Unit		2	2	4	4	6	18	Rp 450.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah	Paket		15000	15000	15000	15000	15000	75000	Rp 7.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan	Seksi Sarana Prasaran

				yang disediakan										Kebudayaan	a Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang disediakan	Paket		15000	15000	15000	15000	15000	75000	Rp 18.750.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar yang disediakan	Siswa		30000	30000	30000	30000	30000	150000	Rp 75.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD
		1.01.02.2.01.22	Penyediaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang disediakan	Paket		10	10	15	15	15	65	Rp 19.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa SD yang mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Siswa		39830	39830	39830	39830	39830	199150	Rp 12.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD
		1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Laporan Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Laporan		1	1	1	1	1	5	Rp 225.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Akreditasi SD dan SMP

		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa SD yang mengikuti Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas	Siswa		150	150	150	150	150	750	Rp 1.750.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikaan Sekolah dasar yang disediakan	Dokumen		1	1	1	1	1	5	Rp 2.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Peningkatan SDM
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pengembangan Karir	Orang		232	232	232	232	232	1160	Rp 7.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Peningkatan SDM
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan	Lembaga		150	150	150	150	150	150	Rp 150.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Akredita

				Manajemen Sekolah												si SD dan SMP
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang mndapatkan Dana BOS	Siswa		39830	39830	39830	39830	39830	199150	Rp 179.235.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD
		1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Monev Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Laporan		1	1	1	1	1	5	Rp 750.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD
1.01.02.2.02	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru yang disediakan	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 25.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang disediakan	Ruang		6	6	10	10	10	42	Rp 10.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang		2	5	5	5	5	22	Rp 5.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan	Seksi Sarana Prasarana

				yang disediakan										Kebudayaan	Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang disediakan	Ruang		5	5	5	5	5	25	Rp 6.250.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang yang terbangun	Ruang		5	5	5	5	5	25	Rp 6.250.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium Sekolah yang disediakan	Ruang		5	5	5	5	5	25	Rp 6.250.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang disediakan	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 5.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Meneng

																ah Pertama
		1.01.02.2.02.08	Pembangunan Asrama	Jumlah Asrama yang disediakan	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 12.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang disediakan	Unit		5	5	5	5	5	25	Rp 6.250.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang disediakan	Paket		5	5	5	5	5	25	Rp 5.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang disediakan	Unit		2	2	2	2	2	10	Rp 1.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

		1.01.02.2.02.12	Pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas sekolah yang disediakan	Paket		20	20	20	20	20	100	Rp 20.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang direhabilitasi	Unit		2	5	5	5	5	22	Rp 4.400.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	Ruang		18	20	20	20	20	58	Rp 19.600.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi	Unit		1	2	2	5	5	15	Rp 4.470.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

		1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi	Unit		1	3	5	5	5	18	Rp 1.900.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.17	Rehabillitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi	Ruang		1	2	2	5	5	15	Rp 3.750.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.18	Rehabillitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium Sekolah yang direhabilitasi	Unit		5	5	5	5	5	25	Rp 7.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.19	Rehabillitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/aula	Jumlah Ruang Serba Guna/aula yang direhabilitasi	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 2.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

		1.01.02.2.02.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	JumlahAsrama yang direhabilitasi	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 2.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.21	Rehabillitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Ruang Serba Guna/aula yang direhabilitasi	Unit		2	2	2	2	2	10	Rp 2.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.22	Rehabillitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang direhabilitasi	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 1.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.23	Rehabillitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang direhabilitasi	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 1.250.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	Paket		3	5	5	5	5	23	Rp 3.450.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubelair Sekolah yang disediakan	Paket		30	30	30	30	30	150	Rp 15.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	Rp 2.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	Rp 5.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

		1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang disediakan	Siswa		16000	16000	16000	16000	16000	80000	20000000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menegah Pertama	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang disediakan	Paket		16000	16000	16000	16000	16000	80000	40000000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
		1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Dasar Buku Teks yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	5000000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
		1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Belajar yang disediakan	Paket		16000	16000	16000	16000	16000	80000	8000000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan	Paket		2	10	10	10	10	42	12600000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Paket		16000	16000	16000	16000	16000	80000	8000000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
		1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Laporan		1	1	1	1	1	5	225000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Akreditasi SD dan SMP
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas	Siswa		150	150	150	150	150	750	2000000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang disediakan	Dokumen		1	1	1	1	1	5	500000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Penguatan Riset dan Pengembangan Teknologi

		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pengembangan Karir	Unit		50	50	50	50	50	250	1250000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Penguatan Riset dan Pengembangan Teknologi
		1.01.02.2.02.41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang mendapatkan dana BOS	Siswa		16000	16000	16000	16000	16000	80000	96000000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
		1.01.02.2.02.42	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS	Laporan		1	1	1	1	1	5	500000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah																
5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																

5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Hasil Pengelolaan Data Dan Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Rp 114.000.000		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		5.01.02.2.03.02	Kooordinasi Penelaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	%		100	100	100	100	100	100	Rp 102.000.000		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		5.01.02.2.03.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	%		100	100	100	100	100	100	Rp 270.000.000		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengemb	

															angan Daerah	
		5.01.02.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPD Secara Tepat Waktu	%		100	100	100	100	100	100	Rp 270.000.000		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		5.01.02.2.03.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPD Secara Tepat Waktu	%		100	100	100	100	100	100	Rp 480.000.000		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		5.01.02.2.03.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPD Secara Tepat Waktu	%		100	100	100	100	100	100	Rp 270.000.000		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan	

														Pengembangan Daerah	
		5.01.02.2.03.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	%		100	100	100	100	100	100	Rp 1.940.000.000		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2020) (3)**	**Target Tahunan (4)**						**Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)**	**Sumber Pendanaan (6)**	**Instansi Pelaksana (7)**	**Keterangan (8)**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**				
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan												
2.1.1(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita												
2.2.1*Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita												
2.2.1(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta												
2.2.2*Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe												

2.2.2(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil																
2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif																
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Wasting (gizi kurang dan gizi buruk) tertangani	Balita		3.809	3.804	3.799	3.794	3.789	3.789	1.796.448.034	APBD	Dinas Kesehatan	Dinkes Bidang Kesmas
1.2.2.2.02		1.02.02.2.02.15		Jumlah Balita stunting (pendek dan sangat pendek) yang tertangani	Balita		3.809	3.804	3.799	3.794	3.789	3.789		APBN / APBD	Dinas Kesehatan	Dinkes Bidang Kesmas
1.2.2.2.02		1.02.02.2.02.15		Jumlah Balita stunting (pendek dan sangat pendek) yang tertangani	Balita		3.809	3.804	3.799	3.794	3.789	3.789		APBN / APBD	Dinas Kesehatan	Dinkes Bidang Kesmas

1.2.2.2.02		1.02.02.2.02.15		INDIKATOR SUB KEGIATAN	Balita		5.225	5.216	5.207	5.198	5.189	5.189		APBN / APBD	Dinas Kesehatan	Dinkes Bidang Kesmas
1.2.2.2.02		1.02.02.2.02.15		Jumlah ibu hamil anemia yang dilayani	Bumil		2.068	2.047	2.027	2.007	1.987	1.987		APBN / APBD	Dinas Kesehatan	Dinkes Bidang Kesmas
1.2.2.2.02		1.02.02.2.02.15		Jumlah bayi usia < 6 bln mendapat ASI Eksklusif	Bayi		5.793	5.822	5.851	5.880	5.909	5.909		APBN / APBD	Dinas Kesehatan	Dinkes Bidang Kesmas
2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)																
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan																
2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari																
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan																
2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan																
2.09.04.2.01.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan	Jumlah dokumen daerah rawan pangan dalam bentuk peta	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	113.610.000	APBN / APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

			Kerentangan Pangan													

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (2017) (3)	Target Tahunan (4)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)	Keterangan (8)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia												
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)												
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih												
3.1.2(a)Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan												
3.2.1*Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup												
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup												
3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup												
3.2.2(b)Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi												
3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa												
3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk												
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi												
3.b.1(a)Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas												
3.c.1*Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan												
3.3.4.(b) Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B												
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)												
3.3.5.(a) Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta.												
3.3.5.(b) Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)												
3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun												

3.3.3.(a) Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria.																
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.																
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.																
3.4.2.(a) Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa																
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani sampai K4 sesuai standar	Bumil		7.235	7.308	7.381	7.418	7.491	7.491	5.634.224.740	APBN / APBD	Dinas Kesehatan	Dinkes Bidang Kesmas
1.2.2.2.02		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani difasilitas kesehatan sesuai standar	Bulin		7.138	7.208	7.278	7.348	7.418	7.418	6.079.555.124	APBN / APBD	Dinas Kesehatan	Dinkes Bidang Kesmas
1.2.2.2.02		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang dilayani sampai KN Lengkap sesuai standar	BBL		7.132	7.202	7.272	7.342	7.412	7.412	611.346.988		Dinas Kesehatan	Dinkes Bidang Kesmas
1.2.2.2.02		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai SOP	Orang		9.771	9.790	9.810	9.830	9.850	9.870	1.810.041.925	APBD	Dinas Kesehatan	Dinkes Bidang P2P
1.2.2.2.02		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Penemuan dan Pengobatan TBC	Orang		4.984	5.000	5.020	5.040	5.060	7.463	2.181.452.056	APBD	Dinas Kesehatan	Dinkes Bidang P2P

			Terduga Tuberkulosis													
1.2.2.2.02		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standart	penduduk usia > 15		4.571	4.594	4.616	4.639	4.662	4.684	688.656.000	APBD	Dinas Kesehatan	Dinkes Bidang P2P
1.02.02.2.01		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	JUMLAH JENIS OBAT DAN VAKSIN YANG TERSEDIA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS	Jenis Obat dan Vaksin		104	145	150	155	155	155	13.184.280.825	APBD	Dinas Kesehatan	
02.02.2.02		**02.02.2.02.25**	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah bayi 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	bayi 0-11 bulan		5560	5837	6333	6649	7132	7132	Rp 11.817.519.000	APBD	Dinas Kesehatan	Seksi Surveilans dan Imunisasi
				Jumlah anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan campak rubella	anak 18-24 bulan		5114	5370	5880	6173	6659	5817		APBD	Dinas Kesehatan	Seksi Surveilans dan Imunisasi
				Jumlah Puskesmas yang disupervisi suportif	Puskesmas		14	14	14	14	14	14		APBD	Dinas Kesehatan	
				Jumlah puskesmas yang dilakukan	Puskesmas		3	2	2	2	2	2		APBD	Dinas Kesehatan	

				pendampingan BLF											
				Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian EVM (Effective Vaccine Management)	Puskesmas		14	14	14	14	14	14		APBD	Dinas Kesehatan	
				Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian RCA (Rapid Convinience Assesment)	Puskesmas		14	14	14	14	14	14		APBD	Dinas Kesehatan	
				Jumlah kecamatan yang mencapai API < 1 / 1000 penduduk	puskesmas		100	14	14	14	14	14	Rp 1.969.586.500	APBD	Dinas Kesehatan	
				Jumlah puskesmas yang dapat berfungsi sebagai Rabies Center	puskesmas		5	7	10	12	14	14		APBD	Dinas Kesehatan	
				Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD	orang		362	350	320	300	280	280		APBD	Dinas Kesehatan	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemantauan vector	puskesmas		6	8	10	12	14	14		APBD	Dinas Kesehatan	

				Jumlah penderita yang diberikan tatalaksana pneumonia sesuai standar	orang		200	200	250	250	275	275		APBD	Dinas Kesehatan	
				Jumlah puskesmas yang mengaktifkan Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	layanan		6	8	10	12	14	14		APBD	Dinas Kesehatan	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan penemuan aktif pasien kusta di wilayah kerjanya	puskesmas		10	11	12	13	14	14		APBD	Dinas Kesehatan	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	puskesmas		14	14	14	14	14	14		APBD	Dinas Kesehatan	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemantauan bayi usia 9-12 bulan dari ibu dengan Hbs-Ag positif	puskesmas		5	7	9	12	14	14		APBD	Dinas Kesehatan	
				Jumlah Puskesmas Yang melaksanakan	Puskesmas		14	14	14	14	14	14	Rp 1.008.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	

				Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM												
				Jumlah Desa/Kelurahan yang mengimplementasikan KTR	Desa/Kelurahan		2	4	6	8	10	2	Rp 372.000.000	APBD	Dinas Kesehatan	
				Jumlah screening perokok usia Remaja	remaja usia 10 - 18 thn		4.030	4.397	4.763	5.129	5.496	5.862	Rp 570.682.000	APBD	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02		1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	spesimen		670	335	167	83	42	42	691.860.000	APBD	Dinas Kesehatan	Seksi Surveilans dan Imunisasi
1.02.02.2.02		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah ibu hamil anemia yang dilayani	Bumil		2.068	2.047	2.027	2.007	1.987	1.987	1.796.448.034	APBD	Dinas Kesehatan	
				Jumlah ibu hamil KEK yang dilayani	Bumil		1281	1262	1243	1224	1211	1211			Dinas Kesehatan	
				Jumlah ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah	bumil		7182	7202	7222	7242	7262	7262			Dinas Kesehatan	

				Darah minimal 90 tablet masa kehamilan											
				Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan	Bumil		1275	1257	1239	1221	1209	1209			Dinas Kesehatan	
				Jumlah ibu nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A	bufas		7068	7068	7068	7068	7068	7068			Dinas Kesehatan	
				Jumlah bayi dengan BBLR (BB < 2500 gr) yang dilayani	bbl		275	268	261	254	247	247			Dinas Kesehatan	
				Jumlah bayi baru lahir mendapat mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	bbl		6145	6175	6205	6225	6255	6255			Dinas Kesehatan	
				Jumlah bayi usia < 6 bln mendapat ASI Eksklusif	bayi		5793	5822	5851	5880	59,9	5909			Dinas Kesehatan	
				Jumlah bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	bayi		4638	4661	4684	4707	4730	4730			Dinas Kesehatan	
				Jumlah balita 6-59 bln mendapat kapsul vitamin A	balita		30494	30570	30646	30722	30798	30798			Dinas Kesehatan	

				Jumlah balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan	balita gizi kurang		1160	1158	1156	1154	1152	1152		Dinas Kesehatan	
				Jumlah kasus balita gizi buruk mendapat perawatan	balita gizi buruk		9	8	7	6	5	5		Dinas Kesehatan	
				Jumlah balita yang ditimbang BB nya (D/S)	balita		20248	21260	22323	23439	24610	24610		Dinas Kesehatan	
				Jumlah balita memiliki buku kesehatan ibu dan anak (KIA), Kartu menuju sehat	balita		31777	31808	31839	31870	31901	31901		Dinas Kesehatan	
				Jumlah balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D)	balita		12649	12712	12775	12838	12901	12901		Dinas Kesehatan	
				Jumlah Balita BB Kurang (BB kurang dan sangat kurang) yang tertangani	balita		2487	2483	2479	2475	2471	2471		Dinas Kesehatan	
				Jumlah Balita stunting (pendek dan sangat pendek) yang tertangani	balita		3809	3804	3799	3794	3789	3789		Dinas Kesehatan	

				Jumlah Balita Wasting (gizi kurang dan gizi buruk) tertangani	balita		1416	1412	1408	1404	1400	1400			
				Jumlah remaja yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	remaja		9770	9965	10164	10367	10574	10574			
				Jumlah RT mengkonsumsi garam beryodium	RT		1583	1585	1587	1589	1591	1591			
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan surveilans gizi	Puskesmas		14	14	14	14	14	14			
				Jumlah puskesmas yang mampu tata laksana gizi buruk	Puskesmas		14	14	14	14	14	14			
1.02.02.2.02		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan Napza yang mendapat pelayanan rehabilitasi medis	Penyalahguna Napza		59	59	59	59	59	59	88.500.000	APBD	Dinas Kesehatan	
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun															
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															

1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat yang terlaksana	Sekolah		240	288	336	384	480		4.017.262.762	APBD	Dinas Kesehatan	
3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.																
3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.																
3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.																
3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.																
3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).																
3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).																
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	2.14.03.2.03.01.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Jenis Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang Didistribusikan			5	5	5	5	5	5	Rp 681.787.500	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB

	Kabupaten/ Kota	2.14.03.2.03.02.	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB yang mendapatkan peningkatan kompetensi			27	27	27	27	27	135	Rp 175.705.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.03.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			420	420	420	420	420	2.100	Rp 491.600.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.04.	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Peserta KB yang mengalami Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP yang mendapatkan pertolongan			140	140	140	140	140	700	Rp 363.200.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB

		2.14.03.2.03.05.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dokumen rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB			1	1	1	1	1	5	Rp 68.176.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang Pelayanan KB			3	3	3	3	3	3	Rp 9.925.000.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.07.	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Peserta KB yang mendapatkan pembinaan Pasca Pelayanan			280	280	280	280	280	1.400	Rp 366.500.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.08.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	Jumlah Faskes dan Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan			25	25	25	25	25	125	Rp 893.500.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB

			Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringan	Kesehatan Reproduksi												
		2.14.03.2.03.09.	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Faskes dan Kelompok Kegiatan yang melakukan promisi dan konseling Kesehatan Reproduksi			25	25	25	25	25	125	Rp 923.500.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.10.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah PLKB/PKB yang mendapatkan peningkatan kompetensi			136	136	134	134	134	134	Rp 285.766.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.11.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS yang mendapatkan Pelayanan KB			2.015	280	240	240	240	3.015	Rp 700.000.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Bidang KB

															Berencana	
		2.14.03.2.03.12.	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah PUS Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran yang mendapatkan konseling KB			350	350	350	350	350	1.750	Rp 442.200.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.13.	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Kesertaan KB Pria			20	20	20	20	20	100	Rp 811.000.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
2.14.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk	2.14.03.2.01.01.	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah stakeholders dan Mitra Kerja yang memahami program KKBPK	Mitra Kerja		20	20	20	20	20	20	Rp 681.787.500		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang PP

	dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.02.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan KIE sesuai kearifan budaya lokal tentang program KKBPK	Orang		420	420	420	420	420	2.100	Rp 175.705.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang PP
		2.14.03.2.01.03.	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Media KIE yang didistribusikan	Unit		3.122	3.122	3.122	3.122	3.122	15.610	Rp 491.600.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang PP
		2.14.03.2.01.04.	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media Massa Cetak, Media Radio, secara langsung	Kali		12	12	12	12	12	12	Rp 363.200.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang PP
		2.14.03.2.01.05.	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media yang dipergunakan dalam promosi dan KIE sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	Media		2	2	2	2	2	2	Rp 68.176.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang PP

			Dalam Pencitraan Program KKBPK													
		2.14.03.2.01.06.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	Jumlah Mitra Kerja yang memahami mekanisme operasional program KKBPK	Mitra Kerja		20	20	20	20	20	20	Rp 9.925.000.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang PP
		2.14.03.2.01.07.	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang mendapatkan dukungan operasional dan sarana	Balai Penyuluhan		14	14	14	14	14	14	Rp 366.500.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang PP

		2.14.03.2.01.08.	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pelaksanaan Program KKBPK yang di monitoring dan evaluasi	Program		14	14	14	14	14	14	Rp 893.500.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang PP

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2020) (3)**	**Target Tahunan (4)**						**Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)**	**Sumber Pendanaan (6)**	**Instansi Pelaksana (7)**	**Keterangan (8)**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**				
TUJUAN 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua												
4.6.1.(a) Persentase Angka Melek Aksara Penduduk umur ≥15 tahun												
4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun												
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan												

1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang disediakan	Unit		2	2	2	2	2	10	Rp 5.000.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal yang disediakan	Unit		2	2	2	2	2	10	Rp 2.500.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang direhabilitasi	Unit		2	2	2	2	2	10	Rp 2.500.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal yang direhabilitasi	Ruang		2	2	2	2	2	10	Rp 470.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF

		1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Sekolah Non Formal yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	Rp 5.000.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		1.01.02.2.04.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah Non Formal yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	Rp 5.000.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	Rp 5.000.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Biaya Personil Peserta didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang disediakan	Orang		1000	1000	1000	1000	1000	5000	Rp 10.000.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Nonformal
		1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	Rp 10.000.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF

		1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Siswa Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang mengikuti Proses Belajar	Orang		1000	1000	1000	1000	1000	5000	Rp 3.250.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Nonformal
		1.01.02.2.04.13	Penyiapan Tindak lanjut dan Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah laporan Evaluasi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan		1	1	1	1	1	5	Rp 375.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Akreditasi PAUD dan PNF
		1.01.02.2.04.14	Penyediaan pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disediakan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen		1	1	1	1	1	5	Rp 500.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Nonformal
		1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Non Formal yang mengikuti Pengembangan Karir	Orang		180	180	180	180	180	900	Rp 1.250.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Nonformal

		1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Lembaga		250	250	250	250	250	1250	Rp 250.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Akreditasi PAUD dan PNF
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Non Formal yang mendapatkan BOP Kesetaraan	Siswa		500	500	500	500	500	2500	Rp 3.250.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Nonformal
		1.01.02.2.04.18	Peningakatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	Laporan		1	1	1	1	1	5	Rp 250.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Nonformal
4.c.1*Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan																
1.01.04 Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan																

1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang disediakan	Laporan		1	1	1	1	1	5	Rp 250.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		1.01.04.2.01.01	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan		1	1	1	1	1	5	Rp 300.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APM) SD/MI/sederajat															
4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.															
4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.															

4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.																
4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.																
4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APM) SMP/MTs/sederajat																
4.a.1* Angka Partisipasi Kasar (APM) SD/MI/sederajat																
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.																
4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																
1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan																
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru yang disediakan	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 25.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang disediakan	Unit		10	10	15	15	15	65	Rp 16.250.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar

		1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang disediakan	Unit		2	5	5	10	10	32	Rp 8.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang disediakan	Unit		5	5	10	10	10	50	Rp 4.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang yang terbangun	Unit		2	5	5	10	10	32	Rp 6.400.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas sekolah yang disediakan	Unit		25	25	25	25	25	125	Rp 17.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang disediakan	Unit		5	5	10	10	10	40	Rp 14.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	Ruang		150	150	200	200	100	800	Rp 155.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi	Ruang		2	10	10	12	12	46	Rp 4.600.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan	Seksi Sarana Prasarana

			Guru/Kepala Sekolah/TU											Kebudayaan	Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi	Ruang		2	5	5	10	10	32	Rp 4.800.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.11	Rehabillitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi	Ruang		12	12	15	15	15	69	Rp 9.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	Unit		6	10	15	15	15	61	Rp 610.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhabilitasi	Unit		2	2	5	5	5	19	Rp 2.850.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubelair Sekolah yang disediakan	Ruang		20	20	30	30	30	100	Rp 80.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang disediakan	Unit		2	2	4	4	6	18	Rp 450.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar

		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang disediakan	Paket		15000	15000	15000	15000	15000	75000	Rp 7.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang disediakan	Paket		15000	15000	15000	15000	15000	75000	Rp 18.750.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar yang disediakan	Siswa		30000	30000	30000	30000	30000	150000	Rp 75.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD
		1.01.02.2.01.22	Penyediaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang disediakan	Paket		10	10	15	15	15	65	Rp 19.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa SD yang mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Siswa		39830	39830	39830	39830	39830	199150	Rp 12.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD
		1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Laporan Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Laporan		1	1	1	1	1	5	Rp 225.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Akreditasi SD dan SMP

		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa SD yang mengikuti Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas	Siswa		150	150	150	150	150	750	Rp 1.750.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikaan Sekolah dasar yang disediakan	Dokumen		1	1	1	1	1	5	Rp 2.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Peningkatan SDM
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pengembangan Karir	Orang		232	232	232	232	232	1160	Rp 7.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Peningkatan SDM
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Lembaga		150	150	150	150	150	150	Rp 150.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Akreditasi SD dan SMP
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang mndapatkan Dana BOS	Siswa		39830	39830	39830	39830	39830	199150	Rp 179.235.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD

		1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Monev Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Laporan		1	1	1	1	1	5	Rp 750.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD
1.01.02.2.02	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru yang disediakan	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 25.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang disediakan	Ruang		6	6	10	10	10	42	Rp 10.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang disediakan	Ruang		2	5	5	5	5	22	Rp 5.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang disediakan	Ruang		5	5	5	5	5	25	Rp 6.250.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang yang terbangun	Ruang		5	5	5	5	5	25	Rp 6.250.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah

																Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium Sekolah yang disediakan	Ruang		5	5	5	5	5	25	Rp 6.250.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang disediakan	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 5.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.08	Pembangunan Asrama	Jumlah Asrama yang disediakan	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 12.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang disediakan	Unit		5	5	5	5	5	25	Rp 6.250.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang disediakan	Paket		5	5	5	5	5	25	Rp 5.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

		1.01.02.2.02.11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang disediakan	Unit		2	2	2	2	2	10	Rp 1.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas sekolah yang disediakan	Paket		20	20	20	20	20	100	Rp 20.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang direhabilitasi	Unit		2	5	5	5	5	22	Rp 4.400.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	Ruang		18	20	20	20	20	58	Rp 19.600.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi	Unit		1	2	2	5	5	15	Rp 4.470.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi	Unit		1	3	5	5	5	18	Rp 1.900.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah

			Kesehatan Sekolah											Kebudayaan	Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.17	Rehabillitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi	Ruang		1	2	2	5	5	15	Rp 3.750.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.18	Rehabillitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium Sekolah yang direhabilitasi	Unit		5	5	5	5	5	25	Rp 7.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.19	Rehabillitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/aula	Jumlah Ruang Serba Guna/aula yang direhabilitasi	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 2.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	JumlahAsrama yang direhabilitasi	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 2.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.21	Rehabillitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Ruang Serba Guna/aula yang direhabilitasi	Unit		2	2	2	2	2	10	Rp 2.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

		1.01.02.2.02.22	Rehabillitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang direhabilitasi	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 1.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.23	Rehabillitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang direhabilitasi	Unit		1	1	1	1	1	5	Rp 1.250.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	Paket		3	5	5	5	5	23	Rp 3.450.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubelair Sekolah yang disediakan	Paket		30	30	30	30	30	150	Rp 15.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	Rp 2.500.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	Rp 5.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah

															Kebudayaan	Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang disediakan	Siswa		16000	16000	16000	16000	16000	80000	20000000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menegah Pertama	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang disediakan	Paket		16000	16000	16000	16000	16000	80000	40000000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
		1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Dasar Buku Teks yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	5000000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
		1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Belajar yang disediakan	Paket		16000	16000	16000	16000	16000	80000	8000000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan	Paket		2	10	10	10	10	42	12600000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Paket		16000	16000	16000	16000	16000	80000	8000000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP

		1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Laporan		1	1	1	1	1	5	225000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Akreditasi SD dan SMP
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas	Siswa		150	150	150	150	150	750	2000000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang disediakan	Dokumen		1	1	1	1	1	5	500000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Penguatan Riset dan Pengembangan Teknologi
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pengembangan Karir	Unit		50	50	50	50	50	250	1250000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Penguatan Riset dan Pengembangan Teknologi

		1.01.02.2.02.41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang mendapatkan dana BOS	Siswa		16000	16000	16000	16000	16000	80000	96000000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
		1.01.02.2.02.42	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS	Laporan		1	1	1	1	1	5	500000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ruang		5	5	5	5	5	25	Rp 4.250.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang disediakan	Paket		12	12	12	12	12	60	Rp 6.250.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhabiltasi	Ruang		6	10	10	10	10	46	Rp 5.400.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi	Paket		6	10	10	10	10	46	Rp 4.600.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF

		1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Meubeleur PAUD yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	Rp 5.000.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		1.01.02.2.03.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	Rp 2.500.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	Rp 2.500.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Siswa PAUD yang disediakan	Paket		8300	8300	8300	8300	8300	41500	Rp 4.150.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD
		1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik PAUD yang disediakan	Siswa		8300	8300	8300	8300	8300	41500	Rp 10.375.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang disediakan	Paket		1	1	1	1	1	5	Rp 5.000.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah siswa PAUD yang mengikuti Proses Belajar	Siswa		8300	8300	8300	8300	8300	41500	Rp 17.500.000		Dinas Pendidikan Dan	Seksi Kurikulum dan

														Kebudayaan	Peserta Didik PAUD
		1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Laporan Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Laporan		1	1	1	1	1	5	Rp 375.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Akreditasi PAUD dan PNF
		1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD yang disediakan	Dokumen		1	1	1	1	1	5	Rp 250.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		1.01.02.2.03.16	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pengembangan Karir	Orang		20	20	20	20	20	100	Rp 500.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Lembaga		250	250	250	250	250	250	Rp 500.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD

		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Siswa yang mendapatkan dana BOP PAUD	Siswa		8300	8300	8300	8300	8300	41500	Rp 6.250.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD
		1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOP PAUD	Laporan		1	1	1	1	1	5	Rp 325.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD
4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).																
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA																
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**2.07.03.2.01.09**	Pelatihan Komputer bagi kaum millenial	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pencari Kerja		30	30	30	30	30		Rp 203.950.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN	Kasi PelatihanTK

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2020) (3)**	**Target Tahunan (4)**						**Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)**	**Sumber Pendanaan (6)**	**Instansi Pelaksana (7)**	**Keterangan (8)**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**				

TUJUAN 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan																
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.																
5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.																
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kasus		7	7	7	7	7	7	Rp 141.218.005	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kasi Perlindungan Hukum dan Hak Perempuan
5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.																
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.																
2.08.07. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK																

02.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	02.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang		90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	Rp 91.137.483	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kasi Perlindungan Khusus Anak
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.																
5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.																
5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)																
5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.																
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																

02.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	02.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluarga		200	200	200	200	200	200	Rp 97.208.020	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga
		02.08.04.2.01.02	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Paket		1	1	1	1	1	1	Rp 213.564.243	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga
5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam																
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi	Jumlah Kebijakan yang dirumuskan	Dokumen		0	0	2	2	2	6	Rp 6.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	

	Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		dan Komunikasi Publik													
		2.16.02.2.01 .02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Layana n		0	0	0	1	1	2	Rp 100.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01 .03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan informasi Daerah yang dimonitorin g	Tahun		0	0	0	1	1	2	Rp 10.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01 .04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media komunikasi publik yang dikelola	Unit		1	1	1	1	1	1	Rp 1.836.526		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01 .05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah an Dan Masyarakat yang dipublikasik an	kegiata n		192	250	300	300	300	300	Rp 1.645.912		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01 .06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Publik	Layana n		1	1	1	1	1	1	Rp 204.100		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	

		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan		0	0	0	0	1	1	Rp 20.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Mitra		0	1	3	1	0	5	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Jumlah Sumber daya Komunikasi publik yang kompeten	Orang		2	2	2	0	0	6	Rp 36.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah sengketa publik yang dilayani	Kasus		2	2	2	2	2	10	Rp 24.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Penyelenggaran Hubungan Media dan Kemitraan	Mitra		0	1	1	1	0	3	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pendukung Infromasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Buah		0	1	2	0	0	3	Rp 300.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	

5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).																
5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.																
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	2.14.03.2.03.01.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Jenis Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang Didistribusikan			5	5	5	5	5	5	Rp 681.787.500	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.02.	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB yang mendapatkan peningkatan kompetensi			27	27	27	27	27	135	Rp 175.705.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB

		2.14.03.2.03.03.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			420	420	420	420	420	2.100	Rp 491.600.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.04.	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Peserta KB yang mengalami Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP yang mendapatkan pertolongan			140	140	140	140	140	700	Rp 363.200.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.05.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dokumen rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB			1	1	1	1	1	5	Rp 68.176.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB

		2.14.03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang Pelayanan KB			3	3	3	3	3	3	Rp 9.925.000.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.07.	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Peserta KB yang mendapatkan pembinaan Pasca Pelayanan			280	280	280	280	280	1.400	Rp 366.500.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.08.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringan	Jumlah Faskes dan Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			25	25	25	25	25	125	Rp 893.500.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.09.	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di	Jumlah Faskes dan Kelompok Kegiatan yang melakukan			25	25	25	25	25	125	Rp 923.500.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB

			Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	promisi dan konseling Kesehatan Reproduksi												
		2.14.03.2.03.10.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah PLKB/PKB yang mendapatkan peningkatan kompetensi			136	136	134	134	134	134	Rp 285.766.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.11.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS yang mendapatkan Pelayanan KB			2.015	280	240	240	240	3.015	Rp 700.000.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
		2.14.03.2.03.12.	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah PUS Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran yang mendapatkan konseling KB			350	350	350	350	350	1.750	Rp 442.200.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB

		2.14.03.2.03.13.	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Kesertaan KB Pria			20	20	20	20	20	100	Rp 811.000.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang KB
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.																
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.																
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK																
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Rp 118.749.749		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kasi Data dan Informasi Gender
		2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolah Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan	Orang		45	45	45	45	45	45	Rp 82.229.183		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kasi Data dan Informasi Gender

				Kabupaten/ Kota												
5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.																
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan		2	2	2	2	2	2	Rp 558.988.578	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kasi Perlindungan Hukum dan Hak Perempuan

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)					Satuan (2)	Tahun Dasar (2020) (3)	Target Tahunan (4)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)	Keterangan (8)
							2021	2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 6. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua																
6.1.1. (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak																
6.1.1. (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.																
1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp 1.200.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Jaringan Perpipaan	Meter			1000 Meter	1000 Meter	1000 Meter	1000 Meter	1000 Meter	Rp 2.400.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata	Seksi Air Minum dan Sanitasi

															an Ruang	
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang Jaringan Perpipaan	Meter			2500 Meter	3000 Meter	3000 Meter	3000 Meter	3000 Meter	Rp 9.750.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Jaringan Perpipaan	Meter			2750 Meter	2300 Meter	2300 Meter	2300 Meter	2300 Meter	Rp 10.905.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Sambungan Rumah (SR)	SR		25 SR	200 SR	250 SR	200 SR	250 SR	250 SR	Rp 33.725.248.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi

		1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Bak Hydran/Penampung Air	Unit		18 Unit	16 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	Rp 8.210.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang Jaringan Perpipaan	Meter		25 Meter	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100 Meter	Rp 10.435.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau															
6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).															
6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.															
6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.															
6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.															
1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															

1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya	Unit			45	35	40	45	45	42.150.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Sungai, Embung, Rawa dan Pantai
		1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Bor Yang Dibangun	Unit		15	7	8	8	8	8	4.050.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Sungai, Embung, Rawa dan Pantai
		1.03.02.2.01.08	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing Yang Dibangun	Meter		3.500,00	6.333,33	7.760,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	35.965.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Sungai, Embung, Rawa dan Pantai
6.2.1. (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak																
6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal																
6.2.1. (f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat																

6.3.1. (a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).																
6.3.1. (b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.																
1.03.06. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah																
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen			1 Dokumen				1 Dokumen	Rp 600.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.06.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah MCK Yang Dibangun	Unit		500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	Rp 26.760.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.06.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM	Orang			20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 250.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penata	Seksi Air Minum dan Sanitasi

															an Ruang	
		1.03.06.2.01.08	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM	Orang			20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 150.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.06.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah IPAL Kombinasi MCK	Unit		2 Unit	5 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Rp 16.939.224.550		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)																
6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)																
1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan																

1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat yang terlaksana	Sekolah		240	288	336	384	480	0	Rp 4.017.262.762	APBD	Dinas Kesehatan	
6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku																
2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	2.11.03.2.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Lokasi Titik Pantau Pencemaran	Titik Pantau		11	11	11	11	11	11	Rp 2.100.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan																
1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																

1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	**1.03.03.2.01.01**	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen		0	0	1	1	0	1	Rp 1.200.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Jaringan Perpipaan	Meter			1000	1000	1000	1000	1000	Rp 2.400.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang Jaringan Perpipaan	Meter			2500	3000	3000	3000	3000	Rp 9.750.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Jaringan Perpipaan	Meter			2750	2300	2300	2300	2300	Rp 10.905.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi

		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Sambungan Rumah (SR)	SR		25	200	250	200	250	250	Rp 28.050.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Bak Hydran/Penampung Air	Unit		18	16	50	50	50	50	Rp 6.460.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
		1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang Jaringan Perpipaan	Meter		25	100	100	100	100	100	Rp 10.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Air Minum dan Sanitasi
6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air																
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																

1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang terbangun	Unit			2	2	2	2		Rp 4.800.000.000		Dinas Kesehatan	

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2020) (3)**	**Target Tahunan (4)**						**Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)**	**Sumber Pendanaan (6)**	**Instansi Pelaksana (7)**	**Keterangan (8)**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**				
TUJUAN 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua												
8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB												
3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata												

3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	3.26.02.2.02.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket		6	8	8	8	8	8	Rp 49.132.022.000		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
		3.26.02.2.02.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kali		7	7	7	7	7	7	Rp 5.262.217.976		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Destinasi	Kali		1	1	1	1	1	1	Rp 1.244.819.000		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	Kali		12	12	12	12	12	12	Rp 9.081.900.000		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara																
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara																

8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata															
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA															
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	3.26.03.2.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pelaksanaan promosi media cetak dan media lainnya	Kali		12	12	12	12	12	12	Rp 940.500.000		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
		3.26.03.2.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi melalui apkasi	Orang			10	10	10	10	10	Rp 3.639.999.800		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)															
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA															

2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**2.07.03.2.01.01**	Pelatihan Teknik Las	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pencari Kerja			30	30	30	30		Rp 175.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN	Kasi PelatihanTK
		2.07.03.2.01.02	Pelatihan Jasa Boga	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pencari Kerja			30	30	30	30		Rp 175.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN	Kasi PelatihanTK
		2.07.03.2.01.03	Pelatihan Menjahit	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pencari Kerja		50	30	30	30	30		Rp 215.950.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN	Kasi PelatihanTK
		2.07.03.2.01.04	Pelatihan Tata Rias	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pencari Kerja		30	30	30	30	30		Rp 188.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN	Kasi PelatihanTK
		2.07.03.2.01.05	Pelatihan Servis Outomotif (Motor)	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan	Pencari Kerja			30	30	30	30		Rp 175.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG	Kasi PelatihanTK

				Pelatihan Berbasis Kompetensi										RASI KABUPATEN	
		2.07.03.2.01.06	Pelatihan Teknik Sablon Digital	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pencari Kerja			30	30	30	30		Rp 175.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN	Kasi PelatihanTK
		2.07.03.2.01.07	Pelatihan Teknik Pengolahan Ikan	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pencari Kerja		30	30	30	30	30		Rp 188.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN	Kasi PelatihanTK
		2.07.03.2.01.08	Pelatihan Teknik Pendingin AC	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pencari Kerja			30	30	30	30		Rp 175.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN	Kasi PelatihanTK
		2.07.03.2.01.09	Pelatihan Komputer bagi kaum millenial	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pencari Kerja		30	30	30	30	30		Rp 203.950.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN	Kasi PelatihanTK
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita															

8.1.1.(a) PDB per kapita																
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah / Jenis data sektoral yang tersedia dan menjadi bahan informasi publik	Jeis		45	45	45	45	45	45	Rp 828.400		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang kompeten	Orang		0	2	3	2	0	10	Rp 48.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata statistik sektoral	Kegiatan		0	0	1	1	1	3	Rp 120.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kebijakan terkait kelembagaan statistik sektoral	Buah		0	0	0	2	1	3	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Stastistik	Jenis		0	0	1	1	2	4	Rp 260.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah koordinasi untuk penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral daerah	Tahun		0	0	1	1	1	3	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)					Satuan (2)	Tahun Dasar (2020) (3)	Target Tahunan (4)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)	Keterangan (8)
							2021	2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi																
9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband																
9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam																
9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet																
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Kebijakan yang dirumuskan			0	0	2	2	2	6	Rp 6.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik			0	0	0	1	1	2	Rp 100.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan informasi Daerah yang dimonitoring			0	0	0	1	1	2	Rp 10.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan	Jumlah Media			1	1	1	1	1	1	Rp 1.836.526		**Dinas Komunikas**	

			Perencanaan Media Komunikasi Publik	komunikasi publik yang dikelola										**i dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintahan Dan Masyarakat yang dipublikasikan			192	250	300	300	300	300	Rp 1.645.912		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Publik			1	1	1	1	1	1	Rp 204.100		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			0	0	0	0	1	1	Rp 20.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan dengan pemangku kepentingan			0	1	3	1	0	5	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Jumlah Sumber daya Komunikasi publik yang kompeten			2	2	2	0	0	6	Rp 36.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	

		2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah sengketa publik yang dilayani			2	2	2	2	2	10	Rp 24.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Penyelenggaran Hubungan Media dan Kemitraan			0	1	1	1	0	3	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pendukung Infromasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			0	1	2	0	0	3	Rp 300.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan.																
2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran																
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	2.16.02.2.01.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoprasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Perahu/Sampan	Unit		570	570	570	570	570	570	Rp 112.000.000		Dinas Perhubungan	Kepala Seksi Dermaga dan Penyeberangan

	Sungai dan Danau	2.16.02.2.01.02	Pengawasan pengoprasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Pengguna Dermaga	Kali		12	12	12	12	12	12	Rp 183.500.000		Dinas Perhubungan	Kepala Seksi Dermaga dan Penyeberangan

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2020) (3)**	**Target Tahunan (4)**						**Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)**	**Sumber Pendanaan (6)**	**Instansi Pelaksana (7)**	**Keterangan (8)**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**				
TUJUAN 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara												
10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal												
10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri												
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal												
2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa												

2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 770.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah penyusunan produk hukum desa yang difasilitasi	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 770.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.03.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah penyusunan perencanaan pembangunan desa yang difasilitasi	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 770.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pengelolaan keuangan desa yang difasilitasi	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 990.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 770.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

		2.13.04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah penyelenggaraan musyawarah desa yang difasilitasi	Desa								Rp -		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.07.	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah peraturan desa yang dievaluasi dan dimonitoring	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 770.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa yang dibina dan diberdayakan	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 1.536.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang difasilitasi	Desa			18		62		80	Rp 2.880.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

		2.13.04.2.01.10.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa			16		64		80	Rp 160.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah penyusunan profil desa yang difasilitasi	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 770.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.12.	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah manajemen pemerintahan desa yang difasilitasi	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 770.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.13.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah pengelolaan aset desa yang difasilitasi	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 1.170.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 770.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.15.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah penetapan dan penegasan batas desa	Desa				80			0	Rp 154.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

				yang difasilitasi												
		2.13.04.2.01.16.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan Kepala Desa yang dibina dan difasilitasi	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 770.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.17.	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah pelaksanaan penugasan urusan/ kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 770.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan yang difasilitasi	Desa		80	80	80	80	80	80	Rp 1.000.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil																

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah / Jenis data sektoral yang tersedia dan menjadi bahan informasi publik	Jenis		45	45	45	45	45	45	Rp 828.400		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang kompeten	Orang		0	2	3	2	0	10	Rp 48.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata statistik sektoral	Kegiatan		0	0	1	1	1	3	Rp 120.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kebijakan terkait kelembagaan statistik sektoral	Buah		0	0	0	2	1	3	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Stastistik	Jenis		0	0	1	1	2	4	Rp 260.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	

		2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah koordinasi untuk penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral daerah	Tahun		0	0	1	1	1	3	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
10.1.1* Koefisien Gini.																
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.																
10.1.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.																
1.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan SLRT)	Jumlah Kepala Keluarga yang Terdata	Rumah Tangga		40000	40000	40000	40000	40000	20000	Rp 2.213.745.000	DINSOS	Dinas Sosial	Sub. Bag. Jaminan Sosial, Penyuluhan dan Pengelolaan Data
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan PKH)	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan dan Jaminan Sosial	KPM		14000	14000	14000	14000	14000	70000	Rp 2.126.350.000	DINSOS	Dinas Sosial	Sub. Bag. Jaminan Sosial, Penyuluhan dan Pengelolaan Data

		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	KK			100	100	100	100	400	Rp 1.000.000.000	DINSOS	Dinas Sosial	Sub. Bag. Jaminan Sosial, Penyuluhan dan Pengelolaan Data
		1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang Menerima Bantuan Sosial UEP (Usaha Ekonomi Produktif)	KUBE			20	20	20	50	110	Rp 900.000.000	DINSOS	Dinas Sosial	Sub. Bag. Jaminan Sosial, Penyuluhan dan Pengelolaan Data
10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.																
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PMKS yang mendapatakan layanan Reunifikasi	orang		5	10	15	20	25	75	Rp 298.800.000	APBD	DINSOS	Sub. Bag. Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan ,Pengemis di Luar Panti Sosial		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Peringatan Hari Disabilitas Internasional)	Jumlah PMKS yang tertangani	orang		100	100	100	100	100	500	Rp 165.800.000	APBD	Dinas Sosial	Sub. Bag. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Menerima Bimbingan Sosial dan Sosialisasi Bantuan Hukum	orang		100	100	100	100	100	500	Rp 95.200.000	APBD	Dinas Sosial	Sub. Bag. Rehabilitasi Sosial dan Anak
			Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Makanan	orang			50	50	50	50	200	Rp 260.000.000	APBD	Dinas Sosial	
			Penyediaan Sandang	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sandang	orang			100	100	100	100	400	Rp 420.000.000	APBD	Dinas Sosial	

			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Alat Bantu	orang			50	50	50	50	200	Rp 900.000.000	APBD	Dinas Sosial	Sub. Bag. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
			Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang menerima akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	orang			100	10	100	100	310	Rp 900.000.000		Dinas Sosial	

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2020) (3)**	**Target Tahunan (4)**						**Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)**	**Sumber Pendanaan (6)**	**Instansi Pelaksana (7)**	**Keterangan (8)**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**				
TUJUAN 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan												
11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang												
11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).												

11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.																
11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.																
11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.																
1.05.03 : Penanggulangan Bencana																
1.05.03.2.02.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) Jumlah Warga yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Orang		100	100	100	100	100	100	Rp 438.140.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Subid Pencegahan
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) Jumlah Warga yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Posko		1	1	1	1	1	1	Rp 380.832.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Subid Kesiapsiagaan

		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase (%) Jumlah Warga yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Unit		3	3	3	3	3	3	Rp 975.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Subid Kesiapsiagaan
11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.																
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan																
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Updating Jakstrada Kabupaten	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Rp 465.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi terkait reduce,	Orang		480	480	480	480	480	480	Rp 900.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	

				reuse, dan recycle												
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Operasional Persampahan	Orang		420	450	450	450	450	450	Rp 51.900.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengelolah Sampah	Kelompok		150	150	150	150	150	150	Rp 900.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana pengelolaan Persampahan yang	Jenis		9	12	12	12	12	12	Rp 308.882.869.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	

				diadakan												
				Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana pengelolaan Persampahan yang terpelihara	Jenis		13	13	13	13	13	13		APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur																
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	**4.01.02.2.04.01**	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen/Kegiiatan		20 Dokumen/1 Kegiatan	20 Dokumen/1 Kegiatan	25 Dokumen/1 Kegiatan	30 Dokumen/5 Kegiatan	30 Dokumen/5 Kegiatan	45 Dokumen/5 Kegiatan	Rp 388.000.000	APBD	Sekretariat Daerah	Subag. Otonomi Daerah Dan Kerjasama

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)					Satuan (2)	Tahun Dasar (2020) (3)	Target Tahunan (4)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)	Keterangan (8)
							2021	2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan																
12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).																
2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)																
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Lokasi Penyimpanan Sementara Limbah B3	Lokasi		50	50	50	50	50	50	Rp 600.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.05.2.01.03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan, dan/ atau Penimbunan	Jumlah atau frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan LB3	Kali		34	34	34	34	34	34	Rp 600.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	

12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang																
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan																
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Updating Jakstrada Kabupaten	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Rp 465.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi terkait reduce, reuse, dan recycle	Orang		480	480	480	480	480	480	Rp 900.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Operasional Persampahan	Orang		420	450	450	450	450	450	Rp 51.900.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang	Kelompok		150	150	150	150	150	150	Rp 900.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	

				Mengelola h Sampah											
		2.11.11.2.01 .07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana pengelolaa n Persampah an yang diadakan	Jenis		9	12	12	12	12	12	Rp 308.882.869. 000	APBD	Dinas Lingkung an Hidup	
				Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana pengelolaa n Persampah an yang terpelihara	Jenis		13	13	13	13	13	13		APBD	Dinas Lingkung an Hidup	
12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001															
2.11.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)															
2.11.06.2. 01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin	2.11.06.2.01 .03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasa n Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat dan Memiliki	Perusahaa an		30	30	30	30	30	30	Rp 970.000.000	APBD	Dinas Lingkung an Hidup	

	Lingkungan dan IzinPPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Izin Lingkungan												

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)					Satuan (2)	Tahun Dasar (2020) (3)	Target Tahunan (4)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)	Keterangan (8)
							2021	2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya																
13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang																
13.1.2* : Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030																
1.05.03 : Penanggulangan Bencana																
1.05.03.2.02.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) Jumlah Warga yang memperoleh Layanan Pencegahan dan	Orang		100	100	100	100	100	100	Rp 438.140.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Subid Pencegahan

				Kesiapsiagaan Bencana											
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) Jumlah Warga yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Posko		1	1	1	1	1	1	Rp 380.832.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Subid Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase (%) Jumlah Warga yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Unit		3	3	3	3	3	3	Rp 975.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Subid Kesiapsiagaan

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2020) (3)**	**Target Tahunan (4)**						**Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)**	**Sumber Pendanaan (6)**	**Instansi Pelaksana (7)**	**Keterangan (8)**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**				

TUJUAN 14: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan																
14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.																
3.25.03 : PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Klp Usaha Bersama (KUB)	Orang		60	60	120	120	180	180	Rp 305.000.000		Dinas Perikanan	
				Jumlah Nelayan yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Orang		60	60	120	120	180	180	Rp 305.000.000		Dinas Perikanan	
				Jumlah Nelayan yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penanganan Hasil Tangkapan	Orang		60	60	120	120	180	180	Rp 305.000.000		Dinas Perikanan	

				Jumlah Nelayan yang Mengikuti Sosialisasi Pengendalian dan Perlindungan Nelayan Kecil melalui Program Asuransi Nelayan	Orang		60	60	120	120	180	180	Rp 305.000.000		Dinas Perikanan	
				Jumlah Nelayan yang Mengikuti Sosialisasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	Orang		60	60	120	120	180	180	Rp 305.000.000		Dinas Perikanan	
				Jumlah Nelayan yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Pembuatan Kartu KUSUKA, Asuransi Nelayan dan Informasi Perikanan	Orang		30	32	35	38	40	40	Rp 136.000.000		Dinas Perikanan	

		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Klp Nelayan Kecil/Klp Usaha Bersama (KUB) yang terbentuk	Kelompok		15	17	20	22	25	25	Rp 290.000.000		Dinas Perikanan	
		3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Orang		120	180	240	240	300	300	Rp 655.000.000		Dinas Perikanan	
				Jumlah Data dan Informasi Penyaluran BBM Bersubsidi (5 SPDN)	Dokumen		10	10	10	10	10	10	Rp 51.500.000		Dinas Perikanan	

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	**Satuan (2)**	**Tahun Dasa**	**Target Tahunan (4)**	**Indikatif Alokasi Anggaran 5**	**Sumber Pendana**	**Instansi Pelaksan**	**Keterangan (8)**

						r (2020) (3)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tahun Rp (Juta) (5)	an (6)	a (7)	
TUJUAN 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati																
15.1.1.(a) Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan																
15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.																
2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																
2.11.03.2.01	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Lokasi Usaha Sumber Pencemar yang Terpantau	Lokasi		10	10	10	10	10	10	Rp 830.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati																
2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Buku Profil Keanekaragaman Hayati	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Rp 1.200.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)					Satuan (2)	Tahun Dasar (2020) (3)	Target Tahunan (4)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)	Keterangan (8)
							2021	2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan																
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui																
5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																
5.01.02.2.03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.01.02.2.03.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Hasil Pengelolaan Data Dan Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Rp 114.000.000		**Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	
		5.01.02.2.03.02	Kooordinasi Penelaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	%		100	100	100	100	100	100	Rp 102.000.000		**Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	

		5.01.02.2.03.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	%		100	100	100	100	100	100	Rp 270.000.000		**Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	
		5.01.02.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPD Secara Tepat Waktu	%		100	100	100	100	100	100	Rp 270.000.000		**Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	
		5.01.02.2.03.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPD Secara Tepat Waktu	%		100	100	100	100	100	100	Rp 480.000.000		**Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	

		5.01.02.2.03.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tingkat Ketersediaan Dokumen RKPD Secara Tepat Waktu	%		100	100	100	100	100	100	Rp 270.000.000		**Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	
		5.01.02.2.03.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Tingkat Ketersediaan Dokumen RPJMD Secara Tepat Waktu	%		100	100	100	100	100	100	Rp 1.940.000.000		**Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	
16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)																
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran keuangan Daerah	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Rp 193.200.000	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran

		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen Perubahan Anggaran keuangan Daerah	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Rp 193.200.000	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran
		5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pokok SKPD	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Rp 181.550.000	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran
		5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Rp 181.550.000	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelakasanaan Anggaran Pokok SKPD	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Rp 181.550.000	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran
		5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelakasanaan Anggaran Perubahan SKPD	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Rp 181.550.000	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan	Kasubid Penyusunan Anggaran

															Aset Daerah	
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Rp 925.200.000	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Perubahan Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Perubahan	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Rp 925.200.000	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kasubid Penyusunan Anggaran

16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)																
Program Penyelenggaraan Pengawasan																
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	laporan		118	118	118	118	118	590	Rp 6.879.250.000		Inspektorat	Irban I-IV
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan	laporan		150	150	150	150	150	750	Rp 8.386.250.000		Inspektorat	Irban I-IV
			Reviu Laporan Kinerja	jumlah laporan	laporan		2	2	2	2	2	10	Rp 363.750.000		Inspektorat	Irban I-IV
			Reviu Laporan Keuangan	jumlah laporan	laporan		2	2	2	2	2	10	Rp 497.500.000		Inspektorat	Irban I-IV
			Pengawasan Desa	jumlah laporan	laporan		80	80	80	80	80	400	Rp 2.250.500.000		Inspektorat	Irban I-IV
			Kerjasama Pengawasan Internal	jumlah laporan	laporan		4	4	4	4	4	20	Rp 666.000.000		Inspektorat	Irban I-IV
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	jumlah laporan	laporan		4	4	4	4	4	20	Rp 2.455.915.000		Inspektorat	Sub.bag evlap

			Hasil Pemeriksaan APIP													
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya																
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**%**											
Kode Kegiatan	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Kode Sub Kegiatan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Keamanan Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan dan kenyamanan Lingkungan	Kali (Patroli)	360	360	360	360	360	360	360	Rp 8.537.760.000	APBD/ DAU	Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR	

Kode Kegiatan		Kode Sub Kegiatan	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus pelanggaran Tibumtranmas yang ditangani	Laporan	49	49	50	51	52	53	54	Rp 78.970.000	APBD/ DAU	Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR	
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur																
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah																
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran																
PROGRAM PENCATATAN SIPIL																
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen/hari		10 Dokumen/hari	10 Dokumen/hari	10 Dokumen/hari	10 Dokumen/hari	10 Dokumen/hari	300	Rp 415.800.000	APBD	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	Seksi Pengolahan data

			Peristiwa Penting													
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen layanan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen/hari		150 Dokumen/hari	150 Dokumen/hari	150 Dokumen/hari	150 Dokumen/hari	150 Dokumen/hari	35	Rp 2.536.800.000	APBD	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	Seksi SIAK
			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlha laporan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	25	Rp 377.000.000	APBD	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	Seksi SIAK
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait	Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 252.400.000	APBD	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	Seksi Pengolahan data

			Pencatatan Sipil													
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Jenis Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dokumen		5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 jenis	Rp 274.600.000	APBD	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	Seksi Pengolahan data
16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.																
16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan																
16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.																
2.08.07. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK																

02.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	02.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	Rp 91.137.483	APBD	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	Kasi Perlindungan Khusus Anak
16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan																
4.01.03. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																
04.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	04.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kegiatan		4 Kegiatan	10 Kegiatan	12 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	Rp 3.206.062.000	APBD	Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	Subag. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir																
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.																

16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir																
16.1.4*Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya																
01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
1.05.02.2.01	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Keamanan Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan dan kenyamanan Lingkungan	Kali		360 kali	360 kali	360 kali	360 kali	360 kali	360 kali	Rp 39.259.200.000		Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR	Bidang Trantibum dan Linmas
		1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban	Jumlah kasus pelanggaran Tibumtranmas yang ditangani	Tahun		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Rp 431.381.200		Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR	Bidang Trantibum dan Linmas

			dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kali		5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	Rp 645.000.000		Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR	Bidang Trantibum dan Linmas
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Linmas yang mengikuti sosialisasi	Kali		3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	Rp 374.500.000		Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR	Bidang Trantibum dan Linmas

		1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah aparatur Satpol.PP dan Sat.Linmas yang mengikuti pelatihan dan pembinaan fisik dan mental	Tahun		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Rp 1.935.232.000		Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR	Bidang Trantibum dan Linmas
		1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Yustisi Bersama)	Orang		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	Rp 1.261.232.000		Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR	Bidang Trantibum dan Linmas
		1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana ketentraman dan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tahun		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Rp 784.100.000		Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR	Bidang Trantibum dan Linmas

			ketertiban umum													
		1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP yang di hasilkan terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	SOP		30 SOP	30 SOP	30 SOP	30 SOP	30 SOP	30 SOP	Rp 505.232.000		Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR	Bidang Trantibum dan Linmas
		1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah jenis Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Tahun		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Rp 796.000.000		Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR	Bidang Penegakan Perunndang Undangan
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)																
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah / Jenis data sektoral yang tersedia dan menjadi bahan informasi publik			45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	Rp 828.400		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah	Jumlah SDM Statistik yang kompeten			0	2 Orang	3 Orang	2 Orang	0	10 orang	Rp 48.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	

			dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi													
		2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata statistik sektoral			0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp 120.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kebijakan terkait kelembagaan statistik sektoral			0	0	0	2 Buah	1 buah	3 Buah	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Stastistik			0	0	1 jenis	1 Jenis	2 Jenis	4 Jenis	Rp 260.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah koordinasi untuk penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral daerah			0	0	1 thn	1 thn	1 thn	3 thn	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.																
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan	2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang	Jumlah Kebijakan yang dirumuskan			0	0	2 Dok	2 Dok	2 Dok	6 dok	Rp 6.000		**Dinas Komunikasi dan**	

	Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Informasi dan Komunikasi Publik												**Informatika**	
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik			0	0	0	1 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	Rp 100.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan informasi Daerah yang dimonitoring			0	0	0	1 Thn	1 Thn	2 thn	Rp 10.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media komunikasi publik yang dikelola			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 1.836.526		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintahan Dan Masyarakat yang dipublikasikan			192 keg	250 keg	300 keg	300 keg	300 keg	300 keg	Rp 1.645.912		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Publik			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Rp 204.100		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	

		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			0	0	0	0	1 Layanan	1 Layanan	Rp 20.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan dengan pemangku kepentingan			0	1 Mitra	3 Mitra	1 Mitra	0	5 Mitra	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Jumlah Sumber daya Komunikasi publik yang kompeten			2 Orang	2 Orang	2 Orang	0	0	6 Orang	Rp 36.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah sengketa publik yang dilayani			2	2	2	2	2	10	Rp 24.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Penyelenggaran Hubungan Media dan Kemitraan			0	1 Mitra	1 Mitra	1 Mitra	0	3 Mitra	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.13	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan	Jumlah Sarana Pendukung Infromasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			0	1 buah	2 buah	0	0	3 Buah	Rp 300.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	

			Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).																
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).																
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK																
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Rp 118.749.749		**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	Kasi Data dan Informasi Gender

	Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolah Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		45	45	45	45	45	45	Rp 82.229.183		**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	Kasi Data dan Informasi Gender

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	**Satuan (2)**	**Tahun Dasar (2020) (3)**	**Target Tahunan (4)**						**Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Rp (Juta) (5)**	**Sumber Pendanaan (6)**	**Instansi Pelaksana (7)**	**Keterangan (8)**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**				
TUJUAN 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan												
17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)												
PROGRAM PENCATATAN SIPIL												

	Pelayanan Pencatatan Sipil		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen/ hari		10 Dokumen/hari	10 Dokumen/hari	10 Dokumen/hari	10 Dokumen/hari	10 Dokumen/hari	300	Rp 415.800.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi Pengolahan data
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen layanan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen/ hari		150 Dokumen/hari	150 Dokumen/hari	150 Dokumen/hari	150 Dokumen/hari	150 Dokumen/hari	35	Rp 2.536.800.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi SIAK
			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlha laporan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	25	Rp 377.000.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi SIAK

			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 252.400.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi Pengolahan data
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Jenis Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dokumen		5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 jenis	Rp 274.600.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi Pengolahan data

17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target																
5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kab/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Atas Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020, Evaluasi Pencapaian SPM Tahun 2020	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Rp 204.000.000	APBD	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi & Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Secara Periodik	Dokumen		4	4	4	4	4	4	Rp 270.000.000	APBD	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).																

17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).																
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	**4.01.02.2.04.01**	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen/ Kegiiatan		20 Dokumen/1 Kegiatan	20 Dokumen/1 Kegiatan	25 Dokumen/1 Kegiatan	30 Dokumen/5 Kegiatan	30 Dokumen/5 Kegiatan	45 Dokumen/5 Kegiatan	Rp 388.000.000	APBD	Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	Subag. Otonomi Daerah Dan Kerjasama
17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik																
17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama																
17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)																
17.19.1.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website																
17.19.1.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)																
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi	Jumlah / Jenis data sektoral yang tersedia dan menjadi bahan			45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	Rp 828.400		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	

	Kabupaten/Kota		Data Statistik Sektoral	informasi publik											
		2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang kompeten			0	2 Orang	3 Orang	2 Orang	0	10 orang	Rp 48.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata statistik sektoral			0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp 120.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kebijakan terkait kelembagaan statistik sektoral			0	0	0	2 Buah	1 buah	3 Buah	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Stastistik			0	0	1 jenis	1 Jenis	2 Jenis	4 Jenis	Rp 260.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah koordinasi untuk penyelenggaraan			0	0	1 thn	1 thn	1 thn	3 thn	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	

				otorisasi statistik sektoral daerah												
17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan																
17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband																
17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet																
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Kebijakan yang dirumuskan			0	0	2 Dok	2 Dok	2 Dok	6 dok	Rp 6.000		Kominfo	
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik			0	0	0	1 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	Rp 100.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan informasi Daerah yang dimonitoring			0	0	0	1 Thn	1 Thn	2 thn	Rp 10.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	

		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media komunikasi publik yang dikelola			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 1.836.526		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintahan Dan Masyarakat yang dipublikasikan			192 keg	250 keg	300 keg	300 keg	300 keg	300 keg	Rp 1.645.912		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Publik			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Rp 204.100		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			0	0	0	0	1 Layanan	1 Layanan	Rp 20.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan dengan pemangku kepentingan			0	1 Mitra	3 Mitra	1 Mitra	0	5 Mitra	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas	Jumlah Sumber daya			2 Orang	2 Orang	2 Orang	0	0	6 Orang	Rp 36.000		**Dinas Komunikasi dan**	

			Sumber Daya Komunikasi	Komunikasi publik yang kompeten											**Informatika**	
		2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah sengketa publik yang dilayani			2	2	2	2	2	10	Rp 24.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Penyelenggaran Hubungan Media dan Kemitraan			0	1 Mitra	1 Mitra	1 Mitra	0	3 Mitra	Rp 30.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pendukung Infromasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			0	1 buah	2 buah	0	0	3 Buah	Rp 300.000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.																
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya																
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.																

05.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah															
05.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**05.02.04.2.01.05**	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Potensi Wajib Pajak Baru Dapat Terukur	Jenis Pajak		9	9	9	9	9	9	Rp 166.900.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sub. Bidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan
		05.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersedianya Aplikasi Pemetaan Berbasis WEB	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Rp 1.530.519.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sub. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB
		05.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	Nilai Objek Jual Pajak Di Kabupaten Maros Terupdate Sesuai Harga Pasar Wajar	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Rp 1.530.920.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sub. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB

			Bangunan (BPHTB)													
		05.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penambahan Wajib Pajak	Dokumen		12	12	12	12	12	12	Rp 220.586.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sub. Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak
		05.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Makin Meningkat	Dokumen		12	12	12	12	12	12	Rp 384.018.250		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sub. Bidang Pengawasan Dan Evaluasi Pajak
		05.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemerikasaan Dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen		10	10	10	10	10	10	Rp 379.505.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sub. Bidang Pengawasan Dan Evaluasi Pajak

MATRIKS KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Nama Kabupaten : Kabupaten pangkajene dan Kepulauan

Periode RPJMD : 2016-2021

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian				
					2017	2018	2019	2020	2021
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS SOSIAL, BALITBANGDA, DINAS STATISTIK	%	16,22	14,36	12,64	11,15	10,09	10,03
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	55.00	65.00	75.00	85.00	95.00	100.00
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	DINAS TENAGA KERJA	%	56,61	60,71	64,79	68,89	72,98	73.00
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	DINAS SOSIAL	%	7.00	20.00	34.00	49.00	61.50	75.00

1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan .	DINAS SOSIAL	KPM	8.513	8.562	8.611	8.66	8.709	8.758
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro									
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	DINAS PENATAAN RUANG	%	19.05 (12444 KK)	19.05 (12444 KK)	19.58 (12794 KK)	20.19 (13194 KK)	20.81 (13594 KK)	21.49 (14044 KK)
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DINAS PENATAAN RUANG & DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	51.15 (33419 KK)	50.70 (33443 KK)	50.35 (33533 KK)	49.99 (33613 KK)	49.62 (33688 KK)	49.26 (33763 KK)
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Ha	33	33	25,7	23,2	20,8	18,3
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS PENDIDIKAN	%	96,18	96,22	96,24	96,26	96,28	99,05
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS PENDIDIKAN	%	78,03	78,55	79,07	79,59	80,11	80,63
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	65	70	75	80	85	90

1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	DINAS PERTANAHAN	Lokasi	0	10	10	10	14	10
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINAS KESEHATAN	%	10	9	8	7	6	5
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	%	42.50	40.78	39.50	38.10	37.10	35.60
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN	%	10	9	8	7	6	5
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	DINAS KESEHATAN	%	10	9	8	7	6	5
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	DINAS KESEHATAN	%	10	9	8	7	6	5

2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINAS KESEHATAN	%	10	9	8	7	6	5
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINAS KESEHATAN	%	80	85	90	95	97,5	100
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Skor	86.8	87.1	90.1	90.5	93.7	95.0
Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.									
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	DINAS KETAHANAN PANGAN & DINAS PERTANIAN PETERNAKAN	Rp/Tenaga Kerja	220,250	300,000	320,000	430,000	455,000	470,000
2.4 : Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.									
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DINAS PERTANIAN	Ha	12,306,060	3,723,046	7,492,953	8,117,292	5,970,000	665,000
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.									

2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	DINAS PERTANIAN	Paket						
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	DINAS PERTANIAN	Paket						
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Kasus	8	6	6	4	3	3
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Kasus	9	8	7	6	5	4
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Kasus	9	8	7	6	5	4
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									

3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINAS KESEHATAN	Org/Pkesmas	0	0	6	6	5	6
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Org/Pkesmas	0	0	0	23	23	23
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	Sekolah (Lokasi Penyuluhan)	0	8	10	11	11	10
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	DINAS KESEHATAN	Org (di Screening)	0	0	0	150	200	250
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	Sekolah (Lokasi Penyuluhan)	0	8	10	11	11	10
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	Org	0	0	1000	1000	1000	1000

3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	Org	0	0	1000	1000	1000	1000
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	Org	0	0	0	50	50	0
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	50	60	70	80	90	100
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Org	500	600	700	800	900	1000
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINAS KESEHATAN	%	50,59	60,47	70,27	80.07	89,87	100
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINAS KESEHATAN	%	87	89	91	93	95	97
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINAS KESEHATAN	Tenaga Medis : 100.000 Penduduk	22,56	23,49	23,80	24,72	27,19	27,19

Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DINAS PENDIDIKAN							
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN	%	43,11	57,11	71,11	85,11	100	100
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN	%	38,28	53,28	68,28	83,28	100	100
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	117,13	117,63	118,13	118,63	119,00	119,00
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	111,06	111,56	112,06	112,56	113,06	113,56
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN	Tahun	7,33	6,48	7,63	7,76	7,88	8,00
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DINAS PENDIDIKAN	%	47,75	49,75	51,75	53,75	55,75	55,75

4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	DINAS PENDIDIKAN	%	44,28	49,28	54,28	59,28	64,28	69,28
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	Ranperda	0	0	1	0	0	0
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%	30	25	20	15	10	10
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK							

5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK							
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK							
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK							
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	Org	294.867	302.239	309.795	317.539	325.478	333.615
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DINAS PENATAAN RUANG	%	19.05 (12444 KK)	19.05 (12444 KK)	19.58 (12794 KK)	20.19 (13194 KK)	20.81 (13594 KK)	21.49 (14044 KK)
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	PDAM, DLH, DINAS PENATAAN RUANG, BALITBANGDA	%	19.05 (12444 KK)	19.05 (12444 KK)	19.58 (12794 KK)	20.19 (13194 KK)	20.81 (13594 KK)	21.49 (14044 KK)

6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DINAS PENATAAN RUANG	%	19.05 (12444 KK)	19.05 (12444 KK)	19.58 (12794 KK)	20.19 (13194 KK)	20.81 (13594 KK)	21.49 (14044 KK)
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINAS KESEHATAN							
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DINAS PENATAAN RUANG/DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	51.15	51.18	51.49	51.64	51.80	51.95
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DINAS KESEHATAN							
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DINAS KESEHATAN							
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	Unit	0	0	6	14	10	10
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi	8	5	6	6	6	6

6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.									
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	BALITBANGDA	Dok	8	0	0	1	0	0
Tujuan SDGs 07 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA									
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.									
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	BALITBANGDA	Dokumen	0	0	1	0	0	0
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS STATISTIK	%	8,5	9	11,81	12,36	13,91	13,46
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS STATISTIK	Juta	62.940.000	67.650.000	74.530.000	80.720.000	86.900.000	93.090.000
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.									
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	DINAS TENAGA KERJA							

8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DINAS TENAGA KERJA	%	30	30	30	30	30	30
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DINAS TENAGA KERJA	%	30	30	30	30	30	30
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	DINAS PERTANIAN	%						
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	DINAS KOPERASI & UMKM	%						
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA							
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS KETENAGAKERJAAN, BALIBANGDA	%	6,8	6,6	6,00 – 6,20	6,16	6,00	5,82
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA	%						

8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS TENAGA KERJA	%	75	79,5	84	88,5	93	97,5
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.									
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	DINAS TENAGA KERJA	%	20	29	38	47	56	65
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	DISPARBUD	%	1,10	1,17	1,19	1,22	1,24	1,26
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DISPARBUD	Org	70	70	80	90	100	100
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DISPARBUD	Org	66.774	60,999	67,099	73,809	81,190	89,300
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	BIDANG JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM	%	30	20	7	8	6	8
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	BIDANG LALU-LINTAS ANGKUTAN LAUT DISHUB, UPT BIRING KASSI, BALITBANGDA	Unit	160	6	10	4	3	2

9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	BIDANG KEPELABUHANAN & KESELAMATAN TRANPORTASI LAUT DISHUB	Dok	10	1	2	2	3	3
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan kedalam rantai nilai dan pasar.									
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	DINAS PERDAGANGAN							
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	DINAS PERDAGANGAN	KLP	0	2834	3262	2262	3442	3512
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA									
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	DPMD	Desa Tertinggal	0	0	39	37	35	33
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Desa Mandiri	0	23	23	23	23	23
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	KK	56,567	69	30	0	0	0
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									

11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD	Kecamatan	7	4	1	1	0	0
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD							
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD							
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	24	24	25	26	27	28
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DINAS PENATAAN RUANG	Lokasi	7	5	7	7	7	7
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	Peta/ Kecamatan	7	4	1	1	0	0
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dok	0	0	0	1	0	1

Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perusahaan	2	2	2	2	2	2
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan Kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.	DISPARBUD	Dok	0	0	1	2	2	2
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.									

13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dok	0	0	0	1	0	1
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.									
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.									
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	DINAS PERIKANAN	Perda	0	1	0	0	0	0
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DINAS PERIKANAN	Org/Klp	13,700	13,608	13,608	13,608	13,608	13,608
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI									
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.									
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.									

15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.									
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laporan	0	1	1	1	1	1
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN									
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	SATPOL - PP	%	100	100	100	100	100	100
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK							
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK							
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK							

16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.									
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	POLRES							
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	KEJAKSAAN NEGERI							
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	PENGADILAN NEGERI							
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.									
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	INSPEKTORAT							
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	%	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPK-RI PERWAKILAN MAKASSAR & INSPEKTORAT KAB. PANGKEP	%	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAPPEDA	Predikat	C	CC	B	BB	BB	BB

16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMBANGUNAN							
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SEKREDARIAT DEWAN							
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH							
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	KESBANG-POL							
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	0	0	85	90	90.5	90.8
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	0	0	35	40	45	50
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	0	75	80	85	90	99

16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%						
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									

17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)							
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)							
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.								
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	60	70	80	90	95	100
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	DINAS STATISTIK	%	0	0	60	70	80	90

MATRIKS KABUPATEN BARRU

Nama Kabupaten : Kabupaten Barru

Periode RPJMD : 2016-2021

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN													
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.													
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	DINAS SOSIAL	%	8,99	8,62	8,23	7,87	7,49	7,49	150.000.000.000	APBD & DAK	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, DPMDPPKBPPPA, Dinas PKP, BAPPEDA, Dinas Koperindagkop.
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.													
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN								105.256.460.777	APBD	DINAS KESEHATAN

3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	DINAS PMPTSPNAKER								234.503.200	APBD	DINAS PMPTSPNAKER
4	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	DINAS SOSIAL	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		APBD	DINAS SOSIAL
5	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DINAS SOSIAL	Orang	3044	3646	6565					APBD	DINAS SOSIAL
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.													
6	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	DINAS KESEHATAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KESEHATAN
7	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	DINAS KESEHATAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KESEHATAN
8	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	DINAS PMD, PPKB,P3A	%	71,21	69,32	69,30	69,30	69,29	69,30			DINAS PMD, PPKB DAN P3A
9	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	DINAS KESEHATAN	%	80	85	90	95	100	100			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

10	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DINAS KESEHATAN	%	5	10	20	22	24	26			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
11	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	93	93,5	94	94,5	95	95			DINAS PENDIDIKAN
12	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	89	90	91	92	93	93			DINAS PENDIDIKAN
13	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.		-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.												
15	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD		0	0	0	0	0	0	200.000.000	APBD	BPBD

16	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Desa	0	2	2	2	2	2	1.000.000.000	APBD	BPBD
17	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	BPBD	Unit	0	10	10	10	10	10		APBD	BPBD
18	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	BPBD	Jiwa	0	50	50	50	50	50	360.000.000	APBD	BPBD
19	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	BPBD	Persen	-	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	1.000.000.000	APBD	BPBD
20	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.000.000.000	APBD	BPBD
21	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD		0	0	0	0	0	0	200.000.000	APBD	BPBD
22	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	BUKU	0	0	0	0	1	0	970000000	APBD	BPBD

Target 1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.													
23	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	BAPPEDA	%	1,44	1,58					150.000.000.000	APBD & DAK	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, DPMDPPKBPPPA, Dinas PKP, BAPPEDA, Dinas Koperindagkop.
24	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	BPKAD										BPKAD
TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN													
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.													
25	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	DINAS KETAHANAN PANGAN	Persen	70,33	72,4	73,51	75,81	76,01	76,8	4.012.000.000	APBD	DINAS KETAHANAN PANGAN

26	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	DINAS KESEHATAN										DINAS KESEHATAN
27	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Persen	25,11	33,29	31,71	42,08	47,69	48,94	7.915.884.700	APBD	DINAS KETAHANAN PANGAN
28	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	DINAS KETAHANAN PANGAN	Persen	14,65	17,9	18,35	18,75	19,1	19,7	7.915.884.700	APBD	DINAS KETAHANAN PANGAN
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.													
29a	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN										DINAS KESEHATAN
29b	2.2.1*	Prevalensi stunting (sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN										DINAS KESEHATAN
30	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	DINAS KESEHATAN										DINAS KESEHATAN
31	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Kurus)	DINAS KESEHATAN										DINAS KESEHATAN

32	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	DINAS KESEHATAN										DINAS KESEHATAN
33	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	DINAS KESEHATAN										DINAS KESEHATAN
34	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Persen	85	87	89	91	93	95	4.012.000.000	APBD	DINAS KETAHANAN PANGAN
Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.													
35	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA													
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.													
36	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	DINAS KESEHATAN										DINAS KESEHATAN

37	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DINAS KESEHATAN		96%	97%	98%	99%	100%	100%			DINAS KESEHATAN
38	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN		77%	79%	82%	85%	95%	100%			DINAS KESEHATAN
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.													
39	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN										DINAS KESEHATAN
40	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN										DINAS KESEHATAN
41	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN										DINAS KESEHATAN
42	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100			DINAS KESEHATAN
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.													
43	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINAS KESEHATAN		0	0	0	0	0	0			DINAS KESEHATAN

44	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN		128	180	218	247	251	259			DINAS KESEHATAN
45	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINAS KESEHATAN		0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,9			DINAS KESEHATAN
46	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	DINAS KESEHATAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KESEHATAN
47	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100			DINAS KESEHATAN
48	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	0	0	0			DINAS KESEHATAN
49	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta (Target Kabupaten)	DINAS KESEHATAN	%					100%	100%			DINAS KESEHATAN
50	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	DINAS KESEHATAN		0	0	0	0	0	0			DINAS KESEHATAN

Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.													
51	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	6,4	5,9	5,6	5,4	5,1	4,8			DINAS KESEHATAN
52	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINAS KESEHATAN	%	24,77	24,28	23,79	23,38	22,77	22,38			DINAS KESEHATAN
53	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4			DINAS KESEHATAN
54	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	DINAS KESEHATAN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			DINAS KESEHATAN
55	3.4.2.(a)	Jumlah Puskesmas yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINAS KESEHATAN	pkm	12	12	12	12	12	12			DINAS KESEHATAN
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.													
56	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	DINAS KESEHATAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KESEHATAN
57	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	DINAS KESEHATAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KESEHATAN

Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.													
58	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DINAS PMD, PPKB,P3A	%	71,21	69,32	69,30	69,30	69,29	69,30			DINAS PMD,PPKB,PPPA
59	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	DINAS PMD, PPKB,P3A	%	71,21	69,32	69,30	69,30	69,29	69,30			DINAS PMD,PPKB,PPPA
60	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	DINAS PMD, PPKB,P3A	%	10,46	10,16	10,21	10,24	10,27	10,30			DINAS PMD,PPKB,PPPA
61	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DINAS KESEHATAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KESEHATAN
62	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	DINAS PMD, PPKB,P3A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PMD,PPKB,PPPA
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.													
63	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	DINAS KESEHATAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KESEHATAN

64	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINAS KESEHATAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KESEHATAN
65	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINAS KESEHATAN										DINAS KESEHATAN
Target 3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.													
66	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINAS KESEHATAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KESEHATAN
Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.													
67	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	DINAS KESEHATAN		28,20 %	27,00 %	26,00%	25,00 %	24,00 %	23,00 %			DINAS KESEHATAN
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.												
68	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	DINAS KESEHATAN		100	100	100	100	100	100			DINAS KESEHATAN
Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.													
69	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	DINAS KESEHATAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KESEHATAN

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS													
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.													
70a	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja pada kelas 4 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca	DINAS PENDIDIKAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENDIDIKAN
70b	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja pada kelas 4 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam matematika	DINAS PENDIDIKAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENDIDIKAN
70c	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca	DINAS PENDIDIKAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENDIDIKAN
70d	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam matematika.	DINAS PENDIDIKAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENDIDIKAN
70e	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca	DINAS PENDIDIKAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENDIDIKAN
70f	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam matematika.	DINAS PENDIDIKAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENDIDIKAN

71	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN										DINAS PENDIDIKAN
72	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	DINAS PENDIDIKAN										DINAS PENDIDIKAN
73	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN		106,5	106	105	104	103	103			DINAS PENDIDIKAN
74	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN		105	104	103	102	101	101			DINAS PENDIDIKAN
75	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.			7,34	7,37	7,4	7,43	7,6	7,49			
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.													
76	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).											DINAS PENDIDIKAN
Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.													
77	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.													
78a	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat	DINAS PENDIDIKAN		93	93,5	94,00	94,5	95	95			DINAS PENDIDIKAN

78b	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat	DINAS PENDIDIKAN		89	9,00	91	92	93	93			DINAS PENDIDIKAN
78c	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat	DINAS PENDIDIKAN										DINAS PENDIDIKAN
78d	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi.	DINAS PENDIDIKAN										DINAS PENDIDIKAN
Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.													
79	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN										DINAS PENDIDIKAN
80a	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun.	DINAS PENDIDIKAN										DINAS PENDIDIKAN
80b	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun.	DINAS PENDIDIKAN										DINAS PENDIDIKAN

Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.												
81a	4.a.1*	Proporsi sekolah SD dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	DINAS PENDIDIKAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENDIDIKAN
81b	4.a.1*	Proporsi sekolah SMP dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	DINAS PENDIDIKAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENDIDIKAN

81c	4.a.1*	Proporsi sekolah SMU dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	DINAS PENDIDIKAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENDIDIKAN
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.													
82a	4.c.1*	Persentase guru PLB yang bersertifikat pendidik.	DINAS PENDIDIKAN	%	0,93								DINAS PENDIDIKAN
82b	4.c.1*	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik.	DINAS PENDIDIKAN	%									DINAS PENDIDIKAN
82c	4.c.1*	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	DINAS PENDIDIKAN	%	91,69	92.8	94	95.1	96				DINAS PENDIDIKAN
82d	4.c.1*	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.	DINAS PENDIDIKAN	%									DINAS PENDIDIKAN
82e	4.c.1*	Persentase guru SMA & SMK yang bersertifikat pendidik.	DINAS PENDIDIKAN	%	0,99								DINAS PENDIDIKAN

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER													
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.													
83	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DINAS PMD, PPKB,P3A	keg	6	6	6	6	6	6			DINAS PMD, PPKB DAN P3A
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.													
84	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	DINAS PMD, PPKB,P3A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	DINAS PMD, PPKB DAN P3A
85	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DINAS PMD, PPKB,P3A										DINAS PMD, PPKB DAN P3A
86	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DINAS PMD, PPKB,P3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PMD, PPKB DAN P3A

87	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	DINAS PMD, PPKB,P3A										DINAS PMD, PPKB DAN P3A
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.													
88	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	DINAS PMD, PPKB,P3A										DINAS PMD, PPKB DAN P3A
89	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DINAS PMD, PPKB,P3A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	DINAS PMD, PPKB DAN P3A
90	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DINAS PMD, PPKB,P3A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	DINAS PMD, PPKB DAN P3A
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.													
91	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	DINAS PMD, PPKB,P3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PMD, PPKB DAN P3A
92	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	DINAS PMD, PPKB,P3A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	DINAS PMD, PPKB DAN P3A

Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.													
93	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	DINAS PMD, PPKB,P3A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	DINAS PMD, PPKB DAN P3A
94	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	DINAS PMD, PPKB,P3A		14,04 %	15,36 %	15,29%	15,25 %	15,21 %	15,17 %			DINAS PMD,PPKB,PPPA
95	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	DINAS PMD, PPKB,P3A	%	71,23	69,30	69,30	69,32	69,34	69,35			DINAS PMD,PPKB,PPPA
Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.													
96	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI YANG LAYAK													
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.													
97	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DINAS KESEHATAN	%	80	85	90	95	100	100			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

98	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
99	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DINAS KESEHATAN	%	80	85	90	95	100	100			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.													
100	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINAS KESEHATAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KESEHATAN
101	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DINAS KESEHATAN	%	5	10	20	22	24	26	173.810.000	APBD	DINAS KESEHATAN
102	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DINAS KESEHATAN	Desa/Kel	55	55	55	55	55	55	173.810.000	APBD	DINAS KESEHATAN
103	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DINAS KESEHATAN	%	20	50	100	100	100	100	173.810.000	APBD	DINAS KESEHATAN
104a	6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota dan kawasan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Kec	0	0	0	0	0	1			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

104b	6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Kec	1	3	7	7	7	7		APBD & DAK, DAU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
105	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	kk	200	200	200	200	200	200		APBD & DAK, DAU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.												
106	6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Unit	-	-	1	1	1	1		APBD & DAK, DAU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
107	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	RT	0	0	10.000	10.000	15.000	15.000		APBD & DAK, DAU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
108	6.3.2.(a)	Kualitas air danau (Di Kab.Barru tdk ada danau)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	-	-	-
109	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	50	55	58	58	60	61	150000000	DAU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.													
110	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.													
111	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	BAPPEDA										BAPPEDA
112	6.5.1.(c)	Banyaknya Jaringan Sumberdaya air yang dibentuk pada kabupaten Barru	Dinas PUPR	km	9,412 km + 10 unit bendung	14 km + 1 unit bendung	15,6 km	15,6 km + 1 unit bendung	15,5 km	13 km	85122390169	DAK dan DAU	Dinas PUPR
113	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	DINAS PU PR		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PU PR
114	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	DINAS PU PR										DINAS PU PR

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU													
Target 7.2. Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.													
115	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Target 7.3. Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.													
116	7.3.1*	Intensitas energi primer.		-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI													
Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.													
117	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	Persentase	5,59	5,95	-	-	-	-			BAPPEDA
118	8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Juta Rupiah	31,78	34,56	39,326	44,068	49,411	55,147			BAPPEDA
Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.													
119	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.												
120	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
121	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
122	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	BPS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
123	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	DINAS KOPERASI, UK DAN PERDAGANGAN										DINAS KOPERASI, UK DAN PERDAGANGAN
Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.												
124	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	BPS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

125	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	6,67	5,6	5,56	5,64	5,59	5,34	301.385.500	APBD	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
126	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	BPS	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	301.385.500	APBD	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.													
127	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.													
128	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	BPS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PARIWISATA
129	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DINAS PARIWISATA		2.600	2.800	2.950	3.100	3.300	3.500	2.017.391.850	APBD	DINAS PARIWISATA

130	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DINAS PARIWISATA		23.400	25.200	26.550	27.900	29.700	31.500	3.171.366.920	APBD	DINAS PARIWISATA
131	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	BPS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PARIWISATA
132	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	BPS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.													
133a	8.10.1*	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa			=17/jumlah penduduk x 100000	17	17	17	17	17			
133b	8.10.1*	Jumlah kantor ATM per 100.000 penduduk dewasa			16	16	16	16	16	16			
134	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			

135	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DINAS KOPERASI, UK DAN PERDAGANGAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KOPERASI, UK DAN PERDAGANGAN
TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR													
Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.													
136	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	DINAS PU PR										DINAS PU PR
137	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api. (km)	DINAS PERHUBUNGAN										DINAS PERHUBUNGAN
138	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DINAS PERHUBUNGAN										DINAS PERHUBUNGAN
139	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DINAS PERHUBUNGAN										DINAS PERHUBUNGAN
Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.													
140a	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB	BPS	Persen									DINAS KOPERASI, UK DAN PERDAGANGAN

140b	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap per kapita.	BPS	Rupiah									DINAS KOPERASI, UK DAN PERDAGANGAN
141	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	BPS	%									DINAS KOPERASI, UK DAN PERDAGANGAN
142	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS										DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
Target 9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.													
143	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	BPS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KOPERASI, UK DAN PERDAGANGAN
144	9.3.2*	pinjaman atau kredit	BPS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KOPERASI, UK DAN PERDAGANGAN
145	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KOPERASI, UK DAN PERDAGANGAN

Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.													
146	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
147	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
148	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN													
Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.													
149	10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS										BAPPEDA
150	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	8,99	8,62	8,23	7,87	7,49	7,49			BAPPEDA

151	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	DINAS PMD, PPKB,P3A		-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PMD, PPKB DAN P3A
152	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	DINAS PMD, PPKB,P3A	Desa	21	21	1	0	0	0			DINAS PMD, PPKB DAN P3A
153	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	DINAS PMD, PPKB,P3A	Desa	-	-	-	1	1	2			DINAS PMD, PPKB DAN P3A
154	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	DINAS PMD, PPKB,P3A		-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PMD, PPKB DAN P3A
155	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Target 10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.													
156	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	BPS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			BAPPEDA
Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.													
157	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	

158	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	BAG. HUKUM		0	0	0	0	0	0	427.303.900	APBD	BAG.HUKUM
Target 10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.													
159	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DINAS SOSIAL		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS SOSIAL
TUJUAN 11. KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN													
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.													
160	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Rasio rumah layak huni										
161	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	
Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.													
162	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	

163	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	
Target 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.													
164	11.4.1.(a)	Jumlah kota (kecamatan) pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		0	0	0	0	0	0			
Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.													
165	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	0	0	0	0	0	0	200.000.000	**APBD**	**BPBD**
166	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	BUKU	1	0	0	1	0	0	970000000	APBD	BPBD
167	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	EWS	0	2	2	2	2	2	1.000.000.000	**APBD**	**BPBD**

168	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rp	0	0	0	0	0	0	200.000.000	**APBD**	**BPBD**
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.													
169	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	%	100	100	100	100	100	100			
170	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.													
171	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.													
172	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	BUKU	1	1	1	1	1	1	970000000	APBD	BPBD

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN													
Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.													
173	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ton							50.000.000	DAU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.													
174	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	M3	15.000	15.000	17.000	17.000	20.000	20.000	450.000.000	DAU, DAK	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.													
175	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PMPTSPNAKER
Target 12.7. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.													
176	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.													
177	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM													
Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.													
178	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	BUKU	0	0	0	0	1	0	970.000.000	APBD	BPBD
179	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	JIWA	0	0	0	0	0	0	200.000.000	**APBD**	**BPBD**
TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN													
TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN													
Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.													
180	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DINAS LHD										

Target 15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.													
181	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ha	0	0	1	1	1	1		APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Target 15.6. Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.													
182	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Target 15.9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.													
183	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1		APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TUJUAN 16. PERDAMAIAN. KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH													
Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.													
184	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	POLRES	Jiwa	0	0	0	0	0	0	103.003.416	DAU	KESBANGPOL

185	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	460.595.000	DAU	KESBANGPOL
186	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POLRES	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	120.514.000	DAU	KESBANGPOL
187	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Target 16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.													
188	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DINAS PMD, PPKB,P3A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	DINAS PMD, PPKB DAN P3A
189	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DINAS PMD, PPKB,P3A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	DINAS PMD, PPKB DAN P3A
190	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DINAS PMD, PPKB,P3A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS PMD, PPKB DAN P3A

Target 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.													
191	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	INSPEKTORAT		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			INSPEKTORAT
Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.													
192	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD										BPKAD
193	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPKAD										BPKAD
194	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bappeda		C	CC	CC	CC	B	B			BPKAD
195	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	BPKAD										BPKAD

196	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAGIAN ORGANISASI										BAGIAN ORGANISASI
197	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Hukum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	194.310.900	DAU	BAGIAN HUKUM SETDA
Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.													
198	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DINAS PMD, PPKB,P3A	%	24	24	24	28	28	28			DINAS PMD, PPKB DAN P3A
199	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	DINAS PMD, PPKB,P3A	%	7,41	7,41	11,11	11,11	11,11	14,81			DINAS PMD, PPKB DAN P3A

Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.													
200	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.004.149.000	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
201	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
202	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.004.149.000	DAU	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.													
203	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Target 16.b. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.													
204	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											
TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN													
Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.													
205	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKAD										BPKAD
206	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BAPENDA										BAPENDA
207	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BAPENDA										BAPENDA
Target 17.6. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.													
208	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK										DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

209	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK										DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Target 17.8. Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.													
210	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
211	17.8.1.(a)	Persentase Kecamatan 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Target 17.17. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.													
212	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BAG. ADM PEMBANGUNAN	Paket	150	150	150	150	150	150	5.320.440.191	APBD	BAG.ADM.PEMBANGUNAN
213	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BAG. ADM PEMBANGUNAN	RP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			BAG. ADM PEMBANGUNAN

Target 17.18. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.													
214	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS										DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK
215	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS										DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK
216	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS										DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK
217	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Bappeda										BAPPEDA
Target 17.19. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.													
218	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
219	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS										DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK
220	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS										DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK

MATRIKS KABUPATEN SOPPENG

Nama Kabuapten : Kabupaten Soppeng

Periode RPJMD : 2016-2021

get	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun													
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Sosial	%	-91,55%	8,45%	8,27%	7,50%	7,50%	7,5%		Dinas Sosial
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	-	-	88,76%	86,00%	-	86%		Dinas Kesehatan
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Sosial	%	0,28	0,28	1,3	48,69	58,27	58,27%		Dinas Sosial
	1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Sosial	%	0%	0%	54%	35%	35%	35,00%		Dinas Sosial

	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Sosial	%	4.380	4.381	4.181	7.831	7.233	7,233		Dinas Sosial

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	88,48%	88,48%	95,87%	92,20%	86,59%	86,59%		Dinas Kesehatan
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	95,71%	95,71%	97,59%	95,60%	96,00%	96%		Dinas Kesehatan
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	78%	78%	75%	75%	77%	77%		Dinas Kesehatan
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	89,92%	89,92%	90,03%	94,00%	94,30%	94,3%		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	29,35%	29,35%	37,07%	42,98%	63,40%	63,4%		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	84,49%	84,49%	86,97%	89,42%	86,40%	86,4%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	70,31%	70,31%	74,18%	74,99%	68,44%	68,44%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	81,83%	81,83%	93,13%	98,18%	93,30%	93,30%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	%	58,32%	58,32%	66,94%	74,15%	77,13%	77,13%		Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Korban meninggal dan hilang	0	0	0	0	0	Tidak ada Korban meninggal dan hilang		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Sosial	Orang	21	21	13	76	57	57 Orang		Dinas Sosial
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Sosial	Orang	0	0	17	18	44	44 Orang		Dinas Sosial
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah				Rp 75.527.420.000	Rp 55.300.707.000	Menurun		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	Ada		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	Pendidikan: 32.70, Kesehatan: 13	Pendidikan: 32.70, Kesehatan: 14	Pendidikan: 30.32, Kesehatan: 17	Pendidikan: 28.72, Kesehatan: 19	Pendidikan: 28 Kesehatan: 19	Meningkat		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik serta Peningkatan Pertanian Berkelanjutan													
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan	%	1828,2	1828,2	1791,4	1836,5	1894,8	18,94%		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	**%**	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	1,00%	0,01%		Dinas Kesehatan

2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	5,01%	5,01%	4,07%	20,20%	16,00%	16%		Dinas Kesehatan
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%		Dinas Kesehatan
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	0,83%	0,83%	0,88%	0,86%	1,00%	0,01%		Dinas Kesehatan
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	81,70%	81,70%	82,50%	83,60%	80,40%	180,40%		Dinas Kesehatan

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan	%	87,4	87,4	84,9	87,9	88,5	88,50%		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahtraan Seluruh Penduduk Semua Usia													
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	Kasus Kematian	3	3	2	2	2	Menurun menjadi 2 kasus		Dinas Kesehatan
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	88,00%	88,00%	88,48%	92,20%	86,59%	86,59%		Dinas Kesehatan
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	88,00%	88,00%	88,48%	92,20%	86,59%	86,59%		Dinas Kesehatan
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	1,3	1,3	3	1,5	1,41	Menurun Menjadi 1,41		Dinas Kesehatan

	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	43,14	43,14	45,43	10	11,2	Menurun Menjadi 11,2		Dinas Kesehatan
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	4	4	3	3	2,2	Menrun menjadi 2,2		Dinas Kesehatan

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	91,4%	91,4%	92,9%	97,1%	-	97,10%		Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	6,00%	6,00%	10,00%	0,01%	0,01%	Menurun Menjadi 0,0001%		Dinas Kesehatan
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	231	231	231	179	0	Menurun menjadi 0%		Dinas Kesehatan
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	12	12	10	10	0	Menurun menjadi 0%		Dinas Kesehatan
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	30,99%	30,99%	21,78%	0,0%	0,0%	Menurun menjadi 0,01%		Dinas Kesehatan

kesejahteraan.	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	0%	0%	0,00%	2%	1%	Menurun menjadi 0,01%		Dinas Kesehatan
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	0	0	0	77,6	77,91	77,91%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	0	0	0	77	60	60,00%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	0	0	0	4922	5675	56,75%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	0,77	0,78	0,65	0,55	0,50	Menurun Menjadi 0,50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	2.31%	2.31%	2.15%	2%	2%	Menurun Menjadin 0,02		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	Jiwa	224972	224972	225001	-	-	Meningkat menjadi 225.001 Jiwa		Dinas Kesehatan
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	Jiwa	224972	224972	225001	-	-	100%		Dinas Kesehatan
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	92,00%	92,00%	93,19%	95,00%	98,00%	0,98%		Dinas Kesehatan
3.a Memperkuat pelaksanaan The Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	0	0	0	0	8,81	8,81%		Dinas Kesehatan

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	1%	1%	1%	1%	1%	100%		Dinas Kesehatan
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Kesehatan	%	1,768/ 100.001	1,768/ 100.000	15,9/ 100.000	-	-	Meningkat		Dinas Kesehatan

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua													
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Indikator nasional yang sesuai denganindikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	22,22%	22,22%	44,44%	35,71%	38,34%	38,34%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (adadi dalam perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	15,94%	15,94%	65,79%	65,79%	68,42%	68,42%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/sederajat.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (adadi dalam perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,05%	97,05%	99,17%	99,17%	96,86%	96,86%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (adadi dalam perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	85,81%	85,81%	86,49%	86,50%	93,15%	93,15%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (adadi dalam perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	7,05	7,05	7,06	7,42	7,63	7,63 Tahun		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK)Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (adadi dalam perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	51,99%	51,99%	69,78%	90,67%	70,97%	70,97%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1)SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4)Perguruan Tinggi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (adadi dalam perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	84,48	84,49	86,97	89,42	86,4	87,4		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (adadi dalam perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	103,85 %	103,85%	99,64%	99,62%	99,62%	99,62%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun danumur 15-59 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (adadi dalam perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,2%	99,15%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan	Indikator nasional yang sesuai denganindikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100,00%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		(terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).										
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP,SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Indikator nasional yang sesuai denganindikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%		n.a	n.a	n.a	59%	Meningkat menjadi 59%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan Kaum Perempuan													
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasukperdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yangsesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	%	21	21	17	18	25	25%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangandalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yangsesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	%	21	21	17	18	25	25%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Indikator nasional yangsesuai dengan indikator global (ada didalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	%	6%	6%	6%	8%	10%	Meningkatmenjadi 100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilankeputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat,parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	%	20	20	20	26,6	23,3	Meningkatmenjadi 23,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	5.5.2*	Proporsi perempuan yangberada di posisi managerial.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	%	20	20	20	26,6	23,3	Meningkatmenjadi 23,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviudari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a)	*Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidakterpenuhi).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	0	0	0	0	22,76	22,76%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	0	0	0	0	57,59	57,59%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Komunikasi danInformatika	%		n.a	80	n.a	82,22	Meningkatmenjadi 82,22%		Dinas Komunikasi danInformatika

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta PengelolaanAir Bersih dan Santasi yang Berkelanjutan untuk Semua													
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal danmerata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tanggayang memiliki akses terhadap layanan sumberair minum layak.	Indikator nasional yangsesuai dengan indikator global (ada didalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	89,92%	89,92%	90,03%	94,00%	94,30%	94,3%		Dinas Pekerjaan Umum & PenataanRuang

	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untukpulau-pulau.	Indikator nasional yangsesuai dengan indikator global (ada didalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	m3/detik	255	255	255	-	-	256 m3/detik		Dinas Pekerjaan Umum & PenataanRuang
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum amandan berkelanjutan.	Indikator nasional yangsesuai dengan indikator global (ada didalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	69,93	69,93	90,05	-	-	90,05%		Dinas Pekerjaan Umum & PenataanRuang
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan,serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tanggayang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	29,35%	29,35%	37,07%	42,98%	63,40%	63,4%		Dinas Pekerjaan Umum & PenataanRuang
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahanyang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		Dinas Kesehatan	Desa	10	10	18,57	100	100	Meningkat menjadi 100desa		Dinas Kesehatan
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		Dinas Kesehatan	Desa	10	10	18,57	100	100	Meningkat menjadi 100desa		Dinas Kesehatan

	6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Kecamatan	1	1	1	1	1	1 Kecamatan		Dinas Pekerjaan Umum & PenataanRuang
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tanggayang terlayani sistem pengelolaan air limbahterpusat.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	Meningkatmenjadi 0,03%		Dinas Pekerjaan Umum & PenataanRuang
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,dan meminimalkan pelepasanmaterial dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja(IPLT).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Kecamatan	1	1	1	1	1	1 Kacamatan		Dinas Pekerjaan Umum & PenataanRuang
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	0,03	0,03	0,03	0,3	0,3	Meningkat menjadi 0,4		Dinas Pekerjaan Umum & PenataanRuang

	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagaisumber air baku.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Lingkungan Hidup	%	3,32	3,32	1,61	1,26	0,86	0,86		Dinas Lingkungan Hidup
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batasyang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	WS	1	1	2	6	7	7 WS		Dinas Pekerjaan Umum & PenataanRuang
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada didalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Kegiatan	2	2	2	2	3	Ada 3		Dinas Pekerjaan Umum & PenataanRuang

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelnjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan menyeleuruh serta Pekerjaan yang Layak bagi Semua													
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	7,78	7,78	8,01	8,15	7,69	7,69%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rupiah	Rp 34.890.000,-	Rp 34.890.000,-	Rp 39.190.000,-	Rp 44.120.000,-	Rp 48.180.000,-	Rp 48.180.000,-		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	2,90%	2,90%	2,71%	2,66%	3,53%	3,53%		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	%	1,44	1,44	1,45	1,47	1,53	Meningkat menjadi 1,53%		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Orang	30	30	43	6	-	0 Orang		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Orang	218357	218357	223975	168929	200597	200.597 Orang		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rupiah	Rp 1.494.680.000,00	Rp 1.494.680.000,00	Rp 1.507.554.000,00	Rp 1.303.565.000,00	Rp 1.148.566.000,00	Rp 1.148.566.000		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi													
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadapPDB dan per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	SKPD yang terkait	%	10,42%	10,42%	10,55%	10,47%	10,52%	Meningkat menjadi 10,52%		Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDBindustri manufaktur.	Indikator nasional yangsesuai dengan indikatorglobal (ada di dalam perpres).	Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	%	81,10%	81,10%	82,90%	81,10%	76,90%	7,69%		Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	67,85	67,85	67,98	68,30	68,00	68%		Dinas Komunikasi dan Informatika
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	67,85	67,85	67,98	68,30	68,00	68%		Dinas Komunikasi dan Informatika
	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	67,85	67,85	67,98	68,30	68,00	68%		Dinas Komunikasi dan Informatika

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi													
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Sosial	%	0,39	0,39	0,35	0,35	-	0,35		Dinas Sosial
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurutjenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Sosial	%	8,45%	8,45%	8,27%	7,50%	7,50%	7,5%		Dinas Sosial
	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Daerah				29	43	43 daerah		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa				21	6	6 desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa	0	0	0	0	0	0 desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta ProgramJaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		Dinas Sosial	%	0,28	0,28	1,3	48,69	58,27	58,27%		Dinas Sosial

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan													
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Indikator nasional yangsesuai dengan indikatorglobal (ada di dalam perpres).	Dinas Perumahan dan Permukiman	%	0	0	63,58	63,34	63,84	63,84%		Dinas Perumahandan Permukiman
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penangananpermukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah		0	0	0	0	0	Tidak Ada		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana,dengan fokus melindungi orang miskin dan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal,hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	Orang	0	0	0	0	0	Tidak ada Korban meninggal dan hilang		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

orang- orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						Ada	Ada		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah				Rp 75.527.420.000	Rp 55.300.707.000	Menurun		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan													
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaanyang tertangani.	Indikator nasional yangsesuai dengan indikatorglobal (ada di dalam perpres).	Dinas Lingkungan Hidup	%	0,00%	0,00%	49,05%	71,30%	73,59%	73,59%		Dinas Lingkungan Hidup
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana(PRB) tingkat daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	Ada		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

mengimplementasikan penanganan holistik risikobencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.													

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 12.Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan													
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Lingkungan Hidup	Kg/Hari	0	0	503,7	2947	3270,04	3270,04 Kg/Hari		Dinas Lingkungan Hidup

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 13.Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengantisipasi iklim dan dampaknya													
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana(PRB) tingkat nasional dan daerah.	Indikator nasional yangsesuai dengan indikatorglobal (ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	Ada		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	jiwa	0	0	0	0	0	Tidak ada Korban meninggal dan hilang		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MATRIKS SDGs

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan Kaum Perempuan													
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	%	21	21	17	18	25	25%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	%	21	21	17	18	25	25%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	%	6%	6%	6%	8%	10%	Meningkat menjadi 100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	%	20	20	20	26,6	23,3	Meningkat menjadi 23,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	%	20	20	20	26,6	23,3	Meningkat menjadi 23,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a)	*Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	0	0	0	0	22,76	22,76%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	0	0	0	0	57,59	57,59%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	%		n.a	80	n.a	82,22	Meningkat menjadi 82,22%		Dinas Komunikasi dan Informatika

MATRIKS SDGs

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta PengelolaanAir Bersih dan Santasi yang Berkelanjutan untuk Semua													
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	89,92%	89,92%	90,03%	94,00%	94,30%	94,3%		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	m3/detik	255	255	255	-	-	256 m3/detik		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	69,93	69,93	90,05	-	-	90,05%		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	29,35%	29,35%	37,07%	42,98%	63,40%	63,4%		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		Dinas Kesehatan	Desa	10	10	18,57	100	100	Meningkat menjadi 100 desa		Dinas Kesehatan
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		Dinas Kesehatan	Desa	10	10	18,57	100	100	Meningkat menjadi 100 desa		Dinas Kesehatan

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Kecamatan	1	1	1	1	1	1 Kecamatan		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	Meningkat menjadi 0,03%		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Kecamatan	1	1	1	1	1	1 Kacamatan		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	0,03	0,03	0,03	0,3	0,3	Meningkat menjadi 0,4		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Lingkungan Hidup	%	3,32	3,32	1,61	1,26	0,86	0,86		Dinas Lingkungan Hidup
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	WS	1	1	2	6	7	7 WS		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Kegiatan	2	2	2	2	3	Ada 3		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

MATRIKS SDGs

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelnjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan menyeleuruh serta Pekerjaan yang Layak bagi Semua													
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	7,78	7,78	8,01	8,15	7,69	7,69%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rupiah	Rp 34.890.000,-	Rp 34.890.000,-	Rp 39.190.000,-	Rp 44.120.000,-	Rp 48.180.000,-	Rp 48.180.000,-		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	2,90%	2,90%	2,71%	2,66%	3,53%	3,53%		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	%	1,44	1,44	1,45	1,47	1,53	Meningkat menjadi 1,53%		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Orang	30	30	43	6	-	0 Orang		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Orang	218357	218357	223975	168929	200597	200.597 Orang		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Rupiah	Rp 1.494.680.000,00	Rp 1.494.680.000,00	Rp 1.507.554.000,00	Rp 1.303.565.000,00	Rp 1.148.566.000,00	Rp 1.148.566.000		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

MATRIKS SDGs

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi													
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	SKPD yang terkait	%	10,42%	10,42%	10,55%	10,47%	10,52%	Meningkat menjadi 10,52%		Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	%	81,10%	81,10%	82,90%	81,10%	76,90%	7,69%		Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	67,85	67,85	67,98	68,30	68,00	68%		Dinas Komunikasi dan Informatika
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	67,85	67,85	67,98	68,30	68,00	68%		Dinas Komunikasi dan Informatika
	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	67,85	67,85	67,98	68,30	68,00	68%		Dinas Komunikasi dan Informatika

MATRIKS SDGs

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara													
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Sosial	%	0,39	0,39	0,35	0,35	-	0,35		Dinas Sosial
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Sosial	%	8,45%	8,45%	8,27%	7,50%	7,50%	7,5%		Dinas Sosial
	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Daerah				29	43	43 daerah		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa				21	6	6 desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa	0	0	0	0	0	0 desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		Dinas Sosial	%	0,28	0,28	1,3	48,69	58,27	58,27%		Dinas Sosial

MATRIKS SDGs

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan													
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Perumahan dan Permukiman	%	0	0	63,58	63,34	63,84	63,84%		Dinas Perumahan dan Permukiman
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		0	0	0	0	0	Tidak Ada		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	0	0	0	0	0	Tidak ada Korban meninggal dan hilang		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						Ada	Ada		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah				Rp 75.527.420.000	Rp 55.300.707.000	Menurun		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan													
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Lingkungan Hidup	%	0,00%	0,00%	49,05%	71,30%	73,59%	73,59%		Dinas Lingkungan Hidup
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	Ada		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MATRIKS SDGs

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 12.Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan													
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Lingkungan Hidup	Kg/Hari	0	0	503,7	2947	3270,04	3270,04 Kg/Hari		Dinas Lingkungan Hidup

MATRIKS SDGs

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 13.Mengambil Tindakan cepat untuk Mengangtisipasi Perubahan Iklim dan Dampaknya													
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	Ada		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	jiwa	0	0	0	0	0	Tidak ada Korban meninggal dan hilang		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MATRIKS SDGs

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 15. Melindungi, Merestorasi dan meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem daratan, Mengelola Hutan secara lestari, menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan serta menghentikan kehilangan Keanekaragaman hayati													
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Lingkungan Hidup	Ha	27069,93	27069,93	11460,97	385,5	20508	20.508 Ha		Dinas Lingkungan Hidup
15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	0	0	0	0	0	Tidak Ada		Dinas Lingkungan Hidup

MATRIKS SDGs

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan													
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	SKPD yang terkait	%	0	0	1	0	0	Menurun menjadi 0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	SKPD yang terkait	%	0	0	0	0	0	Menurun menjadi 0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	SKPD yang terkait	Orang	0	0	105	72	0	Menurun menjadi 0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	SKPD yang terkait	%	19	19	11	21	31	31%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	SKPD yang terkait	%	0,91	0,91	0,93	0,90	0,92	91,87%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	SKPD yang terkait	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP (100%)		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	SKPD yang terkait	%	na	na	55%	58%	59%	58,97%		Inspektorat
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E procurement terhadap belanja pengadaan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	SKPD yang terkait	%	48%	48%	89,55%	100%	100%	100%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	SKPD yang terkait	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Bagian Organisasi dan Tata Laksana
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	SKPD yang terkait	%	20,00%	20,00%	20,00%	26,60%	23,30%	Meningkat menjadi 23,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	SKPD yang terkait	%	4%	4%	3%	3%	2%	2%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	13012	13012	12481	12231	12077	12.077 Anak		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	81,83%	81,83%	93,13%	98,18%	93,30%	93,3%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	33,11%	33,11%	41,63%	61,89%	75,50%	75,5%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MATRIKS SDGs

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 17. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua													
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	%	93%	93%	94%	90%	91%	0,91%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	1,15%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	1,15%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	67,85	67,85	67,98	68,30	68,00	Meningkat menjadi 68%		Dinas Komunikasi dan Informatika

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	67,85	67,85	67,98	68,30	68,00	Meningkat menjadi 68%		Dinas Komunikasi dan Informatika
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	95,00%	95,00%	96,67%	100,00%	-	100%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	95,00%	95,00%	96,67%	100,00%	-	100%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data	15	15	20	12	-	12 Data		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data	regitrasi kelahiran tersedia, registrasi kematian tersedia	regitrasi kelahiran tersedia, registrasi kematian tersedia	regitrasi kelahiran tersedia, registrasi kematian tersedia	regitrasi kelahiran tersedia, registrasi kematian tersedia	regitrasi kelahiran tersedia, registrasi kematian tersedia	ada		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Orang	1400	1400	1500	8653	-	8.653 Pengungjung		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam perpres).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	95,00%	95,00%	99,31%	100,00%	-	100%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

MATRIKS II SDGs

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun												
INDIKATOR SDGs:	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
PROGRAM 1: Program Perlindungan Jaminan Sosial												
Kegiatan 1: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		%		8,45%	8,27%	7,50%	7,50%	7,5%			APBD	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs:	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.										
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.										
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.										
PROGRAM 1.a: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kegiatan 1.a: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)		%		-	88,76%	86,00%	-	86,00%			APBD	Dinas Kesehatan
PROGRAM 1.b: Program Perlindungan Jaminan Sosial												
Kegiatan 1.b: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		%		0,28	1,3	48,69	58,27	58,27			APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 1.c: Program Rehabilitasi Sosial												
Kegiatan 1.c: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		%		0%	54%	35%	35%	35%			APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 1.d: Program Perlindungan Jaminan Sosial												
Kegiatan 1.d: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		%		4.381	4.181	7.831	7.233	7.233			APBD	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs:	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.										
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang										
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.										
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.										
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki										
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.										
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat.										
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun										
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun												
PROGRAM 1.a: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kegiatan 1.a: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)		%		88,48%	95,87%	92,20%	86,59%	86,59%			APBD	Dinas Kesehatan
PROGRAM 1.b: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kegiatan 1.b: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%		95,71%	97,59%	95,60%	96,00%				APBD	
PROGRAM 1.c : Program Pembinaan Keluarga Berencana												
Kegiatan 1.c : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita)		%		78%	75%	75%	77%	77%			APBD	Dinas Kesehatan
PROGRAM 1.d: Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum												
Kegiatan 1.d : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah		%		89,92%	90,03%	94,00%	94,30%	94,3%			APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM 1.e : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah												
Kegiatan 1.e : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		%		29,35%	37,07%	42,98%	63,40%	63,4%			APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM 1.g : Proram Pengelolaan Pendidikan												
Kegiatan 1.g : Kabupaten/Kota		%		84,49%	86,97%	89,42%	86,40%	86,40%			APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM 1.h : Proram Pengelolaan Pendidikan												
Kegiatan 1.h :Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		%		70,31%	74,18%	74,99%	68,44%	68,44%			APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM 1.j :Program Pencatatan												
Kegiatan 1.j :Pelayanan Pencatatan Sipil (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan		%		81,83%	93,13%	98,18%	93,30%	93,30%			APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun												
PROGRAM 1.k :												
		%		58,32%	66,94%	74,15%	77,13%	77,13%			APBD	Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
INDIKATOR SDGs:	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan										
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban										
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.										
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.										
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.										
PROGRAM 1: Program Penanggulangan Bencana												
Kegiatan 1 : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		orang		0	0	0	0	Tidak ada Korban meninggal dan hilang			APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM 1.b: Program Penanganan Bencana												
Kegiatan 1.b : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		orang		21	13	76	57	57 Orang			APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 1.c: Program Penanganan Bencana												
Kegiatan 1.c : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		orang		0	17	18	44	44 Orang			APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 2.a: Program Penanggulangan Bencana												
Kegiatan 2.a: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Rupiah				Rp 75.527.420.000	Rp 55.300.707.000	Menurun			APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM 3: Program Penanggulangan Bencana												
Kegiatan 3 :Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		%		1	1	1	1	Ada			APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
INDIKATOR SDGs:	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.										
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.										
PROGRAM 1: Program Perlindungan Jaminan Sosial												
Kegiatan 1: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		%									APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 2 : Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah												
Kegiatan 2: Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah		%		Pendidikan: 32.70, Kesehatan: 14	Pendidikan: 30.32, Kesehatan: 17	Pendidikan: 28.72, Kesehatan: 19	Pendidikan: 28 Kesehatan: 19				APBD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

MATRIKS II SDGs

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2016)	Target Tahunan (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan													
INDIKATOR SDGs:	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.											
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.											
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.											
PROGRAM a : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum													
Kegiatan 1:Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah		%			89,92%	90,03%	94,00%	94,30%	94,3%			APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM b : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)													
Kegiatan 2 :Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku)					255	255	-	-	256 m3/detik			APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM c : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum													
Kegiatan 3 :Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah					69,93	90,05	-	-	90,05%			APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
INDIKATOR SDGs:	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.											
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).											
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).											
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.											
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2016)	Target Tahunan (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
PROGRAM b :Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah													
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					29,35%	37,07%	42,98%	63,40%	63,4%			APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM c : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan													
PROGRAM 2 : Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan)					10	18,57	100	100	Meningkat menjadi 100 desa			APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM d : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan													
Kegiatan 1: Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat)		%			10	18,57	100	100	Meningkat menjadi 100 desa			APBD	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2016)	Target Tahunan (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
PROGRAM e : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah													
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Hidup Bersih dan Sehat)		%			1	1	1	1	1 Kecamatan			APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM f : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah													
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					0,01	0,01	0,02	0,03	Meningkat menjadi 0,03%			APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
INDIKATOR SDGs:	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).											
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.											
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.											
Kegiatan b : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					1	1	1	1	1 Kacamatan			APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
PROGRAM 1: Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah													
Kegiatan b : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					0,03	0,03	0,3	0,3	Meningkat menjadi 0,4			APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2016)	Target Tahunan (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
PROGRAM 1: Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup													
Kegiatan 1: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut)					3,32	1,61	1,26	0,86	0,86			APBD	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR SDGs:	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.											
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.											
PROGRAM 1: Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)													
Kegiatan 1: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota)		WS			1	2	6	7	7 WS			APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2016)	Target Tahunan (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
PROGRAM 1: Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)													
Kegiatan 1: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA		Kegiatan			2	2	2	3	Ada 3			APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

MATRIKS II SDGs

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 8.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua												
INDIKATOR SDGs:	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.										
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.										
PROGRAM 1: Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral												
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**%**		7,78	8,01	8,15	7,69	7,69%			APBD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM 1.a: Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral												
Kegiatan 1.a: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rupiah		Rp 34.890.000,-	Rp 39.190.000,-	Rp 44.120.000,-	Rp 48.180.000,-	Rp 48.180.000,-			APBD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
INDIKATOR SDGs:	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program 2 : Program Perencanaan Tenaga Kerja												
Kegiatan 2: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		%		2,90%	2,71%	2,66%	3,53%	3,53%			APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
INDIKATOR SDGs:	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.										
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.										
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.										
Program 1 : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata												
Kegiatan 1: Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		%		1,44	1,45	1,47	1,53	Meningkat menjadi 1,53%			APBD	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Program 1.a : Program Pemasaran Pariwisata												
Kegiatan 1.a: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Orang		30	43	6	-	0 Orang			APBD	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 8.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua												
Program 1.b: Program Pemasaran Pariwisata												
Kegiatan 1.b: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Orang		218357	223975	168929	200597	200.597 Orang			APBD	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Program 1.c: Program Pemasaran Pariwisata												
Kegiatan 1.c: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Orang		Rp 1.494.680.000,00	Rp 1.507.554.000,00	Rp 1.303.565.000,00	Rp 1.148.566.000,00	Rp 1.148.566.000			APBD	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

MATRIKS II SDGs

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2016)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta mendorong inovasi												
INDIKATOR SDGs:	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.										
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.										
PROGRAM 1: Program Perencanaan Pembangunan Industri												
Kegiatan 1: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				10,42%	10,55%	10,47%	10,52%	Meningkat menjadi 10,52%			APBD	Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM 1.a: Program Perencanaan Pembangunan Industri												
Kegiatan 1.a: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				81,10%	82,90%	81,10%	76,90%	7,69%			APBD	Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
INDIKATOR SDGs:	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.										
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.										
	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet.										
PROGRAM 1: Program informasi dan komunikasi												
Kegiatan 1: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				67,85	67,98	68,30	68,00	68%			APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM 1.a: Program informasi dan komunikasi												
Kegiatan 1.a: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				67,85	67,98	68,30	68,00	68%			APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM 1.b: Program informasi dan komunikasi												
Kegiatan 1.b: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				67,85	67,98	68,30	68,00	68%			APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

MATRIKS II SDGs

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan												
INDIKATOR SDGs:	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										
PROGRAM 1.a: Program Pengembangan Perumahan												
Kegiatan 1: Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				0	63,58	63,34	63,84	63,85			APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman
INDIKATOR SDGs:	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.										
PROGRAM 2: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat												
Kegiatan 2: Fasilitasi Kerjasama Daerah				0	0	0	0	Tidak Ada			APBD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
INDIKATOR SDGs:	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).										
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.										
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.										
PROGRAM 1: Program Penanggulangan Bencana												
Kegiatan 1: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0	0	0	0	Tidak ada Korban meninggal dan hilang			APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM 1.a: Program Penanggulangan Bencana												
Kegiatan 1.a: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0	0	0	0				APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM 1.c: Program Penanggulangan Bencana												
Kegiatan 1.c: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0	0	0	0				APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM 2.a: Program Penanggulangan Bencana												
Kegiatan 2.a: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				-	-	Rp 75.527.420.000	Rp 55.300.707.000	Menurun			APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
INDIKATOR SDGs:	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.										
PROGRAM 1.a: Program Pengelolaan Persampahan												

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan												
Kegiatan 1.a : Pengelolaan Sampah (Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)		Dokumen		1	1	1	1	Ada			APBD	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR SDGs:	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.										
PROGRAM 2: Program Penanggulangan Bencana												
Kegiatan 2: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1	1	1	1				APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MATRIKS II SDGs

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 15.Melindungi, Merestorasi dan meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem daratan, Mengelola Hutan secara lestari, menghentikan Penggurunan, Memulihkan													
INDIKATOR SDGs:	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.											
Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup													
Kegiatan: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Ha			27069,93	11460,97	385,47	20508	20508			APBD	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR SDGs:	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.											
Program Pengelolaan KEHATI													
Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati)		Dokumen			0	0	0	0	Tidak Ada			APBD	Dinas Lingkungan Hidup

MATRIKS II SDGs

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan												
INDIKATOR SDGs:	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.										
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.										
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.										
PROGRAM 1:Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum												
Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		Kasus		0	1	0	0	Menurun menjadi 0			APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM 2:Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum												
Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		Kasus		0	0	0	0	Menurun menjadi 0			APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM 3:Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum												
Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		orang		0	105	72	0	Menurun menjadi 0			APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
INDIKATOR SDGs:	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.										
Program Perlindungan Khusus Anak												
Kegiatan: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		%		19	11	21	31	31			APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
INDIKATOR SDGs:	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.										
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah										
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/										
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan										
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/										
PROGRAM 1: Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah												
Kegiatan: Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah		%		0,91	0,93	0,90	0,92	91,87%			APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan												
PROGRAM 1.a: Program Pengelolaan Keuangan Daerah												
Kegiatan: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP (100%)			APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
PROGRAM 1.b: Program Penyelenggaraan Pengawasan												
Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal		%		na	55%	58%	59%	58,97%			APBD	Inspektorat
PROGRAM 1.c: Program Perekonomian dan Pembangunan												
Kegiatan: Pengadaan Barang dan Jasa		%		48%	89,55%	100%	100%	100%			APBD	Badan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
PROGRAM 1.d: Program Administrasi Umum												
Kegiatan: Penataan Organisasi (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi)Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah		%		0	0	0	0	0			APBD	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
INDIKATOR SDGs:	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).										
PROGRAM 1.a: Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak												
Kegiatan: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		%		20,00%	20,00%	26,60%	23,30%	23,30%			APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM 1.b: Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak												
Kegiatan: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		%		4%	3%	3%	2%	2%			APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
INDIKATOR SDGs:	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.										
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.										
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan												
PROGRAM 1: Program Pencatatan Sipil												
Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting)				13012	12481	12231	12077	12077			APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM 1.a: Program Pencatatan Sipil												
Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting)		%		81,83%	93,13%	98,18%	93,30%	93,30%			APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM 1.b: Program Pencatatan Sipil												
Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting)		%		33,11%	41,63%	61,89%	75,50%	75,50%			APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MATRIKS KABUPATEN ENREKANG

Nama Kabuapten : Kabupaten Enrekang

Periode RPJMD : 2019-2023

KODE INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	BASELINE	Target Pencapaian					OPD Pelaksana	Ket
				2019	2020	2021	2022	2023		
TUJUAN 1 : Tanpa Kemiskinan										
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1	Persentase Penduduk yang Hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	65,57	66	68	68	70	70	Dinas Sosial	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan										
1.3.1 (a)	Proporsi peserta Jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	60	95	97	98	100	100	Dinas Kesehatan	
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki- laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	50	65	70	75	100	100	DPP-KB	
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	27.77	49.79	70	75	80	85	Dinkes	
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	102	90	95	97	98	100	Dinas Kesehatan	
1.4.1 ©	Prevalensi Penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	%	60	75	80	90	100	100	DPP-KB	
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	86.75	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahan pangan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana										
1.5.1*	Jumlah Korban Meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	%	5	3	3	2	2	0	BPDB	

1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	%	38	46	54	62	70	72	BPDB	
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	%	160	150	135	120	105	90	BPDB	
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	%	10.5	8.5	6.5	4.5	2.5	2	BPDB	
TUJUAN 2 : Tanpa Kelaparan										
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun										
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	13.7	13.5	13	12.75	12.5	12	DISKEPAN	
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	%	6.8	6	5.5	5	4.5	4	Dinkes	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan	%	10	9	8	7	6	5	DISKEPAN	
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	%	14	13.5	13	12.75	12.5	12	DISKEPAN	
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segal bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara Internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibuy hanil dan menyusui serta manula.										
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita	%	24.4	24	23.5	22	21.5	21	Dinkes	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	%	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	Dinkes	
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	32.3	31.3	30	29.5	29	28.5	Dinkes	
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	64	50	52	53	54	55	Dinkes	
2.2.2.(c)	Kualitas Konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan	%	81	82	83	84	85	86	DISKEPAN	

TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	60	65	70	90	100	100	DPP-KB	
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	65	5	4	3	2	1	Dinkes	
3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	45	53	70	90	100	100	DPP-KB	
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya										
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV Pada populasi dewasa	%	32.5	34.5	35.6	37.5	38.4	39.6	Dinkes	
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk	%	80	70	70	65	60	55	Dinkes	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	%	<1	<1/1000 Pddk	<1/1000 Pddk	<1/1000 Pddk	<1/1000 Pddk	<1/1000 Pddk	Dinkes	
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis	%		100	100	100	100	100	Dinkes	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	%		10	15	20	25	30	Dinkes	
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	%	32.5	34.5	35.6	37.5	38.4	39.6	Dinkes	
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%	24.28	23.8	22.5	21.5	20.5	20	Dinkes	
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	%	15.8	15.4	15	15.2	15.1	15	Dinkes	
3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	%	12	12	12	12	12	12	Dinkes	
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidkan dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategis dan program nasional.										
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun	%	60	70	75	90	100	100	DPP-KB	

3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	%	70	75	85	90	100	100	DPP-KB	
3.7.2 *	Angka kelahiran pada perempuan umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	%	55	65	70	90	100	100	DPP-KB	
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang										
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	%	11.467	7500	8500	9000	9250	12000	Dinkes	
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	%	2.6	2.3	3.2	2.2	2.1	2	DPP-KB	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	%	808	90	100	100	100	100	Dinkes	
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	100	90	100	100	100	100	Dinkes	
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	%		50	45	40	35	25	Dinkes	
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	%	86.2	35	37	40	43	45	Dinkes	
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS										
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.1*	Proporsi anak - anak dan remaja : (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/Kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam : (i) membaca, (ii) matematika	%	78	80	83	85	87	90	Diknas	
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	%	106	106	106	106	106	106	Diknas	
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	%	100	100	100	100	100.2	100.3	Diknas	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	49	50	50.3	50.5	50.7	51	Diknas	

4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan										
4.5.1 *	Rasio angka partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat ; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat ; dan Rasio angka partispasi kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	%	91.5	91.5	91.5	91.8	92	92.5	Diknas	
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	98	98	98.3	98.5	98.6	98.7	Diknas	
4.6.1 (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	99	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	Diknas	
TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER										
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan programme of Action of the International Conference on Population andDelepment and the Beijing Platform serta dokumen - dokumen hasil reviu dari konferensi - konferensi tersebut										
5.6.1.(a)	Unmet Need KB (Kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)	%	13	14	13	12	11	10	DPP-KB	
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan usia subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	%	60	70	80	90	100	100	DPP-KB	
TUJUAN 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang miliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	42890	85	95	105	115	120	Perkim-TR	
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yabg tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global										
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	%	40 (memprihatinkan)	45 (Kurang)	50 (sedang)	56 (sedang)	61 (sedang)	65 (sedang)	Dinas Lingkungan Hidup	
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.										
6.5.1.(g)	Kegiatan Penataan Kelembagaan Sumber Daya Air	%	7	5	5	5	5	5	Perkim-TR	
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU										
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										

7.1.1	Rasio elektrifikasi.	%							Bagian Ekonomi	
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita.	%		75	80	85	90	95	Bagian Ekonomi	
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	%		665	665	665	665	665	Bagian Ekonomi	
7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	%		73.926	73.926	73.926	73.926	73.926	Bagian Ekonomi	
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang										
8.1.1	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	%	6,89%	6,99	7.00	7.20	7.70	8.00	Dinas Pertanian	
8.1.1(a)	PDRB per kapita	%	31.54 juta	32	35	37	39	41	Dinas Pertanian	
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										
8.2.1 :	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	%	6	6	6	6	6	12	Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan										
8.3.1 ©	Persentase Akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	%	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	160 UKM	160 UKM	160 UKM	Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
8.5 Pada tahun 2020, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi sema perempuan dan laki - laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya										
8.5.2*	Tingkat Pengganggguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan Kelompok Umur	%	3	5	6	7	10	10	Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal										
8.9.1* :	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	%	274.470.000	550.000.000	561.000.000	572.220.000	583.664.400	438.900.000	Dispopar	
8.9.1.(b) :	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	%	40.035	50.000	55.000	60.500	66.550	73.205	Dispopar	
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										

8.10.1(b) :	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	10	10	10	10	10	10	Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR										
9.1 Mengembangkan infratruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua										
9.1.2.	Jumlah Penumpang dan volume Pengangkutan, menurut jenis transportasi	%	104.544	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000	DISHUB	
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	%	12.5	12.5	12.56	12.58	12.6	12.61	Disperindag	
9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	%	7	7	5.92	5.88	5.56	5.26	Disperindag	
9.2.2	Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur	%	5.84	5.84	5.89	5.94	5.98	6.02	Disperindag	
Target 9.3. Meningkatkan Akses Industri dan Perusahaan Skala Kecil, khususnya dinegara berkembang terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan kedalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	%	83.33	83.33	83.36	83.34	83.61	83.87	Disperindag	
TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN										
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 % dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata - rata nasional										
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%		10	20	30	40	50	Dinas Pertanian	
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	%		2	2	2	2	2	Dinas Pertanian	
TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN										
11.1 Pada tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh										
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%		14	18	23	26	30	Perkim-TR	

11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua										
11.2.1.	Proporsi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik , terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia dan penyandang difabilitas	%	0.74	0.77	0.80	0.82	0.85	0.87	DISHUB	
11.2.1.(a)	Persentase Pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	74	70	68	65	63	60	DISHUB	
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang berdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan										
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	%	5	3	3	2	2	0	BPBD	
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	%		1	2	1	1		BPBD	
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi lansung akibat bencana		1.200.000.000	1.000.000.000	900.000.000	800.000.000	700.000.000	600.000.000	Satpol PP % Damkar	
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi lansung akibat bencana	%	10.5	8.5	6.5	4.5	2.5	2	BPBD	
TUJUAN 12 : POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB										
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati										
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		30 ton	35 ton	40 ton	45 ton	50 ton	55 ton	Dinas Lingkungan Hidup	
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.		32 ton	40 ton	50 ton	60 ton	70 ton	80 ton	Dinas Lingkungan Hidup	
TUJUAN 13 : PERUBAHAN IKLIM										

13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.											
13.1.1*.	strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah									BPBD	
13.1.2*.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.									BPBD	
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH											
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WDP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD / Inspektorat Daerah	
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	75	%	85	86	87		88	90	Disdukcapil	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	30	%	50	55	60		65	70	Disdukcapil	
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional											
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.			40 % dari jumlah PPID Pembantu	50 % dari jumlah PPID Pembantu	55 % dari jumlah PPID Pembantu	40 % dari jumlah PPID Pembantu	60 % dari jumlah PPID Pembantu	65 % dari jumlah PPID Pembantu	Diskominfo - Stastistik	
TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN											
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya			1.057.719.428.195	1.092.919.000	1.101.344.000	1.104.250.000	1.106.750.000	112.000.000	Badan Pendapatan Daerah	

7.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB		9.965.000.000	10.835.000.000	10.851.252.000	12.850.000.000	13.350.000.000	15.750.000.000	Badan Pendapatan Daerah	
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara										
INDIKATOR 17.9.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	%	74.21	85	86	87	88	90	Disdukcapil	
17.18 Pada Tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional										
INDIKATOR 17.18.1.(b)	Persentase Konsumen yang menjadikan data dan informasi Statistik BPS sebagai rujukan utama	%		50%	60%	65%	70%	75%	DISKOMINFO dan Statistik	
INDIKATOR 17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	%		71	72	73	74	75	DISKOMINFO dan Statistik	

MATRIKS KABUPATEN LUWU

Nama Kabupaten : Kabuapten Luwu

Periode RPJMD : 2019-2024

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS SOSIAL, BALITBANGDA, DINAS STATISTIK	%	12.76	12.86	11.09	10.98	10.42	9.99
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	NA	73.25	73.40	73.75	73.90	74.05
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	DINAS TENAGA KERJA	%	75.79	77.88	79.62	81.25	83.75	84.17
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	DINAS SOSIAL	%	34.00	36.00	71.00	43.00	43.00	43.00
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan .	DINAS SOSIAL	KPM	16526	17298	18070	18842	18614	20386
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro									
1.4.1*(a)	Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 tahun yang proses melahirkan di fasilitas kesehatan	DINAS KESEHATAN	%	86.70	86.70	86.70	87.00	87.00	88.00

1.4.1*(b)	Persentase Anak Umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	DINAS KESEHATAN	%	NA	76.40	81.00	85.60	90.30	95.00
1.4.1*(c)	Pravalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%	66.80	66.20	66.22	66.24	66.26	66.28
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	DINAS PENATAAN RUANG & DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	47.22	48.69	49.9	51.15	52.43	53.74
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DINAS PENATAAN RUANG & DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	75.45	76.00	77.10	78.05	79.00	81.00
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	DINAS PENATAAN RUANG & DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	1.60	1.80	2.00	2.40	2.60	2.80
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS PENDIDIKAN	%	98.23	98.23	98.23	100	100	102.5
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS PENDIDIKAN	%	83.64	83.64	85.73	87.87	90.07	92.32
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	81.00	85.00	86.00	89.00	90.00	92.00
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT/DINAS SOSIAL	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Target 1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana									
1.5.1.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000 Orang	2,929	0	0	0	0	0
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	BPBD	lokasi	1 kec	5 kec	5 kec	10 kec	10 kec	15 kec
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	DINAS SOSIAL	%	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00

1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	DINAS SOSIAL	Jumlah korban	NA	PM	PM	PM	PM	PM
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	DINAS KETAHANAN PANGAN	%	6.98	11.50	10.50	9.50	8.00	6.50
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINAS KESEHATAN	%	15.00	14.70	14.50	14.50	13.50	13.00
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	%	17.30	21.00	20.00	18.50	17.00	15.50
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	DINAS KETAHANAN PANGAN/DINAS KESEHATAN	%	17.20	20.00	19.00	18.00	17.00	16.00
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN	%	18.40	17.90	17.40	16.40	15.40	14.00
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	DINAS KESEHATAN	%	15.00	14.70	14.50	14.00	13.50	13.00
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	DINAS KESEHATAN	%	3.70	3.50	3.30	3.10	2.90	2.70
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINAS KESEHATAN	%	11.10	10.60	10.10	9.60	9.10	8.60
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINAS KESEHATAN	%	85.00	87.00	90.00	95.00	97,5	100.00
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Skor	89.3	88.0	89.0	90.0	91.5	93.5
Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.									

2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	DINAS KETAHANAN PANGAN & DINAS PERTANIAN PETERNAKAN	Rp/Tenaga Kerja	220,250	300,000	320,000	430,000	455,000	470,000
target 2.4 : Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.									
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DINAS PERTANIAN	Ha	0	0	30,653	30,653	30,653	30,653
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.									
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	DINAS PERTANIAN	Jumlah	0	0	0	0	0	0
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	DINAS PERTANIAN	%	0	0	0	0	0	0
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Per 100.000 HK	94.40	77.64	60.80	60.35	45.29	45.15
3.1.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	DINAS KESEHATAN	%	89.78	92.02	94.33	96.68	99.10	0.01
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	DINAS KESEHATAN	%	97.96	86.70	86.70	87.00	87.00	88.00
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Per 1000 KH	10.86	9.98	8.54	7.68	6.35	5.6
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1.000 Kelahiran Hidup	DINAS KESEHATAN	Per 1000 KH	7.55	7.17	6.29	6.06	5.79	5.35
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Per 1000 KH	0.0107	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									

3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINAS KESEHATAN	%	0.00005	0.000052	0.0000507	0.0000494	0.0000482	0.0000470
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Kasus per 100.000 penduduk	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13
3.3.3.	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	DINAS KESEHATAN	Kasus per 1000 Org	0	0	0	0	0	0
3.3.5.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	DINAS KESEHATAN	%	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan									
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	DINAS KESEHATAN	%	NA	9.1	9	8.9	8.8	8.7
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	DINAS KESEHATAN	%	NA	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	DINAS KESEHATAN	%	NA	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4
3.4.2.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	DINAS KESEHATAN	%	NA	0	0	0	0	0
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	DINAS KESEHATAN	Org	NA	2	3	4	5	6
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	%	66.80	66.20	66.22	66.24	66.26	66.28
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	%	66.80	66.20	66.22	66.24	66.26	66.28

3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP/ cara modern).	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	%	22.10	23.35	22.75	23.05	23.60	23.95
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	Per 1.000	NA	19.38	19.35	19.33	19.29	19.01
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	%	2.96	2.94	2.90	2.85	2.80	2.76
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINAS KESEHATAN	%	89.50	89.50	92.00	95.00	97.00	100.00
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINAS KESEHATAN	%	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.(rasio tenaga kesehan per 1.000 penduduk)	DINAS KESEHATAN	rasio	2.88	3.04	3.13	3.3	3.44	3.55
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DINAS PENDIDIKAN	%	94.41	95.63	96.61	97.66	98.49	99.54
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN	%	32.35	44.12	55.15	62.5	73.53	91.91

4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN	%	39.62	56.6	66.04	75.47	84.91	94.34
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	97.78	99.42	100	100	100	102.5
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	98.32	98.85	100	100	100	100
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN	Tahun	7.97	8.05	8.18	8.31	8.43	8.6
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DINAS PENDIDIKAN	%	35.15	60.04	61.55	63.08	64.66	66.28
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi									
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN	%	98.12	60.04	61.55	63.08	64.66	66.28
4.6.1.(b)	Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	DINAS PENDIDIKAN	%	95.95	98.35	100.00	100.00	100.00	100.00
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	Ranperda	4	5	7	0	0	0
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02
5.2.2.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%	0.06	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									

5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%	0.14	0.13	0.1	0.08	0.05	0.02
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%	10.78	14.08	15.49	17.04	18.74	20.62
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%	5.56	12.00	20.00	30.00	30.00	30.00
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut									
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	%	14.27	12.53	12.20	12.00	11.35	11.00
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	PUPR	%	80.00	82.04	84.09	86.19	88.35	90.56
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	PUPR/PERKIM	Ltr/dtk	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	PUPR	%	47.22	48.69	49.9	51.15	52.43	53.74
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINAS KESEHATAN	%	30	50	70	90	100	100

6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DINAS PENATAAN RUANG/DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	75.45	85.85	87.5	90	95	100
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DINAS KESEHATAN	Jumlah	20	25	30	35	40	45
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DINAS KESEHATAN	Desa	90	160	200	210	227	227
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	%	5.04	7.04	9.05	12.05	14.05	16.04
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	PUPR	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kategori	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.									
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kasus	0	0	0	0	3	3
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau									
6.6.1.(e)	Jumlah DAS Prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sungai	4	4	4	4	6	6
Tujuan SDGs 07 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA									
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	BPS/PUPR/PLN	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	BPS/PUPR/PLN	Jumlah	NA	PM	PM	PM	PM	PM
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									

8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS STATISTIK	%	7.59	PM	PM	PM	PM	PM
8.1.1.(a)	PDB per kapita.(ADHB)	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS STATISTIK	Juta	43.25	PM	PM	PM	PM	PM
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.									
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS/DINAS TENAGA KERJA	%	6.67	6.92	7.17	7.42	7.67	7.67
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS/DINAS TENAGA KERJA	%	3.13	3.10	3.07	3.04	3.01	3.01
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS/DINAS TENAGA KERJA	%	22.47	22.67	22.25	23.01	23.30	23.30
8.3.1.(c)	Persentase Akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke Layanan Keuangan	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN	%	NA	31.11	33.00	34.00	35.00	37.00
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA	Rp	13,020.00	14,065.00	14,583.00	15,625.00	16,666.00	17,708.00
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS KETENAGAKERJAAN, BALIBANGDA	%	4.66	4.10	3.77	3.39	3.04	2.78
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA	%	4.47	4.19	3.91	3.62	3.33	3.05
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS TENAGA KERJA	%	4.19	3.91	3.62	3.33	3.05	3.05
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.									

8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	DINAS TENAGA KERJA	Jumlah Perusahaan	37	45	52	68	77	80
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	DINAS PARIWISATA/BPS	%	0,007	0,007	10	10	10	10
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DINAS PARIWISATA/BPS	Org	5	4	5	5	7	8
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DINAS PARIWISATA/BPS	Org	2,955	13,206	13,261	13,265	13,315	13,330
8.9.1.(c)	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata	DINAS PARIWISATA/BPS	Juta Rupiah	10,585,000	33,015,000	33,152,500	33,162,500	33,287,500	33,325,000
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									
TARGET 9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua									
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	DINAS PERHUBUNGAN	unit	1	-	-	-	-	-
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	DINAS PERHUBUNGAN	unit	-	-	1	-	-	-
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	DINAS PERHUBUNGAN	unit	1	-	-	-	-	-
9.4 Meningkatkan Infrastruktur dan Retrofit Industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efesiensi penggunaan sumberdaya adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing									
9.4.1	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah Sektor Industri Manufaktur	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	NA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA									
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	DPMD	Desa	17	12	19	30	42	0
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	DPMD	Desa	103	91	72	42	0	0
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Desa	1	83	124	134	144	166
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar									

10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA	%	75.79	77.88	79.62	81.25	83.75	84.17
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN/BPS	%	86.69	87.10	89.66	92.22	94.78	97.34
TARGET 11.2 : Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan, wanita, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang tua									
11.2.1	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Dinas Perhubungan	%	NA	42.00	49.00	57.00	63.00	77.00
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
11.5.1.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Org	2929	0	0	0	0	0
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	Sistem	0	0	3	3	3	3
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	nilai	0	0	0	0	0	0
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	80.00	75.00	74.00	73.00	72.00	71.00
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									
11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS/POLRES	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM

Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dok	1	1	1	1	1	1
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perusahaan	0	0	0	1	2	2
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persen	80.00	85.00	95.00	100.00	100.00	100.00
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ton	20	22	24	26	27	28
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.									
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Usaha	1	1	1	2	2	2
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.									
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dok	1	1	1	1	1	1
13.1.2*	Jumlah korban meninggal,hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Org	2,929	0	0	0	0	0

Target 13.2 Mengintegrasikan Tindakan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional									
13.2.2*	Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi GRK	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen	NA	1	1	1	1	1
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya									
14.4.1.	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	DINAS PERIKANAN	%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.									
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	DINAS PERIKANAN	Perda	0	1	1	1	1	1
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DINAS PERIKANAN	Org	644	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI									
Target 15.3 Pada tahun 2020, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Lahan Kritis dan Tanah Kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunis yang bebas dan terdegradasi.									
15.3.1.	Proporsi Lahan Kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.									
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Dok	NA	PM	PM	PM	PM	PM
Target 15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitasmasyarakat lokal mengejar peluang mata encaharian yang berkelanjutan									

15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	0	0	0	0	0	0
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN									
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	BPS/POLRES	Kasus	2	PM	PM	PM	PM	PM
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	KESBANGPOL	Org	0.81	0	0	0	0	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS/POLRES	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS/POLRES	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%	0	0	0	0	0	0
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%	0.58	0.60	0.70	0.80	0.90	0.06
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%	0	0	0	0	0	0
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.									
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS/POLRES	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM

16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	%	97.05	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAPPELITBANGDA	%	-0.27	6.50	7.00	8.00	9.00	10.00
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	%	NA	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00
16.6.1.(d)	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI	%	On Review	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SEKRETARIAT DEWAN	%	5.74	6.31	6.94	7.63	83.4	9.24
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	%	5.12	PM	PM	PM	PM	PM
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	85.00	86.00	89.00	90.00	92.00	95.00
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	85.00	86.00	89.00	90.00	92.00	95.00
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									

16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tersedia / Tidak Tersedia	NA	On Process	15	35	56	65
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%	NA	0	5	5	10	15
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BADAN PENDAPATAN DAERAH/BPS	%	0.73	PM	PM	PM	PM	PM
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BADAN PENDAPATAN DAERAH/BPS	%	9.41	PM	PM	PM	PM	PM
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%	71.92	72.23	73.64	73.78	74.07	74.12
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	%	93.50	PM	PM	PM	PM	PM
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	%	100.00	PM	PM	PM	PM	PM
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	Nilai	6.00	PM	PM	PM	PM	PM
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BAPPEDA	%	-	PM	PM	PM	PM	PM

17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	Tersedia / Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	Org	9,391	PM	PM	PM	PM	PM
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	%	100.00	PM	PM	PM	PM	PM

MATRIKS KABUPATEN LUWU TIMUR

Nama Kabupaten : Kabupaten Luwu Timur

Periode RPJMD : 2016-2021

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian				
					2017	2018	2019	2020	2021
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DINAS SOSIAL & P3A	%	7.26	7.26	7.2	7.17	7.09	7.00
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	75.00	85.00	95.00	95.50	97.75	100
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	100	100	100	100	100	100
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro									

1.4.1.(a)	Persentase perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan .	Dinas Kesehatan	%	90.00	95.00	95.00	97.00	97.00	100
1.4.1.(b)	Persentase Anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	50	75	80	85	90	90
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	77,21	74,48	71,53	73,88	72,47	72,47
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	81.92%	82, 50%	83, 07%	83.65%	84.22%	84.80%
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	100	100	100	100	100
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	95,58	100	100	100	100	100
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	80.71	80,21	82,19	84,17	86,15	88,13
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	67.59	71.15	75.55	80.11	81.53	81.53

1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik PLN dan Bukan PLN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	80	82	85	87	90	90
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	PM	PM	PM	PM	PM	PM
1.5.1.(a)	Jumlah Lokasi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lokasi	1	7	6	4	3	2
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	342,370,000	342,370,000	342,370,000	342,370,000	342,370,000	342,370,000
1.5.3*	Dokumen Strategi pengurangan resiko bencana (PRB) Tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	1	0	0	0	0
1.a.2*	Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial)	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	27.01	24.02	20.80	21.78	22.43	22.43
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of undermourishment)	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	%	5.71	5.71	5.33	5.33	5.33	5.33
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	%	12,69	7,90	7,90	7,90	7,90	7.90

2.1.2*	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat berdasarkan pada.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	%	8,66	8,66	6,66	6,66	6,66	6.66
2.1.2.(a)	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Dibawah 1400 kkal/kapita/hari	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	%	12,69	7,90	7,90	7,90	7,90	7.90
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	9.99	8.99	8.99	7.99	7.99	7.99
2.2.1.(a)	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	%	9.99	8.99	8.99	7.99	7.99	7.99
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	%	1	1	1	1	1	1
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	%	8.67	8.58	0.80	10.91	9.49	9.49
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	%	74.92	73.07	72.94	69.78	61.16	61.16
2.2.2.(c)	Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	%	89.7	92.2	97.5	98.8	98.8	98.8

Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.									
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian		PM	PM	PM	PM	PM	PM
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	%	87.99	84.99	79.99	74.99	69.99	64.99
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	%	90.00	95.00	95.00	97.00	97.00	100
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	90.00	95.00	95.00	97.00	97.00	100
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	%	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2
3.2.2*	Angka kematian neonatal(AKN) Per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	5.2	5.1	5	4.8	4.5	4.5

3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	PER 100.000 PENDUDUK	7.99	6.99	6.99	5.99	5.99	4.99
3.2.2.(b)	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	%	92	93	94	95	96	96
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Per 100.000 pddk	70	75	80	85	85	85
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	per 1000 org	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3.3.3.(a)	Jumlah Kecamatan Yang mencapai eliminasi Malaria	Dinas Kesehatan	Kec	11	11	11	11	11	11
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	%	80	85	90	90	90	90
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi terhadap penyakit Tropis Yang terabaikan	Dinas Kesehatan	orang	0	0	0	0	0	0
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan		PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan		PM	PM	PM	PM	PM	PM

3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1.(a)	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 18 tahun	Dinas Kesehatan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.4.1.(b)	Prevalensi Tekanan Darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.4.1.(c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk umur 18 Tahun	Dinas Kesehatan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.4.2*	Angka Kematian (insidens rate) Akibat Bunuh Diri	Dinas Kesehatan		PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	%	0	0	0	0	0	0
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan	SEKOLAH	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.5.2*	Konsumsi Alkohol (Liter Perkapita) Oleh penduduk Umur 15 tahun dalam satu tahun.	Dinas Kesehatan	liter per kapita	PM	PM	PM	PM	PM	PM

3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15 -49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	77,21	74,48	71,53	73,88	72,47	72,47
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	77,21	74,48	71,53	73,88	72,47	72,47
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	~~%~~	24,55	23,54	23,86	24,79	24,98	24,98
3.7.2*	Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-49 tahun (Age Spesific Fertiliti)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	11,36	11,36	11,43	11,24	11,03	11,03
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	2,76	2,31	2,21	1,91	1,91	1,91
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	%	75.00	85.00	95.00	95.50	97.75	100

3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	%	75.00	85.00	95.00	95.50	97.75	100
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.									
3.9.3.(a)	Proporsi Kematian Akibat Keracunan	Dinas Kesehatan	%	0	0	0	0	0	0
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.									
3.a.1*	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 15 tahun	Dinas Kesehatan		PM	PM	PM	PM	PM	PM
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	%	90	90	90	90	91	91
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	2.63	2.87	2.84	2.97	2.97	2.97
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan	%	100	100	100	100	100	100

4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	31,80	33,80	37,30	40,50	50,70	60,90
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	48,00	50,00	52,00	54,00	57,00	59,00
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	102.3	102.6	102.9	103.2	103.7	103.9%
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	103.02	104.03	105.04	106.02	106.05	106.20
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	7.88	8.20	8.45	8.64	8.83	9.02
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan	%	39.02	44.00	49.05	54.00	59.12	59.32
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
4.4.1*	proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi .	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	100	100	100	100	100	100
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan / Laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/MTS/ Sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi	Dinas Pendidikan	%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
4.6.1.(a)	Persentasi Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 tahun	Dinas Pendidikan	%	95.07	95.46	99.74	99.75	99.77	99.79
4.6.1.(b)	persentasi angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan	%	94.06	97.24	97.33	97.42	97.52	97.62
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.									
4.a.1*	Proporsi Sekolah Dengan Akses ke : (a) listrik (b) internet untuk tjuan pengajaran (c) komputer untuk tujuan pengajaran (d) insfrastruktur dan materi memadai bagi siswa	Dinas Pendidikan	%	70	75	80	85	90	95
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan	%	TK : 63.00 SD : 30.00 SMP : 50.00	TK : 64.00 SD : 40.00 SMP : 58	TK : 66.67 SD : 50.00 SMP : 61.00	TK : 66.77 SD : 55.00 SMP : 63	TK : 66.87 SD : 60.00 SMP : 65.00	TK : 66.97 SD : 65.00 SMP : 70
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	0	0	1	0	0	0

5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	30	25	20	15	10	10
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1.(b)	Angka Kelahiran Pada Perempuan umur 15-19 tahun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	83,46%	83,46%	83,46%	83,46%	83,25%	
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	3.33	3.33	3.33	6.67	6.67	6.67
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang	16.25	12.69	16.58	17.02	17.19	17.35
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.									
5.6.1.(a)	unmet need KB (kebutuhan keluarga berencana/ KB yang terpenuhi)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	11,76	13,23	14,85	14,18	15,61	15,61

5.6.1. (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	88,95	87,73	87,53	88,09	88,09	88,09
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Orang	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	81.92%	82.50%	83.07%	83.65%	84.22%	84.80%
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	23,50	25,15	29,25	32,50	37,05	46,05
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	79.71	80.72	81.88	85.45	86.7	90.27
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	127	127	127	127	127	127

6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	127	127	127	127	90	127
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten	0	0	0	0	0	0
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RT	0	0	0	0	0	0
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten	0	0	0	0	0	0
6.3.1. (b)	Proporsi Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan Lumpur Tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RT	0	0	0	0	0	0
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Dinas Lingkungan Hidup							
	1. Matano		Pij	-	-	-	9.41	-	
	2. Old Camp		Pij	-	-	-	1.88	-	
	3. Towuti Saumil		Pij	-	-	-	8.76	-	
	4. Sumasang		Pij	-	-	-	9.87	-	
	5. Towuti Dermaga		Pij	-	-	-	1.89	-	

6.3.2.(b)	Kualitas Air sungai sebagai Sumber Air Baku	Dinas Lingkungan Hidup							
	1. Sungai Angkona		Pij	-	1.658	2.44	8.21	-	
	2. Sungai Kalaena		Pij	-	3.091	2.44	7.04	-	
	3. Sungai Lagego		Pij	-	3.016	2.52	8.76	-	
	4. Sungai Malili		Pij	-	3.759	1.65	4.92	-	
	5. Sungai Tomoni		Pij	-	7.993	3.28	6.87	-	
	6. Sungai Wasuponda		Pij	-	-	-	5.76	-	
	7. Sungai Mantadulu		Pij	-	-	1.75	-	-	
	8. Sungai Mantabuntu		Pij	-	3.458	-	-	-	
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Juta	1.62%	>8%	>8%	>8%	>8%	>9%
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	81.72	81.72	93.13	103.37	114.74	127.36

8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	33.56	33.56	33.56	29.72	42.33	42.33
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	33.56	33.56	29.72	42.33	42.33	42.33
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Perdagangan koperasi dan UKM	%	40%	41%	42%	43%	44%	45%
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rupiah	55,500	61,703	67,077	72,463	78,630	78,630
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	2.58	2.58	2.18	4.08	2.18	2.18
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM

8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	75.00	79,5	84.00	88,5	93.00	97,5
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1*	Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Orang	20	20	20	20	20	20
8.9.1.(b)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Orang	20,000	20,000	22,000	24,000	27,500	27,500
8.9.1. (c)	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata	Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	%	0.28	0.3	0.33	0.36	0.3	0.3
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.									
8.10.1*	Jumlah Kantor Bank dan ATM Per 100.000 penduduk Dewasa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	JKB: 0,014 JATM: 22,96	JKB: 0,014 JATM: 23,66	JKB: 0,013 JATM: 24,93	JKB: 0,015 JATM: 25,24	JKB: 0,015 JATM: 24,95	JKB: 0,015 JATM: 24,95

8.10.1.(a)	Rata-Rata Jarak lembaga keuangan (BANK umum)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	km	5	5	5	5	5	5
8.10.1.(b)	Proporsi Kredit UMKM terhadap total Kredit	Dinas Perdagangan koperasi dan UKM	%	70	71	72	73	74	75
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Unit	9	9	9	9	9	9
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
9.2.1*	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB Dan perkapita.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
9.2.1.(a)	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
9.2.2*	Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.									
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	4.14	5.22	29.82	29.82	29.82	29.82
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM

9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.									
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.									
9.c.1*	Proporsi Penduduk Yang Terlayani mobile Broadband	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang mengusai/memiliki Telepone Genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
9.c.1.(b)	Proporsi Individu Yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA									
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1*	Koefisien Gni	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penduduk	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
10.1.1.(a)	Persentase Penduduk Yang Hidup Dibawah Garis kemiskinan Nasional, menurut jenis	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	7.26	7.26	7.2	7.17	7.09	7.00

10.1.1.(c)	Jumlah Desa Yang Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	DESA	PM	PM	PM	PM	PM	PM
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	DESA	PM	PM	PM	PM	PM	PM
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.									
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	7.26	7.26	7.2	7.17	7.09	7.00
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.									
10.4.1.(b)	Proporsi PesertaProgram jaminan Sosial Bidang Ketenaga Kerjaan	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	%	100	100	100	100	100	100
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	23	25,7	37,3	48,9	69,7	88
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
11.5.1*	Jumlah Korban meninggal, Hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	PM	PM	PM	PM	PM	PM
11.5.1.(a)	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Skor	202.00	202.00	202.00	na *	na	na

11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	0	0	4	1	0
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	PM	PM	PM	PM	PM	PM
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	%	15.5	19.52	73.18	80.01	80.01	80.01
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	0	1	0	0	0
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah	Dinas Lingkungan Hidup	~~Ton~~	-	-	3,350,237.16	7,371,519.40	-	
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	-	-	21.90	2,595.93	-	

12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.									
12.6.1.(a)	Jumlah Perusahaan Yang menetapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup	Perusahaan	1	1	1	1	1	1
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.									
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	1	0	0	0	0
13.1.2*	Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena dampak Bencana per 100.000 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN									
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan Pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kantor Kesatuan Bangsa dan Poilitik	Kasus	1	2	2	2	0	0
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik pe 100.000 penduduk	Kantor Kesatuan Bangsa dan Poilitik	%	0	0	0	0	0	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Poilitik	%	0	0	0	0	0	0
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	kesatuan bangsa poilitik	%	0	0	0	0	0	0

16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.									
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Inspektorat		PM	PM	PM	PM	PM	PM
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelola Keuangan Daerah		87678.16577	88487.82949	91705.83143	95335.30422	94486.79575	94486.79575
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100

16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	3.33	3.33	3.33	6.67	6.67	6.67
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	16.00	16.00	16.00	16.00	17.86	17.86
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	75	77.5%	80%	82.5	85	90.8
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	32.91	36.45	40.20	43.67	45.21	45.21
			Jiwa	96,761	107.871	120.592	131.187	136.201	136.201
			Jiwa	293,978	295,904	299,975	300,374	301,273	301,273
16.9.1.(b)			%	67.59	71.15	75.55	80.11	81.53	81.53

	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jiwa	74.218	77.880	84.223	88.366	88.787	88.787
			Jiwa	109,808	109,461	111,476	110.304	108,907	108,907
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									
16.10.2.(c)	Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat pengelolah informasi dan Dokumentasi (PPID) Untuk mengukur Kualitas PPID dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Orang	0	0	0	0	0	0
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	4.80	4.80	4.80	5.00	5.00	5.50
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	4.80	4.80	4.80	5.00	5.00	5.50
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.									
17.6.2.(b)	Tingkat Penetrasi Akses Tetap Pita Lebar	Dinas Komunikasi dan Informatika	KK	belum terjangkau	belum terjangkau	belum terjangkau	32.20% (25.875)	34.76% (27.988)	45.32% (40.960)
17.6.2.(c)	Proporsi Penduduk Yang terlayani Mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	orang	No Data	95.83% (275.882	95.91% (293.822)	98.28% (281.830)	98.60% (300.844)	99.20% (307.835)
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.									

17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	24% (68.229)	53% (152.573	56% (167.362)	69% (207.318)	75% (228.825)	81% (251.343)
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	89.94	90.00	90.00	90.00	95.00	100.00
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	89.94	90.00	90.00	90.00	95.00	100.00
17.18.1.(c)	Jumlah Metadata Kegiatan Statistik dasar, Sektoral Dan Khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		PM	PM	PM	PM	PM	PM
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	28.00	32.00	32.00	46.00	46.00	55.00
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	96,761	107,871	%	131,187	136,201	136,201
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengunjung	5,888	7,835	6,202	9746	9746	9746
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	89.94	90.00	90.00	90.00	95.00	100.00

MATRIKS KABUPATEN TANA TORAJA

Nama Kabupaten : Tana Toraja

Periode RPJMD : 2016-2021

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN					
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.					
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DINAS SOSIAL	%	13.7	
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.					
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINAS KESEHATAN	Jiwa	230,145	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	DINAS TENAGA KERJA	%		
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	DINAS SOSIAL	%		

1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan .	DINAS SOSIAL	KPM	6,000	
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentu					
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	D DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	14	
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	D DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	5	
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Ha		
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	98.3	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	81.01	
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	75	

1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	DINAS PERTANAHAN			
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN					
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.					
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINAS KESEHATAN	%	0	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	%		
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ib					
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN	%	0	
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	DINAS KESEHATAN	%	0	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	DINAS KESEHATAN	%	0	
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINAS KESEHATAN	%	0	
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINAS KESEHATAN	%	42	

2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Skor		
Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terha pekerjaan non-pertanian.					
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	DINAS KETAHANAN PANGAN & DINAS PERTANIAN PETERNAKAN	Rp/Tenaga Kerja		
2.4 : Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cu					
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DINAS PERTANIAN	Ha		
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan inte sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.					
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	DINAS PERTANIAN	Paket		
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	DINAS PERTANIAN	Paket		
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA					
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					

3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Kasus	102/100.000 KH	102
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Kasus	32/1000 KH	3
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Kasus	23/1000 KH	2
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINAS KESEHATAN	per 1000 pdd	0	
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Kasus	81	
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.					
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	Sekolah (Lokasi Penyuluhan)		
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	DINAS KESEHATAN	Org (di Screening)	0	

3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	Sekolah (Lokasi Penyuluhan)		
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	Org		
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	Org		
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	Org		
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	0	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Org	230,145	

3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINAS KESEHATAN	%	100	
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentan ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.					
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINAS KESEHATAN	%	99	
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.					
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINAS KESEHATAN	Tenaga Medis : 100.000 Penduduk	261.52	
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA					
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DINAS PENDIDIKAN	%	98.3	
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN	%	60	
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN	%	70	

4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	116.3	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	108.9	
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN	Tahun	8.31	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan d					
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DINAS PENDIDIKAN	%	95	
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.					
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	DINAS PENDIDIKAN	%	34.6	
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN					
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.					
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	Ranperda	1	
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.					

5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%		
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	%	50	
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.					
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	Org	11,693	
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK			
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat	DINAS PENDIDIKAN	%	105.5	
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.					
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	Index	68.76	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK			
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.					

5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%	60	
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA					
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.					
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	70	
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	PDAM	%	0	
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jiwa	32,227	
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyara					
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINAS KESEHATAN	Jiwa	0	
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KK	60.00	

6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DINAS KESEHATAN	Kel/Lembang	159	
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DINAS KESEHATAN	Kel/Lembang	159	
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Unit		
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan mening					
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	100	
6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita					
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Dok		
Tujuan SDGs 07 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA					
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.					
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Unit	20	
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA					
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.					

8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	%	7.8	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	Rp.	19,250,000	2
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.					
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Juta	40.5	
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terh					
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%		
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	45.59	
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	70	
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	DINAS KOPERASI UKM	Rp.	750,000,000	8
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.					

8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp.	13,005	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS KETENAGAKERJAAN, BALIBANGDA	%	6,8	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	59.5	
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.					
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	30.25	
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.					
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	20	
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.					
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	DINAS PARIWISATA	%	1,10	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DINAS PARIWISATA	Org	21,000	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DINAS PARIWISATA	Org	900.000	

8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	DINAS PARIWISATA	Rp.	900.000.000	2
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI					
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata ba					
9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	BIDANG JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM	%		
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	KEMENTRIAN PERHUBUNGAN, DINAS BINA MARGA PROP. SULSEL, DINAS PUPR, DINAS PERHUBUNGAN	Dok	0	
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan promosi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya d					
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	%	11	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	%	11	
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan kedalam rantai nilai dan pasar.					
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	%		
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknoligi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2030					
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadbrand	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	%	65	

9.c.1.(a)	Proporsi individu yang mengusasi/memiliki telpon genggam	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	%	60	
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	%	55	
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA					
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.					
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	DPMD	Desa Tertinggal		
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Desa Mandiri		
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN					
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.					
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN	Unit	10	
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang					
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD	Kecamatan	0	
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.					

11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	100	
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.					
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN	Lokasi		
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan ikli di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.					
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dok	0	
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN					
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah te					
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perusahaan	0	
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	100	
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.					

12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ton	100	
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan Kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.					
12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.	DINAS PARIWISATA	Dok	0	
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA					
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.					
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dok	0	
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.					
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHE					

15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasa					
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.					
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.					
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laporan	0	
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISE					
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.					
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	SATPOL - PP	%	100	
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.					

16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK			
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK			
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK			
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.					
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	POLRES			
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	KEJAKSAAN NEGERI			
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	PENGADILAN NEGERI			
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.					

16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	INSPEKTORAT			
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.					
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	%		
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPK-RI PERWAKILAN MAKASSAR & INSPEKTORAT KAB. PANGKEP	%		
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAPPEDA	Predikat	C	
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMBANGUNAN	%	85	
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.					

16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SEKREDARIAT DEWAN			
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH			
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	KESBANG-POL			
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.					
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%		
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%		
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%		
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.					

16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Org	0	
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp.	13,112,585,000	20
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp.	6,658,815,000	10
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk m (PBB), dan melalui mekanisme fasilitas teknologi global.					
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%	3	
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%	65	
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknolo					

17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%	55	
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat wakt geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.					
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)			
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)			
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.				
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.					
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	%		
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%		

MATRIKS KABUPATEN PAREPARE

Nama Kota : Kota Parepare

Periode RPJMD : 2019-2023

MATRIKS SDG'S KOTA PAREPARE 2019-2023

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN												
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan disemua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.												
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur												
PROGRAM 1 : Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan lainnya												
Kegiatan 1 : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin		jiwa	6750		1357	1340	1356	1348	1349			Dinsos
Kegiatan 2 : Pemberian Bantuan Raskin (Peduli Beras Miskin)		KPM	2127			2127	2127	2127	2127			Dinsos
Kegiatan 3 : Stimulasi pemberdayaan bagi lanjut usia dan penyandang masalah kesejahteraan sosial		jiwa	2526		505	505	505	505	505			Dinsos
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan												
INDIKATOR SDGs: 1.3.1(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.												
PROGRAM 1 : UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1 : Pelayanan Kesehatan Gratis		Persen		98%	98%	88%	95%	98%	100%	100.950.000.000	DU	Dinkes
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.												
INDIKATOR SDGs : 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.												

PROGRAM 1 : PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK												
Kegiatan 1 : Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu Melahirkan		Persen	95%	95%	96%	97%	98%	99%	100%	518.471.450	DU	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.												
PROGRAM 1 : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular												
Kegiatan 1 : Peningkatan Imunisasi		Persen	129%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.000.000	DU	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Persen		65	70	70	75	75	80			Dinkes
INDIKATOR SDGs : 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan												
PROGRAM 1 : Pengembangan Perumahan												
Kegiatan 1 :			3,89%	3,20%	3,33%	3,07%	2,82%	2,58%	2,35%	Rp34,748,328,500		Perkimtan
Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu										Rp 4,666,453,000	APBD Kota Parepare	Perkimtan
Pengadaan Rumah Impian										Rp19,519,025,000	APBD Kota Parepare	Perkimtan
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK)										Rp15,229,303,500	APBN melalui DAK	Perkimtan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)											APBN	Perkimtan
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat												
PROGRAM 1 : Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun												
Kegiatan 1 : Pemberian fasilitas sekolah secara gratis	Jumlah siswa yang menerima bantuan pakaian seragam	siswa/siswi								1.489.500.000	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 2. Penyediaan Beasiswa SD dan SMP	Jumlah siswa SD/SMP Berprestasi dan Siswa yang Kurang Mampu yang menerima beasiswa	siswa/siswi	80,50		90,71	92,50%	95,18%	98,20	99,07	1.990.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

Kegiatan 3. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis	Jumlah sekolah siswa SD/MI dan SMP/MTs yang menerima pendidikan gratis	siswa/siswi								17.272.240.000	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 4. Program Pendukung Pendidikan Gratis (BOP)	Jumlah sekolah yang menerima BOP	siswa/siswi								5.915.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.												
PROGRAM 1 : PENATAAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL												
Kegiatan 1 : Pelayanan terpadu penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah Kutipan akta Kelahiran yang diterbitkan	Kutipan akta Kelahiran	5.000	10.300	3.500	900	900	900	900	250.000.000	APBD	DukCapil
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana												
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang												
PROGRAM 1 : Penanggulangan Bencana / Kelurahan Tangguh												
Kegiatan 1 : Desiminasi penanggulangan bencana	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah	Lokasi		22		0	22	22	22	200.000.000	APBD	BPBD
Kegiatan 2 :	Jumlah lokasi fasilitas penerapan mitigasi bencana	Lokasi										
INDIKATOR SDGs : 1.5.1(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial												
PROGRAM 1 : PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL												
Kegiatan 1 : Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa		%			100	100	100	100	100			Dinsos
INDIKATOR SDGs: 1.5.1(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.												
PROGRAM 1 :												

Kegiatan 1 : Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa		%			100	100	100	100	100			Dinsos
INDIKATOR SDGs: 1.5.3* Dokumen strategis pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah												
PROGRAM 1 : Penanggulangan Bencana / Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan												
Kegiatan 1 : Penyusunan kajian resiko bencana (KRB), Penyusunan rencana kontigensi dan Pengendalian peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen kajian pengurangan risiko bencana.	Dokumen		0		1	1	2	2	980.000.000	APBD	BPBD
Kegiatan 2 : Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana.	Dokumen		0		0	0	1	0	100.000.000	APBD	BPBD
Kegiatan 3 : Penyusunan peta jalur dan titik evakuasi	Jumlah dokumen pedoman dan strandarisasi pengurangan resiko bencana.	Dokumen		0		1	0	0	0	30.000.000	APBD	BPBD
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN												
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.												
INDIKATOR SDGs: 2.1.1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).												
PROGRAM 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan												
Kagiatan 1 : Penerapan Urban Farming dan penataan kawasan rumah pangan lestari	Jumlah kawasan yang ditata	lorong	-	3	3	5	5	5	5	440.000.000	APBD	Ketahanan pangan
Kegiatan 2 : Aksi Peduli Pangan (Biduan Parepare)	Jumlah bibit yang disebar	polibag	-	-	12.000	16.000	24.000	24.000	24.000	450.000.000		Ketahanan pangan
Kegiatan 3 : Pengembangan kampung buah	Jumlah kawasan yang ditata	lokasi	-	-	-	2	2	2	2	275.000.000		Ketahanan pangan

Kegiatan 4 : Pengembangan kampung sayur	Jumlah kawasan yang ditata	lokasi	-	-	-	1	1	1	1	115.000.000		Ketahanan pangan
Kegiatan 5 : Pengembangan sistem Hidroponik dan Rumah Hidroponik	Jumlah lokasi	lokasi	-	-	11	11	22	22	22	891.000.000		Ketahanan pangan
INDIKATOR SDGs : 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Persen		17	17	17	17	17	17			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan												
PROGRAM 1 : Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)												
Kegiatan 1 : Penyusunan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dan Peta Kerentangan Pangan	Jumlah dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	175.000.000		Ketahanan Pangan
Kegiatan 2 : Penanganan daerah rawan pangan (PDRP)	Jumlah keluarga	keluarga	20	20	25	25	25	25	25	120.000.000		Ketahanan Pangan
INDIKATOR SDGs: 2.1.2(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.												
PROGRAM 1 : Peningkatan Ketahanan Pangan												
Kegiatan 1 : Rumah Pangan Kita	Jumlah rumah tangga	rumah tangga	-	60	60	60	60	60	60	165.000.000		Ketahanan Pangan
Kegiatan 2 : Lorong Inflasi	Jumlah lorong yang ditata	Lokasi	-	-	2	2	2	2	-	1.000.000.000		Ketahanan Pangan
Kegiatan 3 : Tanaman Obat Disekitar Kita (TOKITA Parepare)	Jumlah demplot	Demplot	-	-	1	1	1	1	-	150.000.000		Ketahanan Pangan
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.												
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 : Peningkatan status gizi balita		Persen	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30			Dinkes

INDIKATOR SDGs: 2.2.1(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Persen	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 2.2.2*Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.												
PROGRAM 1 : Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita												
Kegiatan 1 :		Persen		9,5	9,5	8,1	7,8	7,5	7,3			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 2.2.2(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Persen	12	25	28	45	42	39	36			Dinkes
INDIKATOR SDGs : 2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Persen	44,17	40	42	43	45	50	55			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 2.2.2(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.												
PROGRAM 1 : Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan												
Kegiatan 1 : Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah peserta Cipta Menu Pangan	Kelurahan	22	22	22	22	22	22	22	325.000.000		
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA												
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.												
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Kasus	4	3	2	2	2	2	2			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlati												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Persen	95	90	95	96	97	98	99			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Persen	95	90	95	96	97	98	99			Dinkes

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.												
INDIKATOR SDGs: 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		per 1000 KH	9	5	8	6	4	2	2			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		per 1000 KH	7	7	8	6	6	4	2			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		per 1000 KH	11	10	9	8	6	4	2			Dinkes
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.												
INDIKATOR SDGs : 3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		per 1000		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		per 1000 pop	0,31	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.3.2 Kejadian TB per 1000 orang												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		per 1000	2,36	2,11	2,50	2,70	2,80	2,63	2,58			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		per 100.000	236,43	211,12	249,55	269,95	279,51	262,51	257,58			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		per 1000	0,16	0,14	0,12	0,10	0,10	0,09	0,09			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.3.4 Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.												
PROGRAM 1 :												

Kegiatan 1 :		per 100.000	19,23	19,00	18,21	18,22	17,30	16,41	16,18			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.3.5 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Orang	17	15	13	12	10	9	5			Dinkes
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.												
INDIKATOR SDGs: 3.4.1(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Persen		50,6	40	30	20	10	5			Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.4.1(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Per 1000 penduduk usia >15 tahun		2.222	97.913	100.145	100.901	101.615	102.295			Dinkes
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.												
INDIKATOR SDGs: 3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Kasus		0	0	0	0	0	0			Dinkes
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.												
INDIKATOR SDGs: 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		per 1000 pddk		1131	1088	871	950	980	1000			Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Persen		98%	98%	88%	95%	98%	100%			Dinkes
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat												
INDIKATOR SDGs : 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Persen		50,6	40	30	20	10	5			Dinkes

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.												
INDIKATOR SDGs : 3.b.1 Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Persen	100	100	100	100	100	100	100			Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.												
PROGRAM 1 :												
Kegiatan 1 :		Persen	100	98	98	98	98	99	100			Dinkes
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA												
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan laki-laki menyesuaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif												
INDIKATOR SDGs : 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja : (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, © tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam : (i) membaca, (ii) matematika												
PROGRAM 1 : Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun												
Kegiatan 1 : Pengembangan pendidikan melalui extrakurikuler	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler yg dilaksanakan	siswa/siswi								16.110.140.000	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 2. Pengembangan Religiusitas Siswa SD/SMP	Jumlah Siswa Kelas 3 SMP yang mengikuti Religiositas	siswa/siswi								2.915.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 3. Pemberian Beasiswa bagi Hafidz Qur'an	Jumlah penerima bantuan beasiswa bagi hafidz qur'an	siswa/siswi								363.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 4 : Penyelenggaraan Ujian Nasional	Jumlah peserta Ujian Nasional di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB	siswa/siswi								2.172.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs : 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B												
PROGRAM 1 : Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun												
Kegiatan 1 : Pembinaan siswa berprestasi	Jumlah siswa SD/SMP yang berprestasi yang menerima beasiswa	siswa/siswi								`	APBD	Dinas Pendidikan

Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Ujian Nasional	Jumlah peserta Ujian Nasional di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB	siswa/siswi								2.172.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

MATRIKS KOTA PALOPO

Nama Kota : Kota Palopo

Periode RPJDM : 2015-2018

MATRIKS BAGIAN 1 : TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUSTANAIBLE DEVELOPMENT GOALs (TPB/SDGs) KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian		
					2016	2017	2018
Tujuan SDGs 01 : TANPA KEMISKINAN							
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (BPS)	%	8,60	8,50	8,48	8
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	70,00	85,00	90,00	95,00
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	Dinas Tenaga Kerja	%	n/a	37	37	37
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	%	n/a	3,1	1,6	1,5
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan .	Dinas Sosial	KPM	n/a	3,100	3,750	3800
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	%	n/a	90	95	100
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	n/a	100	100	100

1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	83	84	85	85
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	%	88,01	88	88,67	89
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	%	n/a	12	8	7
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	94,57	96,38	98,19	100,00
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	BPS & Dinas Pendidikan	%	77,44	84,96	92,48	100,00
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	58,39	63,89	69,39	75
Target 1.a : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dinas Sosial	%	n/a	44	58	≥58
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN							
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan	%	n/a	10	8,5	≤ 8,5
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	%	n/a	≤ 2,5	≤ 2,3	≤ 2
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Angka	n/a	Sedang (20) Berat (28)	Sedang (15) Berat (27)	Sedang (≤15) Berat (≤28)
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan	%	n/a	29	27	≤ 27
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	%	n/a	1,70	1,50	<1
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	%	n/a	0,3	0,2	< 0,2

2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	%	n/a	33,15	70,40	n/a
2.2.2.(c)	(i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat Konsumsi Ikan	Dinas Ketahanan Pangan	%	65	75	85	90
Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.							
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Pertanian	Juta Rupiah	n/a	135	165	180
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA							
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	Jiwa	4	4	2	1
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	%	n/a	n/a	94	95
3.1.2.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	%	n/a	90	95	100
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Org	n/a	4,5	2,1	2
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Org	n/a	8	6	5
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Org	n/a	2,2	2,1	2
3.2.2.(b)	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	%	n/a	n/a	95	>95
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	n/a	< 0,05	< 0,05	< 0,05
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Org	n/a	255	250	245
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	Org	n/a	<2	<1	<1
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							

3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	n/a	n/a	70	≥70
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Org	n/a	25	28	30
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	%	70	80	85	95
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA							
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	60,2	65,2	70	>75
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	45,87	55,47	65,07	>75
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	99,61	99,73	99,85	100
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	99,84	99,89	99,94	100
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	Tahun	9,97	10,24	10,27	10,28
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan	%	40	47	70	75
4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan baca tulis dan kemampuan berhitung.							

4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur > 15 Tahun	Dinas Pendidikan	%	94	96	98	100
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	%	n/a	n/a	100	100
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	angka	n/a	n/a	12,9	≤12,9
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	%	≥20	≥20	≥20	≥20
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Kominfo	%	100	100	100	100
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA							
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	83	84	85	85
6.1.1.(b)	Kapasitas Prasarana Air Baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Lt/ detik	n/a	n/a	550	550
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	%	n/a	86	93	100
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	%	88,01	88	88,67	89
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Kelurahan	9	9	9	9

6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Kelurahan	9	9	9	9
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Unit	n/a	n/a	180	180
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Ada/Tidak Ada	n/a	n/a	Ada	Ada
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Baku Mutu Air	Sesuai Baku mutu air	Sesuai baku mutu air	Sesuai baku mutu air	Sesuai baku mutu air
Tujuan SDGs 07 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA							
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA							
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Badan Pusat Statistik (BPS)	%	n/a	6,9	7,1	≥7,1
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Juta	31.491.104	33.321.613	35.152.122	36.982.631
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	%	15	17	19,65	25
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Tenaga Kerja	Rp	n/a	14,062	15,200	16,000
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Tenaga Kerja	%	n/a	≤15	≤11	≤10
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja	%	n/a	26,1	24	≤24

8.9 Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	n/a	n/a	≥8	≥8
8.9.1 (a)	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Org	n/a	200	600	700
8.9.1 (b)	Jumlah Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Org	n/a	95,000	98,000	100,000
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI							
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030,, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk dometik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan 2 kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan Per Kapita	Dinas Perindustrian	%	2,96	3	≥ 3	≥ 3
9.2.1 (a)	Laju Pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Perindustrian	%	n/a	5,1	3,57	n/a
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
9.5.1*	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDB	Balitbangda	%	n/a	0,0035	0,0036	0,0037
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA							
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Koefisien Gini	Dinas Sosial	%	n/a	≤0,36	≤0,36	≤0,36
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Sekretariat DPRD	Kebijakan	0	0	0	0
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN							
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara							
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Sekretariat DPRD	Institusi	n/a	43	43	43

11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia							
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Dinas Kebudayaan	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rp	n/a	0	0	0
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	%	83	84	88	90
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.							
11.7.1.(a)	Jumlah Kota Hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan Kota Sedang	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	Jumlah	1	1	1	1
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN							
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	M^3	n/a	n/a	1600	1600
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.						
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.							
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).						
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.							
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.						
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.						

Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI							
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.						
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.							
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.						
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.						
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70% .						
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.						
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.						
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN							
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
16.1.1. (a)	Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir	Badan Kesbangpol Linmas & Satpol PP	Kasus	n/a	0	0	0
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 Penduduk	Badan Kesbangpol Linmas	%	<1	<1	<1	<1
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Badan Kesbangpol Linmas & Satpol PP	%	n/a	≤2	≤1,5	≤1,3
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	DPKAD & Inspektorat	%	55	75	85	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		Predikat	C	CC	CC	B

16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Setda	%	n/a	60	62	64
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Setda	Status	Kuning	Kuning	Kuning	Kuning
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	%	n/a	≥20	≥20	≥20
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	%	n/a	≥16	≥16	≥16
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Capil	%	60	70	75	80
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan dan Capil	%	60	70	75	80
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Capil	%	58,39	63,89	69,39	75
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah	%	2,23	2,78	≥2,78	≥2,78
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pendapatan Daerah	%	n/a	0,3	0,4	≥0,4
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pendapatan Daerah	%	n/a	13	14	≥14
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							

17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Dinas Persandian dan Statistik	%	n/a	90	95	≥ 95
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Dinas Persandian dan Statistik	%	n/a	90	95	≥ 95
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statisitik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRuSa)	Dinas Persandian dan Statistik	Data	n/a	0	5	≥ 5